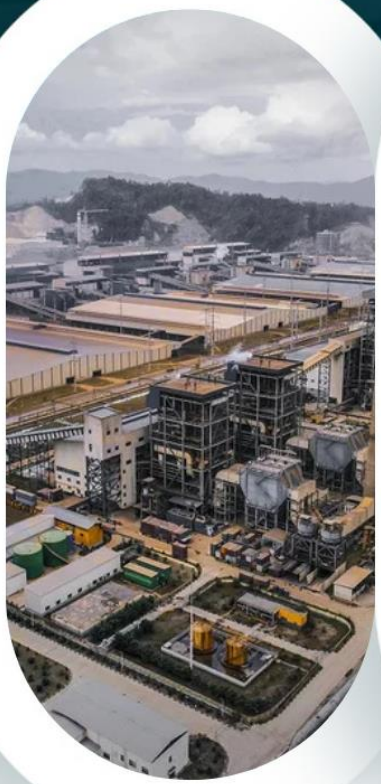
RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025 - 2029







PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI

KATA PENGANTAR



Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab serta sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Morowali menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam mengelola pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD ini diawali dengan Studi Awal, yang menjadi dasar untuk memperdalam pemahaman bersama atas arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan di setiap kecamatan, merumuskan akar permasalahan, menentukan prioritas, serta menyusun alternatif solusi strategis yang mampu menjadi titik tolak dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah dan sembilan kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali.

Langkah selanjutnya dalam penyusunan dokumen ini adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan dalam periode-periode sebelumnya. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi, yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD sebelumnya. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Setelah mengidentifikasi dan memahami isu strategis, proses penyusunan RPJMD dilanjutkan dengan perumusan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk periode 2025–2029. Visi dan misi ini menjadi arah utama pembangunan dan akan diterjemahkan ke dalam strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja utama dalam jangka menengah lima tahun.

Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting agar indikator pencapaian visi dan misi bersifat terukur, realistis, dan

dapat diinternalisasi oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam menetapkan target kinerja dan perencanaan program pembangunan. Dengan demikian, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat fokus menggunakan seluruh potensi, kapasitas sumber daya, serta komitmen untuk mencapai target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan dan implementasi RPJMD ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, DPRD, dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Morowali yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Demikian Pengantar Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029 ini kami sampaikan. Semoga dokumen ini menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Bungku, April 2025

BUPATI MOROWALI

IKSAN

DAFTAR ISI

			Hal.
KATA PENGANTAR			ii
DAFTAR ISI			iv
DAFTAR TABEL			vi
DAFTAR GAMBAR			xiii
BAB I	**PENDAHULUAN**		I-1
	1.1	Latar Belakang	I-1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3	Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-7
	1.4	Maksud dan Tujuan	I-11
	1.5	Sistematika Penulisan	I-12
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**		II-1
	2.1	Kondisi Umum Daerah	II-1
		2.1.1 Aspek Georafi dan Demografis	II-1
		2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-41
		2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-97
		2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-110
	2.2	Gambaran Umum Keuangan Daerah	II-240
	2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	II-263
		2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-264
		2.3.2 Isu Strategis Daerah	II-281
BAB III	**VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**		III-1
	3.1.	Rumusan Visi	III-1
	3.2	Misi	III-7
	3.3	Tujuan dan Sasaran	
	3.4	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-30
		3.4.1 Pentahapan Pembangunan	III-30
		3.4.2 Lokus Pembangunan Kabupaten Morowali	III-38
		3.4.3 Arah Kebijakan	III-40
		3.4.4 Program Prioritas/Unggulan Daerah Tahun 2025-2029	III-48

BAB IV **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**..... IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah..... IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... IV-71
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... IV-71
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci/Daerah (IKD) IV-76

BAB V **PENUTUP**..... V-1
5.1 Kesimpulan Penting Subtansial V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan dan Pengendalian V-2
Evaluasi terhadap dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah V-3

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa, dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-1
Tabel 2.2	Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) di Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024.....	II-18
Tabel 2.3	Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton) Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024.....	II-19
Tabel 2.4	Produksi Beberapa Jenis Tanaman Buah-Buahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024	II-20
Tabel 2.5	Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-21
Tabel 2.6	Luas Lahan Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024	II-22
Tabel 2.7	Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024.....	II-23
Tabel 2.8	Jumlah Unggas Menurut Jenisnya di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-24
Tabel 2.9	Perkembangan Rumah Tangga Perikanan RTP per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-25
Tabel 2.10	Produksi Perikanan Laut (Tangkap dan Budidaya Laut) selama Empat Tahun Terakhir dan Persentase Produksi per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-25
Tabel 2.11	Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali (Hektar), Tahun 2024.....	II-26
Tabel 2.12	Potensi dan Luas Areal Pertambangan dan Energi di Kabupaten Morowali.....	II-27
Tabel 2.13	Status Daya Dukung Air Kabupaten Morowali Tahun 2025.....	II-28
Tabel 2.14	Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Morowali.....	II-30
Tabel 2.15	Kondisi Lingkungan Hidup Berkualitas di Kabupaten Morowali.....	II-31
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali, Tahun 2010, 2020, 2024.....	II-35
Tabel 2.17	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-36
Tabel 2.18	Perbandingan Jumlah Penduduk (Ribu) Kabupaten Morowali Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2024.....	II-36

Tabel 2.19	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan, Tahun 2024.....	II-38
Tabel 2.20	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Morowali, Tahun 2024.....	II-39
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 (ribu).....	II-40
Tabel 2.22	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 (Persen).....	II-42
Tabel 2.23	PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022.....	II-46
Tabel 2.24	IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-61
Tabel 2.25	Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023.....	II-68
Tabel 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024.....	II-77
Tabel 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024.....	II-79
Tabel 2.28	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-81
Tabel 2.29	Opini Audit BPK Atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-83
Tabel 2.30	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-84
Tabel 2.31	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-85
Tabel 2.32	Produksi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-86
Tabel 2.33	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024..	II-86
Tabel 2.34	Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-87
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-88
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-88
Tabel 2.37	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-90
Tabel 2.38	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-90
Tabel 2.39	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-91
Tabel 2.40	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-92

Tabel 2.41	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap Sektor PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-93
Tabel 2.42	Investasi, Pertumbuhan PDRB dan ICOR Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-95
Tabel 2.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024.....	II-107
Tabel 2.44	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	II-109
Tabel 2.45	Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2.46	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (SD/MI) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-118
Tabel 2.47	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel 2.48	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-121
Tabel 2.49	Angka Pendidikan Yang ditamatkan Tahun 2020-2024 Kabupaten Morowali.....	II-123
Tabel 2.50	Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-124
Tabel 2.51	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel 2.52	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel 2.53	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-129
Tabel 2.54	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-129
Tabel 2.55	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2.56	Angka Kelulusan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-133
Tabel 2.57	Angka Yang Melanjutkan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-134
Tabel 2.58	Fasilitas Pendidikan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-135

Tabel 2.59	Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-136
Tabel 2.60	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-137
Tabel 2.61	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel 2.62	Rasio Guru/Murid Per Rata-Rata Kelas Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-139
Tabel 2.63	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel 2.64	Rasio Puskesmas, Poliknilik, Pustu Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel 2.65	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-148
Tabel 2.66	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel 2.67	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.68	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-151
Tabel 2.69	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (TBC) per 100.000 Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 2.70	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-159
Tabel 2.71	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-160
Tabel 2.72	Cakupan Puskesmas Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2.73	Cakupan Pembantu Puskesmas Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2.74	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-162
Tabel 2.75	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-164
Tabel 2.76	Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 di Kabupaten Morowali.....	II-170
Tabel 2.77	Indikator Capaian Pembangunan Bidang Sosial pada Tahun 2020-2024 di Kabupaten Morowali.....	II-171
Tabel 2.78	Ketersedian Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-183
Tabel 2.79	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-183

Tabel 2.80	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-184
Tabel 2.81	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-185
Tabel 2.82	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-186
Tabel 2.83	Penetapan MHA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024..	II-186
Tabel 2.84	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-187
Tabel 2.85	Ketersediaan Database Kependudukan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-191
Tabel 2.86	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-191
Tabel 2.87	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-200
Tabel 2.88	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-201
Tabel 2.89	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2.90	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-204
Tabel 2.91	Data Jaringan Tower Kabupaten Morowali Tahun 2024	II-206
Tabel 2.92	Jumlah Desa/Kelurahan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Kabupaten Morowali Tahun 2024	II-208
Tabel 2.93	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023	II-214
Tabel 2.94	Capaian Indikator Statistik di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-216
Tabel 2.95	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-219
Tabel 2.96	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-220
Tabel 2.97	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-221
Tabel 2.98	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-222
Tabel 2.99	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024	II-223
Tabel 2.100	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal per Hektar Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-224
Tabel 2.101	Daya Terpasang Listrik (kw) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-227
Tabel 2.102	Ekspor Perdagangan Menurut PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 (Miliar)	II-228
Tabel 2.103	Industri Prioritas Morowali	II-228
Tabel 2.104	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenisnya (ton) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-232

Tabel 2.105	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Territorial Tahun 2020-2024 di Kabupaten Morowali	II-234
Tabel 2.106	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-235
Tabel 2.107	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-236
Tabel 2.108	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-237
Tabel 2.109	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-237
Tabel 2.110	Opini Audit BPK Atas LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-237
Tabel 2.111	Penetapan APBD Kabupaten Morowal Tahun 2020-2024	II-239
Tabel 2.112	Gambaran Capaian Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-239
Tabel 2.113	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.....	II-242
Tabel 2.114	Neraca Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024....	II-252
Tabel 2.115	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Morowali.....	II-258
Tabel 2.116	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2026-2030.....	II-260
Tabel 2.117	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali.....	II-262
Tabel 2.118	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Daerah.....	II-265
Tabel 2.119	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan.....	II-270
Tabel 2.120	Pencapaian TPB di Kabupaten Morowali.....	II-345
Tabel 2.121	Rumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Morowali	II-366
Tabel 3.1	Sasaran dan Indikator Visi RPJMD Morowali Tahun 2025-2029.....	III-5
Tabel 3.2	Keterkaitan Sasaran RPJMD Provinsi Sulteng dan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel 3.3	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dan Misi RPJMN (Asta Cita/Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi/Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045.....	III-13
Tabel 3.4	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Tujuan 1 Misi 1.....	III-17
Tabel 3.5	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 2.....	III-20
Tabel 3.6	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 3.....	III-23

Tabel 3.7	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 4.....	III-26
Tabel 3.8	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 5.....	III-29
Tabel 3.9	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.....	III-31
Tabel 3.10	Kecamatan Lokus Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.....	III-38
Tabel 3.11	Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029.....	III-41
Tabel 3.12	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.....	III-50
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030.....	IV-3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030.....	IV-73
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030.....	IV-77

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-10
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali, Tahun 2024.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Morowali.....	II-4
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Morowali.....	II-6
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Morowali.....	II-7
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kabupaten Morowali.....	II-8
Gambar 2.6	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali.....	II-9
Gambar 2.7	Kondisi Iklim Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-10
Gambar 2.8	Peta Curah Hujan Kabupaten Morowali.....	II-10
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali.....	II-11
Gambar 2.10	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Morowali.....	II-17
Gambar 2.11	Potensi Persawahan di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda di Kabupaten Morowali	II-18
Gambar 2.12	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Morowali.....	II-33
Gambar 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024....	II-44
Gambar 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024	II-44
Gambar 2.15	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024.....	II-45
Gambar 2.16	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	II-47
Gambar 2.17	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024	II-48
Gambar 2.18	Indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-49
Gambar 2.19	Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	II-50
Gambar 2.20	Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 ...;.....	II-50
Gambar 2.21	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	II-52
Gambar 2.22	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2024.....	II-54
Gambar 2.23	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional ..... Tahun 2019-2024	II-55

Gambar 2.24	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	II-56
Gambar 2.25	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-57
Gambar 2.26	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	II-57
Gambar 2.27	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-58
Gambar 2.28	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	II-59
Gambar 2.29	IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-60
Gambar 2.30	Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II-62
Gambar 2.31	Angka UHH Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-63
Gambar 2.32	Angka UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	II-64
Gambar 2.33	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-63
Gambar 2.34	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	II-65
Gambar 2.35	Angka Stunting Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023.....	II-67
Gambar 2.36	Angka Melek Huruf Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-69
Gambar 2.37	Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	II-70
Gambar 2.38	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-71
Gambar 2.39	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	II-72
Gambar 2.40	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-73
Gambar 2.41	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	II-74
Gambar 2.42	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2023-2024.....	II-75
Gambar 2.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-76

Gambar 2.44	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.....	II-78
Gambar 2.45	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-80
Gambar 2.46	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024.....	II-82
Gambar 2.47	Pertumbuhan Industri Kabupaten Morowali Tahun 2019-2025	II-94
Gambar 2.48	Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Morowali 2020-2024	II-98
Gambar 2.49	Angka UHH Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024	II-99
Gambar 2.50	Angka UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	II-100
Gambar 2.51	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2023-2024	II-101
Gambar 2.52	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	II-103
Gambar 2.53	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	II-104
Gambar 2.54	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	II-105
Gambar 2.55	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	II-105
Gambar 2.56	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024	II-106
Gambar 2.57	Indeks Inovasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-108
Gambar 2.58	Akreditasi PAUD di Kabupaten Morowali Tahun 2023	II-113
Gambar 2.59	Akreditasi SD/MI di Kabupaten Morowali Tahun 2023	II-114
Gambar 2.60	Akreditasi SMP/MTs di Kabupaten Morowali Tahun 2023	II-115
Gambar 2.61	Akreditasi SMA di Kabupaten Morowali Tahun 2023 ..	II-116
Gambar 2.62	Akreditasi SMK di Kabupaten Morowali Tahun 2023 ..	II-117
Gambar 2.63	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024 .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....	II-119
Gambar 2.64	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024	II-121
Gambar 2.65	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024	II-122

Gambar 2.66 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024 ..... II-125
Gambar 2.67 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024 ..... II-126
Gambar 2.68 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024 ..... II-128
Gambar 2.69 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-131
Gambar 2.70 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-132
Gambar 2.71 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-133
Gambar 2.72 Kualifikasi Pendidik Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023 Kabupaten Morowali II-140
Gambar 2.73 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-141
Gambar 2.74 Angka Kematian Balita di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-143
Gambar 2.75 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-144
Gambar 2.76 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-145
Gambar 2.77 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-152
Gambar 2.78 Persentase Balita yang Pernah di Imunisasi Campak Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-153
Gambar 2.79 Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-154
Gambar 2.80 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 II-157
Gambar 2.81 Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-158
Gambar 2.82 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-163
Gambar 2.83 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam) Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-165
Gambar 2.84 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-166
Gambar 2.85 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2023 ..... II-167

Gambar 2.86	Persentase Penduduk Yang Berakses Air Minum Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-168
Gambar 2.87	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-169
Gambar 2.88	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-170
Gambar 2.89	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Orang) Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-173
Gambar 2.90	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-174
Gambar 2.91	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024 ...	II-175
Gambar 2.92	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-176
Gambar 2.93	Rasio KDT Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-174
Gambar 2.94	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-178
Gambar 2.95	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-179
Gambar 2.96	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-180
Gambar 2.97	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-181
Gambar 2.98	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024	II-182
Gambar 2.99	Jumlah Penduduk Per satuan KTP (Jiwa) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-188
Gambar 2.100	Jumlah Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-189
Gambar 2.101	Jumlah Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-190
Gambar 2.102	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-192
Gambar 2.103	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-193
Gambar 2.104	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-193
Gambar 2.105	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-194
Gambar 2.106	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-195
Gambar 2.106	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-196
Gambar 2.108	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49 Tahun di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024	II-197

Gambar 2.109 Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-198
Gambar 2.110 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-199
Gambar 2.111 Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-201
Gambar 2.112 Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-202
Gambar 2.113 Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-205
Gambar 2.114 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP atau Telepon Seluler di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-209
Gambar 2.115 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-210
Gambar 2.116 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-211
Gambar 2.117 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-212
Gambar 2.118 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024..... II-213
Gambar 2.119 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (Jumlah Organisasi Pemuda) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-215
Gambar 2.120 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-218
Gambar 2.121 Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-225
Gambar 2.122 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kabupaten Morowali Dari Tahun 2020 – 2024 ..... II-226
Gambar 2.123 Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-234
Gambar 2.124 Persentase SILPA Terhadap APBD Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 ..... II-238
Gambar 2.125 Megatren Tahun 2045 ..... II-283
Gambar 2.126 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Tahun 2025 dan 2045 ..... II-284
Gambar 2.127 Disrupsi Teknologi II-289
Gambar 2.128 Share Konsumsi Penduduk Kelas Menengah Global, 2000-2050 II-294
Gambar 2.129 Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Juta ton CO2e) II-297

Gambar 2.130	Prioritas Pengembangan Regional Wilayah Sulawesi	II-313
Gambar 2.131	Tema Pembangunan dan Arah kebijakan Wilayah Sulawesi dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 khususnya Morowali sebagai Kawasan Industri (KI) Prioritas Nasional	II-314
Gambar 2.132	Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Morowali	II-346
Gambar 2.133	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045	II-346
Gambar 3.1	Hubungan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, serta Visi RPJPD Kabupaten Morowali 2025-2045 dengan Visi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.....	III-5
Gambar 3.2	Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 1.....	III-16
Gambar 3.3	Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 2.....	III-19
Gambar 3.4	Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 3.....	III-22
Gambar 3.5	Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 4.....	III-25
Gambar 3.6	Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 5.....	III-28

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 disebutkan Rancangan RPJMD adalah rancangan dokumen awal perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan tehnokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Lebih lanjut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menjelaskan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan pasal 65 dan pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Rancangan Awal RPJMD merupakan dokumen analisis gambaran umum kondisi Daerah hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun sebelumnya, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya serta perumusan isu strategis daerah. Selain berpedoman pada dokumen RPJPD, penyusunan dokumen Rancangan Tehnokraktik RPJMD juga memperhatikan rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali 2015-2035. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD adalah Pendekatan dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, walaupun dalam implementasinya juga menggunakan pendekatan analisis dan kajian ilmiah dan partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up) hasil evaluasi capaian pembangunan masa lalu. Sementara Pendekatan politik belum digunakan dalam penyusunan naskah Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 karena menunggu Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik dan mekanisme perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik selesai tahapannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Nasional yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan berdasarkan pendekatan politis adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan

partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dilakukan melalui berbagai tahapan dokumen analisis gambaran umum kondisi Daerah dan keuangan daerah, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta analisis dokumen RPJPD dan dokumen Tata ruang daerah.

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Tugas Pokok pasangan Bupati/Wakil Bupati Morowali periode 2025-2029 akan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong terciptanya Pemerintahan yang berkualitas dalam upaya peningkatan produktivitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehubungan dengan berbagai permasalahan di Kabupaten Morowali seperti belum optimalnya pengelolaan pemerintahan, terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar yang bermutu, masih terbatasnya jumlah dan mutu infrastruktur, serta rendahnya mutu pelayanan publik. Selain itu, dalam rangka mempertahankan kearifan lokal dan budaya masyarakat menjadi tata nilai dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai religiusitas, maka berbagai upaya terus didorong ke arah tersebut.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rancangan awal RPJMD 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang 51 Tahun 1999,Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telha diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang

Perubahan atas UU nomor 51 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 182);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor: 549);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negari Nomor 02 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor : 132);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor : 158);

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 175);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 882);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 07);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 06 tahun 2024);

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD dan RPJPD Kabupaten Morowali

Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Morowali. Oleh sebab itu, penyusunan dokumen RPJMD selain memuat kondisi umum daerah, pengelolaan keuangan daerah, masalah pembangunan dan isu-is strategis, visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, pagu indikatif, indikator kinerja daerah, dan pedoman transisi.

2. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali dan RPJM Nasional 2025-2029

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Morowali memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2025-2029 untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Pusat. Prioritas pembangunan nasional Periode 2025-2029 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan Kabupaten Morowali adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

3. Dokumen RPJMD Morowali dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali juga memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi pertimbangan utama.

4. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Morowali. Selain itu, Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali juga memuat arah pembangunan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

5. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali dan Renstra OPD

Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali. Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (Renja-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

6. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Morowali

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 yang setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Morowali yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPAS); serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

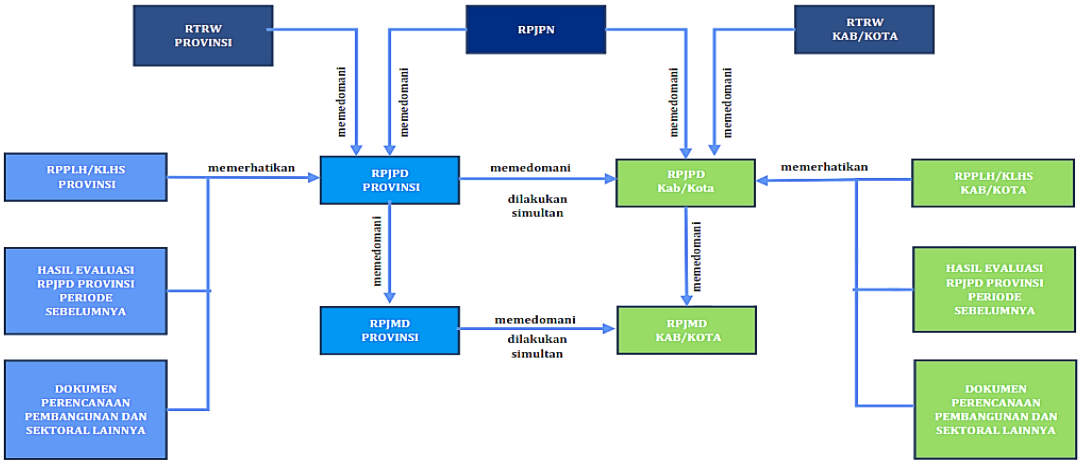
7. Dokumen RPJMD dan KLHS RPJMD dan RPKD Kabupaten Morowali

RPJMD Kabupaten Morowali akan akan mengakomodasi berbagai kebijakan dan rekomendasi arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029.

8. Dokumen RPJMD dan RAN-SDG's, RAN-PG, RANHAM, RAN GRK, RAN-PK dan SPKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 akan memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, serta Kabupaten Morowali. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain: Agenda Pembangunan Rencana Aksi Nasional Sustainable Development Goals (RAN-SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Sulawesi Tengah Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sulawesi Tengah, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tengah, dan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tengah (RAD GRK), Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) Sulawesi Tengah serta RAD Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Morowali dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penyusunan RPJMD harus selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Morowali terpilih.

Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Morowali juga dimaksudkan untuk menjadi acuan atau pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan OPD, dan KUA-PPAS.

Rancangan Awal RPJMD berfungsi sebagai draf awal dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029, di mana Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Morowali terpilih akan dimasukkan ke dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, dari segi isi dan substansi, tujuan penyusunan Dokumen RPJMD adalah

a. Mempercepat pembangunan Kabupaten Morowali berdasarkan karakteristik dengan fokus pada pemantapan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan proses percepatan pembangunan;
b. Menyediakan suatu rujukan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Morowali, APBN dan sumber dana lainnya;
c. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya se-Sulawesi Tengah, secara lebih khusus antar Pemerintah Kabupaten Morowali, dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, serta antara Kabupaten Morowali dengan kabupaten tetangga di

Provinsi Sulawesi Tenggara seperti Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur, Maluku Utara seperti Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Taliabo yang memiliki kemiripan Sosial, Budaya, dan Ekonomi khususnya dalam produk-produk unggulan masing-masing;

d. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
e. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, amanah, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
f. Memfasilitasi keselarasan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta RPJMD Kabupaten Morowali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Morowali;
g. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Morowali, swasta dan masyarakat;
h. Memfasilitasi penyusunan Kerangka Acuan Kerja masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

1.5. Sistematika Penulisan

Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negari Nomor 02 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: **Pendahuluan,** memuat uraian tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan Tujuan, Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika penulisan;

BAB II: **Gambaran Umum Daerah**

a. Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat uraian tentang Aspek geografi dan demografi, Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum, dan Aspek daya saing daerah;
b. Gambaran Umum Keuangan Daerah, memuat uraian tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu (realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024); Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan/Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029;
c. Permasalahan dan Isu Strategis, memuat uraian tentang Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Daerah.

BAB III: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

a. Visi dan Misi, memuat uraian tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
b. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tentang uraian strategi dan arah kebijakan daerah untuk mencapai tujuan, sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Program Perangkat Daerah, memuat tentang uraian Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
b. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat tentang uraian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V: Penutup, yang memuat uraian tentang kesimpulan penting subtansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sasaran pembangunan di daerah..

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi ini dapat berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan kharakteristik wilayah Kabupaten Morowali.

A. Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Morowali terletak antara 01^0 31' 12" Lintang Selatan dan 03^0 46' 48" Lintang Selatan serta antara 121^0 02' 24" Bujur Timur dan 123^0 15' 36" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Morowali, adalah berupa daratan seluas 5.472,00 km^2 atau 7,28 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Bungku Tengah. Data wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Morowali selengkapnya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa, dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

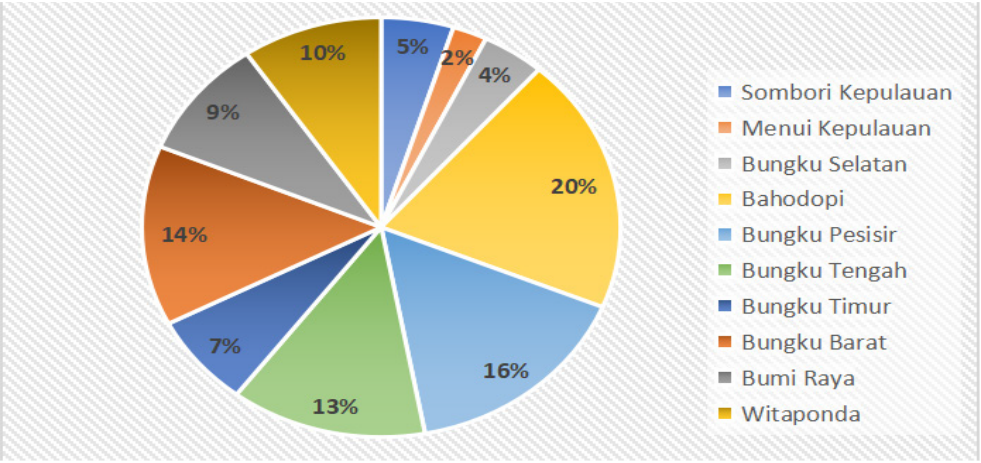
Kecamatan	Luas (Km2)	%	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibukota Kecamatan	Jarak (mil laut/Km)
Sombori Kepulauan	267,78	5	13	Tanjung Harapan	98
Menui Kepulauan	127,65	2	15/1	Ulunambo	160
Bungku Selatan	403,9	4	23	Kaleroang	103
Bahodopi	1.080,98	20	10	Bahodopi	41
Bungku Pesisir	867,29	16	10	Lafeu	75
Bungku Tengah	725,57	13	13/6	Marsaoleh	0
Bungku Timur	387,23	7	10	Kolono	18
Bungku Barat	758,93	14	10	Wosu	27
Bumi Raya	504,77	9	13	Bahonsuai	48
Witaponda	519,7	10	9	Laantula Jaya	61
Luas Kabupaten	**5.472,00**	**100**	**126/7**		

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2024

Akhir Tahun 2024, wilayah administrasi Kabupaten Morowali terdiri dari 10 wilayah kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan yaitu: Sombori Kepulauan (267,78 km^2), Menui Kepulauan (127,65 km^2), Bungku Selatan (232,10 km^2), Bahodopi (1.080,98 km^2), Bungku Pesisir (867,29 km^2), Bungku Tengah (725,57 km^2), Bungku Timur (387,23 km^2), Bungku Barat (758,93 km^2), Bumi Raya (504,77 km^2), Witaponda (519,70 km^2). BPS Kabupaten Morowali Tahun 2025, Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan terluas 1.080,98 km^2, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Menui Kepulauan hanya seluas 127,65 km^2. Kecamatan memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Bungku Selatan yakni 23 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Witaponda yakni memiliki 9 desa.

Jika ditinjau dari jarak masing-masing ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten (Kelurahan Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah), maka kecamatan terjauh adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan jarak 160 mil laut yang berarti untuk menjangkau ibukota kecamatan tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, sementara kecamatan yang terdekat adalah Bungku Timur dengan jarak 18 km dan Bungku Barat dengan jarak 27 km ditempuh dengan menggunakan transportasi darat terutama roda empat dan roda dua.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali dapat ditempuh dengan akses moda transportasi darat dan laut dari ibukota Kabupaten menuju ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua dan kapal laut. Masih ada sebagian besar di Kecamatan Bungku Selatan, Sombori Kepulauan, dan Menui Kepulauan, dimana desa-desa tersebut berada di wilayah kepulauan yang ditempuh dengan hanya berjalan kaki atau pun menggunakan kendaraan roda dua atau jalur laut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2025

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali, Tahun 2024

Secara singkat, profil singkat 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali diuraikan sebagai berikut.

Sombori Kepulaun : Merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas sebesar 267,78 km^2 atau 5 persen dari total wilayah Kabupaten yang berjarak 98 (mil laut) dari Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Tanjung Harapan;

Menui Kepulauan : Merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil dengan luas sebesar 127,65 km^2 atau 2 perswen dari total wilayah Kabupaten yang berjarak 160 (mil laut) dari Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan di Ulunambo;

Bungku Selatan : Luas wilayah 403.90 km^2 atau 4 persen dari total wilayah Kabupaten yang berjarak 64 (mil laut) dari Ibukota Ka-bupaten dengan Ibukota Kecamatan di Kaleroang;

Bahodopi : Merupakan kecamatan pemekaran pertama dari Kecamatan Bungku Selatan, merupakan wilayah kepulauan dan memiliki luas wilayah Kecamatan Bahodopi seluas 1080,98 km^2 adalah kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di kabupaten. Persen-tase luas wilayah sebesar 19,76 persen dari total wilayah kabupaaten, berjarak kurang lebih 41 km dari Ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di Desa Bahodopi, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.

Bungku Pesisir : Merupakan juga kecamatan pemekaran kedua dari Kecamatan Bungku Selatan dan berada di wilayah daratan utama Sulawesi, memiliki luas wilayah 867,29 km^2 atau 15,85 persen dari total luas wilayah ka-bupaten yang berjarak 75 km dari ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Lafeu, memiliki ketinggian tempat 4 m dpl.

Bungku Tengah : Merupakan ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 725,57 km^2 atau 13 persen dari total luas wilayah kabupaten yang berjarak 0 km dari ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Marsaoleh, memiliki 6 kelurahan, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.

Bungku Timur : Merupakan kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Bungku Tengah, Desa Kolono adalah ibukota Kecama-tan Bungku Timur dengan luas wilayah 387,23 km^2 atau 7 persen dari total luas wilayah yang jarak 18 km dari Ibukota Kabupaten Morowali, memiliki ketinggian tempat 7 m dpl.

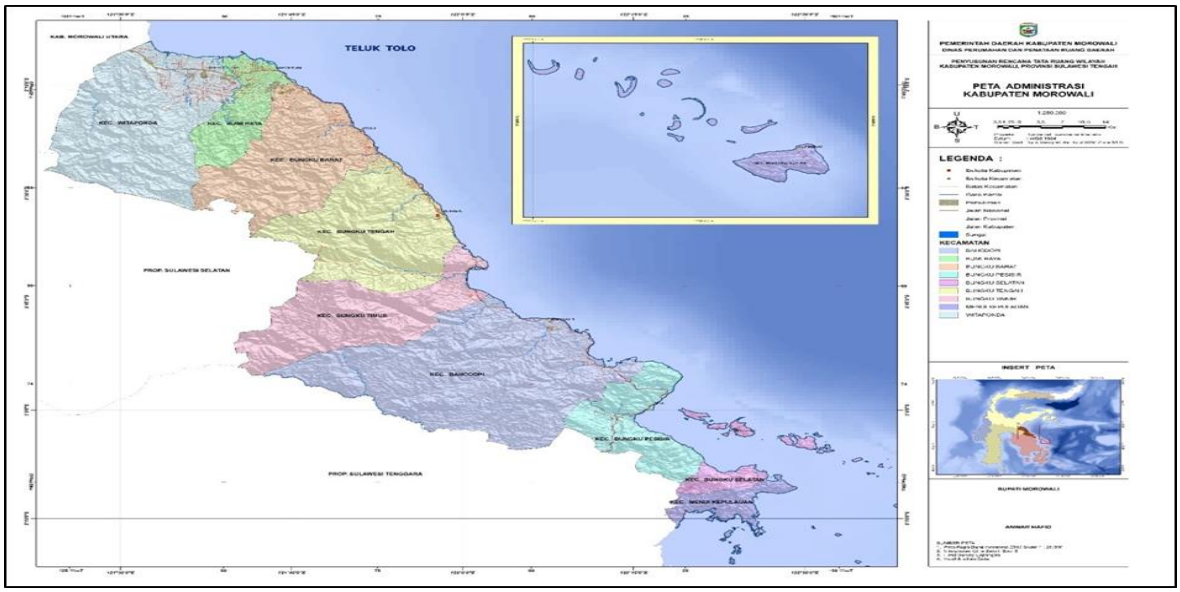
Bungku Barat : Merupakan kecamatan yang berada di wilayah daratan dan sangat dekat dengan ibukota kabupaten, memiliki luas wilayah 758,93 km^2 atau 14 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali yang berjarak 27 km dari

Ibukota Kabupaten, dengan Ibukota Keca-matan di Wosu, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.

Bumiraya : Merupakan kecamatan pemekaran dari Bungku Tengah bersama kecamatan Bungku Barat dan Witaponda, memiliki luas wilayah 504,77 km^2 atau 9 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali yang berjarak 48 km dari Ibukota, dengan Ibukota Kecamatan di Bahonsuai, memiliki ketinggian tempat 2 m dpl.

Witaponda : Merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara, memiliki jarak 61 km dari Ibukota Kabupaten dengan luas wilayah 519,70 km^2 atau sebesar 10 .persen dari total wilayah, dengan Ibukota Kecamatan di Laantula Jaya, memiliki keti-nggian tempat 11 m dpl.

Letak, batas dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Morowali selengkapnya terdapat pada gambar berikut ini tentang peta administratif Kabupaten Morowali.



Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Morowali

Jika ditinjau dari posisi geografis, Kabupaten Morowali memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Timur merupakan Wilayah Perairan Teluk Tolo.

B. Letak dan Kondisi Geografis

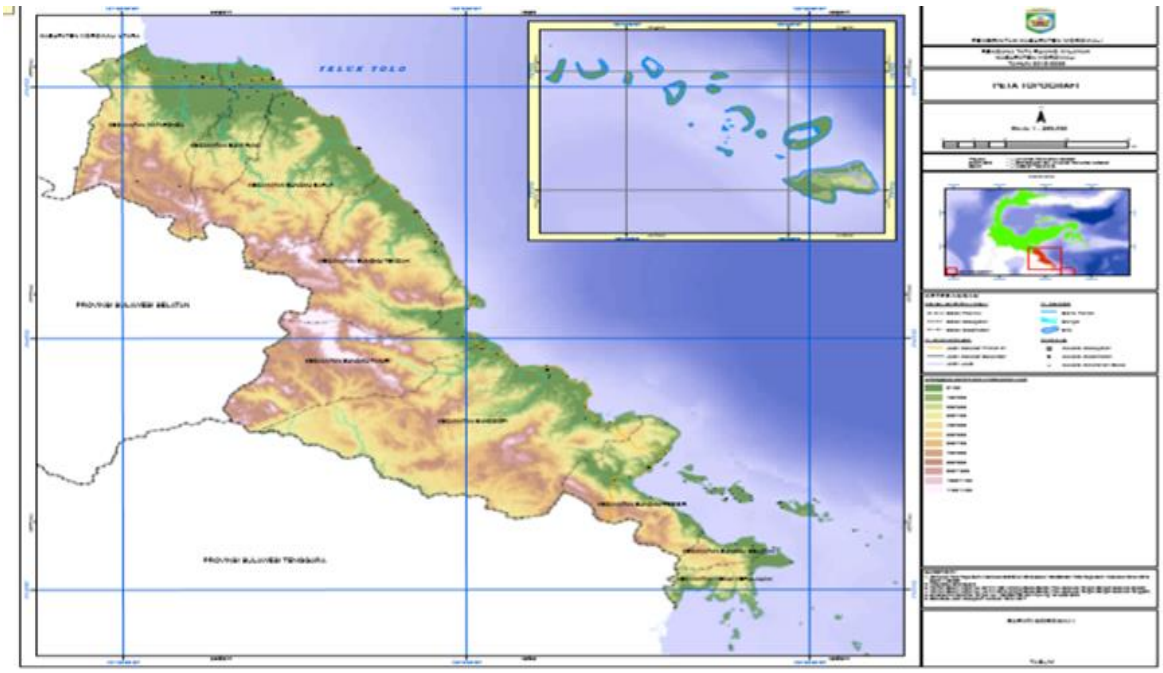
Secara astronomis, Kabupaten Morowali terletak antara 01^0 31'12" Lintang Selatan dan 03^0 46' 48" Lintang Selatan serta antara 121^0 02' 24" Bujur Timur dan 123^0 15' 36" Bujur Timur. Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat dan melebar ke Bagian Timur, sebagian besar (88,55 persen) berada di daratan Pulau Sulawesi, dan sebagian kecil lainnya (11,45 persen) merupakan pulau-pulau kecil terutama bagian paling selatan Kabupaten Morowali terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Morowali tersebut, maka wilayah kabupaten ini dapat dipetakan menjadi dua wilayah yakni wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan wilayah kepulauan.

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Wilayah Kabupaten Morowali yang berada di **daratan utama** Pulau Sulawesi meliputi Kecamatan Witaponda, Bumiraya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, dan Bungku Pesisir merupakan kecamatan yang ada di sekitar wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan sumberdaya tambang mineral, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat;
2) Wilayah Kabupaten Morowali yang berada di **kepulauan** meliputi Kecamatan Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan, dan Bungku Selatan merupakan daerah yang relatif didominasi oleh potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Dari jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan tersebut terdapat 110 desa berada di wilayah pesisir dan pulau, serta 23 desa dikategorikan sebagai desa non pesisir (BPS Kabupaten Morowali, 2025). Di antara 110 desa pesisir dan pulau tersebut, terdapat 45 desa yang berada di wilayah pulau-pulau kecil dan 5 desa yang berada di wilayah pesisir, yang tersebar di tiga kecamatan yakni Menui Kepulauan, Sombori Kepulauan dan Bungku Selatan. Sisanya merupakan desa-desa pesisir yang berada di wilayah daratan utama Pulau Sulawesi dan tersebar di 7 (tujuh) kecamatan lainnya di Kabupaten Morowali. Dari 23 desa non pesisir, terdapat 5 desa yang berada pada kondisi topografi wilayah yang dikategorikan memiliki kelerangan, dan 18 desa non pesisir pada kondisi topografi datar, terutama desa-desa yang berada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda.

C. Topografi dan Geologi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Morowali terdiri dari 10 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan dan 126 desa yang tersebar di bagian tenggara Pulau Sulawesi sehingga jika dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl).



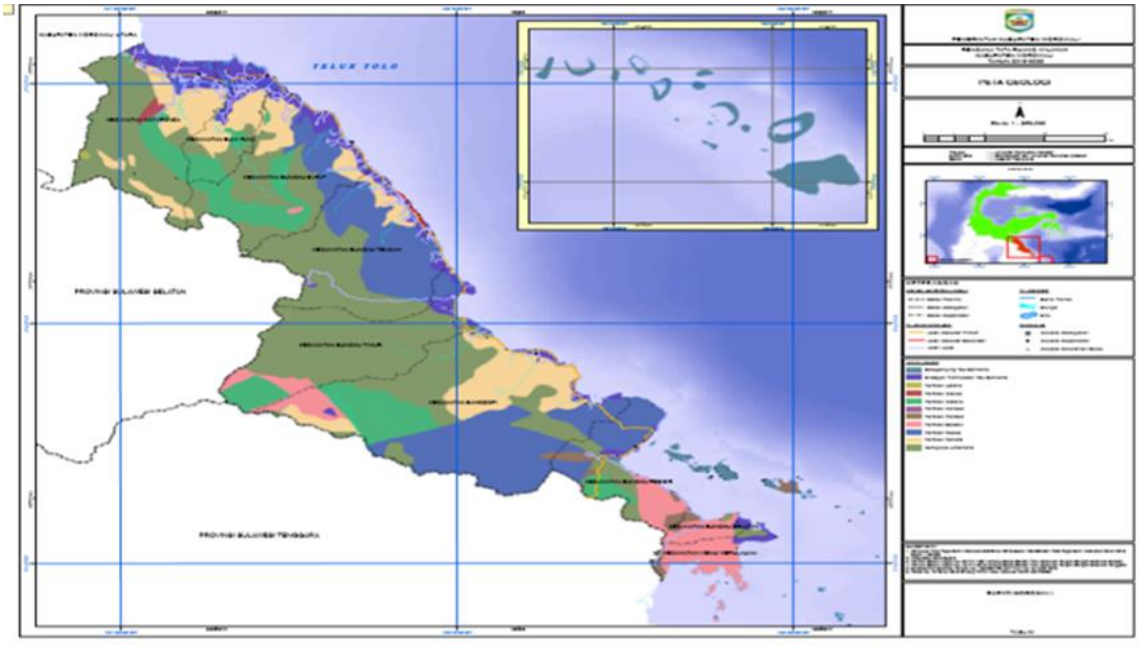
Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Morowali

Kondisi topografi Kabupaten Morowali bervariasi, sebagian besar (52,74 persen) berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpl, kemudian seluas 33,74 persen berada pada ketinggian antara 200-500 meter dpl, dan selebihnya seluas 13,52 persen berada pada ketinggian di bawah 100 meter dpl. Tingkat kelerengannya, yaitu seluas 52,30 persen kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sangat curam), 11,70 persen luas wilayah dengan kemiringan di bawah 2 persen (datar) agak landai), 12,56 persen luas wilayah dengan kemiringan 3 – 15 persen dan 23,30 persen luas wilayah dengan kemiringan antara 16 - 40 persen (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 persen.

Namun, berdasarkan elevasi (ketinggian tempat) setiap ibukota kecamatan, dataran ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali seluruh-nya berada pada ketinggian 0 m - 100 m dpl (100 persen). Ini berarti bahwa umumnya, ibukota kecamatan di Kabupaten Morowali berada pada wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kondisi topografi yang datar.

Secara geologis, wilayah Kabupaten Morowali tersusun atas beberapa

jenis batuan yaitu: Batuan Mollase, Batuan kapur, Batuan skiss, Batuan basic, Batuan ultra basic, dan Batuan sedimen. Sedangkan dari sisi geomorfologinya, wilayah ini merupakan beberapa bentukan lahan (landform) yaitu: Aluvial (A) tersebar di dataran rendah (0 - 3 persen), di sekitar sungai besar; Marine (M) tersebar di wilayah agak cekung di sepanjang pantai; Volkanik (V) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung; Tektonik dan struktural (T) tersebar pada relief yang bergelombang dan bergunung. Peta Geologi Kabupaten Morowali secara lengkap terdapat pada gambar berikut.

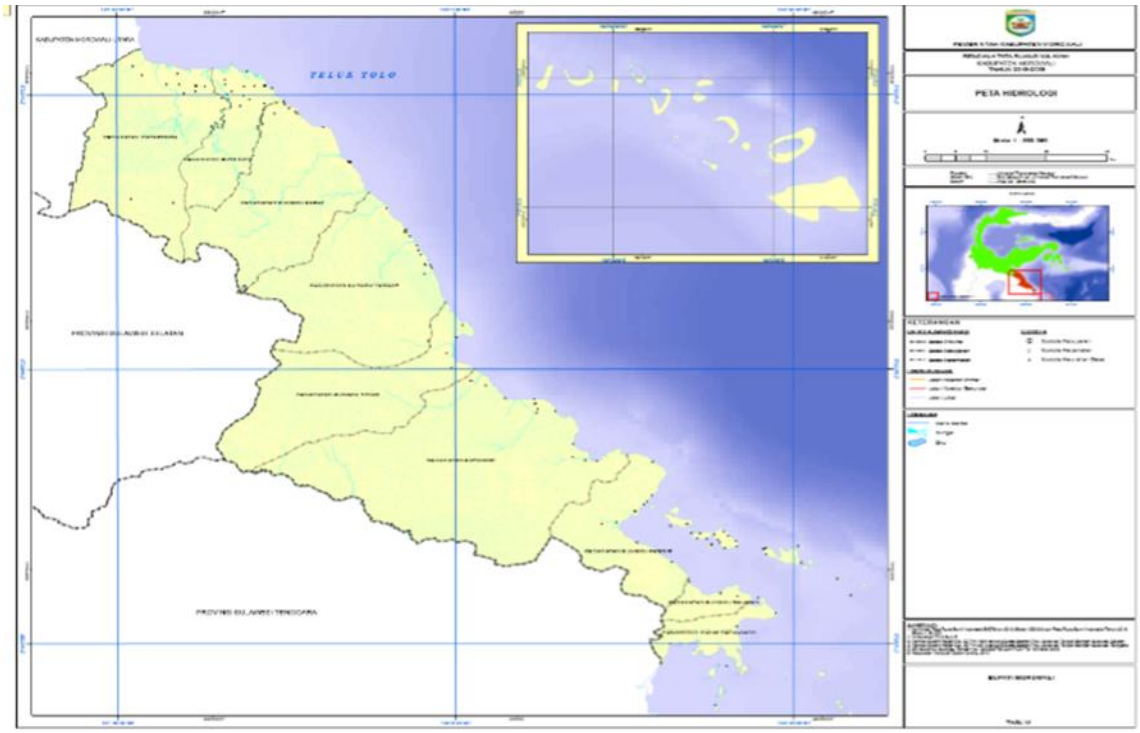


Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Morowali

Kondisi aktual eksplorasi dan produksi bahan galian yang terdapat di daerah ini tersebut (Uno, 2010): di wilayah Sulawesi Tengah, tiga jenis bahan galian utama yang telah nampak survey dan produksinya adalah minyak, gas bumi dan nikel. Kegiatan ekplorasi minyak bumi dilakukan di wilayah perairan Morowali (Teluk Tomori) sedangkan Gas bumi terletak di Senoro (Sinorang) Kabupaten Banggai dan telah melakukan produksinya. Adapun keberadaan sumberdaya nikel umumnya terdapat di wilayah Morowali sampai ke wilayah perbatasan Sulawesi Selatan (Soroako atau Luwu Timur) dan Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Selatan). Saat ini kegiatan penambangan dan pengolahan nikel berskala besar telah dan sedang berlangsung bahkan dengan melakukan perubahan fungsi lahan. Konversi lahan permukiman dan pertanian menjadi wilayah konsesi tambang baik untuk kawasan industri maupun sebagai lokasi sumber barang tambang nikel (orc) sebagaimana umumnya terjadi di wilayah Kecamatan Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir dan Kecamatan Sombori Kepulauan.

D. Hidrologi

Beberapa sumber air permukaaan terutama sungai-sungai kecil tersebar dari Kecamatan Witaponda sampai Kecamatan Bungku Pesisir. Sumber air sungai tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, bahwa wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Morowali termaksud dalam wilayah sungai strategis nasional. Adapun DAS tersebut adalah wilayah sungai yang berada di DAS Morowali, dan DAS Bahodopi seluas 246,87Ha. Ketersediaan air permukaan dan air tanah juga dipengaruhi oleh kondisi hutan. Penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan nikel, serta konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Peta Hidrologi Kabupaten Morowali terdapat pada gambar sebagai berikut.

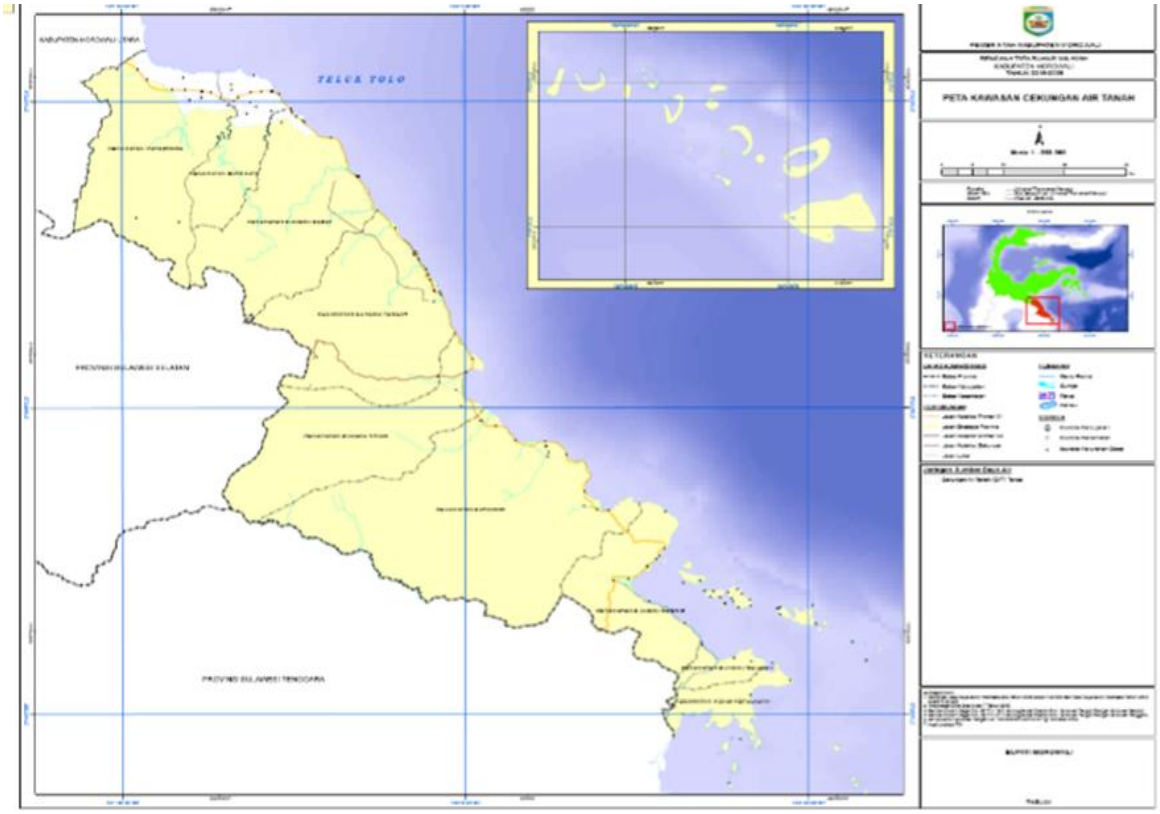


Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Morowali

Berdasarkan peta potensi penyebaran hidrologi yang merujuk kepada peta Geologi Regional menunjukkan bahwa sekitar 40 persen wilayah Kabupaten Morowali termasuk dalam zona aquifer produktif dengan

penyebaran luas artinya memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Sisanya 60 persen lagi termasuk dalam zona akuifer dengan produktivitas kecil yang berarti memiliki formasi batuan dengan potensi air tanah rendah tetapi dalam pemanfaatannya dapat diusahakan melalui teknologi geolistrik dan pemboran dengan diameter besar

Terdapat sejumlah sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar di Kabupaten Morowali, karena menjadi daerah resapan air (catchment area). Beberapa potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali pada gambar sebagai berikut.

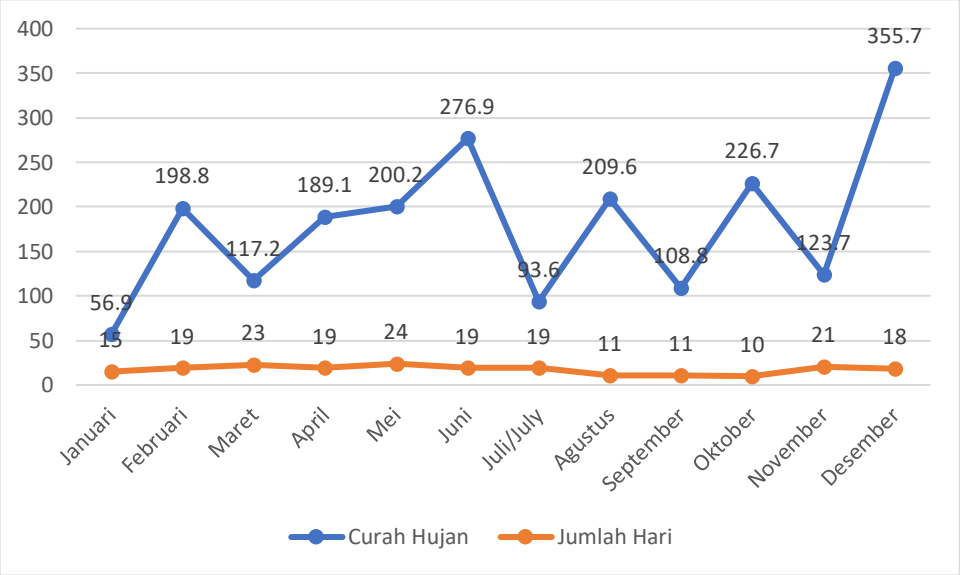


Gambar 2.6
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Morowali

E. Klimatologi

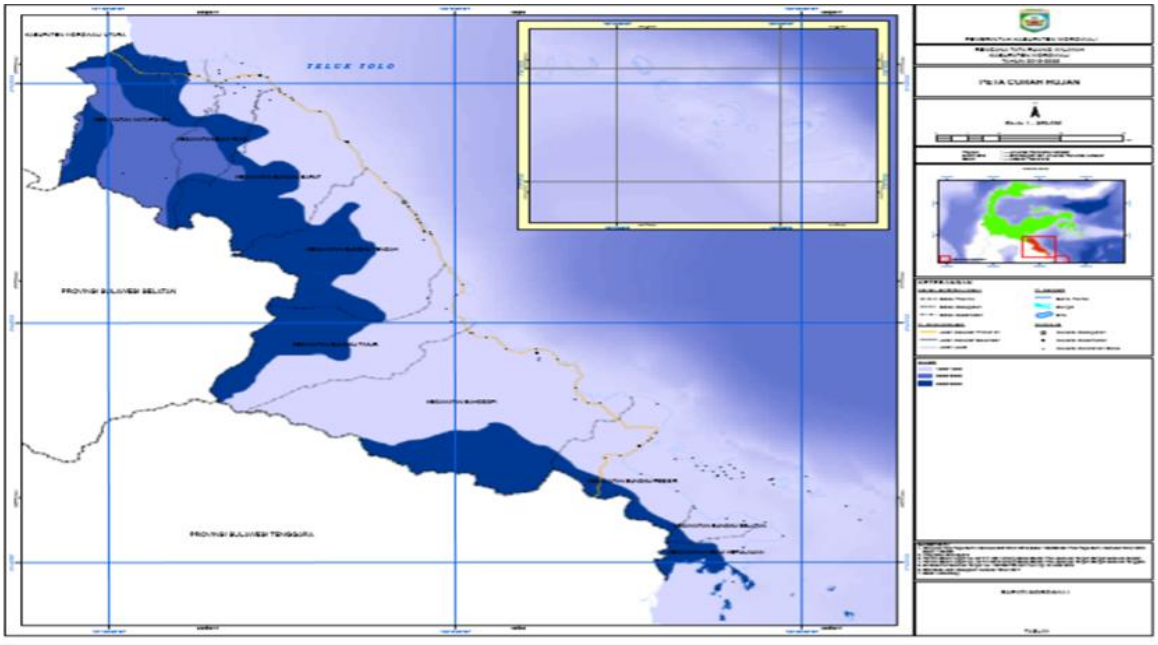
Kabupaten Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sehingga wilayah tergolong iklim A atau sangat basah. Karena itu, wajar jika daerah ini memiliki sungai yang cukup banyak sebagai sumber daya air yang potensial di manfaatkan untuk pengairan. Komponen yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi aliran air permukaan (*run off*) pada lokasi kegiatan antara lain curah hujan, bentang lahan, jenis tanah dan vegetasi sebagai tutupan

lahan. Curah hujan sebagai input utama dalam besarnya aliran air permukaan di daerah tangkapan air (*catchment area*), daerah tangkapan air merupakan fungsi dari vegetasi yang dapat menyimpan air hujan yang turun pada daerah tersebut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2024 (diolah kembali)

Gambar 2.7
Kondisi Iklim Kabupaten Morowali Tahun 2024



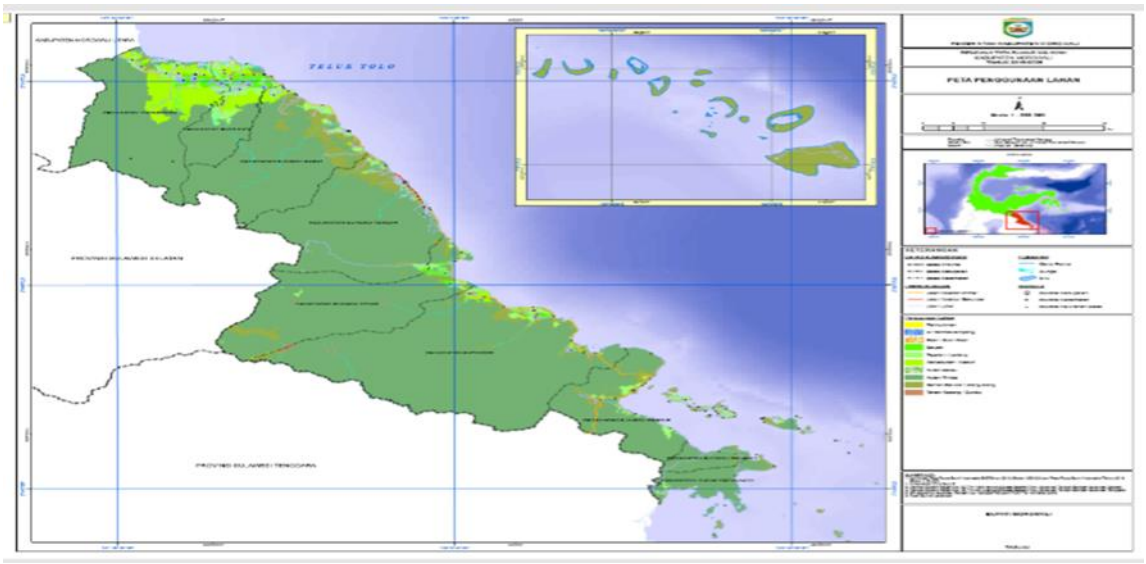
Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Kabupaten Morowali

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali, Curah hujan tertinggi pada bulan Desember dengan Curah Hujan 355 mm3 dengan selama 18 hari hujan, Selanjutnya diikuti dengan Bulan Juni

dengan Curah Hujan 279 mm^3 selama 19 hari hujan. Sedangkan, Curah Hujan paling sedikit yaitu bulan Agustus dengan Curah Hujan 56 mm3 selama 15 hari hujan, disusul pada bulan Juli dengan Curah Hujan 93 mm^3 selama 18 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

F. Penggunaan dan Peruntukan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali terdiri dari lahan kering dan lahan basah. Lahan basah untuk sawah, sementara lahan kering untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perumahan dan bangunan lainnya. Penggunaan Lahan di Kabupaten Morowali didominasi lahan Kehutanan, Lahan Pertanian dan Perkebunan dan Peta Penggunaan Lahan terdapat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Morowali

Peruntukan Lahan di Kabupaten Morowali diuraikan pada Rencana Pola Ruang mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijkan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Morowali yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung tersebar di wilayah Kabupaten Morowali seluas ± 99.576,41 ha yang terdiri atas hutan lindung, kawasan lindung lainnya, sempadan

sungai, sempadan pantai berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 yang diuraikan sebagai berikut.

- Kawasan lindung terdapat Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan dan taman bawah laut berupa terumbu karang terdapat di Kecamatan Bungku Selatan, Sombori Kepulauan dan Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam karst yang terdapat dikawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Menui Kepulauan.
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah kawasan imbuhan Cekungan air tanah pada CAT Tonoa di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, dan Kecamatan Bungku Barat dan kawasan sekitar mata air terdapat di setiap kecamatan dengan garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- Kawasan cagar budaya terdiri atas: a. kawasan cagar budaya Masjid Tua Bungku terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; b. kawasan cagar budaya Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah; dan c. Kawasan cagar budaya Goa di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun rincian luas kawasan budidaya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 40.207,91 hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku

Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;

- Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap kecamatan;
- Kawasan hortikultura terdiri atas tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan tanaman biofarma tersebar di kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan permukiman perdesaan disetiap Kecamatan;
- Kawasan perkebunan terdiri atas kawasan perkebunan rakyat dengan komoditi tanaman perkebunan campuran yang terdapat di setiap kecamatan;
- Kawasan peternakan terdiri atas : (a). kawasan integrasi tanaman dan ternak meliputi semua komoditi ternak terdapat di setiap kecamatan; (b). rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Witaponda dan Kecamatan Bahodopi; (c). rencana sentra peternakan rakyat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat; (d). rencana pengembangan kawasan Budidaya Ternak terdapat di setiap Kecamatan; (e). rumah Pemotongan Hewan terdapat di kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi, (f). rencana Rumah Pemotongan Hewan di Kecamatan Bungku Pesisir; (g). pasar dan terminal hewan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (h). rencana pasar dan terminal hewan di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Pesisir;
- Kawasan perikanan tangkap (a). seluruh perairan Kabupaten Morowali yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap; (b). Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan; dan (c). rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Kepulauan Menui dan sekitarnya di Kecamatan Menui Kepulauan, Kawasan Minapolitan Moahino dan sekitarnya di Kecamatan Witaponda, dan Kawasan Minapolitan Umbele dan sekitarnya di Kecamatan Bumi Raya;
- Kawasan perikanan budidaya laut terdiri atas: (a). perikanan budidaya keramba, komoditi ikan kerapu, ikan kuwe, dan lobster di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan; (b). rencana pengembangan perikananan budidaya kera-mba di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir; dan (c). perikanan budidaya rumput laut di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan budidaya perikanan air Payau terdiri atas: (a). tambak udang, ikan bandeng dan rumput laut terdapat di Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan

Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; dan (b). kawasan budidaya perikanan tambak yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas ± 26 (dua puluh enam) hektar di Kecamatan Bahodopi;

- Kawasan budidaya perikanan kolam air tawar berupa kolam air tawar dengan komoditi ikan lele, ikan nila dan ikan mas, ikan patin terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya Kecamatan Bungku Barat Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi;
- Kawasan Pertambangan Mineral Logam meliputi: (a). pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bungku Barat; (b). Perta-mbangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.451,95 (enam ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan lima) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (c). pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi konversi seluas 423,57 (empat ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar di Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Bungku Pesisir; (d). rencana WUP mineral logam terdapat di setiap kecamatan; dan (e). Wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Kecamatan Bahodopi;
- Kawasan Pertambangan bukan Logam meliputi rencana WUP mineral bukan logam yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, dan Kecamatan Sombori Kepulauan;
- Kawasan Pertambangan Batuan meliputi: (a). pertambangan batuan terdapat di Witaponda, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kecamatan Bungku Selatan; dan (b). Wilayah pertambangan rakyat (WPR) direncanakan pada lokasi dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dengan komoditi tambang rakyat terdiri atas Pasir batu di setiap kecamatan, Batu kali disetiap kecamatan, Batu gunung di setiap kecamatan, Tanah liat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Bungku Tengah;
- Kawasan industri besar terdiri atas: (a) Kawasan Industri Logam; (b) Kawasan Industri perkebunan; (c) Kawasan Industri (KI) Morowali terdapat di Kecamatan Bahodopi; (d) kawasan Industri (KI) Morowali yang berada dalam outline kawasan hutan lindung (HL) seluas 30.39

hektar di Kecamatan Bahodopi, dan kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 6,35 hektar; (e) pengembangan kawasan industri pengolahan hasil tambang terdapat di Kecamatan Bungku Timur dan Bungku Pesisir; dan (f) rencana industri pengolahan hasil tambang di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Sombori Kepulauan;

- Kawasan sentra industri kecil dan menengah merupakan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan kegiatan industri terdiri atas: (a). industri pengolahan hasil pertanian pangan berupa Sentra Industri Kecil Menengah (Sikim) Pangan terdapat di Kecamatan Bungku Barat; dan (b). industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas: (a). industri pengolahan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Witaponda; dan (b). rencana industri pengo-lahan kelapa sawit di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bumi Raya;
- Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas: (a). industri meubel kayu terdapat di Kecamatan Bungku Tengah; dan (b). rencana industri meubel rotan di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bungku Tengah;
- Industri pengolahan hasil perikanan terdiri atas: (a). Industri pengolahan ikan di Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Witaponda, Sombori Kepulauan;
- Kawasan pariwisata alam pegunungan/ hutan terdiri atas: (a). Wisata Goa terdiri atas: 1) Goa Petakoa di Desa Solonsa Kecamatan Witaponda; 2). Goa Fafompogaro, Goa Kotaeya, Goa Tengkorak di Kecamatan Bungku Barat; 3) Goa Kumapa, Goa Tambeanpana Api, Goa Fumbunsanua di Kecamatan Bungku Tengah; 4) Goa Berlian, Goa Alo di Kecamatan Sombori Kepulauan, (b). Wisata Puncak/Pegunungan terdiri atas: 1). Puncak Fafo baho di Kecamatan Bungku Tengah; 2). Puncak Mateantina, Puncak Unsongi di Kecamatan Bungku Timur; dan 3). Puncak Kayangan, Puncak Narita Kecamatan Sombori Kepulauan, (c). Wisata air terjun terdiri atas: 1). Kecamatan Bungku Barat Air Terjun Batu Kapal; 2). Kecamatan Bungku Tengah: Air Terjun Mempueno, Air Terjun Sampa laa, Air Terjun Veranomata, Permandian Tompaika, Air Terjun Vera Inense, Air Terjun Perawan; 3). Kecamatan Bungku Timur Permandian Lofi; 4). Kecamatan Bahodopi, Air Terjun Bahoumumpa; 5). Kecamatan Bungku Pesisir Air terjun Buleleng; dan 6). Kecamatan Sombori Kepulauan untuk Air kiri Sombori, (d). Penangkaran Rusa dan Penangkaran Burung Maleo di Kecamatan Bungku Barat;
- Kawasan pariwisata maritim/bahari terdiri atas: (a). wisata alam Bentang Laut meliputi: 1). Ekowisata Tracking Mangrove di Kecama-tan

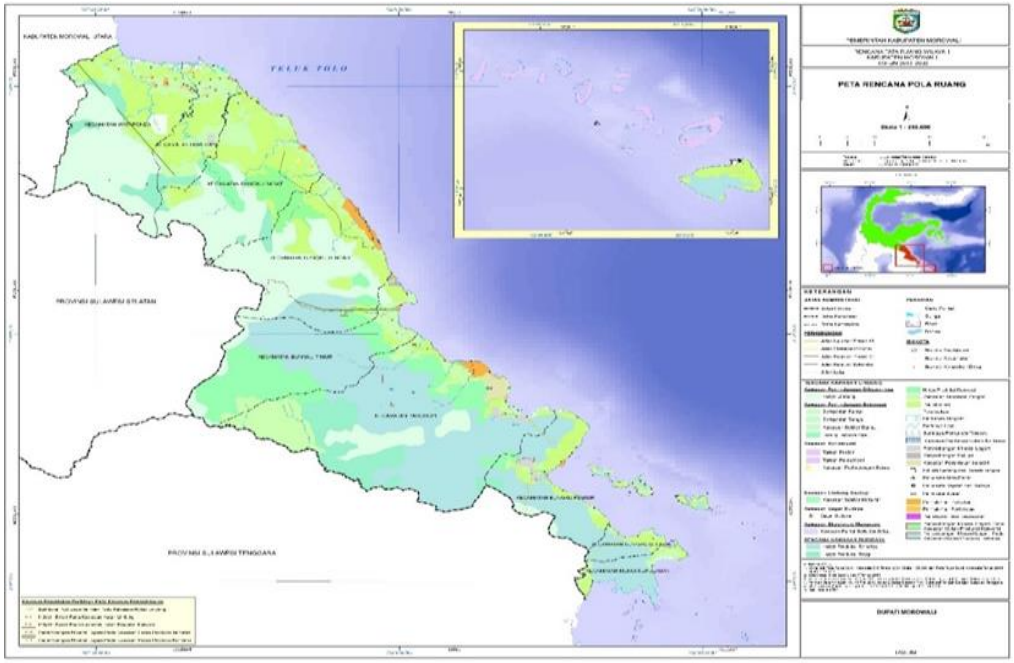
Bungku Tengah; dan 2). Ekowisata Mangrove Nambo–Laroue di Kecamatan Bungku Timur. (b). Wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil meliputi: 1). Pantai pasir Putih Pebotoa, Pantai Lambelu di Kecamatan Bumi Raya; 2). Pantai Raha-Raha ada rasa, Pantai Raha-raha ada Bio di Kecamatan Bungku Barat; 3). Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapuno Bahomante, Pantai Tapuno Bente, Pantai Tudua Di Kecamatan Bungku Tengah; 4). Pantai Pasir Besi, Pantai Puluti, Pulau Pasir Hitam di Kecamatan Bungku Timur; 5). Pulau Langala, Pulau Kanda Pute, Pantai Kea kea di Kecamatan Bahodopi; 6). Pantai Panjang, Pasir Putih Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir; 7). Pulau Dua Laut, Pulau Umbele kecamatan Bungku Selatan; dan 8). Pulau Sombori, Pasir Putih Koi-koila, Pulau Koko, Rumah Nenek, Danau Air Asin, Konservasi perairan pulau tiga Kecamatan Sombori Kepulauan (c). Wisata alam bawah laut meliputi perairan di sekitar Pantai Kecamatan Sombori Kepulauan.

- Kawasan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: (a). Situs Istana Raja Bungku di kecamatan bungku tengah; (b). Makam Raja Bungku di kecamatan Bungku Tengah; (c). Masjid Tua Bungku, Masjid Agung dan Islamic center di kecamatan Bungku Tengah; dan (d). Benteng Fafontofure di Kecamatan Bungku Tengah;
- Kawasan pariwisata buatan antara lain: (a). Taman Kota Fonuasingko, Alun-alun Rumah Jabatan Bupati, Taman Sangiang Kinambuka di Kecamatan Bungku tengah; dan (b). Permandian Bahoruru di Kecamatan Bungku Tengah;

Rencana kawasan potensi parawisata lainnya di setiap kecamatan;

- Kawasan permukiman terdiri atas: (a). kawasan permukiman perkotaan terdiri atas: 1). kawasan perkotaan bungku Tengah; 2). permukiman kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah; 3). Permukiman perkotaan di Kecamatan Bahodopi; 4). rencana permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bungku Tengah; dan 5). rencana kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Pembangunan Baru (KPB) Bungku di Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda; (b). kawasan permukiman perdesaan terdiri atas: 1). permukiman perdesaan terdapat di setiap Kecamatan; 2). kawasan permukiman Transmigrasi terdapat di Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Pesisir; 3). rencana kawasan permukiman Transmigrasi Nelayan di Kecamatan Bungku Selatan, Sombori, dan Kecamatan Menui Kepulauan; dan 4). rencana pengembangan kawasan permukiman Transmigrasi di kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, kecamatan Bungku

Barat, Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Witaponda. Data Pola Ruang secara lebih jelas dan lengkap terdapat pada pada gambar di bawah ini tentang Peta sebagai berikut.



Gambar 2.10
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Morowali

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Sektor pertanian merupakan sektor memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Morowali. Hal tersebut ditunjukkan, sektor ini memegang peranan penting, lebih dari 50 persen tiap tahunnya dalam perekonomian di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sub sektor pertanian terdiri dari Subsektor Hortikultura, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Perikanan dan Subsektor Kehutanan. Berikut ini disajikan keadaan sub sektor pertanian di Kabupaten Morowali.

A. Pertanian Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Morowali meliputi tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Lahan untuk tanaman padi umumnya beririgasi, dan juga terdapat lahan non irigasi (sawah tadah hujan dan padi ladang), umumnya berada di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda.



Gambar 2.11
Potensi Persawahan di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda di Kabupaten Morowali

Kawasan dan potensi usaha tani untuk padi ladang hanya terdapat di Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Bahodopi. Potensi lahan untuk tanaman pangan lain selain untuk tanaman padi juga terdapat di kecamatan lain seperti di Bungku Timur dengan kondisi topografi landai sampai bergunung. Berdasarkan data BPS Tahun 2024, potensi lahan tegalan di Kabupaten Morowali seluas 16.685,70 Ha (terluas di Bungku Pesisir 1549 Ha), lahan huma/ladang mencapai 1900 Ha yang terluas di Kecamatan Bungku Barat seluas 871Ha, dan tidak digunakan seluas 27.875 Ha yang terluas juga berada di Bungku Barat seluas 3.977 Ha. Luas panen tanaman pa-ngan di Kabupaten Morowali Tahun 2022 seperti tanaman padi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 9.343 Ha. Luas jagung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data perkembangan luas panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha) di Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Tahun (Hektar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	9.225,00	9.343,00	8.650,00	5.498.06	5.498.06
Jagung	1.180,00	1.040,10	1.040,10	167,00	103
Ubi Kayu	144,00	190,00	190,00	143,97	80,50
Ubi Jalar	38,00	69,90	69,90	50,00	41
Kacang Tanah	52,00	224,50	224,50	42,52	31,00
Kacang Kedelai	61,00	87,00	87,00	32,00	4,00
Kacang Hijau	61,00	57,50	57,50	41,50	31

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Merujuk pada tabel di atas, luas lahan panen tanaman pangan di Kabupaten Morowali yang terbesar di Tahun 2024 adalah lahan tanaman pangan padi sebesar 5.498,06 Ha, kemudian yang terluas kedua yakni

tanaman pangan jagung sebesar 1.040 Ha. Sedangkan yang terendah adalah tanaman pangan Kacang Hijau dengan luas panen 57,5 Ha. Dari total luas lahan, perkembangan berfluktuatif kurun Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020, total luas panen tanaman pangan seluas 11.431,90 Ha, kemudian menurun pada Tahun 2021 seluas 10.605 Ha, meningkat pada Tahun 2022 seluas 10.761 Ha dan terus meningkat Tahun 2023 menjadi 11.012 seluas Ha. Namun, menurun kembali Tahun 2024 menjadi hanya seluas 10.319 Ha.

Tabel 2.3
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton)
Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Tahun (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	42.068,22	45.434,34	39.507,32	26.940,49	26.940,49
Jagung	1.865,00	1.865,00	1.865,00	684,70	406,59
Ubi Kayu	4.186,00	4.186,00	4.186,00	3.677,57	1.763,04
Ubi Jalar	775,00	775,00	775,00	684,70	531,93
Kacang Tanah	56,00	56,00	56,00	45,07	32,09
Kacang Kedelai	127,00	127,00	127,00	35,27	5,20
Kacang Hijau	4,00	4,00	4,00	41,50	31,00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Berdasarkan data pada tabel di atas, produksi tanaman padi sawah pada Tahun 2018 sebanyak 40.477 ton, lalu meningkat Tahun 2019 menjadi sebesar 44.672 ton. Kemudian Tahun 2020 produksi meningkat menjadi sebesar 42.068,22 Ton dan meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 45.434,34 Ton. Namun di tahun 2022 produksi tanaman padi menurun menjadi 39.507,32 Ton.

Untuk tanaman jagung jumlah produksi tertinggi pada Tahun 2018 yakni sebesar 7.083,00 ton, sementara pada Tahun 2019 sebesar 5.283,00 ton. Pada tahun 2020 hingga 2022 produksi tanaman jagung menurun cukup besar menjadi 1.865 ton.

Untuk jenis tanaman pangan lokal lainnya di Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022, secara keseluruhan mengalami fluktuasi produksi seperti Tanaman Ubi Kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau, produksinya menurun selama periode 2019-2022. Penurunan produksi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Morowali sebagai daerah industri tambang yang padat penduduk dan tenaga kerja dari berbagai daerah. Sehingga kebutuhan akan ketersediaan pangan juga meningkat. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali.

B. Pertanian Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura merupakan jenis tanaman yang terkait keperluan bahan pangan dan kebutuhan keindahan atau seni. Dilihat dari segi umur, tanaman hortikultura umumnya tergolong tanaman semusim dan ada juga yang berumur jangka panjang. Tanaman hortikultura digolongkan dalam tiga kelompok tanaman yakni tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan hias. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu Tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu Tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak. Tanaman buah-buahan Tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman Tahunan. Tanaman sayuran Tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu Tahun.

Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Tanaman hias adalah tanaman yang mempunyai nilai keindahan baik bentuk, warna daun, tajuk maupun bunganya, sering digunakan untuk penghias pekarangan dan lain sebagainya. Luas lahan dan produksi tanaman hortikultura terutama sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Morowali disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Produksi Beberapa Jenis Tanaman Buah-Buahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

No	Kecamatan	Produksi (Kuintal) Tanaman Buah						
		Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Rambutan	Langsat
1	Menui Kepulauan	20	5	4	150	20	-	-
2	Bungku Selatan	-	-	-	10	15	-	-
3	Bahodopi	16	-	23	1.686	1.100	-	-
4	Bungku Pesisir	30	5	1	3	4	3	-
5	Bungku Tengah	40	-	-	-	-	-	-
6	Bungku Timur	5	40	-	110	-	-	-
7	Bungku Barat	216	90	-	3.345	900	1.020	490
8	Bumi Raya	565	-	-	620	195	-	-
9	Witaponda	-	-	300	-	-	-	120
	Morowali	**892**	**140**	**328**	**5.924**	**2.234**	**1.023**	**610**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Mengutip data pada tabel di 2.4, menunjukkan bahwa jenis komoditi buah-buahan yang memiliki produksi yang tinggi adalah tanaman pisang dan diusahakan oleh hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Morowali atau tersebar di sembilan kecamatan. Secara umum, tanaman pepaya juga merupakan tanaman kedua yang banyak ditanam oleh masyarakat di Sulawesi Tengah selain tanaman nenas. Produksi tanaman buah terbesar yakni pisang sebesar 5.924 kuintal, meningkat dari tahun sebelumnya, kemudian pepaya sebesar 2.234 kuintal dan rambutan sebesar 1.023 kuintal, mangga sebesar 892 kuintal. Sedangkan yang terkecil adalah Durian sebesar 140 kuintal.

C. Potensi Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan merupakan jenis tanaman yang berumur Tahunan atau jangka panjang. Penghitungan luas tanaman perkebunan besar adalah pada keadaan akhir Tahun dan tidak termasuk yang luasnya kurang dari 5 hektar. Bentuk produksi perkebunan adalah; karet kering (karet), daun kering (the dan tembakau), biji kering (kopi dan coklat), kulit kering (kayu manis dan kina), serat kering (rami), bunga kering (cengkeh), refined sugar (tebu dari perkebunan besar), gula mangkok (tebu dari perkebunan rakyat), ekivalen kopra (kopra), biji dan bunga (pala) serta minyak daun (sereh). Jenis tanaman perkebunan yang umumnya ditanam petani di Kabupaten Morowali adalah kelapa, kakao, kelapa sawit, cengkeh, kopi, lada, karet, dan pala. Produksi dan luas lahan tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Produksi Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

No	Kecamatan	Produksi (ton) Tanaman Perkebunan			
		Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao
1	Menui Kepulauan	130.200	-	-	-
2	Bungku Selatan	125.000	-	-	-
3	Bahodopi	148.500	33.250	2.880	10.350
4	Bungku Pesisir	66.650	134.000	14.355	20.250
5	Bungku Tengah	607.000	29.700	-	493.536
6	Bungku Timur	199.000	36.000	-	32.700
7	Bungku Barat	81.600	19.250.000	855	110.000
8	Bumi Raya	70.000	18.000.000	-	62.000
9	Witaponda	52.000	10.440.000	1.465	91.980
	Morowali	**1.479.950**	**47.922.950**	**19.555**	**820.816**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan produksi tertinggi tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali adalah tanaman kelapa sawit (47.922.950 Ton), dan produksi terendah adalah tanaman Kopi (19.555 Ton). Tanaman kelapa sawit umumnya terkonsentrasi di Bungku Barat, Bumi Raya dan

Witaponda. Produksi tanaman Kelapa adalah yang terbesar kedua dan usaha ini dilakukan masyarakat di hampir seluruh kecamatan, selain Menui Kepulauan, Bungku Selatan dan Bungku Timur. Selanjutntya Sedangkan, untuk produksi tanaman Kakao pada tahun 2024 sebesar 820.816 ton, produksi tanaman kakao tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali kecuali Menui Kepulauan. Produksi tanaman Kakao terbesar berada di Kecamatan Witaponda, Bungku Timur dan Kecamatan Bungku Barat.

Tabel 2.6
Luas Lahan Beberapa Jenis Tanaman Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha) Tanaman Perkebunan			
		Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao
1	Menui Kepulauan	147	-	-	-
2	Bungku Selatan	203	-	-	-
3	Bahodopi	120	20	6	90
4	Bungku Pesisir	71	72	101	37
5	Bungku Tengah	1.816	32	-	1.695
6	Bungku Timur	298	9	-	154
7	Bungku Barat	69	5.930	1	340
8	Bumi Raya	60	2.695	-	90
9	Witaponda	50	4.085	4	309
	Morowali	**2.834**	**12.843**	**112**	**2.705**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Tabel di atas menunjukkan jenis tanaman perkebunan yang memiliki lahan terluas adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman ini diusahakan masyarakat dan perusahaan perkebunan di 6 (enam) kecamatan. Tanaman terluas di Kecamatan Bungku Barat mencapai luas 5.930 ha dan terkecil di Kecamatan Bungku Timur sebesar 9 ha. Meski, mengalami penurunan produksi akibat serangan hama, tanaman kakao masih menempati urutan kedua terluas di Kabupaten Morowali.

D. Peternakan

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Morowali Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diklasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu: a) Ternak besar yang meliputi: sapi kuda dan kerbau b) Ternak kecil antara lain: kambing, domba dan babi; dan c) Ternak unggas yang meliputi: ayam kampung, ayam petelur dan itik. Ternak besar jenis sapi merupakan ternak yang mendominasi di Kabupaten Morowali dan umumnya tersebar di Kecamatan Bungku Barat, Bahodopi, Bungku Timur dan Bungku Tengah. Populasi ternak besar pada Tahun 2024 sebanyak 3.602 ekor sapi, ternak kerbau sebanyak 23 ekor dan kuda 4 ekor. Data populasi ternak besar di Kabupaten Morowali terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil
Kabupaten Morowali, Tahun 2020-2024

Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ternak Besar					
- Kerbau	336	99	65	34	23
- Sapi	7.931	9.019	10.325	12.223	3.602
- Kuda	8	4	4	4	4
Ternak Kecil					
- Kambing	16.608	13.608	16.512	20.620	1.790
- Domba	-	-	-	-	-
- Babi	4.162	1.812	2.189	2.430	1.601

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Populasi ternak kecil (kambing, domba, dan babi) di Kabupaten Morowali cenderung mengalami penurunan. Populasi ternak kecil seperti kambing mengalami penurunan populasinya dari 20.620 ekor di Tahun 2023 menurun menjadi 1.790 ekor pada Tahun 2024. Sementara itu populasi ternak kecil jenis babi di Tahun 2023 sebanyak 2.430 ekor mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 1.601 ekor.

Populasi unggas yang diternak masyarakat Kabupaten Morowali terdiri dari Ayam Kampung, Ayam Pedaging, Ayam Petelur dan Itik. Dari 4 (empat) jenis unggas yang diternak masyarakat di Kabupaten Morowali dalam 2 (dua) Tahun terakhir didominasi unggas ayam kampung. Data populasi unggas di Kabupaten Morowali pada Tahun 2023-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Unggas Menurut Jenisnya
di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Jenis Unggas	Tahun (Ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ayam Kampung	101.926	114.158	141.754	152.552	53.246
Ayam Petelur	31.918	65.044	37.249	7.309	22.978
Itik	41.532	10.781	14.914	19.920	3.049

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Seperti yang di tampilkan pada tabel di atas, jumlah populasi ternak unggas jenis ayam kampung di Kabupaten Morowali pada Tahun 2020 sebanyak 101.926 ekor lalu terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak 152.552 ekor tahun 2023, namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan jumlah menjadi 53.246 ekor. Untuk populasi ternak unggas ayam petelur berfluktuatif selama 4 tahun belakang dimana tahun 2020 sebesar 31.918 ekor dan hingga Tahun 2021 meningkat dengan sangat signifikan menjadi 65.044 ekor. Ayam petelur mengalami penurunan jumlah pada tahun 2022 menjadi sebanyak 37.249 dan di tahun 2023

hanya menyisahkan sebanyak 7.309 ekor. Tahun 2024 jumlah populasi ternak kembali meningkat menjadi 22.978 ekor. Sementara populasi ternak itik Tahun 2020 sebanyak 41.532 ekor menurun menjadi 10.781 ekor pada Tahun 2021 dan kembali meningkan di tahun 2022 dan 2023 masing masing sebanyak 14.914 ekor dan 19.920 ekor serta pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 3.049 ekor.

E. Perikanan

Potensi perikanan terdiri atas sumberdaya perikanan dan sumberdaya manusia (nelayan dan pembudidaya). Sumberdaya perika-nan dikelola melalui dua kegiatan/usaha perikanan yakni perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sumberdaya manusia pada sub sektor perikanan dilakukan secara bersama-sama oleh satu keluarga yang disebut dengan Rumah Tangga Perikanan (RTP). Jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Morowali mencapai 7.178 RTP pada Tahun 2020 lalu meningkat menjadi 7.264 RTP pada Tahun 2021 dan hingga Tahun 2024 sebanyak 8.710 RTP meningkat dari Tahun 2023, dan ditahun 2024 jumlah RT perikanan sebesar 8.617, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Perkembangan Rumah Tangga Perikanan RTP per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menui Kepulauan	2.237	2237	2.170	2.789	2.785
Bungku Selatan	3.043	3049	3.312	3.450	3.405
Bahodopi	141	125	219	242	229
Bungku Pesisir	313	331	357	369	364
Bungku Tengah	526	526	649	649	616
Bungku Timur	265	293	392	398	396
Bungku Barat	270	270	227	276	280
Bumi Raya	241	241	201	303	293
Witaponda	142	192	258	261	249
Kabupaten Morowali	**7.178**	**7.264**	**8.535**	**8.710**	**8.617**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Garis pantai Kabupaten Morowali kurang lebih 500 km, dengan luas perairan laut sekitar 29.962,88 km^2 memiliki potensi biotik yang jenis dan jumlahnya cukup banyak, terdiri dari berbagai jenis ikan, kepiting, cumi-cumi, gurita, dan kerang mutiara. Sedangkan untuk perikanan budidaya antara lain tambak dan kolam dengan jenis potensi udang windu, bandeng, rumput laut, ikan mas, nila, dan udang galah. Selama ini jenis ikan pelagis ekonomis rendah seperti kembung, teri, dan layang yang banyak ditangkap nelayan. Hasil tangkapan dalam bentuk segar dan kering untuk konsumsi lokal atau luar daerah.

Tabel 2.10
Produksi Perikanan Laut (Tangkap dan Budidaya Laut) selama Empat Tahun Terakhir dan Persentase Produksi per Kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Kecamatan	Produksi Perikanan Laut Tahun (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menui Kepulauan	5.532,00	8.675.70	8.526,90	8.914,90	7.646,30
Bungku Selatan	16.821,20	14.309,30	14.761,80	17.533,00	16.432,00
Bahodopi	182,40	307,20	382,60	422,70	333,70
Bungku Pesisir	1.158,60	1.558,80	1.472,00	1.447,10	1.415,30
Bungku Tengah	5.135,10	3.373,30	2.602,20	2.860,90	2.378,00
Bungku Timur	573,70	1,169,0	1.074,20	1.254,40	1.253,80
Bungku Barat	1.015,30	705,40	963,90	570,20	504,50
Bumi Raya	417,40	611,50	612,90	583,40	619,20
Witaponda	1.367,50	2.599,40	3.023,30	2.840,10	2.454,10
Kabupaten Morowali	**32.203,20**	**33.309,30**	**33.420,80**	**36.414,70**	**33.036,90**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Produksi perikan laut menurun sangat signifikan pada Tahun 2020 dengan total produksi hanya sebesar 32.203,20 ton dari tahun sebelumnya. Namun, Tahun 2021 hingga 2023 kembali meningkat cukup signifikan. Kurun Tahun 2020-2024 terdapat beberapa kecamatan yang produksi perikanan laut menurun seperti Kecamatan Bumi Raya. Sedangkan Kecamatan Menui Kepulauan Produksi perikanan lautnya meningkat signfikan dari Tahun 2020 menjadi 5.532,00 ton menjadi 7.646,30 ton ditahun 2024. Kemudian Kecamatan Bungku Timur juga meningkat signifikan produksi perikanan laut menjadi 1.253,80 ton di tahun 2024 yang sebelumnya di tahun 2020 hanya sebesar 573,70 ton. Kecamatan lainnya mengalami fluktuasi produksi yakni Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Timur, Bungku Barat dan Witaponda. Produksi perikanan tangkap tersebut diperoleh dari mengoperasikan alat tangkap dan perahu, kapal motor dan perahu tanpa motor.

F. Sumberdaya Hutan

Sebelum dilakukan pemekaran Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar. Berdasarkan data Publikasi BPS Tahun 2025, Tercatat pada Tahun 2024 Kabupaten Morowali memiliki hutan seluas 303.306,97 Ha, terdiri dari Hutan Produksi terbatas sebesar 114.200,51 Ha, hutan Produksi tetap sebesar 37.416,69 Ha, Hutan Produksi dapat di Konversi sebesar 41.340,71 Ha, kemudian terdapat hutan lindung seluas 114.122,01 Ha.

Tabel 2.11
Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali (Hektar), Tahun 2024

Kecamatan	Hutan Produksi			Hutan Lindung	Suaka Alam & Pelestarian Alam	Jumlah Luas Hutan
	Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi			
Sombori Kepulauan	-	-	-	-	-	-
Menui Kepulauan	10.911,42	-	-	388,99	-	11.300,41
Bungku Selatan	5.182,67	-	-	-	-	5.182,67
Bahodopi	47.299,26	23.976,06	10.578,41	10.820,43	-	92.674,16
Bungku Pesisir	19.237,36	847,59	1.011,04	1.441,26	-	22.537,25
Bungku Tengah	7.867,65	538,75	2.977,02	31.970,62	-	43.354,04
Bungku Timur	23.702,15	-	23.001,29	913,82	-	47.617,26
Bungku Barat	-	1.991,37	3.474,73	20.353,16	-	22.344,53
Bumi Raya	-	1.485,40	298,22	502,43	-	1.987,83
Witaponda	-	8.577,52	-	47.731,30	-	56.308,82
Morowali	**114.200,51**	**37.416,69**	**41.340,71**	**114.122**	**-**	**303.306,97**

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Selanjutnya Hasil hutan non kayu, kulit dan daun mencapai 29.777,185 ton dan hasil perburuan (madu) 23.604 liter. Cagar alam di Kabupaten Morowali memiliki luas 225.000 Ha. Kawasan ini merupakan wilayah konservasi terluas kedua di Provinsi Sulawesi Tengah. Berbagai flora dan fauna dilindungi ada di kawasan ini, seperti anoa, babi rusa, musang coklat, dan burung maleo.

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Selanjutnya berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 pada pasal 128 Kawasan hutan produksi di Kabupaten Morowali terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 120.665,27 (seratus dua ribu enam ratus enam puluh lima koma dua tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 28.280,57 (dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh koma lima tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Menui Kepulauan;
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas seluas 40.207,91 (empat puluh ribu dua ratus tujuh koma sembilan satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Menui Kepulauan;

G. Potensi Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan, Kabupaten Morowali menyimpan deposit tambang yang cukup besar, seperti minyak bumi, nikel, besi, dan chromit. Tabel berikut ini menyajikan luas potensi tambang dan area pertambangan yang telah dikelola di Kabupaten Morowali.

Tabel 2.12
Potensi dan Luas Areal Pertambangan dan Energi di Kabupaten Morowali

Jenis Bahan Tambang/Galian	Luas Area (Ha)	Lokasi Tambang
Minyak Bumi dan Gas Alam	-	-
Nikel	142.000	Sombori Kepulauan (harusnya Desa Matarape), Bungku Pesisir, Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, Witaponda
Chromit	5.729	Bungku Barat
Marmer	-	-
Total	147.729	

Berdasarkan data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi Nikel di Kabupaten Morowali memiliki luas areal hampir 150.000 Ha, lokasinya menyebar hampir di sebagian wilayah Morowali dengan cadangan diperkirakan akan sampai 8 juta WMT. Untuk chromit yang merupakan bahan galian yang banyak digunakan dalam industri baja dan industri bahan kimia, cadangannya diperkirakan mencapai 1 juta ton terdapat di Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Barat. Begitu juga dengan batu gamping yang cadangannya mencapai 30 juta meter kubik dengan luas area 25 Ha yang berada di Kecamatan Bungku Selatan.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Status Daya Dukung Air

Ketersediaan air di Kabupaten Morowali dihitung menggunakan data debit air baku permukaan material aliran sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Morowali. Dengan asumsi material air sungai yang melintas di Kabupaten Morowali dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal. Debit air sungai yang bersumber dari KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan selanjutnya didistribusikan ke dalam sistem grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Morowali, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah

tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan di wilayah tersebut.

Tabel 2.13
Status Daya Dukung Air Kabupaten Morowali Tahun 2025

Kecamatan	KETERSEDIAAN AIR (m^3/Tahun)	KEBUTUHAN AIR UNTUK LAHAN (m^3/Tahun)	KEBUTUHAN AIR UNTUK DOMESTIK (m^3/Tahun)	KEBUTUHAN AIR TOTAL (m^3/Tahun)	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK (Jiwa)	SELISIH AMBANG BATAS (Jiwa)	STATUS
Bahodopi	1.460.746.788	114.843.081	36.485.820	151.328.901	1.309.417.887	1.636.772	1.591.165	Belum Terlampaui
Bumi Raya	313.108.480	138.205.543	13.312.410	151.517.953	161.590.527	201.988	185.348	Belum Terlampaui
Bungku Barat	705.044.120	136.515.220	12.176.389	148.691.610	556.352.511	695.441	680.220	Belum Terlampaui
Bungku Pesisir	392.440.810	32.241.261	6.775.505	39.016.765	353.424.045	441.780	433.311	Belum Terlampaui
Bungku Selatan	157.325.078	10.828.453	12.043.221	22.871.674	134.453.404	168.067	153.013	Belum Terlampaui
Bungku Tengah	817.156.291	109.376.449	26.825.974	136.202.423	680.953.868	851.192	817.660	Belum Terlampaui
Bungku Timur	701.086.112	50.105.525	12.093.587	62.199.112	638.887.000	798.609	783.492	Belum Terlampaui
Menui Kepulauan	513.966.874	20.337.715	11.294.093	31.631.808	482.335.066	602.919	588.801	Belum Terlampaui
Witaponda	767.557.680	370.188.255	18.259.768	388.448.024	379.109.656	473.887	451.062	Belum Terlampaui
Total Morowali	**5.828.432.233**	**982.641.502**	**149.266.766**	**1.131.908.269**	**4.696.523.964**	**5.870.655**	**5.684.071**	**Belum Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Morowali 2025-2029.

Analisis status daya dukung air di Kabupaten Morowali tahun 2025, terdapat beberapa kecamatan yang menunjukkan indikasi terlampauinya daya dukung air secara signifikan. Kecamatan dengan persentase wilayah terlampaui yang tinggi di antaranya adalah Witaponda dengan 20,65% wilayahnya sudah melampaui daya dukung air, dan Bungku Barat dengan 19,89% wilayah terlampaui. Kedua kecamatan ini memiliki persentase tertinggi dalam hal wilayah yang sudah mengalami tekanan daya dukung air.

Selain itu, Kecamatan Bahodopi dan Bumi Raya juga menunjukkan indikasi dengan masing-masing memiliki 10,81% dan 10,75% wilayah yang daya dukung airnya sudah terlampaui. Meskipun persentasenya tidak setinggi Witaponda dan Bungku Barat, wilayah ini tetap perlu mendapat perhatian lebih untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul dari penurunan daya dukung air. Sementara hasil data Status Daya Dukung Air di Kabupaten Morowali Tahun 2029, terdapat beberapa kecamatan yang terindikasi memiliki tingkat status telah terlampaui daya dukung air yang tinggi. Kecamatan Witaponda menempati posisi teratas dengan 23,31% wilayahnya yang daya dukung airnya sudah terlampaui. Kecamatan ini menunjukkan persentase tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, sehingga membutuhkan perhatian serius dalam pengelolaan sumber daya air.

Kecamatan Bungku Barat juga memiliki persentase tekanan daya dukung penyedia air yang signifikan, yaitu sebesar 19,92%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seperlima wilayah di kecamatan tersebut sudah melampaui kapasitas daya dukung airnya. Kecamatan Bungku

Selatan dan Bungku Tengah juga menunjukkan indikasi yang cukup tinggi, masing-masing dengan 13,48% dan 13,30% wilayah yang sudah terlampaui.

B. Status Daya Dukung Pangan

Berdasarkan hasil pengolahan data dihasilkan ketersediaan potensi bahan pangan Kabupaten Morowali sebesar 62.808.536.932,91 Kkal/tahun, jenis-jenis produksi komoditi bahan pangan yang telah dikonversi ke dalam satuan Kkal berdasarkan data dari Neraca Bahan Makanan Kabupaten Morowali Tahun 2021 (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Morowali) yaitu sebesar 14.084 Kkal/Orang/Hari yang selanjutnya dikonversi ke Kkal/Tahun dan didistribusikan sebarannya ke dalam *system grid* berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten Morowali, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan di wilayah tersebut.

Tabel 2.14
Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Morowali

KECAMATAN	KETERSEDIAAN PANGAN (Kkal/Tahun)	KEBUTUHAN PANGAN (Kkal/Tahun)	SELISIH (Kkal/Tahun)	AMBANG BATAS PENDUDUK (Jiwa)	SELISIH AMBANG BATAS (Jiwa)	KETERANGAN
Bahodopi	1.918.597.261,43	29.294.717.500	-27.376.120.238,57	7	-37.323	TERLAMPAUI
Bumi Raya	24.638.773.876,62	11.415.758.250	13.223.015.626,62	31.314	16.767	BELUM TERLAMPAUI
Bungku Barat	3.614.141.269,61	11.063.405.500	-7.449.264.230,39	5.506	-8.592	TERLAMPAUI
Bungku Pesisir	14.303.887.465,59	5.194.260.250	9.109.627.215,59	18.368	11.749	BELUM TERLAMPAUI
Bungku Selatan	2.145.814.449,56	10.910.379.250	-8.764.564.800,45	2.704	-11.199	TERLAMPAUI
Bungku Tengah	1.506.316.300,15	22.920.978.000	-21.414.661.699,85	2.965	-26.243	TERLAMPAUI
Bungku Timur	1.240.030.093,25	9.464.869.750	-8.224.839.656,75	2.794	-9.267	TERLAMPAUI
Menui Kepulauan	680.212.179,50	10.404.215.500	-9.724.003.320,50	504	-12.754	TERLAMPAUI
Witaponda	12.760.764.037,20	16.241.186.000	-3.480.421.962,80	15.784	-4.912	TERLAMPAUI
Total Morowali	**62.808.536.932,91**	**126.909.770.000**	**-64.101.233.067,10**	**79.946**	**-81.774**	**TERLAMPAUI**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Morowali 2025-2029.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan pangan adalah kemampuan suatu negara atau daerah untuk memenuhi kebutuhan energi, air, dan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Ini berarti tidak bergantung pada impor dan memiliki sistem produksi, distribusi, dan pengelolaan yang efisien dan lestari. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Morowali telah memprogramkan ketahanan energi terutama kelistrikan dan air di wilayah kepulauan. menjamin kelancaran penyediaan listrik dan telah melakukan koordinasi dengan PLN untuk mempercepat penyaluran listrik ke daerah-daerah yang belum terlayani. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp17 miliar untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Bahodopi, termasuk yang terkait dengan penyaluran listrik. Selain itu,

melakukan mediasi dengan PT BTIIG/PT IHIP terkait tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan terkait penyediaan air bersih dan listrik murah, pada tahun 2025 ini penyelesaian masalah kelistrikan di beberapa kecamatan, seperti Witaponda, Bumi Raya, dan Bungku Barat.

Ketahanan air, secara aktif menangani keluhan masyarakat terkait listrik dan air bersih, termasuk menjamin adanya layanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar ISPA akibat pencemaran lingkungan.

Dari sisi ketahanan pangan, salah satu proyek penting adalah kolaborasi antara PT Vale Indonesia dan TNI dalam program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (PSRLB), yang mengembangkan pertanian organik untuk memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 juga berperan penting dalam membuka lahan ketahanan pangan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Upaya ini mencerminkan sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Morowali.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas adalah kondisi di mana alam dan ekosistem berada dalam keadaan sehat dan seimbang, mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Kualitas Udara: Udara bersih tanpa polusi yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan.
2. Kualitas Air: Air yang bebas dari kontaminasi dan aman untuk dikonsumsi serta digunakan dalam kegiatan sehari-hari.
3. Keanekaragaman Hayati: Keberagaman spesies flora dan fauna yang terjaga, yang berkontribusi pada keseimbangan ekosistem.
4. Pengelolaan Limbah: Sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mencegah pencemaran tanah dan air.
5. Ruang Terbuka Hijau: Area hijau yang cukup untuk rekreasi dan sebagai paru-paru kota, membantu mengurangi efek urbanisasi.

Lingkungan hidup berkualitas juga berarti adanya upaya berkelanjutan untuk menjaga dan memulihkan ekosistem, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Adapun kondisi capaian lingkungan hidup berkualitas disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.15
Kondisi Lingkungan Hidup Berkualitas di Kabupaten Morowali

No	Parameter Lingkungan	Nilai Capaian Kualitas Lingkungan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kualitas Udara	na	94,92	86,20	83,33	83,45

2.	Kualitas Air	na	52,52	68,89	67,33	64,39
3.	Keanekaragaman Hayati	na	Na	Na	na	na
4.	Pengelolaan Limbah	na	Na	Na	na	na
5.	Ruang Terbuka Hijau	na	Na	Na	na	na
6.	Kualitas Lahan	na	95,9	92,22	92,26	92,6

Sumber: DInas Lingkungan Hidup, 2025.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim merujuk pada kemampuan suatu sistem, komunitas, atau individu untuk mengantisipasi, merespons, serta pulih dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun perubahan iklim secara efektif dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup perencanaan tata ruang yang adaptif, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap risiko, penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan, serta integrasi data iklim dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membangun ketahanan ini, risiko kerugian akibat bencana dapat diminimalkan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang dapat terjaga, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap perubahan lingkungan ekstrem.

A. Wilayah Rawan Bencana

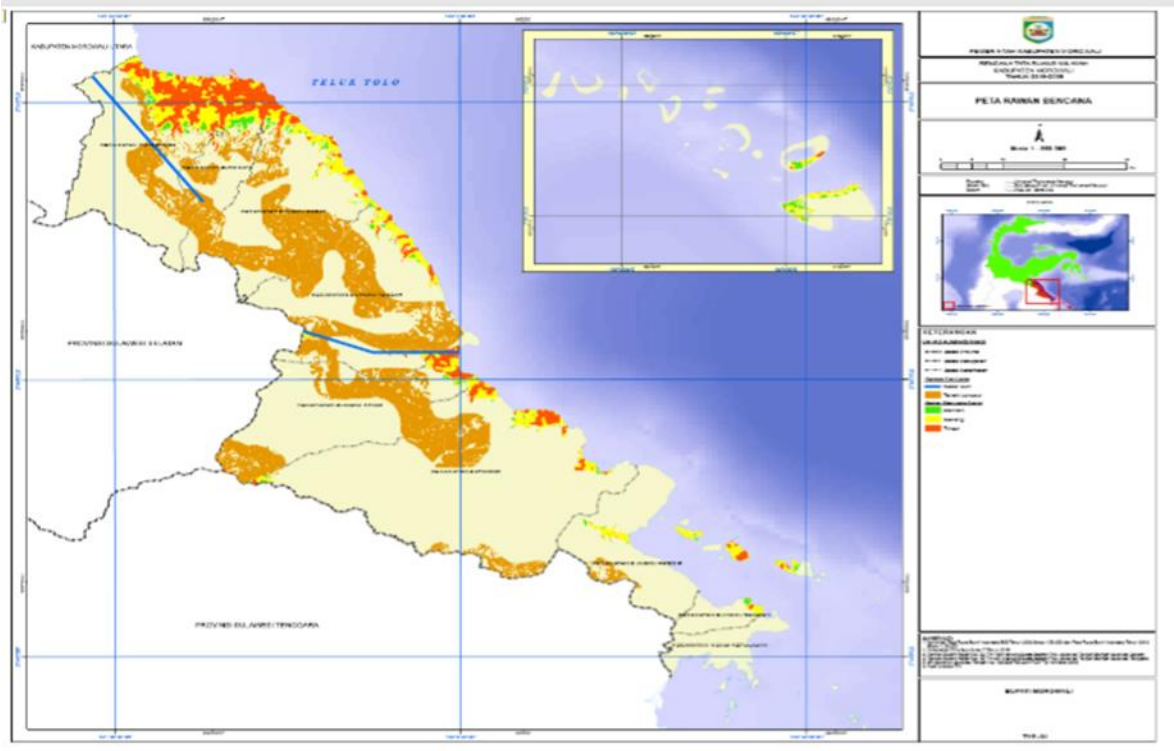
Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan cura hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor.

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan

pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan.

Beberapa Tahun terakhir terdapat bencana Alam yang melanda Kabupaten Morowali banjir bandang, Gempa Bumi dan Longsor yang terjadi pada kurun Tahun 2019 s/d 2020. Peningkatan sedimentasi juga telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku tengah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali pada gambar berikut ini.



Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Morowali

Adapun Kawasan rawan bencana dalam wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

- Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir

- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur
- Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur.

2.1.1.7. Demografi

Istilah kependudukan (*population*) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, perpindahan penduduk (*migration*) dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibat-kan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah- masalah sosial dan ekonomi.

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk *(in migration)* lebih besar dari pada migrasi keluar *(out migration).* Sensus Penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2010 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebanyak 102.228 jiwa meningkat sebesar 10,66 persen pada Tahun 2015 menjadi 113.132 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi sebanyak 117.330 jiwa pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Morowali sebesar 170.450 jiwa. Ini berarti bahwa terjadi peningkatan sebesar 40 persen selama periode Tahun 2010-2023 dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,86 persen perTahun. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali antara Tahun 2010 dengan 2023 menurut kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali, Tahun 2010, 2020, 2024

No	Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2010	2020	2024	2010–2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Menui Kepulauan	12.064	13.232	13.500	-29,81
2	Bungku Selatan	17.273	13.914	14.100	-13,92
3	Bahodopi	6.594	37.322	44.500	589,02
4	Bungku Pesisir	-	6.625	8.467	-
5	Bungku Tengah	27.774	29.302	36.385	31,00
6	Bungku Timur	-	12.061	15.341	-
7	Bungku Barat	10.093	14.061	21.064	108,70
8	Bumi Raya	11.488	14.524	17.648	53,62
9	Witaponda	16.942	20.686	23.664	39,68
10	Sombori Kepulauan	Na	na	6.460	-
	Morowali	**102.228**	**161.727**	**198.968**	**94,63**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bahodopi, yang pada Tahun 2024 tercatat berjumlah 45.434 jiwa. Lonjakan penduduk di Kecamatan Bahodoi didominasi oleh penduduk pendatang yang bekerja di wilayah pertambangan dan telah berpindah kependuduk (ber KTP) Kabupaten Morowali. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Bungku Tengah sebesar 36.385 jiwa. Kemudian Kecamatan Witaponda sebanyak 30.882 jiwa, Kecamatan Witaponda sebesar 23.664 jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Bungku Barat sebanyak 21.064 jiwa, Kecamatan paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bungku Pesisir sebesar 8.467 jiwa. Laju

pertumbuhan penduduk yang merupakan profil dari tingkat perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Morowali bervariasi antar kecamatan.

B. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut *jenis* kelamin adalah rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi. Secara lengkap informasi mengenai rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Morowali Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Sombori Kepulauan	3.314	3.146	6.460	105
Menui Kepulauan	4.782	4.854	9.636	99
Bungku Selatan	7.629	7.240	14.869	105
Bahodopi	25.900	19.534	45.434	133
Bungku Pesisir	4.453	4.014	8.467	111
Bungku Tengah	19.081	17.304	36.385	110
Bungku Timur	8.037	7.304	15.341	110
Bungku Barat	11.767	9.297	21.064	127
Bumi Raya	9.246	8.402	17.648	110
Witaponda	12.381	11.283	23.664	110
Morowali	**106.590**	**92.378**	**198.968**	**115**

Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Seperti pada tabel di atas, persentase jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bahodopi sebagai dengan persentase sebesar 133 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali secara keseluruhan, diikuti oleh Kecamatan Bungku Barat sebesar 18,12 persen dan selanjutnya Witaponda sebesar 12,79 persen, sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya di Kabupaten Morowali adalah Kecamatan Bungku Pesisir yang hanya sebesar 6.625 jiwa atau proporsinya mencapai 4,10 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali. Penduduk Kabupaten Morowali mengalami peningkatan dari 121.300 jiwa pada Tahun 2019 menjadi 161.730 jiwa pada Tahun 2020, dan hingga Tahun 2021 meningkat menjadi 167.910 jiwa dan ditahun 2023

sebanyak 170.450 jiwa. Selanjutnya dilihat dari data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten *Morowali* dengan Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perbandingan Jumlah Penduduk (Ribu) Kabupaten Morowali Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangkep	120,14	121,68	123,58	123,42	124,58
Banggai	362,28	366,22	370,97	373,69	377,60
Morowali	**161,73**	**167,91**	**176,24**	**170,45**	**173,31**
Poso	244,88	248,35	252,65	254,06	254,06
Donggala	300,44	302,97	305,89	311,00	311,00
Toli-Toli	225,15	226,80	228,64	233,90	233,90
Buol	145,25	146,63	148,25	152,36	152,36
Parigi Moutong	440,02	443,17	446,71	459,76	459,78
Tojo Una-una	163,83	166,34	169,48	170,82	170,82
Sigi	257,59	261,68	266,81	269,96	269,96
Banggai Laut	70,44	70,87	71,35	74,02	74,02
Morowali Utara	120,79	122,24	124,01	127,87	127,87
Palu	373,22	377,03	381,57	392,51	392,51
Sulawesi Tengah	**2.986**	**3.021,88**	**3.066,14**	**3.121,75**	**3.121,75**

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2025 (diolah kembali)

Secara umum, pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus-menerus mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2020, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2.986,00 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi 2.021,88 jiwa pada Tahun 2021, kemudian Tahun 2022 Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3.066.140 juta jiwa dan di tahun 2024 berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS mendata sebanyak 3.121,75 juta jiwa penduduk yang tercatat berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2024, Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 456,76 ribu jiwa; kemudian diikuti Kota Palu dengan jumlah penduduk sebanyak 392,51 ribu jiwa dan peringkat ketiga Kabupaten Banggai sebanyak 373,69 ribu jiwa, terbesar keempat Kabupaten Donggala sebanyak 311,00 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali menempati urutan ke-delapan dari tiga belas kabupaten/kota pada Tahun 2020 sebanyak 170,45 jiwa, serta Kabupaten Banggai Laut menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah yakni sebanyak 74,02 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yakni jumlah kelahiran dan kematian, emigrasi dan imigrasi.

C. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023, rata- rata kepadatan penduduk Kabupaten Morowali adalah 31 jiwa per km². Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Morowali tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bungku Tengah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pemerintahan Kabupaten Morowali memiliki luas wilayah kecamatan sebesar 725,57 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 30.882 mencapai kepadatan penduduk sebanyak 39 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Menui Kepulauan yaitu 53 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bungku Pesisir dengan tingkat kepadatan sebesar 8 jiwa per km². Data rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Tingkat Kepadatan Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan, Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Org/Km²)
	Km²	%	Jumlah	%	
Kepulauan Sombori	267,78	5	6.460	3,25	24,12
Menui Kepulauan	127,65	2	9.636	4,84	75,49
Bungku Selatan	232,1	4	14.869	7,47	64,06
Bahodopi	1.080,98	20	45.434	22,83	42,03
Bungku Pesisir	867,29	16	8.467	4,26	9,76
Bungku Tengah	725,57	13	36.385	18,29	50,15
Bungku Timur	387,23	7	15.341	7,71	39,62
Bungku Barat	758,93	14	21.064	10,59	27,75
Bumi Raya	504,77	9	17.648	8,87	34,96
Witaponda	519,70	10	23.664	11,89	45,53
Morowali	**5.472,00**	**100**	**198.968**	**100**	**36,36**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Menui Kepulauan merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibanding kecamatan lain, sementara terendah kepadatan penduduknya di Kecamatan Bungku Pesisir. Hal ini disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Menui Kepulauan lebih sempit dibanding kecamatan lain yakni hanya 4,07 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali.

D. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "*Sex Ratio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis

kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu, hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Data terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Morowali, Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Kepulauan Somboro	3.314	3.146	6.460	105
Menui Kepulauan	4.782	4.854	9.636	99
Bungku Selatan	7.629	7.240	14.869	105
Bahodopi	25.900	19.534	45.434	133
Bungku Pesisir	4.453	4.014	8.467	111
Bungku Tengah	19.081	17.304	36.385	110
Bungku Timur	8.037	7.304	15.341	110
Bungku Barat	11.767	9.297	21.064	127
Bumi Raya	9.246	8.402	17.648	110
Witaponda	12.381	11.283	23.664	110
Morowali	**106.590**	**92.378**	**198.968**	**115**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali)

Jika dilihat dengan cermat tabel di atas tergambarkan bahwa Kecamatan Bahodopi merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024 dengan rasio sebesar 133, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Menui Kepulauan dengan rasio sebesar 99.

Secara keseluruhan terlihat *sex rasio* pada tingkat kecamatan di Kabupaten Morowali relatif bervariasi antara 99 sampai 133. Namun secara kumulatif, pada tingkat Kabupaten Morowali dalam Tahun terakhir komposisi penduduk laki-laki dan perempuan telah relatif berbeda (*sex rasio=100*) dengan angka rasio sebesar 133 dan bahkan terdapat kecenderungan sex rasio tetap di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

E. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kabupaten Morowali. Pada Tahun 2023 penduduk di bawah usia 15 Tahun mencapai 54.742 jiwa atau sebesar 27,51 persen dari total penduduk Kabupaten Morowali yang berjumlah 198.968 jiwa. Dengan demikian, Kabupaten Morowali mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk *Intermediate*, yakni proporsi

penduduk usia di bawah 15 Tahun sekitar 30 persen, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali
Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 (ribu)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	*2*	*3*	*4*
0-4	10.243	9.486	19.729
5-9	9.554	9.034	18.588
10-14	8.497	7.928	16.425
15-19	7.372	6.506	13.878
20-24	12.000	9.056	21.056
25-29	13.776	10.479	24.255
30-34	10.357	8.534	18.891
35-39	8.540	7.218	15.758
40-44	7.025	6.183	13.208
45-49	5.389	4.944	10.333
50-54	4.356	3.967	8.323
55-59	3.324	3.095	6.419
60-64	2.362	2.197	4.559
65-69	1.591	1.581	3.172
70-74	1.125	1.028	2.153
75+	1.079	1.142	2.221
Morowali	**106,590**	**92,378**	**198,968**

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali dalam Angka Tahun 2025 (diolah kembali).

Merujuk data pada di atas, komposisi atau struktur umur penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebesar 66,76 persen berada pada kelompok umur 0-34 Tahun. Hal ini menunjukkan penduduk dominan berada pada kelompok penduduk usia muda. Sementara untuk Rasio Ketergantungan Anak (*Child Dependency Ratio*) Tahun 2024 tercatat sebesar 27,51 yang berarti bahwa terdapat sekitar 28 orang anak menjadi beban tanggungan untuk setiap 100 orang penduduk yang berada dalam usia produktif. Di sisi lain, penduduk usia lanjut juga tidak dapat melakukan kegiatan secara produktif, sehingga akan menjadi beban tanggungan bagi penduduk lainnya yang masih produktif. Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (*Old Dependency Ratio*) Tahun 2024 di Kabupaten Morowali sebesar 6,08 persen. Bila kedua kelompok usia ketergantungan tersebut digabungkan, maka akan diperoleh angka Rasio Ketergantungan Umum (*Dependency Ratio*) sebesar 54,75 persen. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 55 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana individu dan kelompok dalam suatu wilayah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup yang mencakup kesehatan, pendidikan, akses terhadap infrastruktur dasar, serta keterlibatan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, kesejahteraan masyar akat menjadi salah satu tujuan utama yang harus dicapai melalui perencanaan yang sistematis dan berbasis inklusivitas. Pemerintah, melalui kebijakan strategis yang termuat dalam dokumen RPJMD, mengarahkan pembangunan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang holistik, perlu adanya fokus yang lebih spesifik pada beberapa aspek utama, yaitu kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan berkualitas, perlindungan sosial, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu aspek utama yang menentukan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Morowali. Aspek ini mencakup berbagai indikator laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan beberapa indikator lainnya yang sesuai.

A. Pertumbuhan PDRB

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/region. PDRB tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

PDRB sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 menjadi 17 lapangan usaha. Sementara laju

pertumbuhan ekonomi (PDRB) diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada Tahun ke-n terhadap nilai pada Tahun ke n-1 (Tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada Tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2024 Kabupaten Morowali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 (Persen)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.84	(2.76)	3.21	1.81	(0.29)	1.89
B	Pertambangan dan Penggalian	19.77	34.40	23.11	17.22	14.08	5.75
C	Industri Pengolahan	24.00	35.72	24.53	31.91	25.29	21.01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.98	4.47	2.69	11.36	10.10	6.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.17	0.11	9.06	2.33	1.83	4.53
F	Konstruksi	13.31	(14.62)	70.45	34.62	2.36	0.98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.90	(4.98)	9.00	62.22	5.19	12.30
H	Transportasi dan Pergudangan	6.47	(28.38)	201.86	151.77	5.86	10.35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.01	(10.48)	14.19	56.23	16.93	15.41
J	Informasi dan Komunikasi	6.80	7.09	9.83	23.57	6.70	4.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.17	13.23	7.89	5.92	0.29	12.01
L	Real Estat	0.90	0.15	3.77	28.73	20.20	15.31
M,N	Jasa Perusahaan	4.98	(1.17)	1.27	14.35	10.43	16.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.05	1.06	4.59	(3.00)	2.51	0.96
P	Jasa Pendidikan	3.00	(0.18)	0.74	0.48	4.53	6.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.35	6.91	4.05	2.22	7.21	6.61
R,S,T, U	Jasa lainnya	2.59	(0.44)	14.40	10.05	5.40	11.02
Produk Domestik Regional Bruto		**20.20**	**28.93**	**25.15**	**28.21**	**20.34**	**16.26**

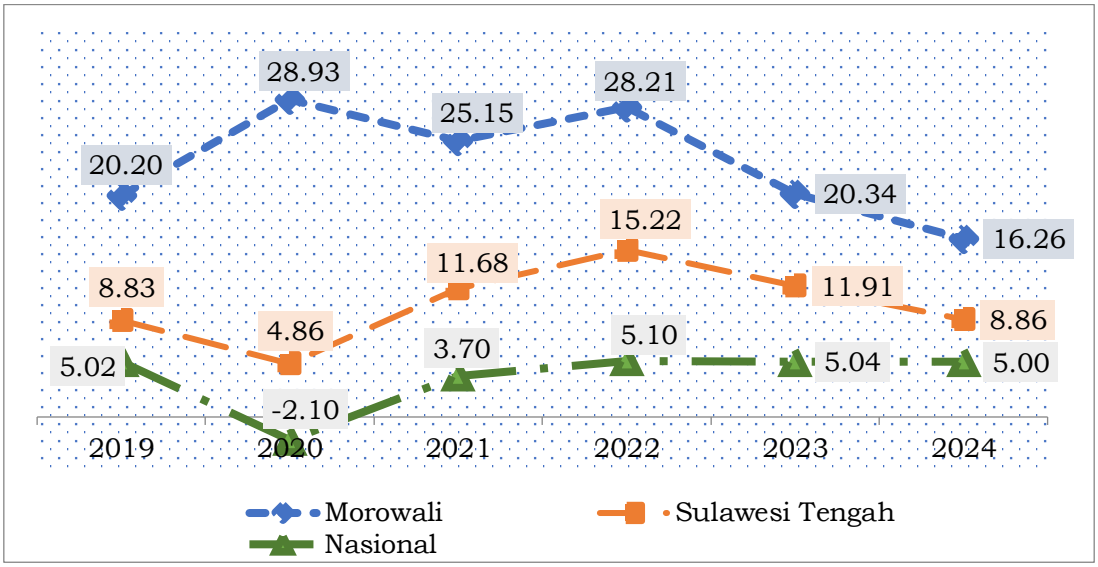
Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2019-2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 23.18 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbunan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar

10.23 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi Tahun 2018 sebesar 112.20 persen. Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20.20 persen. Selanjutnya Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 28.93 persen. Hal ini menunjukan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali mencapai 25.15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada dua digit diangka 28.21 persen dan Tahun 2023-2024 menurun menjadi sebesar 20.34 persen dan 16.26 persen.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu Industri Pengolahan (21.01 persen), Jasa Perusahaan (16.26 persen), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15.41 persen). Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan rendah yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1.89 persen), Konstruksi (0.98 persen), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0.94 persen). Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian.

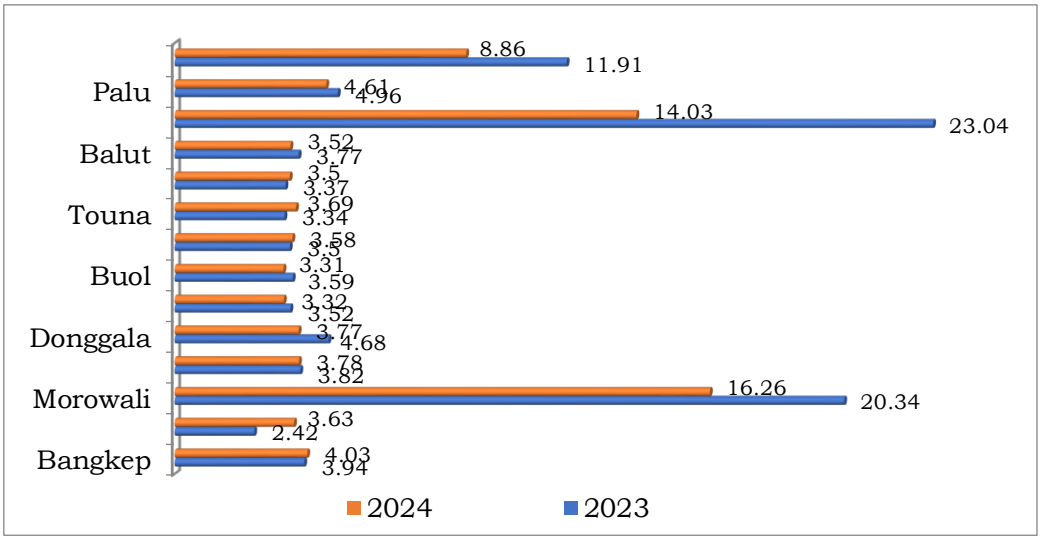
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, dalam periode Tahun 2019-2024 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sebesar 20.20 persen, tetap lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.83 persen dan rata-rata secara nasional sebesar 5.02 persen. Penyebab pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif, yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali menurun menjadi sebesar 16.26 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional sebesar 5.00 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.86 persen secara lengkap terdapat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.13
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Ditinjau menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua, setelah Kabupaten Morowali Utara dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 23.04 persen dan di urutan ketiga Kota Palu sebesar 4.96 persen. Sedangkan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Banggai sebesar 2.42 persen. Selain Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 11 kabupaten/kota rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023-2024, data terkait diuraikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.14
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 pada kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan kecuali Kabupaten Bangkep (4.03 persen), Kabupaten Banggai (3.63 persen), Kabupaten Parigi Moutong (3.58 persen), Kabupaten Tojo Una-Una (3.69 persen), Kabupaten Sigi (3.50 persen) mengalami peningkatan. Kabupaten Morowali berada pada urutan pertama sebesar 16.26 persen sementara Kabupaten Morowali Utara sebesar 14.04 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Buol sebesar 3.31 persen.

1) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor ini mencakup Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sub-kategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Sub-kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor ini di sebagian besar daerah Kabupaten/Kota menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam meningkatkan perekonomian daerah setempat. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten Morowali.

Tabel 2.23
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Rp)						
ADHB	2,063,374.20	2,023,944.10	2,147,499.60	2,346,565.90	2,444,303.60	2,702,860.00
ADHK 2010	1,437,272.30	1,397,500.00	1,442,504.70	1,468,633.80	1,464,379.90	1,494,150.00
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	4.55	3.26	2.17	1.60	1.55	1.55
ADHK 2010	4.21	3.18	2.62	2.08	1.72	1.51

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 mengalami penurunan setiap tahunnya baik berdasarkan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010. Kontribusi sektor pertanian Tahun 2019 sebesar 4.55 persen untuk PDRB ADHB dan 4.21 persen PDRB ADHK 2010. Terus menurun sampai Tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 1.55 persen untuk ADHB dan 1.51 persen untuk PDRB ADHK 2010. Penurunan ini mencerminkan semakin kecilnya peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi Kabupaten Morowali yang semakin didominasi oleh sektor-sektor non-pertanian, seperti sektor industri

pengolahan dan pertambangan. Meskipun nilai absolut PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan, pertumbuhannya tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan sektor lainnya, sehingga proporsinya terhadap total PDRB terus menurun. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dan kebijakan yang mendorong revitalisasi pertanian agar tetap relevan dalam pembangunan ekonomi daerah ke depan antara lain meningkatkan nilai tambah (*value added*), kualitas produksi dan penggunaan teknologi.

2) Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB merupakan ukuran besarnya peran subsektor tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar dalam membentuk total nilai tambah ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana komoditas palawija berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di daerah yang berbasis agraris atau memiliki potensi lahan kering dan musim tanam alternatif. Besarnya kontribusi subsektor palawija mencerminkan keberhasilan produktivitas, efisiensi distribusi, dan nilai komersial hasil pertanian, serta kebijakan yang mendukung petani dan agribisnis lokal. Jika kontribusinya meningkat, maka sektor ini dapat menjadi pendorong ketahanan pangan, penyerap tenaga kerja pedesaan, dan penggerak ekonomi lokal.

Tabel 2.24
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Pertanian/Palawija (Juta Rp)						
ADHB	122,510.75	133,166.15	133,176.10	133,186.05		
ADHK 2010	76,735.38	80,704.71	80,710.15	80,715.77		
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	0.27	0.21	0.13	0.09	0.00	0.00
ADHK 2010	0.23	0.18	0.15	0.11	0.00	0.00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Tren penurunan kontribusi sektor pertanian/palawija terhadap PDRB Kabupaten Morowali selama periode 2019-2024, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK 2010). Pada Tahun 2019, kontribusi sektor palawija sebesar 0.27 persen (ADHB) dan 0.23 persen (ADHK), namun terus mengalami penurunan hingga mencapai 0.01 persen pada Tahun 2023 dan 2024. Meskipun nilai absolut PDRB sektor

palawija relatif stabil hingga Tahun 2024, kontribusinya terhadap PDRB total semakin kecil akibat pesatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain, terutama sektor industri dan pertambangan. Semakin menurunnya kontribusi hingga Tahun 2023–2024 mengindikasikan semakin minimnya peran palawija dalam struktur ekonomi daerah, yang berpotensi menunjukkan adanya pengabaian terhadap subsektor ini atau terbatasnya inovasi dan investasi dalam pengembangannya. Hal ini menjadi sinyal perlunya strategi revitalisasi pertanian palawija agar tetap relevan dan berdaya saing dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Morowali.

3). Produksi Sektor Pertanian

Tanaman Ubi Kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau, menurun produksi selama periode Tahun 2019-2024. Penurunan produksi ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan kondisi Kabupaten Morowali sebagai daerah industri tambang yang semakin padat penduduk dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang masuk dari berbagai daerah. Sehingga kebutuhan ketersediaan pangan juga semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang dan kesempatan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Morowali disajikan pada tabel sebagai berikut ini

Tabel 2.25
Produksi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	44,672.00	42,068.22	45,434.34	39,507.32		
Jagung	5,283.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00		
Ubi Kayu	4,186	4,186.00	4,186.00	4,186.00		
Ubi Jalar	775	775	775	775		
Kacang Tanah	56	56	56	56		
Kacang Kedelai	45	127	127	127		

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Produksi tanaman padi sawah sebesar 44,672.00 ton pada Tahun 2019. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar -5.8 persen jika dibandingkan produksi tanaman padi pada Tahun 2020, yaitu sebesar 42,068.22 ton. Produksi tanaman padi mengalami peningkatan Tahun 2021 sebesar 45,434.34 ton dan menurun pada Tahun 2022 menjadi 39,507.32 ton. Untuk tanaman jagung jumlah produksi tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 5.283,00 ton kemudian menurun dari Tahun 2020-2022 menjadi sebesar 1.865,00 ton. Sementara kacang tanah dan kacang kedelai hanya sebesar 56 ton dan 775 ton atau konstan sepanjang Tahun 2019-2022.

4). Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Subkategori tanaman perkebunan terdiri dari perkebunan semusim dan perkebunan Tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lain sampai kegiatan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan.

Tabel 2.26
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Perkebunan/Tanaman Keras (Juta Rp)						
ADHB	640,004.72	652,913.58	652,913.35	652,916.52		
ADHK 2010	464,267.29	465,020.50	465,019.60	465,019.89		
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	1.41	1.05	0.66	0.44	0.00	0.00
ADHK 2010	1.36	1.06	0.85	0.66	0.00	0.00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Pada Tahun 2022 Nilai Sektor Perkebunan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp652,916.52 juta, kemudian untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp465,019.89 juta. Sementara itu, untuk kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Morowali sebesar 0.44 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0.66 persen juga menurun dari tahun sebelumnya.

5). Produksi Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan yang memiliki jumlah produksi besar yakni Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, dan kakao. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali selama periode 2019–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif antar komoditas. Kelapa sawit tetap menjadi komoditas dominan dengan volume produksi tertinggi, meskipun mengalami penurunan dari 80,148.90 ribu ton Tahun 2020 menjadi 47,992.95 ribu ton Tahun 2023-2024. Produksi kelapa sempat menurun hingga titik terendah Tahun 2022 (733.49 ribu ton), namun meningkat menjadi 1,479.95 ribu ton pada 2024. Produksi kopi mengalami penurunan cukup drastis dari 35,780 ribu ton Tahun 2019 menjadi hanya 19,555 ribu ton Tahun 2024, mengindikasikan penurunan minat atau tantangan produksi. Kakao juga menunjukkan tren penurunan dari Tahun 2020 sebesar 6,971.70 ribu ton menjadi hanya 820,82 ribu ton dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, produksi karet hanya tercatat pada Tahun 2021–

2022. Secara keseluruhan, meskipun beberapa komoditas menunjukkan pemulihan, tren penurunan pada komoditas utama seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi pasar, dan keberlanjutan usaha perkebunan.

Tabel 2.27
Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN (Ribu Ton)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa	1,239.35	1,163.23	739.35	733.49	1,025.95	1,479.95
Kelapa Sawit	78,362.45	80,148.90	74,092.52	76,096.25	47,992.95	47,992.95
Kopi	35,780.00	23,447.00	35,200.00	33,626.00	20,026.00	19,555.00
Kakao	1,554.21	6,971.70	2,400.00	1,727.75	820.82	820.82
Karet	0	0	2,400.00	2,400.00	0	0

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

6). Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Sub-kategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk adalah jasa yang menunjuang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Pada Tahun 2022, nilai produksi Sektor Kehutanan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp73,585.14 juta, dan berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp55,568.66 juta. Kontribusi sektor terkait terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Morowali tahun 2022 sebesar 0.05 persen menurun dari Tahun 2019 sebesar 0.15 persen. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0,08 persen Tahun 2022 juga menurun dari Tahun sebelumnya yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Kehutanan (Juta Rp)						
ADHB	69,931.00	73,573.22	73,579.18	73,585.14		
ADHK 2010	54,181.95	55,563.29	55,565.91	55,568.66		
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	0.15	0.12	0.07	0.05	0.00	0.00
ADHK 2010	0.16	0.13	0.10	0.08	0.00	0.00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

7). Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 (empat) subkategori, antara lain: sub-kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, sub-kategori Pertambangan Batubara dan Lignit, subkategori Pertambangan Bijih Logam, dan sub-kategori Pertambangan dan Penggalian lainnya.

Tabel 2.29
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Pertambangan (Juta Rp)						
ADHB	8,242,666.10	11,364,639.80	18,404,883.50	25,313,779.30	28,114,258.80	29,202,530.00
ADHK 2010	7,676,333.50	10,315,559.60	12,701,490.40	14,888,973.60	16,985,391.50	17,961,630.00
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	18.18	18.29	18.61	17.25	17.79	16.80
ADHK 2010	22.51	23.50	23.09	21.08	19.99	18.18

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Secara umum, nilai PDRB sektor pertambangan terus meningkat dari Rp8,242,666.10 juta Tahun 2019 menjadi Rp29,202,530.00 juta Tahun 2024 (ADHB), namun kontribusinya terhadap total PDRB justru menunjukkan tren penurunan dari 18.18 persen Tahun 2019 menjadi 16.80 persen Tahun 2024. Sementara ADHK 2010 juga mengalami kontribusi menurun dari 22.51 persen menjadi 18.18 persen dalam periode yang sama. Penurunan kontribusi ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai sektor pertambangan tumbuh, pertumbuhannya tidak secepat sektor-sektor lain dalam struktur ekonomi Kabupaten Morowali. Hal ini mencerminkan adanya diversifikasi ekonomi daerah, namun juga perlu diwaspadai agar sektor unggulan ini tetap dapat memberikan manfaat optimal, baik dari sisi ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan dan sosial.

8.) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Sektor pariwisata Kabupaten Morowali merupakan potensi ekonomi yang strategis berbasis kekayaan alam, budaya lokal, dan keunikan wilayah pesisir serta kepulauan. Wilayah ini memiliki daya tarik wisata yang beragam, mulai dari pantai berpasir putih, terumbu karang, hingga kawasan konservasi laut dan hutan tropis yang masih alami. Selain itu, budaya lokal masyarakat Kabupaten Morowali yang khas dan beragam

dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan wisata berbasis kearifan lokal. Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan. Destinasi wisata yang indah dan terkenal adalah Pulau Sombori. Pada Tahun 2022, nilai Sektor Pariwisata berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp89,469.19 juta, dan untuk nilai PDRB ADHK 2010 sebesar Rp51,263.20 juta. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB sebesar 0.06 persen dan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0.07 persen yang diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Periwisata (Juta Rp)						
ADHB	80,902.30	78,771.80	79,752.75	89,469.19		
ADHK 2010	55,404.10	53,704.00	46,574.85	51,263.20		
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	0.18	0.13	0.08	0.06	0.00	0.00
ADHK 2010	0.16	0.12	0.08	0.07	0.00	0.00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

9.) Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Subkategori sektor perikanan dan kelautan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun laun. Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Morowali sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pada Tahun 2022, nilai subsektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp1,026,025.38 juta, dan berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp570,898.91 juta. Kontribusi sektor ini Tahun 2022 terhadap nilai PDRB ADHB sebesar 0.70 persen menurun dari tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi berdasarkan PDRB ADHK 2010 sebesar 0.81 persen juga lebih rendah dari tahun sebelumnya yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,29440	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan (Juta Rp)						
ADHB	953,504.90	1,026,00266	1,026,015.05	1,026,025.38		
ADHK 2010	570,226.97	570,881.76	570,891.88	570,898.91		
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	2.10	1.65	1.04	0.70	0.00	0.00
ADHK 2010	1.67	1.30	1.04	0.81	0.00	0.00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

10.) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang mencakup distribusi dan pertukaran barang dan jasa antar pelaku usaha, konsumen, serta antarwilayah. Sektor ini menjadi penghubung utama antara produsen dan konsumen, serta berperan penting dalam mendorong perputaran ekonomi daerah. Perdagangan yang berkembang mencerminkan dinamika permintaan, daya beli masyarakat, serta efisiensi logistik dan infrastruktur. Sebagai salah satu sektor strategis, perdagangan turut mendukung pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kategori ini terdiri atas subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.32
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rp)						
ADHB	960,770.50	949,451.70	1,065,441.30	1,832,172.10	1,996,082.90	2,419,030.00
ADHK 2010	620,626.90	589,746.00	642,836.10	1,042,806.90	1,096,933.80	1,231,820.00
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	2.12	1.53	1.08	1.25	1.26	1.39
ADHK 2010	1.82	1.34	1.17	1.48	1.29	1.25

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali selama periode 2019–2024 berdasarkan ADHB dan ADHK 2010 mengalami fluktuasi. Meskipun nilai absolut PDRB sektor perdagangan mengalami peningkatan Tahun 2020-2023, kontribusi terhadap PDRB total justru mengalami penurunan. Tahun 2019, kontribusi sektor perdagangan sebesar 2.12 persen (ADHB) dan 1.82 persen (ADHK), namun terus menurun hingga 1.39 persen (ADHB) dan 1.25 persen (ADHK) Tahun 2024. Penurunan kontribusi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan tidak secepat sektor-sektor lainnya seperti pertambangan atau industri pengolahan yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Morowali. Meskipun peran perdagangan tetap penting dalam mendukung perputaran barang dan jasa, kondisi ini mencerminkan perlunya strategi penguatan sektor perdagangan agar tetap kompetitif dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

11.) Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori sektor industri terdiri dari subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas; Industri Makanan dan Minuman; Industri Pengolahan Tembakau; Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; Industri Barang Galian bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perleng-kapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan. Sektor Industri sebagai sektor dengan nilai dan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Morowali. Aktivitas industri logam dasar yang besar di PT. IMIP menjadi aktivitas sentra dari sektor ini di Kabupaten Morowali.

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Industri (Juta Rp)						
ADHB	29,415,556.30	43,380,744.30	70,456,853.90	107,508,915.00	114,926,064.10	127,964,170.00

ADHK 2010	21,304,229.10	28,813,486.60	35,981,449.60	47,573,453.00	59,604,084.10	72,129,280.00
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	64.86	69.80	71.23	73.25	72.72	73.60
ADHK 2010	62.47	65.63	65.42	67.36	70.13	73.00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Sektor industri merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Morowali selama periode 2019–2024, dengan kontribusi yang terus meningkat secara konsisten. Berdasarkan ADHB, kontribusi sektor industri meningkat dari 64.86 persen Tahun 2019 menjadi 73.60 persen Tahun 2024, sementara berdasarkan ADHK 2010, kontribusinya meningkat dari 62.47 persen menjadi 73.00 persen dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri, khususnya industri pengolahan berbasis pertambangan seperti nikel, menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan nilai PDRB sektor industri baik secara nominal maupun riil mencerminkan ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi. Meski berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dominasi sektor ini juga perlu diimbangi dengan penguatan sektor lainnya agar tercipta struktur ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

12.) Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri

Keberadaan industri kecil (*small industry*) atau kerajinan rumah tangga (*home industry*) ini menempati peran yang penting dan strategis dalam pembangunan, karena dapat memberikan corak dan warna terhadap usaha-usaha pembangunan pertanian, kepariwisataan, dan tingkat urbanisasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan kontribusi industri rumah tangga terhadap nilai PDRB Sektor industri Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap Sektor PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	29,415,556.30	43,380,744.30	70,456,853.90	107,508,915.00	114,926,064.10	127,964,170.00
ADHK 2010	21,304,229.10	28,813,486.60	35,981,449.60	47,573,453.00	59,604,084.10	72,129,280.00
Nilai PDRB Sektor Industri Rumah Tangga (Juta Rp)						
ADHB	1,573,672.86	1,730,361.43	1,887,050.00	2,043,738.56		
ADHK 2010	874,055.87	917,660.15	961,264.43	1,004,868.70		
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	5.35	3.99	2.68	1.90	0.00	0.00

ADHK 2010	4.10	3.18	2.67	2.11	0.00	0.00

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Merujuk data pada tabel di atas, Tahun 2022 nilai PDRB ADHB sektor Industri Rumah Tangga sebesar Rp2,043,738.56 juta, kemudian nilai PDRB ADHK 2010 Sektor Industri Rumah Tangga sebesar Rp1,004,868.70 juta. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB ADHB sebesar 1.90 persen menurun dari tahun sebelumnya dan untuk kontribusi sektor industri PDRB ADHK 2010 sebesar 2.11 persen.

13.) Pertumbuhan Investasi terhadap PDRB

Pertumbuhan produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan (pertumbuhan) faktor-faktor produksinya (modal, tenaga kerja, tanah, dan teknologi). Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dihubungkan dengan perkembangan faktor-faktor produksi. Salah satu metode yang dikembangkan untuk menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi (output) adalah Incremental *Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR adalah suatu konsep yang meng-hubungkan besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto (inves-tasi) dengan pertambahan PDB atau PDRB. Banyak studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara erat kaitan dengan tingkat produktivitas penggunaan modal, sehingga penggunaan ICOR untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan faktor produksi modal dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu, ICOR dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. Semakin rendah ICOR berarti perekonomian tersebut semakin efisien dalam menggunakan barang modal.

ICOR dapat pula menunjukkan kecenderungan penggunaan metode produksi (padat karya atau padat modal) dalam suatu perekonomian. Penggunaan metode produksi padat modal akan cenderung menyebabkan nilai ICOR menjadi tinggi. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi ICOR adalah periode tenggang waktu (*time lag*) antara saat melakukan investasi dengan saat berproduksi. Tenggang waktu yang terlalu lama antara saat investasi dengan saat berproduksi membuat nilai ICOR menjadi tinggi. Data mengenai nilai investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ICOR Kabupaten Morowali selama periode 2019-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Investasi, Pertumbuhan PDRB dan ICOR Kabupaten Morowali
Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp)	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Perubahan- (Juta Rp)	5,744,347.70	9,799,545.10	11,098,950.20	15,620,225.00	14,365,774.80	13,821,525.60
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	12,108,672.80	10,138,620.20	26,837,374.10	37,313,890.00	37,876,610.00	39,511,560.00
ICOR	2.11	1.03	2.42	2.39	2.64	2.86

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Pengaruh investasi terhadap perubahan PDRB yang relatif kecil tersebut juga dapat diamati melalui nilai ICOR yang dapat dikatakan sangat baik Tahun 2019 yakni sebesar 2.11 persen dan meningkat sampai Tahun 2024 sebesar 2.86 persen. Kondisi menunjukan dibutuhkan nilai investasi yang lebih besar untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). ICOR Kabupaten Morowali selama periode Tahun 2019-2024 yang dapat dikatakan cukup tinggi tersebut disebabkan, kegiatan penanaman modal di Kabupaten Morowali yang dominan pada sektor pertambangan dengan kebutuhan modal relatif besar bersifat jangka panjang, belum dapat berproduksi secara optimal pada periode awal kegiatan investasi. Namun demikian, di masa depan ketika kegiatan penanaman modal yang dilakukan telah mampu menghasilkan nilai produksi secara optimal, diyakini akan menghasilkan nilai ICOR yang semakin menurun.

B. Penduduk Miskin

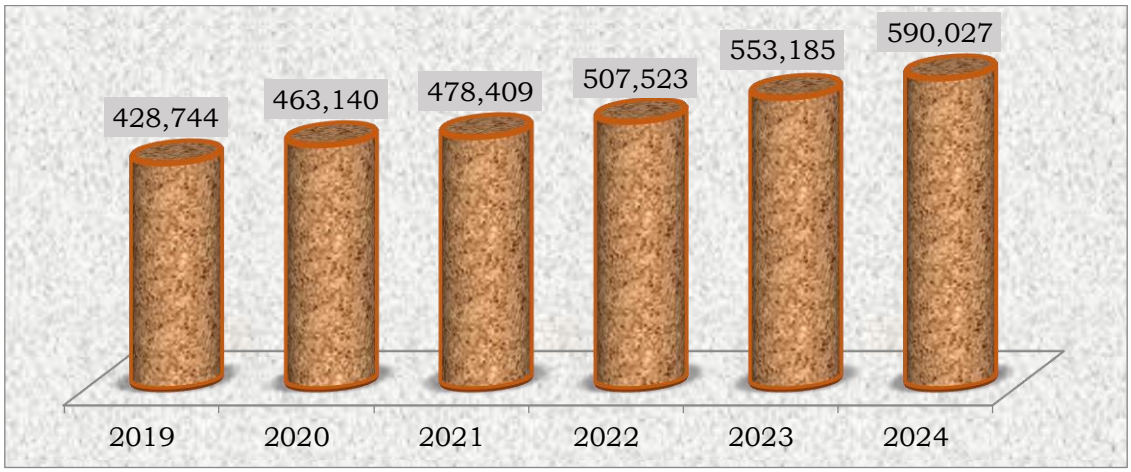
Tingkat kemiskinan adalah rasio jumlah orang miskin terhadap jumlah penduduk suatu wilayah (negara atau daerah) pada Tahun tertentu. Seseorang dikatakan miskin bila pendapatan berada di bawah ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin adalah setara dengan harga 2.100 kalori bahan makanan ditambah 10 (sepuluh) persen dari padanya untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin tergantung kepada besarnya pendapatan dan pendapatan ambang batas miskin. Pendapatan ambang batas miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat harga bahan makanan utama masyarakat dan tingkat harga barang konsumsi lain. Gambaran kondisi kemiskinan Kabupaten Morowali dijelaskan pada beberapa aspek yaitu: garis kemiskinan, penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), yang dapat dijelaskan pada beberapa bagian berikut ini.

1) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin

dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacangkacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan Kabupaten Morowali periode 2019-2024 mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Rata-rata peningkatan garis kemiskinan Kabupaten Morowali dalam rentan waktu tersebut sebesar 6.61 persen. Pada Tahun 2019 GK sebesar Rp428.744 perkapita/bulan meningkat menjadi sebesar Rp590,027 perkapita/bulan. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Morowali kurun Tahun 2019-2024 secara lengkap terdapat pada gambar berikut ini.

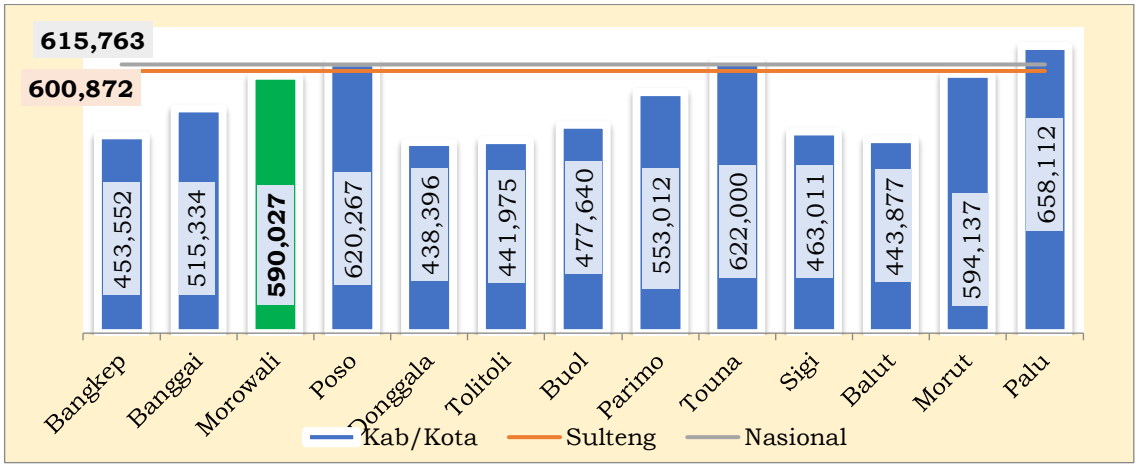


Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.15
Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan signifikan dari Tahun 2019 hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup, terutama akibat inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan standar konsumsi minimum. Faktor lain yang berkontribusi

adalah meningkatnya upah tenaga kerja seiring dengan ekspansi industri pertambangan di Kabupaten Morowali, yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 pada Tahun 2020-2021 mempercepat perubahan struktur ekonomi dan meningkatkan ketimpangan pendapatan, sehingga batas minimum garis kemiskinan terus mengalami penyesuaian. Namun, jika melihat perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali berada pada urutan keempat sebagaimana digambarkan pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

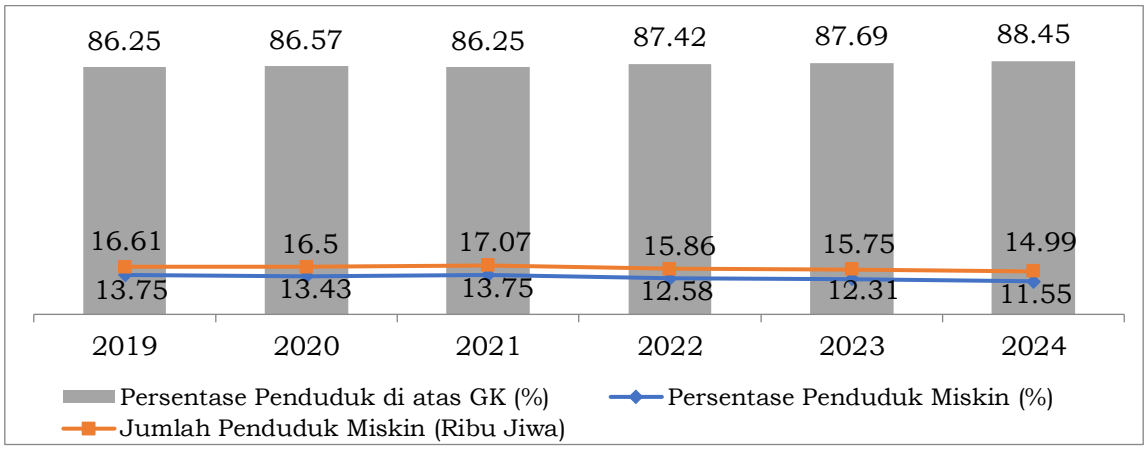
Gambar 2.16
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan perbandingan garis kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bahwa Kota Palu memiliki garis kemiskinan tertinggi sebesar Rp658,112 per kapita per bulan, sementara Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso juga memiliki nilai yang cukup tinggi masing-masing sebesar Rp622,000 dan Rp620,267 per kapita per bulan. Kabupaten Morowali mencatat garis kemiskinan sebesar Rp590,027 per kapita per bulan, berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp600,872 per kapita per bulan) dan nasional sebesar Rp615,763 per kapita per bulan). Kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp453,552 per kapita per bulan dan Kabupaten Tolitoli sebesar Rp441,975 per kapita per bulan, mencerminkan perbedaan tingkat biaya hidup dan daya beli masyarakat antarwilayah. Peningkatan garis kemiskinan ini dapat dikaitkan dengan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri pada masing-masing daerah.

2) Persentase Penduduk Miskin (P0)

Penduduk miskin (*poverty people*) merupakan masalah utama yang terjadi di setiap daerah. Sementara itu, pembangunan dimaksudkan sebagai suatu proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata, sehingga masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan. Wujud nyata dari kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs*), yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat (*consumption society*). Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, melalui peningkatan kinerja perekonomian daerah, maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemiskinan (*poverty*) adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

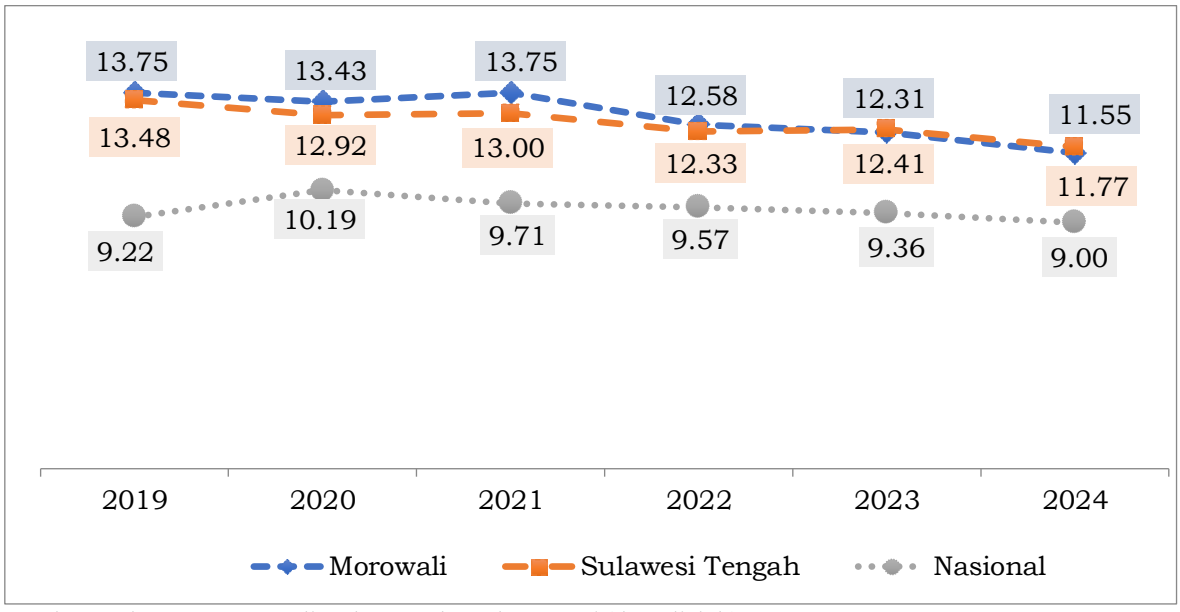
Gambar 2.17
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali selama periode 2019 hingga 2024. Persentase penduduk miskin turun dari 13.75 persen Tahun 2019 menjadi 11.55 persen Tahun 2024, demikian pula jumlah penduduk miskin menurun dari

16.61 ribu jiwa menjadi 14.99 ribu jiwa. Seiring dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, maka persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga meningkat dari 86.25 persen Tahun 2019 menjadi 88.45 persen Tahun 2024, menandakan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Morowali bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional masih lebih tinggi di atas rata-rata, menunjukkan adanya tantangan struktural, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, atau ketimpangan hasil pembangunan antarwilayah. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang lebih rendah mencerminkan capaian pembangunan yang lebih baik di wilayah tersebut.

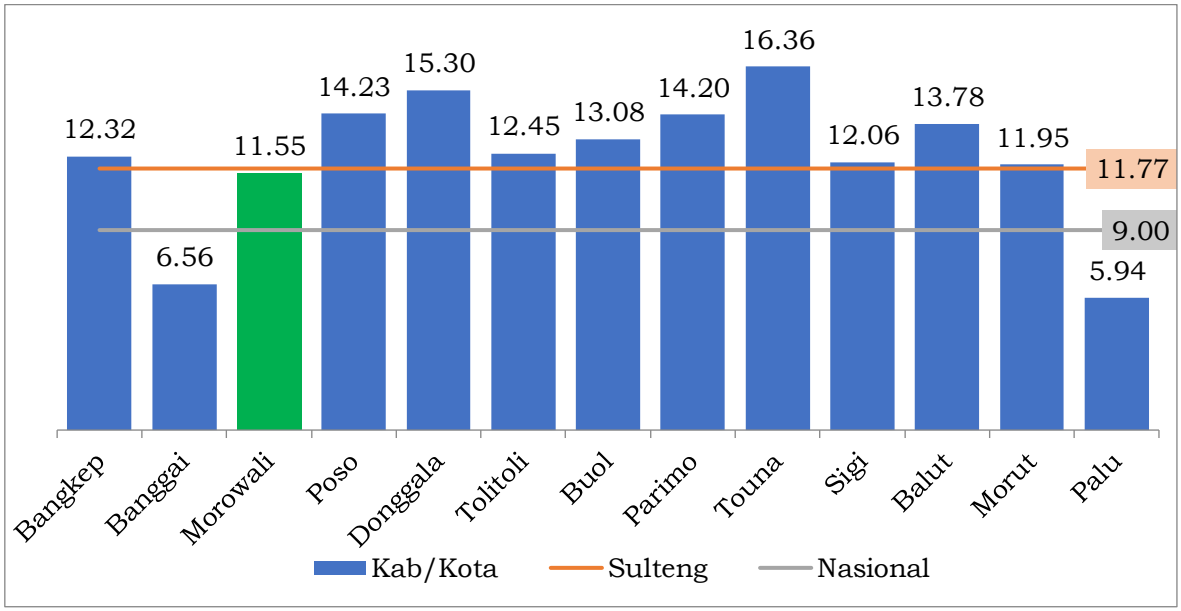


Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.18
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Morowali selama periode 2019–2024 cenderung menurun, dari 13.75 persen Tahun 2019 menjadi 11.55 persen Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan secara nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali masih berada di atas rata-rata nasional, yang terus menurun dari 9.22 persen menjadi 9.00 persen,

menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Morowali menunjukkan kemajuan dalam pengurangan kemiskinan, wilayah ini masih menghadapi tantangan struktural yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional, namun berada dalam tren positif. Berkaitan dengan penurunan penduduk miskin selama Tahun 2019-2024 yang relevan dengan penurunan di Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional, apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, penduduk miskin Kabupaten Banggai dan Kota Palu lebih rendah dibandingkan secara nasional, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

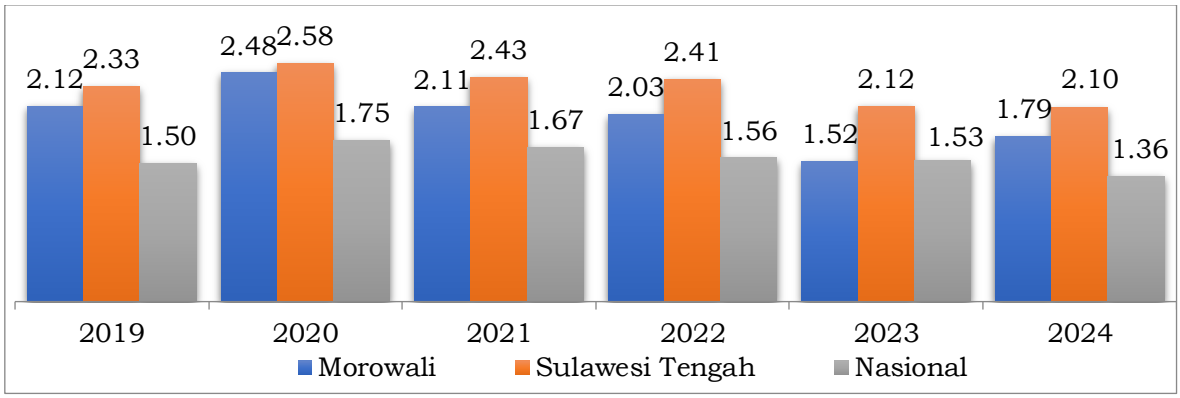
Gambar 2.19
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Perkembangan penduduk miskin antar Kabupaten Morowali dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Morowali di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah namun di atas rata-rata nasional dan berada pada urutan ketiga. Sedangkan Kabupaten Banggai dan Kota Palu memiliki persentase penduduk miskin terendah dan berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata

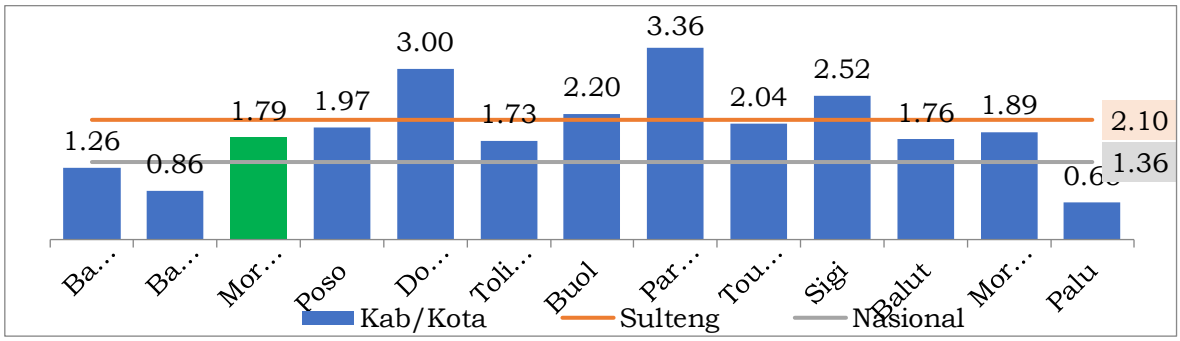
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berikut diuraikan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali tahun 2019-2024.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.20
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Nilai Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Morowali cenderung meningkat dan berfluktuatif. Tahun 2019 sebesar 2.12 menurun menjadi 1.79 Tahun 2024. P1 Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk miskin di Kabupaten Morowali Tahun 2024 hanya kekurangan sekitar 1.79 persen dari garis kemiskinan untuk keluar dari status miskin. Meski masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, angka ini menandakan perbaikan kondisi ekonomi penduduk miskin di Kabupaten Morowali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan keberhasilan upaya pengurangan ketimpangan kedalaman kemiskinan. Namun, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali menunjukkan indeks kedalamam kemiskinan yang lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya, sebagaiman diuraikan pada gambar berikut.



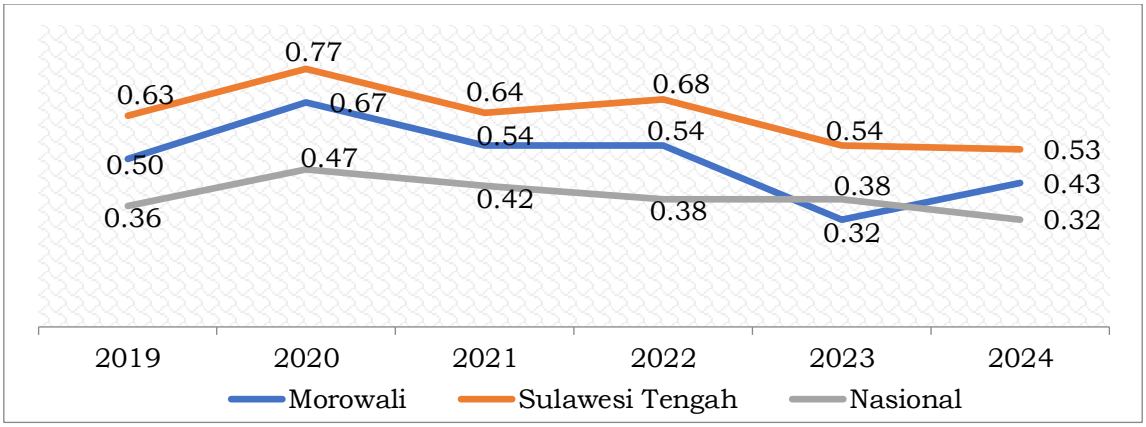
Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali berada pada urutan keenam berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, namun lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kabupaten dengan P1 terendah adalah Kota Palu dan Kabupaten Banggai, sedangkan P1 tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala.

4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

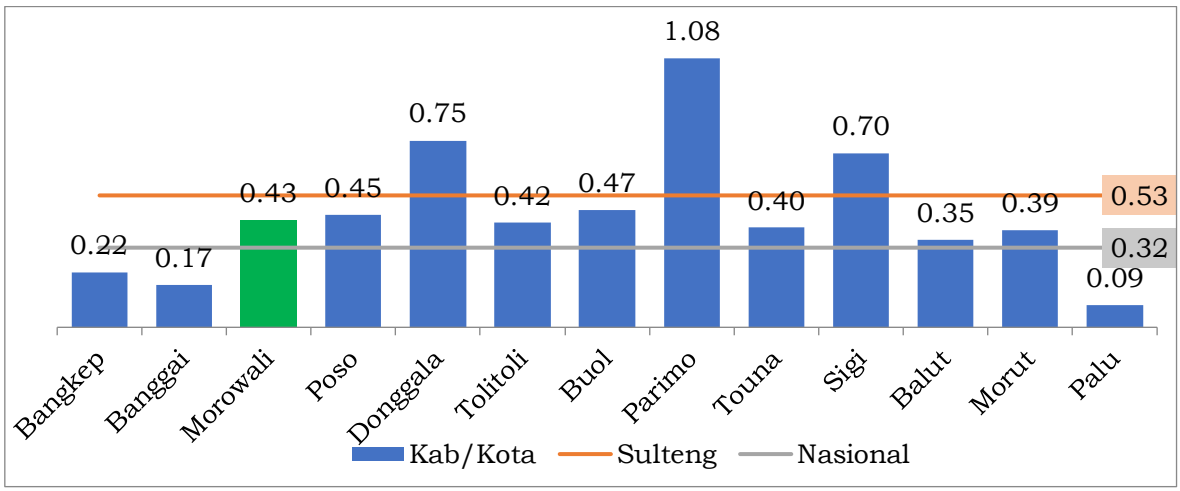
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Data indek keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali (P2) ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.22
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Morowali berfluktuatif dengan kecendrungan menurun. Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2019 sebesar 0.50 menurun menjadi sebesar 0.43 Tahun 2024. Kondisi P2 Kabupaten Morowali, tergolong tinggi berada di atas rata-rata nasional walaupun berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah setempat. Upaya melalui berbagai program dan bantuan sosial yang dikucurkan harus tepat sasaran dan sesuai dengan target. Capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali ternyata belum sepenuhnya mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan cenderung melebar jarak pendapatan kemiskinan di antara penduduk miskin. Selanjutnya, data P2 Kabupaten Morowali dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada gambar berikut ini.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.23
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Nilai rata-rata P2 Kabupaten Morowali sebesar 0.43 berada pada urutan kedelapan. Beberapa daerah masih memiliki P2 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. sedangkan P2 terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, dan Kota Palu.

C. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah yang diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi. Besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Manfaat menghitung PDRB Perkapita adalah 1) Mengukur Kesejahteraan Ekonomi, semakin tinggi PDRB perkapita, maka semakin besar rata-rata pendapatan yang dapat dinikmati penduduk. 2) Perbandingan Ekonomi Antar Wilayah. Artinya, PDRB perkapita gigunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antara daerah, baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. 3) Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan, yaitu Pemerintah menggunakan PDRB per kapita untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dan merancang strategi pembangunan. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 diuraikan pada tabel berikut.

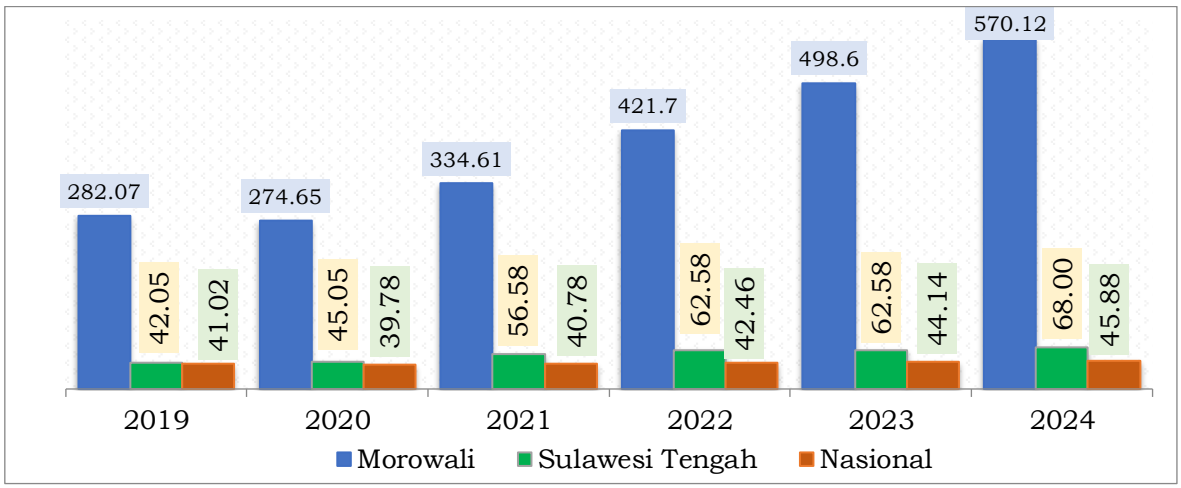
Tabel 2.36
PDRB Perkapita Kabupaten Morowali Tahun 2018-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)						
ADHB	45,349.58	62,148.34	98,916.81	146,599.32	158,048.73	173,864.99
ADHK 2010	34,102.75	43,902.29	55,001.24	70,515.62	84,989.24	98,808.77
Nilai PDRB Per kapita (juta rupiah)						
ADHB	375.10	388.80	601.78	876.42	927.23	1,003.18
ADHK 2010	282.07	274.65	334.61	421.70	498.60	570.12
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (persen)	18.66	(2.63)	21.83	26.03	18.24	14.34
Jumlah Penduduk (orang)	121,196	161,727	167,910	176,244	170,450	198,968

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah).

Selama periode 2019-2024 PDRB perkapita Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan terus meningkat baik berdasarkan ADHB maupun ADHK 2010. Tahun 2019 PDRB per kapita ADHB sebesar Rp375.10 juta, mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1,003.18 juta Tahun 2024. Sementara berdasarkan ADHK 2010 Tahun 2019 sebesar Rp282.07 juta dan meningkat menjadi sebesar Rp570.12 juta. Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Morowali tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dalam kurun waktu tersebut. Secara umum diketahui, pertumbuhan PDRB Morowali didominasi oleh pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan yang *multiplier effect*nya terhadap perekonomian lokal masih sangat kecil. Latar belakangnya adalah karena pada kedua sektor tersebut keterlibatan faktor produksi lokal (tenaga kerja, capital, dan skill) masih sangat kecil. Kedua sektor tersebut, terutama pada industri feronikel, merupakan *enclave* dalam ekonomi daerah Kabupaten Morowali.

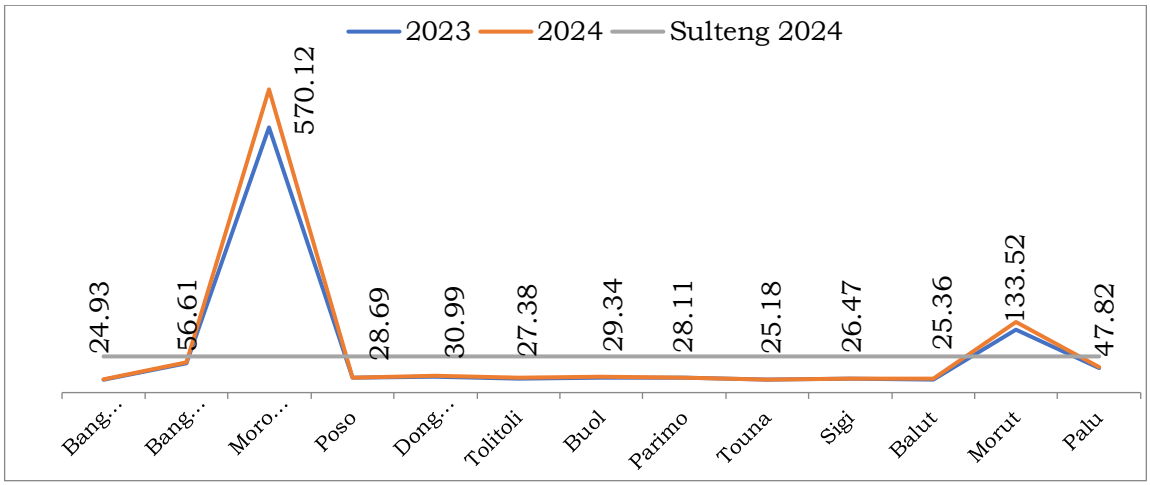
PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sangat jauh di atas capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana pada Tahun 2019 PDRB Perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp282.07 juta, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp42.05 juta, dan Nasional sebesar Rp41.02 juta. Pada Tahun 2024 PDRB perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp570.12 juta, sangat jauh dari Nasional mencapai sebesar Rp45.88 juta dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp68.00 juta. Data Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional diuraikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.24
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Merujuk pada data gambar di atas, bahwa PDRB perkapita Kabupaten Morowali bukan saja melampaui PDRBn perkapita Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan berlipat ganda sebanyak 8.38 kali lipat, atau sebanyak 12.43 kali lipat dari PDB perkapita Indonesia Tahun 2024. Dengan PDRB perkapita yang terus meningkat, diharapkan berdampak positif pula terhadap bidang-bidang yang lain (misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) sehingga tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Morowali akan semakin meningkat. Perbandingan PDRB Perkapita antara Kabupaten Morowali dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan Kabupaten Morowali adalah tertinggi dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang disajikan secara lengkap pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

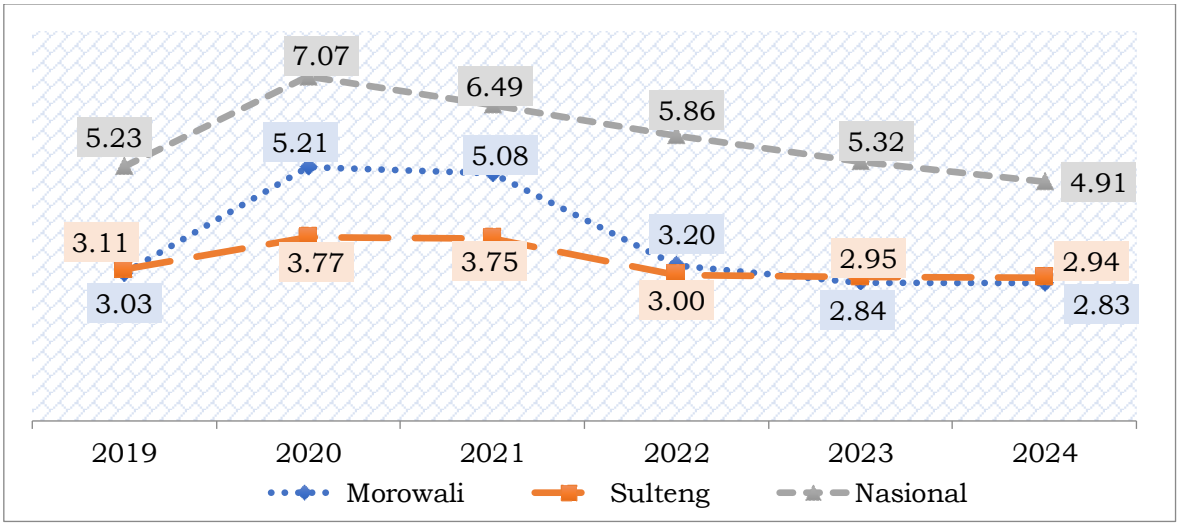
Gambar 2.25
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Berdasarkan data pada gambar di atas, sampai dengan Tahun 2024 capaian PDRB perkapita tertinggi adalah Kabupaten Morowali sebesar Rp570.12 juta, dan Kabupaten Morowali Utara berada pada posisi kedua sebesar Rp133.52 juta, serta tertinggi ketiga Kabupaten Banggai sebesar Rp56.61 juta. Sedangkan untuk kabupaten dengan PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Banggai Laut (Rp25.36 juta) dan Kabupaten Tojo Una-Una (Rp25.18 juta) serta Kabupaten Banggai Kepulauan (Rp24.93 juta).

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penganggur (*unemployment*) adalah penduduk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan, karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela), maupun yang tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Sebagai daerah yang kaya Sumber daya Alam (*natural resources*) Kabupaten Morowali 'negeri tambang' di Indonesia. Potensi pertambangan ini seharusnya dapat menjadi sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penciptaan lapangan kerja atau kesempa-tan kerja. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari data persentase tangkat pengangguran terbuka (TPT) yang justru menurun dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir.



Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Gambar 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Secara umum, TPT Kabupaten Morowali menujukkan penurunan sampai Tahun 2024 sebesar 2.83 persen. TPT tertinggi Tahun 2020-2021 sebesar 5 persen. Pada Tahun 2020, bencana non-alam Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut berdampak sangat buruk pada kondisi perekonomian nasional, salah satunya dengan meningkatnya jumlah penganggur termasuk di Kabupaten Morowali. Namun secara umum, TPT Kabupaten Morowali Tahun 2024 berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Morowali mulai membaik dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal, meskipun masih terdapat tantangan fluktuatif pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, Kabupaten Morowali berpotensi menjadi daerah dengan ketenagakerjaan yang lebih stabil dan inklusif dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, kondisi TPT Kabupaten Morowali dibandingkan dengan kondisi capaian Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam menangani masalah pengangguran. Sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Tingkat Pengangguran Terbuka Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bangkep	2.00	2.47	2.95	1.48	1.56	1.55
Banggai	2.18	2.42	3.57	3.09	3.12	3.11
Morowali	**2.97**	**5.21**	**5.08**	**3.20**	**2.84**	**2.84**
Poso	2.18	2.39	2.47	1.68	1.67	1.77
Donggala	2.76	2.58	3.50	2.84	2.79	2.79
Tolitoli	3.10	3.74	3.13	3.31	3.12	3.11
Buol	3.01	4.36	3.64	3.07	3.14	3.13
Parimo	2.36	2.70	2.97	1.71	2.11	2.10
Touna	2.92	2.84	3.44	3.05	2.83	2.47
Sigi	2.54	3.36	2.38	3.60	2.60	2.55
Balut	3.04	3.09	3.35	3.60	3.64	3.60
Morut	3.05	5.16	2.98	2.25	2.23	2.38
Kota Palu	6.32	8.38	7.61	6.15	5.65	5.63
Sulteng	3.11	3.77	3.75	3.00	2.95	2.94
Nasional	5.23	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

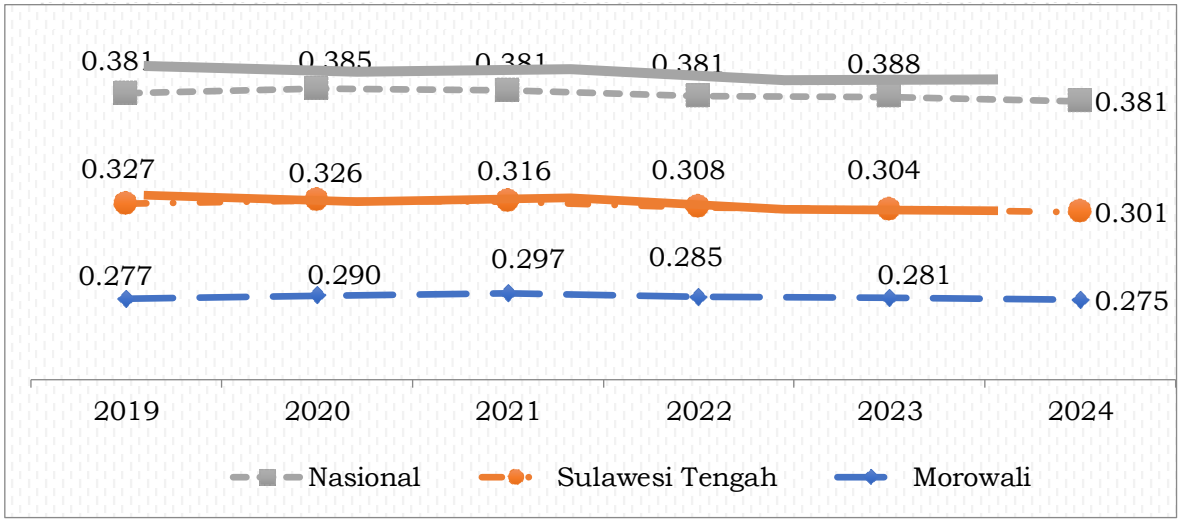
Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan data TPT Kabupaten Morowali menurun cukup signifikan di Tahun 2024 menjadi sebesar 2.84 persen. TPT tertinggi yakni Kota Palu mencapai 5.65 persen, kemudian Kabupaten Banggai Laut mencapai 3.60 persen. Sedangkan, TPT terendah adalah Kabupaten Poso

sebesar 1.77 persen dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 1.55 persen. Namun, secara keseluruhan TPT kabupaten/kota Provinsi Suawesi Tengah berada di bawah rata-rata nasional kecuali Kota Palu.

E. Indeks Gini

Koefisien Gini atau indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk menghitung kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika indeks Gini memiliki angka 1. Hal ini menunjukkan semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Dimana, indeks Gini dengan angka nol atau satu adalah hampir tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian hingga saat ini. Sehubungan dengan besarnya angka indeks Gini yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika indeks Gini berada pada: 1). 0 sampai dengan 0.3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2). di atas 0.3 sampai dengan 0.4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3). lebih besar dari 0.4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Data perkembangan indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada gambar berikut.



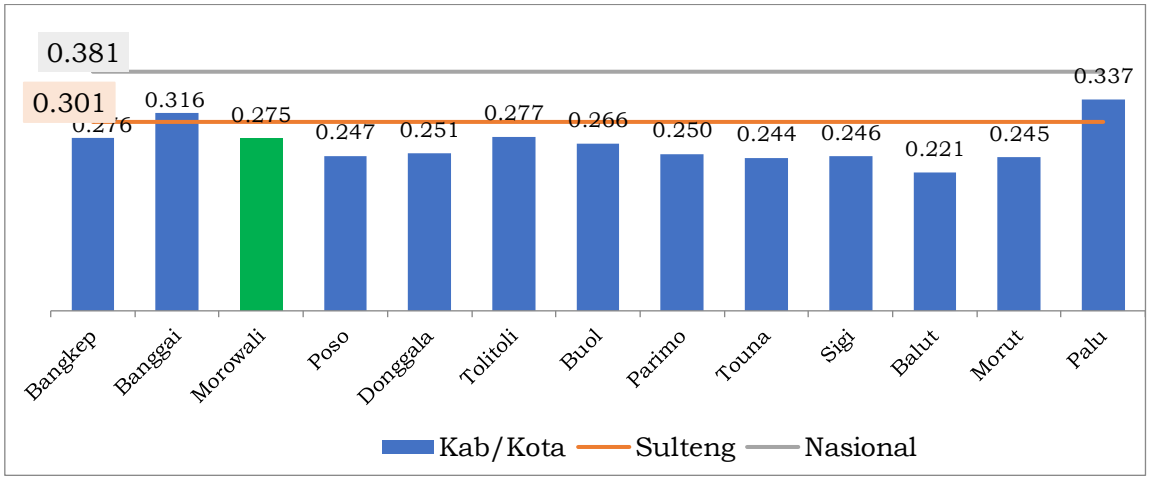
Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.27
Indeks Gini Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Selama kurun waktu 2019-2024 indeks Gini Kabupaten Morowali memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada Tahun 2019 indeks Gini Kabupaten Morowali sebesar 0.277 mengalami

penurunan Tahun 2024 menjadi sebesar 0.275. Pada Tahun 2024 kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali lebih baik dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0.301 dan rata-rata Nasional sebesar 0.381. Dengan besaran angka-angka indeks Gini Kabupaten Morowali tersebut masuk dalam range 0-0,30 yakni 0.284, maka distribusi pendapatan dalam kategori ketimpangan rendah.

Ditinjau menurut Kabupatan/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, indeks Gini Kabupaten Morowali tertinggi kelima. Sedangkan, terendah pertama adalah Kabupaten Banggai Laut dan terendah kedua Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan indeks Gini tertinggi dalah Kota Palu dan Kabupaten Banggai. Data mengenai perbandingan indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.28
Gini Rasio Kabupaten Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Berdasarkan gini rasio di atas bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, Kota Palu dan Kabupaten Banggai berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yang artinya bahwa kedua wilayah tersebut berada pada ketimpangan pendapatan moderat. Secara Nasional, semua kabupaten/kota berada di bawah rata-rata nasional termasuk gini rasio Provinsi Sulawesi Tengah.

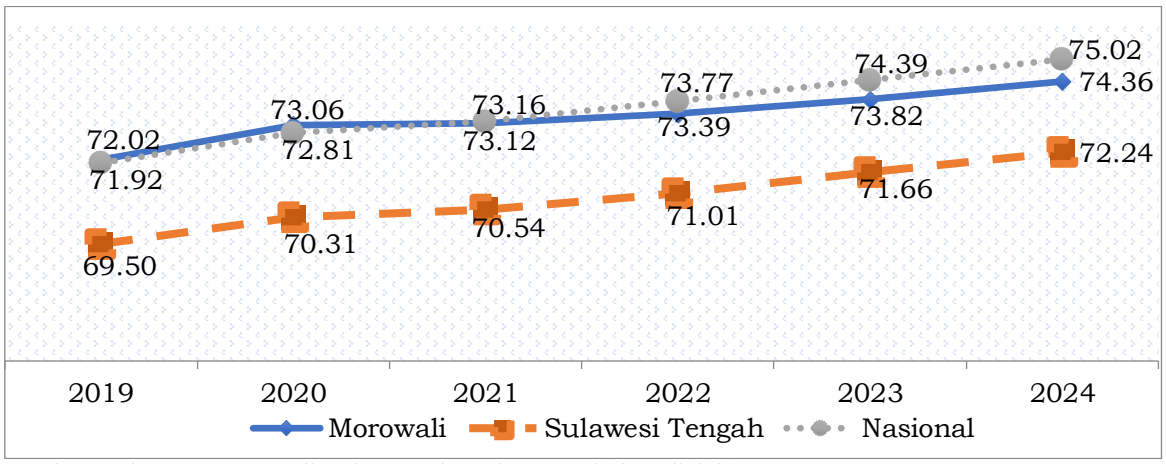
F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh antara lain pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP

Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi Tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru Tahun 2014 dan melakukan backcasting Tahun 2010. Selanjutnya, IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat menggambarkan Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Gambaran perkembangan IPM Kabupaten Morowali diuraikan pada grafik berikut.



Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.29
IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

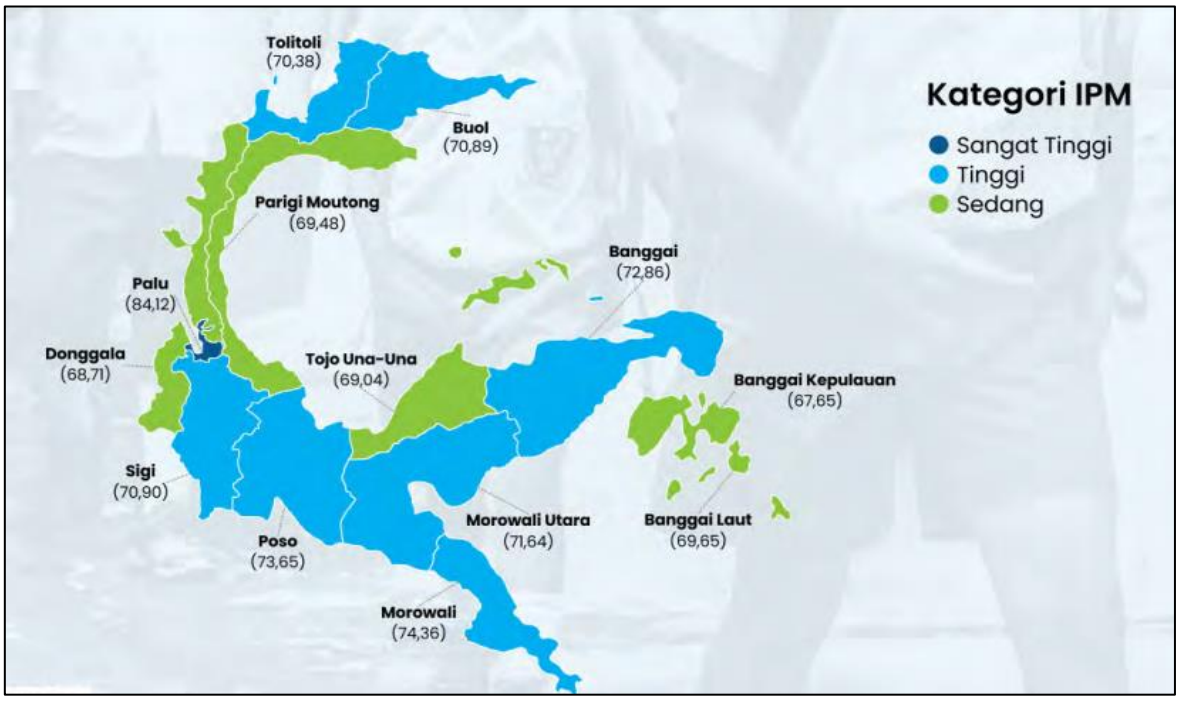
Perkembangan IPM Kabupaten Morowali selama Tahun 2019-2024 mengalami peningkatan yakni Tahun 2019 sebesar 72.02 meningkat menjadi sebesar 74.36 Tahun 2024. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2024 masuk kategori tinggi menunjukkan perbaikan di aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 75.02, namun lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 72.24. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Morowali sudah relatif baik. Peningkatan IPM ini juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan sektor industri dan investasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.38
IPM Kabupaten/Kota, Sulawesi Tengah, dan Nasional
Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	65.13	65.61	65.82	66.30	67.05	67.65
Banggai	70.36	71.01	71.09	71.58	72.19	72.86
Morowali	**72.02**	**73.06**	**73.12**	**73.39**	**73.82**	**74.36**
Poso	71.40	72.10	72.22	72.75	73.25	73.65
Donggala	65.49	66.80	66.96	67.49	68.17	68.71
Toli-Toli	65.42	67.70	68.31	68.77	69.68	70.38
Buol	67.69	68.49	68.92	69.37	70.18	70.89
Parigi Moutong	65.47	67.46	67.84	68.29	69.06	69.48
Tojo Una-Una	64.52	66.67	66.81	67.62	68.47	69.04
Sigi	68.16	68.48	68.84	69.40	70.28	70.90
Banggai Laut	65.27	67.60	67.82	68.40	69.12	69.65
Morowali Utara	68.45	69.42	69.52	70.02	70.74	71.64
Kota Palu	81.50	82.74	82.96	83.26	83.71	84.12
Sulawesi Tengah	69.50	70.31	70.54	71.01	71.66	72.24
Nasional	71.92	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2024 menunjukan Kota Palu dengan IPM tertinggi yakni sebesar 84.14 masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan, Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Gambaran kategori IPM berdasarkan peta IPM kabupaten/kta Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.30
Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Peta IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya Kota Palu dengan status IPM Sangat Tinggi, kemudian disusul Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli pada kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, kabupaten Tojo Una-Una pada kategori IPM sedang.

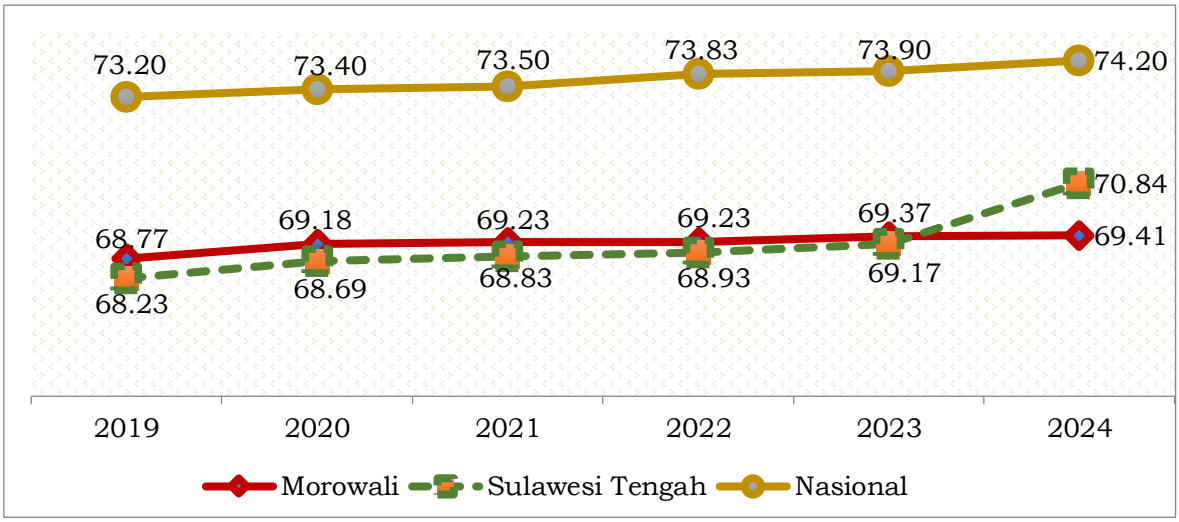
3) Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup , diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

A. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan UHH dari suatu negara. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui berbagai fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, meningkatnya kema-mpuan daya beli masyarakat akan berimplikasi dengan makin mening-katkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebu-tuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

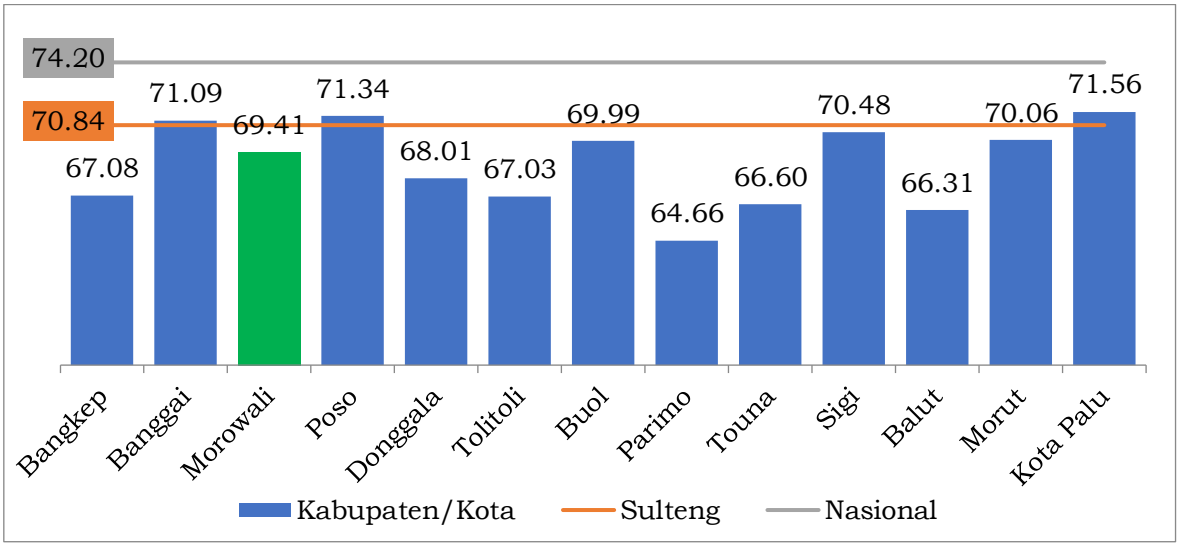
UHH pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. UHH sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka UHH rendah di suatu daerah menunjukkan capaian pembangunan kesehatan, kecukupan gizi dan kalori. UHH Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.31
Angka UHH Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Grafik usia harapan hidup Kabupaten Morowali menunjukkan tren yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 68.77 tahun pada Tahun 2019 menjadi hanya sebesar 69.41 tahun pada Tahun 2024. Kenaikan yang terjadi sangat lambat dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang justru mengalami kenaikan signifikan dari 68.23 tahun menjadi 70.84 tahun pada periode yang sama. Bahkan sejak Tahun 2024, usia harapan hidup Kabupaten Morowali mulai berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, yang sebelumnya selalu lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas hidup, seperti layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan lingkungan yang belum merata dan optimal di Kabupaten Morowali. Jika tidak ditangani, stagnasi ini dapat berdampak pada kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh di wilayah tersebut. Namun, apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, UHH berada pada posisi ketujuh, sebagaimana diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.32
Angka UHH Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

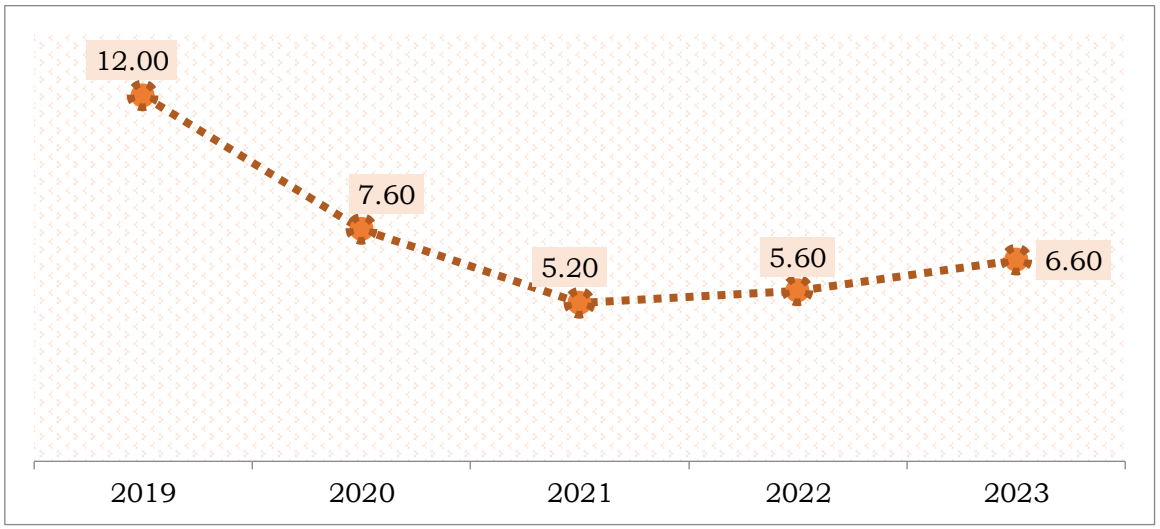
Grafik di atas memperlihatkan perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2024 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dibandingkan dengan rata-rata provinsi (70.84 tahun) dan nasional (74.20 tahun). Kota Palu mencatat UHH tertinggi sebesar 71.56 tahun, diikuti Kabupaten Poso (71.34 tahun) dan Kabupaten Banggai (71.09 tahun), menunjukkan capaian yang mendekati atau melampaui rata-rata provinsi. Sementara itu, Kabupaten Morowali berada di bawah rata-rata provinsi dengan UHH sebesar 69.41 tahun, menandakan masih adanya tantangan dalam aspek layanan kesehatan, kualitas hidup, serta akses terhadap fasilitas dasar. Kabupaten Parigi Moutong mencatat UHH terendah, yaitu 64.66 tahun, disusul Kabupaten Tojo Una-Una (66.60 tahun) dan Kabupaten Banggai Laut (66.31 tahun), yang mencerminkan perlunya intervensi pembangunan yang lebih merata. Secara keseluruhan, UHH di Provinsi Sulawesi Tengah masih tertinggal dari rata-rata nasional, yang menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup guna memperpanjang usia harapan hidup masyarakat.

B. Prevalensi Stunting

Istilah *underweight* sendiri merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil penimbangan berat badan berdasarkan umur antara gizi buruk dan gizi kurang (BB/U <-2 SD) stunting merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan pada hasil pengukuran tinggi/panjang badan berdasarkan umur antara sangat pendek dan pendek (TB/U <-2 SD) sedangkan wasting merupakan kondisi gabungan pada masalah gizi yang menitik beratkan

pada hasil penimbangan berat badan dibandingkan hasil pengukuran tinggi/panjang badan antara sangat kurus dan kurus (BB/TB <-2 SD). Risiko yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka pendek diantaranya meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian, gangguan perkembangan (kognitif, motorik, bicara), mening-katnya beban ekonomi untuk biaya perawatan dan pengobatan anak yang sakit. Jangka panjang menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, konsentrasi belajar dan rendahnya produktivitas kerja.

Penanganan stunting di Kabupaten Morowali menunjukan perkembangan relatif baik. Hal ini ditunjukan dari angka stunting yang menurun dari 12.00 persen Tahun 2019 menjadi 5.20 persen Tahun 2021, mencerminkan keberhasilan program intervensi gizi, peningkatan kesadaran orang tua, dan perbaikan layanan kesehatan dasar. Namun, stunting Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 5.60 persen sampai Tahun 2023 sebesar 6.60 persen. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan baru atau penurunan efektivitas program intervensi yang perlu segera dievaluasi. Beragam intervensi yang dilakukan mulai dari alokasi dana APBD dan pemanfaatan dana desa dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Morowali.



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2023 (data diolah)

Gambar 2.33
Angka Stunting Kabupaten Morowali Tahun 2019-2023

Secara umum di Provinsi Sulawesi Tengah masalah gizi yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Pemberian makanan tambahan bagi anak dengan gizi kurang tidak dipantau sehingga pemberian tidak tepat sasaran dan tidak sesuai petunjuk teknis yang diberikan. 2. Masih ada tenaga pengelola gizi yang bukan berlatar belakang ilmu gizi (nutrisionis) 3. Kurangnya edukasi soal asupan gizi saat hamil 4. Kondisi sanitasi, kebersihan lingkungan, dan akses air bersih yang buruk

bisa meningkatkan potensi terjadinya infeksi penyakit. Seperti diare dan malaria. 5. Infeksi Penyakit seperti diare, penyakit pernapasan seperti pneumonia, dan cacingan, bisa memengaruhi pertumbuhan anak. Selanjutnya, perkembangan prevalensi stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Bangkep	22.60	23.00	21.50	19.80	17.60
Banggai	19.90	17.90	15.20	14.60	12.60
Morowali	**12.00**	**7.60**	**5.20**	**5.60**	**6.60**
Poso	21.80	16.80	11.70	10.30	11.60
Donggala	34.90	27.10	23.50	20.90	20.50
Tolitoli	11.20	9.80	13.20	10.30	9.70
Buol	9.40	11.70	8.40	10.40	14.50
Parimo	21.50	11.40	10.90	9.10	9.80
Touna	26.00	22.10	19.00	17.30	10.20
Sigi	24.60	19.00	16.60	19.10	17.70
Balut	20.70	20.80	14.20	7.70	6.40
Morut	24.00	17.40	14.20	13.10	15.20
Kota Palu	17.00	14.00	7.90	6.50	6.20
Sulteng	**21.40**	**16.20**	**13.80**	**12.90**	**12.20**
Nasional	**27.70**	**26.92**	**24.40**	**21.60**	**21.50**

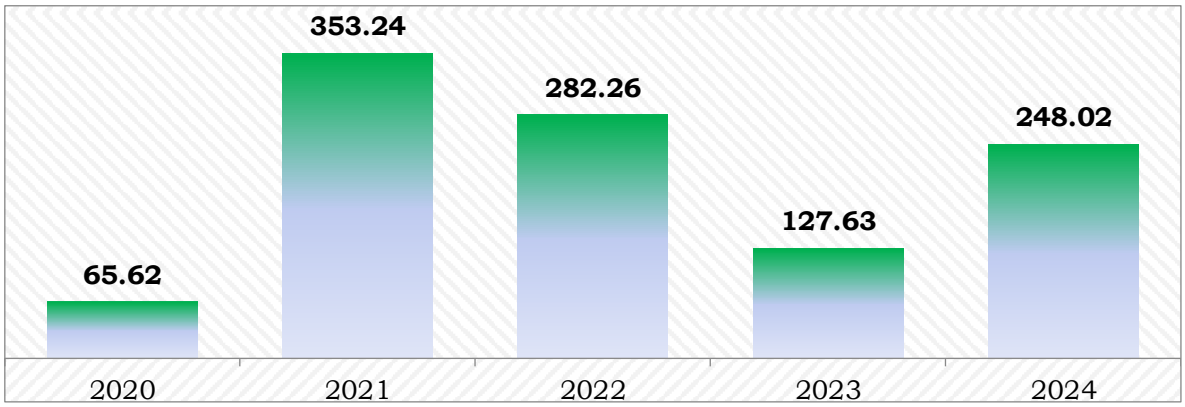
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2023 dan Profil Kesehatan Indonesia 2023 (data diolah)

Prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 12.20 persen. Kabupaten dengan prevalensi stunting terbesar adalah Kabupaten Donggala sebesar 20.50 persen, Kabupaten Sigi sebesar 17.70 persen dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 17.60 persen. Sedangkan terendah Kota Palu sebesar 6.20 persen dan Kabupaten Morowali terendah ketiga.

C. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup merupakan indikator utama untuk menilai derajat kesehatan ibu di suatu wilayah. AKI mengukur jumlah ibu yang meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan), dari setiap 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI biasanya disebabkan oleh faktor seperti perdarahan, eklampsia, infeksi, dan keterlambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Angka ini juga mencerminkan aksesibilitas dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan ibu, termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis terlatih, serta

kualitas perawatan prenatal dan persalinan. Penurunan AKI memerlukan pendekatan lintas sektor, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, pemantauan kehamilan yang lebih intensif, hingga peningkatan infrastruktur kesehatan, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Angka kematian ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, data diolah

Gambar 2.34
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

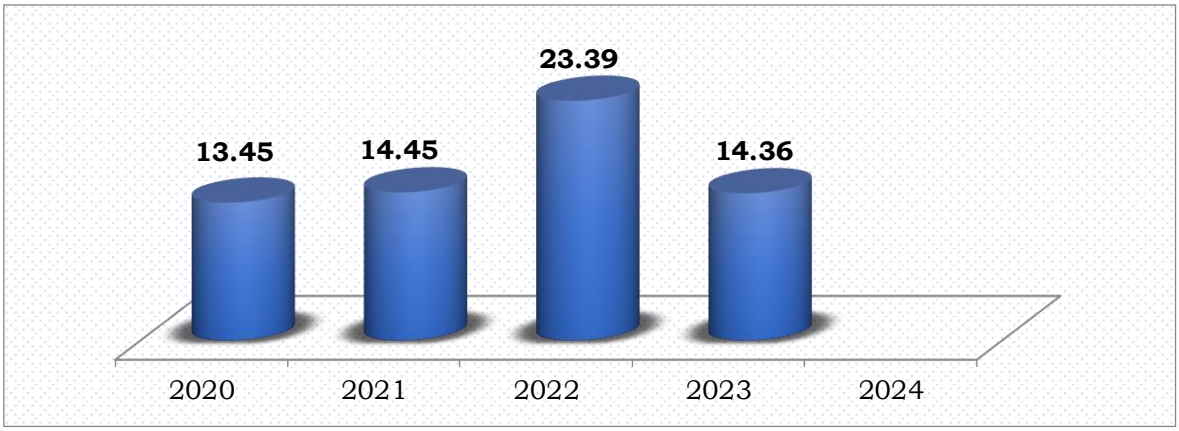
AKI per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan tren fluktuatif dengan peningkatan tertinggi Tahun 2021 sebesar 353.24 per 100.000 kelahiran hidup. Kenaikan Tahun 2021 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya layanan kesehatan ibu, termasuk keterbatasan akses terhadap pemeriksaan kehamilan, persalinan aman, dan layanan pasca persalinan. Meskipun terjadi penurunan Tahun 2024, angka AKI masih tergolong tinggi, menandakan pentingnya kesinambungan program intervensi, seperti peningkatan kualitas layanan antenatal, penyediaan bidan di setiap desa, serta penguatan sistem rujukan darurat obstetri untuk menurunkan risiko kematian ibu secara berkelanjutan.

D. Angka Kematian Anak

1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas pelayanan kesehatan suatu wilayah. AKB dihitung sebagai jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu periode tertentu. Tingginya AKB sering dikaitkan dengan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk, sanitasi yang tidak memadai, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan perawatan bayi. Oleh karena itu, penurunan AKB menjadi fokus penting dalam agenda pembangunan kesehatan, yang

dapat dicapai melalui peningkatan cakupan imunisasi, layanan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta program intervensi gizi dan edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui. Di Kabupaten Morowali, upaya ini harus pula disesuaikan dengan kondisi geografis dan keterjangkauan fasilitas kesehatan sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar terlaksana secara menyeluruh. Angka kematian bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, data diolah

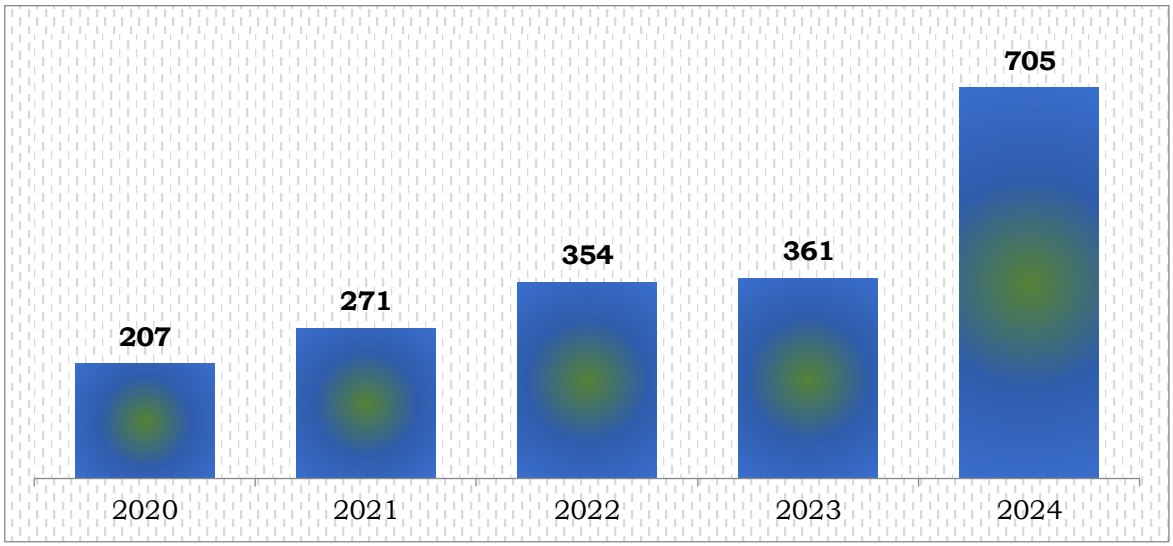
Gambar 2.35
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

AKB per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Morowali menunjukkan fluktuasi selama Tahun 2020-2023. Peningkatan AKB tertinggi etrjadi Tahun 2022 mencapai 23.39 per 1.000 kelahiran hidup, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko kematian bayi pada tahun tersebut. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti BBLR dan Prematuritas, Asfiksia, kelainan kongenital, infeksi serta penyakit penyerta yang paling banyak diderita oleh seorang bayi antara lain pneumonia, kelainan kardiovaskuler dan respiratori, Diare dan lainnya. Masa kehamilan dan pertolongan persalinan pada bayi baru lahir menjadi masalah utama tingginya kematian pada bayi baru lahir, selain itu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang kurang memadai, tenaga yang belum berkompeten, penyakit bawaan serta sanitasi lingkungan yang kurang memadai juga menjadi penyebab tingginya kematian yang terjadi pada bayi. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB, yaitu dengan peningkatan layanan kesehatan dasar dan intervensi kesehatan seperti imunisasi, layanan antenatal, dan perbaikan gizi anak maupun ibu terutama pada masa kehamilan serta penambahan petugas kesehatan.

E. Cakupan penemuan Kasus TB (treatment coverage)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Basil Tahan Asam) merupakan indikator penting dalam pengendalian tuberkulosis, khususnya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan

sistem kesehatan dalam mendeteksi kasus aktif dan memberikan pengobatan yang sesuai. TBC BTA positif merupakan bentuk TBC yang paling menular, sehingga penemuan dini dan penanganan yang cepat menjadi sangat krusial dalam memutus rantai penularan di masyarakat. Tingginya cakupan penemuan kasus menandakan keberhasilan skrining aktif, kampanye kesadaran masyarakat, dan efektivitas layanan laboratorium di fasilitas kesehatan primer. Sementara itu, cakupan penanganan menggambarkan kesiapan layanan kesehatan dalam memberikan terapi sesuai standar, termasuk pengawasan minum obat (PMO). Di Kabupaten Morowali, cakupan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan ketahanan terhadap penyakit menular melalui penguatan layanan promotif, preventif, dan kuratif. Jumlah kasus penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Gambar 2.36
Jumlah Kasus Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Perkembangan jumlah kasus penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Morowali dari Tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan dari 207 kasus Tahun 2020 menjadi 705 kasus Tahun 2024. Kenaikan bertahap dari tahun ke tahun mencerminkan upaya intensifikasi penemuan kasus aktif melalui skrining dan pelacakan kontak yang semakin efektif. Lonjakan tinggi Tahun 2024 menunjukkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus TBC, yang disebabkan oleh peningkatan pelaporan dan pencatatan kasus. Meskipun angka kasus terus meningkat, mengindikasikan perbaikan sistem surveilans dan

cakupan layanan penanganan TBC yang semakin baik, namun juga menuntut penguatan strategi pencegahan dan edukasi masyarakat agar penularan dapat ditekan secara berkelanjutan.

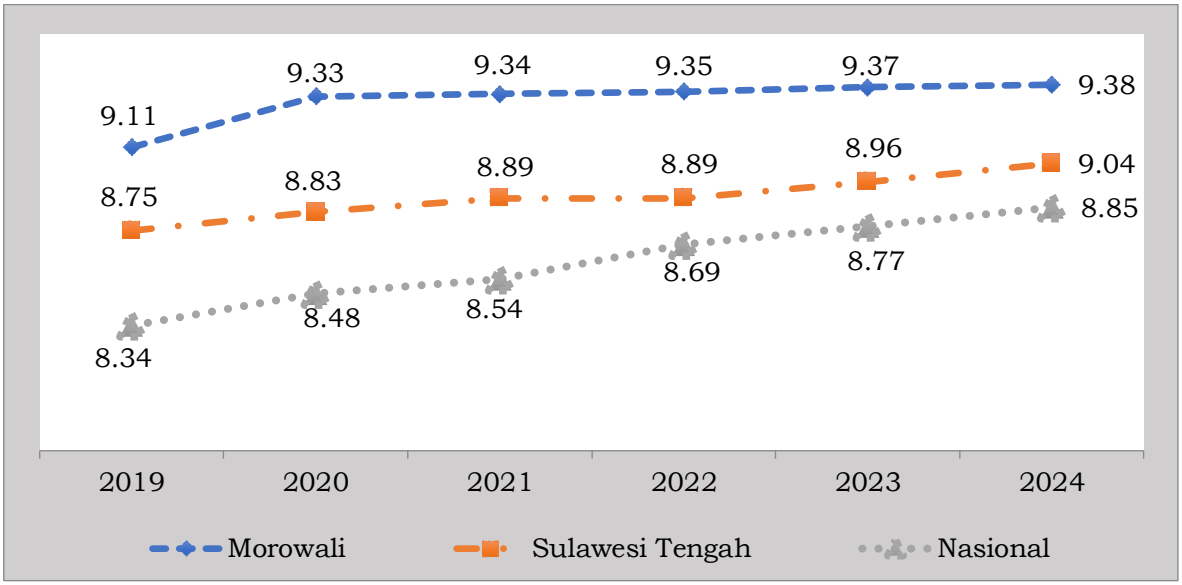
4) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Konsep ini menekankan pentingnya akses yang adil terhadap pendidikan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya. Pendidikan yang merata berfokus pada pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik. Dengan menjamin kualitas pendidikan yang merata, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antarwilayah atau antarsektor dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendi-dikan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas (daya saing) seseorang. RLS merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah Tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali.

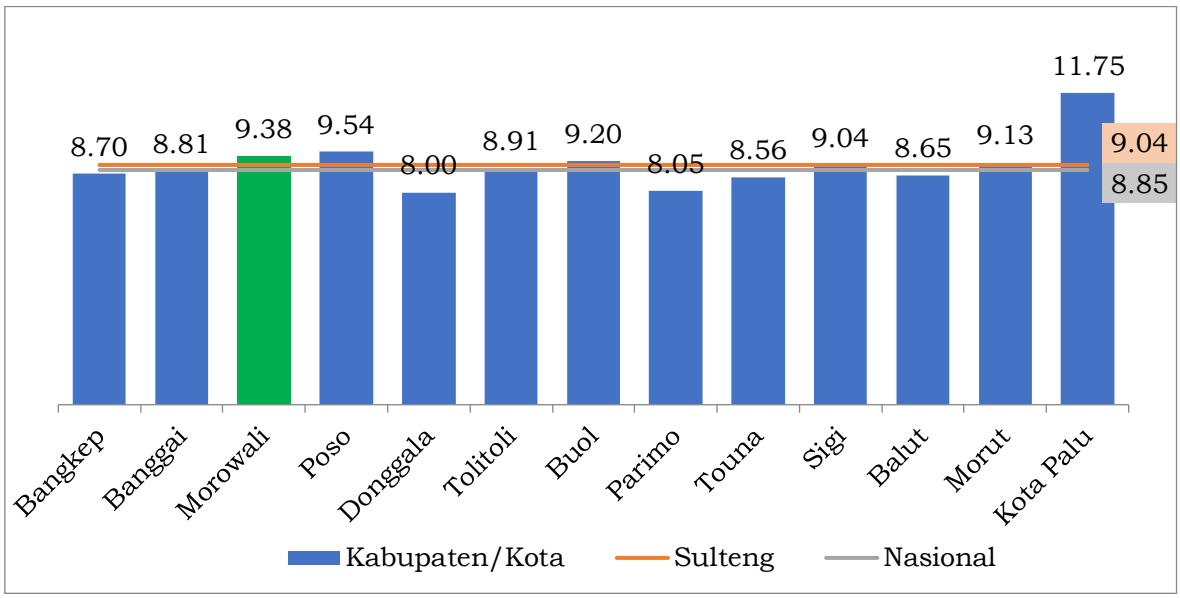
Berdasarkan RLS dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka RLS adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau years of schooling dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal, seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Data mengenai perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024 terdapat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.37
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2019 selama 9.11 Tahun, meningkat hingga Tahun 2024 menjadi selama 9.38 Tahun. Artinya secara umum penduduk Kabupaten Morowali Usia 25 Tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas 3). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal manusia (*human capital*) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Morowali. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap pening-katan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pemba-ngunan. Capaian Kabupaten Morowali Tahun 2024 lebih baik dari rata-rata capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana masing selama 8.85 Tahun dan 9.04 Tahun. Dalam periode Tahun 2019-2024, angka RLS Kabupaten Morowali selalu berada di atas rata-rata capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Angka RLS yang tinggi tersebut menempatkan posisi Kabupaten Morowali berada pada urutan kedua setelah Kabupaten Poso sebagaima diuraikan pada gambar berikut.



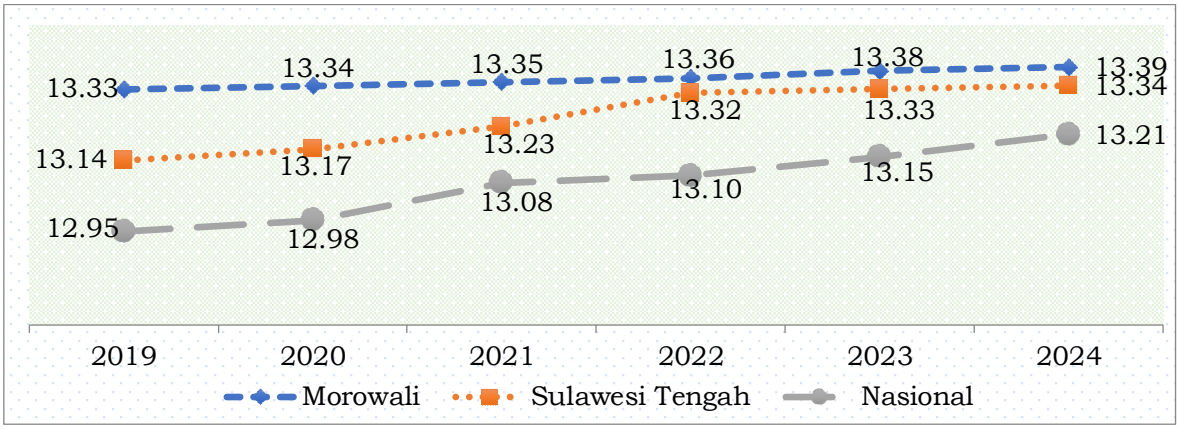
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.38
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Grafik di atas memperlihatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu mencatat RLS tertinggi sebesar 11.75 tahun, jauh di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah (9.04 tahun) dan nasional (8.85 tahun), menunjukkan kualitas dan akses pendidikan yang lebih baik di perkotaan. Kabupaten Morowali memiliki RLS sebesar 9.38 tahun, menandakan kemajuan pendidikan yang cukup signifikan. Sementara itu, Kabupaten Donggala (8.00 tahun) dan Kabupaten Parigi Moutong (8.05 tahun) berada pada posisi terendah, mengindikasikan masih terbatasnya akses dan keberlanjutan pendidikan di wilayah tersebut. Secara umum, mayoritas wilayah di Sulawesi Tengah menunjukkan capaian RLS yang masih dalam kisaran 8–9 tahun, mencerminkan perlunya upaya peningkatan akses pendidikan menengah dan pengurangan angka putus sekolah untuk mendorong pemerataan pendidikan yang lebih baik.

B. Harapan Lama Sekolah

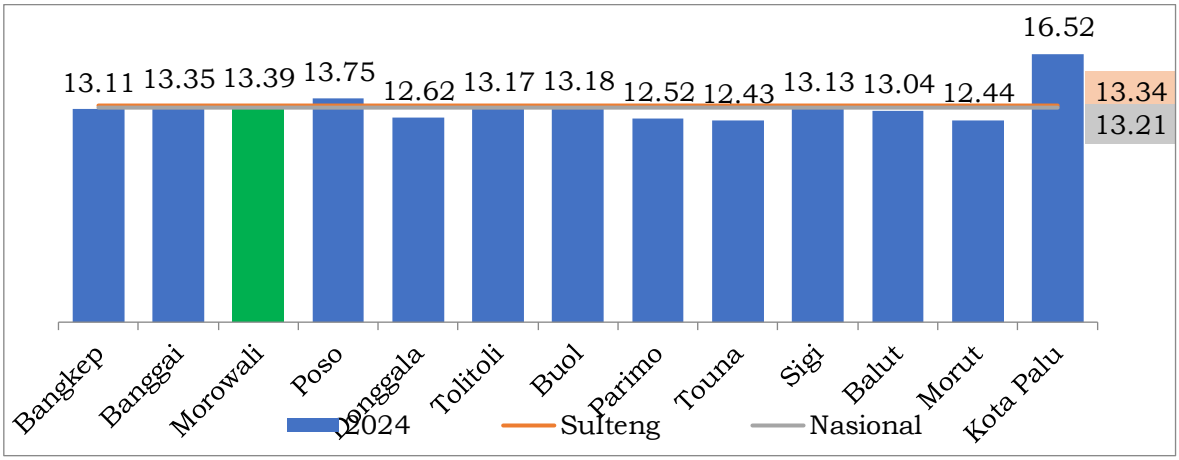
HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 (tujuh) Tahun ke atas, karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Data perbandingn HLS Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional disajikan pada tabel berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.39
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

Selama kurun Tahun 2019-2024, HLS Kabupaten Morowali selalu meningkat setiap Tahun. Pada Tahun 2019 yakni selama 13.33 Tahun, hingga Tahun 2024 meningkat hingga selama 13.39 Tahun. Meningkatnya angka HLS menjadi signal positif, bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada Tahun 2024, angka HLS Morowali telah mencapai selama 13.39 Tahun, berarti anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus diploma satu (D1). Capaian HLS Kabupaten Morowali Tahun 2024 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah selama 13.34 Tahun maupun rata-rata secara Nasional selama 13.21 Tahun. Angka HLS Kabupaten Morowali apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan tertinggi kedua setelah Kota Palu, sebagaimana diuraikan pada gambar berikut.



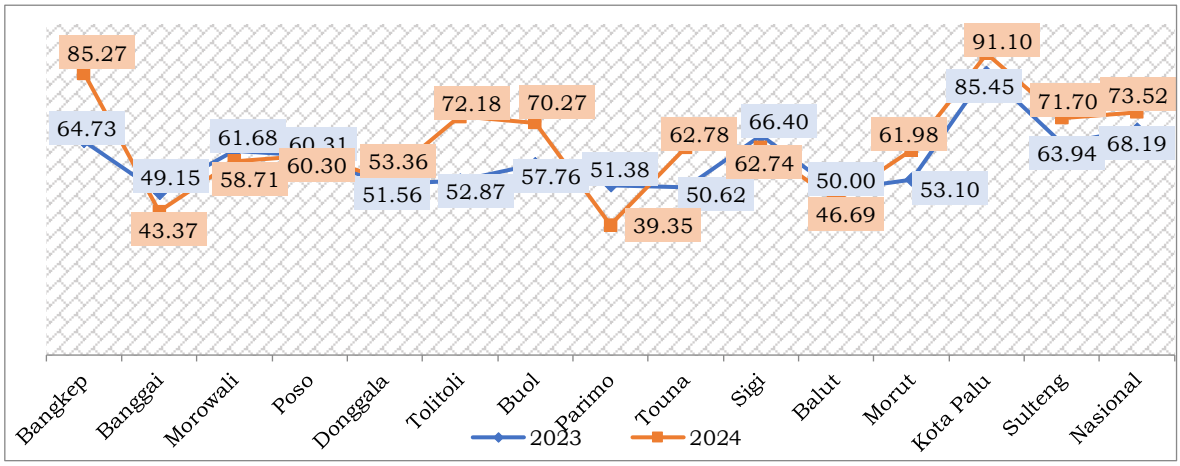
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.40
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Grafik di atas menggambarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2024 di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Kota Palu mencatat HLS tertinggi, yaitu 16.52 tahun, menunjukkan bahwa anak-anak di kota berpeluang menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Kabupaten Morowali memiliki HLS sebesar 13.39 tahun, sedikit di atas rata-rata provinsi dan nasional, mencerminkan prospek pendidikan yang cukup baik. Sebaliknya, Kabupaten Tojo Una-Una (12.43 tahun), Kabupaten Morowali Utara (12.44 tahun), dan Kabupaten Parigi Moutong (12.52 tahun) berada di bawah rata-rata, menandakan masih terbatasnya harapan atau akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi.

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan literasi masyarakat di suatu daerah secara menyeluruh. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan baca tulis, akses terhadap bahan bacaan, ketersediaan dan pemanfaatan sarana literasi seperti perpustakaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi. IPLM tidak hanya menilai kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga sejauh mana masyarakat mampu memahami, mengelola, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nilai IPLM yang tinggi mencerminkan masyarakat yang literat, kritis, dan berdaya saing, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan akses, infrastruktur, dan budaya literasi. Dengan demikian, IPLM menjadi alat penting dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan nonformal di tingkat lokal maupun nasional.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2025 (data diolah)

Gambar 2.41
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2023-2024

Secara umum, tren nilai IPLM di sebagian besar wilayah meningkat Tahun 2024 dibanding Tahun 2023. Kota Palu tetap menjadi daerah dengan indeks tertinggi, meningkat dari 85.45 menjadi 91.10, menunjukkan kemajuan pesat dalam pengembangan literasi. Sementara itu, Kabupaten Banggai mengalami peningkatan dari 49.15 menjadi 85.27. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Sigi dan Kabpaten Banggai Laut mengalami penurunan, mengindikasikan perlunya penguatan kembali ekosistem literasi di wilayah tersebut. Kabupaten Morowali mencatat menurun dari 60.31 menjadi 60.30, mencerminkan stagnasi yang perlu segera diatasi dengan peningkatan akses dan kualitas layanan literasi masyarakat. Dibandingkan rata-rata nasional (73.52) dan provinsi (71/70), sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di bawah standar rata-rata, sehingga dibutuhkan perhatian serius dalam penguatan literasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

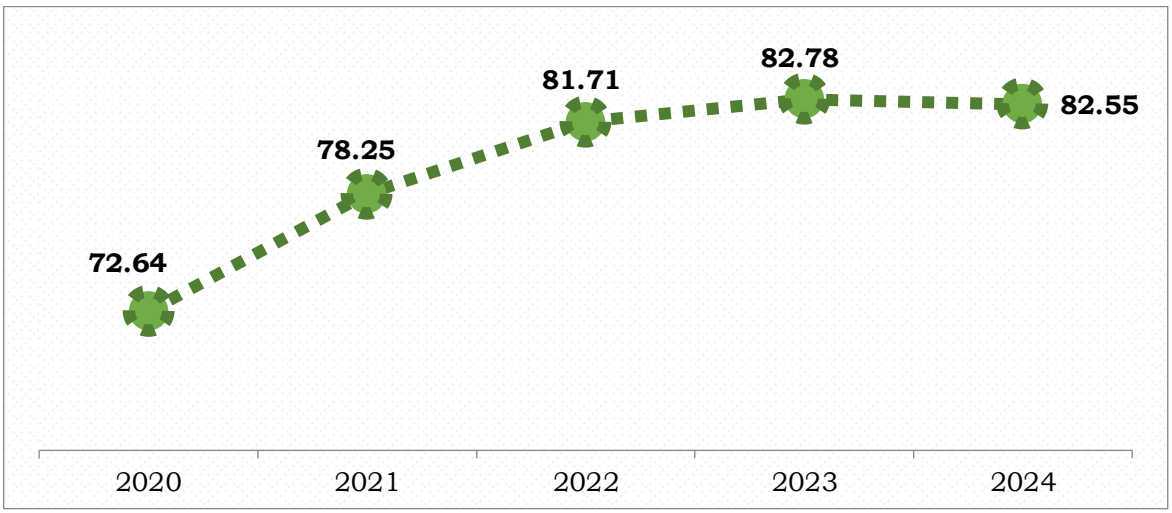
5) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

B. Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni menggambarkan perbandingan antara jumlah rumah yang memenuhi kriteria kelayakan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Rumah layak huni atau rumah sederhana sehat adalah hunian yang dibangun dengan bahan dan konstruksi sederhana, namun tetap memenuhi standar minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Rumah jenis ini mempertimbangkan potensi lokal, baik dari sisi fisik seperti bahan bangunan, kondisi geologis, dan iklim, maupun aspek sosial budaya seperti arsitektur lokal dan gaya hidup masyarakat. Rasio ini tidak hanya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga keberhasilan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal yang layak. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 (diolah

Gambar 2.42
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Grafik rasio rumah layak huni menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2020-2024. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Kedepan, diupayakan target pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dapat tercapai secara merata.

6) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Di Kabupaten Morowali, konsep beragama Maslahat dan berkebudayaan maju mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Beragama Maslahat menekankan pentingnya agama sebagai sumber kebaikan bersama, yang tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi komunitas dan lingkungan. Sementara itu, Berkebudayaan Maju mengacu pada pengembangan budaya yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman, yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang toleran, dinamis, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang nasional. Beragama Maslahat adalah konsep yang menekankan pentingnya agama sebagai sumber kebaikan yang luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep ini muncul dalam UU Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Tujuan utama dari Beragama Maslahat adalah untuk menggali nilai-nilai agama yang dapat memberikan manfaat sosial yang lebih luas, seperti meningkatkan toleransi, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini juga berupaya menghindari pengaruh ekstremisme

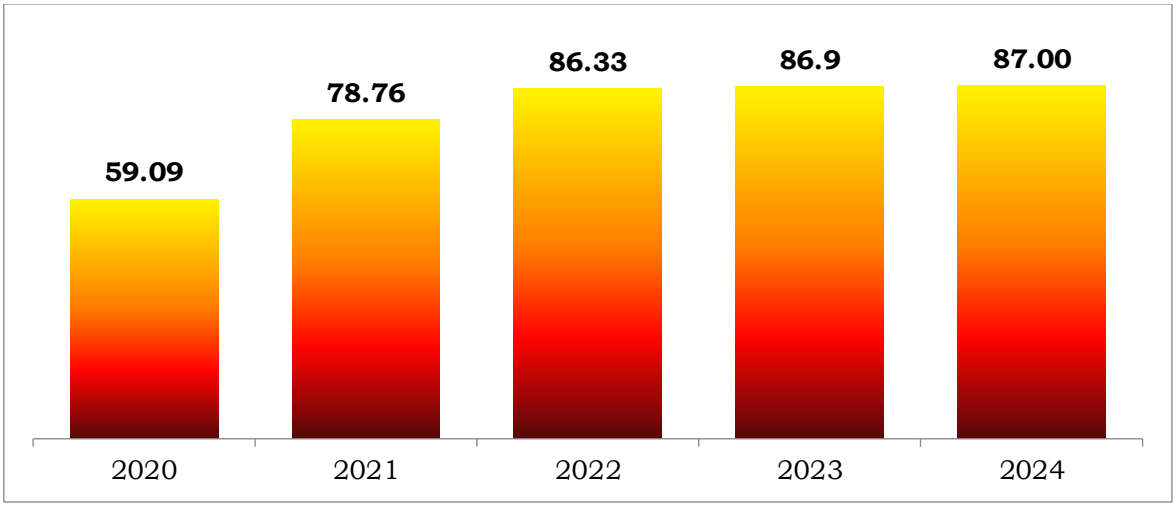
dan radikalisme dalam beragama, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berkebudayaan Maju di Kabupaten Morowali mencerminkan upaya untuk mengembangkan budaya yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Konsep ini menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi lokal, sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global yang positif. Berkebudayaan Maju juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya, pendidikan, dan ekonomi, sehingga menciptakan lingkungan yang dinamis dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, masyarakat Morowali dapat membangun identitas yang kuat dan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

A. Persentase Akses Jaringan Internet

1) Akses Jaringan Komunikasi

Akses jaringan komunikasi di Kabupaten Morowali merupakan elemen penting dalam mendukung konektivitas digital, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan seluler, internet, dan layanan data menjadi indikator kemajuan wilayah, terutama dalam memperkecil kesenjangan informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Semakin luas dan stabil cakupan jaringan komunikasi, semakin tinggi pula potensi partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital, akses terhadap layanan daring, serta percepatan pembangunan berbasis teknologi. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi (%) di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Gambar 2.111
Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi di Kabupaten Morowali selama periode 2020 hingga 2024 mencapai 87.00 persen wilayah yang terjangkau jaringan komunikasi. Akses jaringan informasi di Kabupaten Morowali masih menghadapi berbagai kendala, seperti infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan provider telekomunikasi dan internet, serta bencana alam yang sering terjadi di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya akses telepon dan data di beberapa wilayah di Kabupaten Morowali. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah daerah, provider telekomunikasi dan internet, serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan informasi di Kabupaten Morowali.

2) Data Jaringan Tower

Jaringan tower telekomunikasi berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal komunikasi, menjadi tulang punggung utama dalam mendukung layanan jaringan seluler dan internet. Keberadaan tower sangat vital untuk memastikan cakupan sinyal yang luas dan stabil, terutama di wilayah terpencil atau geografis yang menantang seperti pegunungan dan kepulauan. Jumlah dan distribusi tower yang merata memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan digital secara optimal, termasuk komunikasi suara, data, dan layanan daring lainnya. Oleh karena itu, pembangunan jaringan tower merupakan bagian strategis dalam memperkuat sistem telekomunikasi nasional, mempercepat transformasi digital, serta mendukung pemerataan pembangunan berbasis teknologi di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Morowali. Data jaringan tower di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Data Jaringan Tower Kabupaten Morowali Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
1	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
2	Bungku Tengah	Ipi	Ya	Ya	Ya
3	Bungku Tengah	Marsaoleh	Ya	Ya	Ya
4	Bumi Raya	Parilangke	Ya	Ya	Ya
5	Wita Ponda	Lantula Jaya	Ya	Ya	Ya
6	Bungku Barat	Wosu	Ya	Ya	Ya
7	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
8	Bumi Raya	Pebatae	Ya	Ya	Ya
9	Wita Ponda	Ungkaya	Ya	Ya	Ya
10	Bungku Tengah	Bente	Ya	Ya	Ya
11	Bumi Raya	Limbo Makmur	Ya	Ya	Ya
12	Bungku Tengah	Bente	Ya	Ya	Ya

No	Kecamatan	Desa	Jenis Jaringan		
			2G	3G	4G
13	Menui Kepulauan	Ulunambo	Ya	-	Ya
14	Bumi Raya	Samarenda	Ya	-	Ya
15	Bungku Tengah	Lanona	Ya	Ya	Ya
16	Bungku Tengah	Matansala	Ya	Ya	Ya
17	Bungku Tengah	Tofuti	Ya	Ya	Ya
18	Bungku Tengah	Bahomoleo	Ya	Ya	Ya
19	Bungku Timur	Kapala	Ya	-	Ya
20	Bungku Timur	Bahomotefe	Ya	Ya	Ya
21	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
22	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
23	Bahodopi	Bahomakmur	Ya	Ya	Ya
24	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
25	Wita Ponda	Solonsa Jaya	Ya	-	Ya
26	Bungku Barat	Tofogaro	Ya	Ya	Ya
27	Bungku Selatan	Kaleroang	Ya	-	Ya
28	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
29	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
30	Bungku Pesisir	Laroenai	Ya	Ya	Ya
31	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
32	Bungku Tengah	Bahomohoni	Ya	Ya	Ya
33	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
34	Bungku Tengah	Bungi	Ya	Ya	Ya
35	Bumi Raya	Umbele	Ya	Ya	Ya
36	Bungku Tengah	Bahomohoni	Ya	Ya	Ya
37	Bungku Timur	Bahomotefe	Ya	Ya	Ya
38	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
39	Bahodopi	Labota	Ya	Ya	Ya
40	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
41	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
42	Wita Ponda	Moahino	Ya	Ya	Ya
43	Wita Ponda	Moahino	Ya	Ya	Ya
44	Bahodopi	Bahodopi	Ya	Ya	Ya
45	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
46	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
47	Bahodopi	Fatufia	Ya	Ya	Ya
48	Bungku Pesisir	Bete-Bete	Ya	-	Ya
49	Bungku Pesisir	Tangofa	Ya	-	Ya

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2025

Data jaringan tower di Kabupaten Morowali seluruh telah tersedia di Semua kecamatan di Kabupaten Morowali, namun jenis jaringan 4G masih mengalami kendala pada saat tertentu dan belum merata pada semua desa di setiap kecamatan sehingga mengalami gangguan dan kesulitan untuk jaringan internet, diantaranya Desa Ulunambo Kecamatan Menui

Kepulauan, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan.

7) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Di Kabupaten Morowali, konsep Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif merupakan pilar penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan. Keluarga Berkualitas menekankan pentingnya keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang mendukung perkembangan anak dan kesejahteraan anggota keluarga. Kesetaraan Gender berfokus pada pemberian hak dan kesempatan yang sama bagi semua gender, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Masyarakat Inklusif mengacu pada lingkungan sosial yang menghargai keberagaman dan memastikan semua individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan. Ketiga konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang nasional.

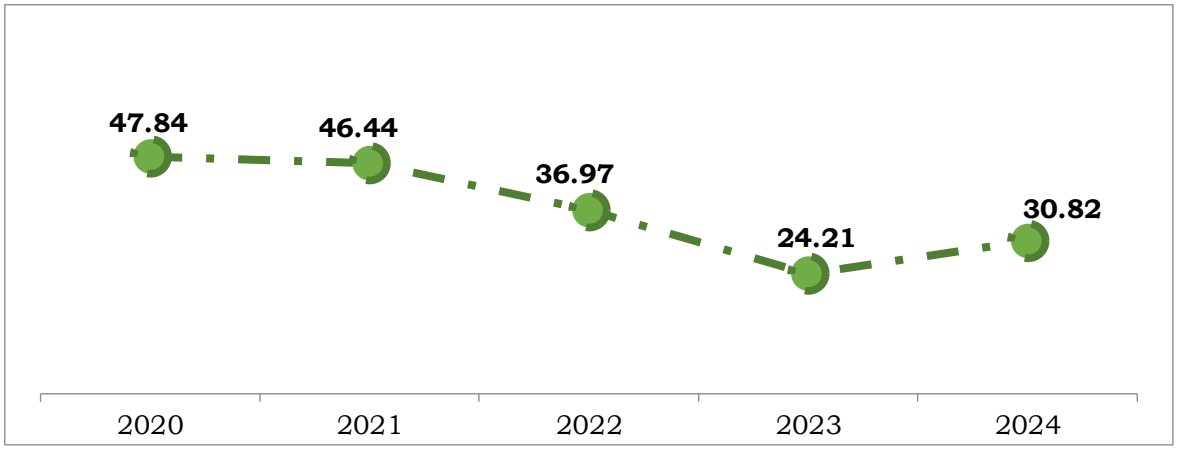
Kesetaraan Gender adalah konsep yang menekankan kesamaan hak, kesempatan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Ini mencakup kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan akses terhadap sumber daya. Kesetaraan gender bertujuan untuk menghapus diskriminasi berbasis gender dan memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat tanpa hambatan.

Masyarakat Inklusif adalah masyarakat yang menghargai dan menerima keberagaman dalam segala bentuknya, termasuk perbedaan ras, agama, gender, kemampuan, dan latar belakang sosial. Masyarakat inklusif berupaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dan diskriminasi dengan menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik bagi semua anggotanya. Ini juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua individu, sehingga setiap orang merasa diterima dan dihargai.

A. TPAK Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan mengukur keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan. Tingginya partisipasi ini mencerminkan akses yang lebih setara terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan keterampilan, serta kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong kemandirian

finansial. Sehingga, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan perlu didukung dengan kebijakan inklusif, lingkungan kerja yang ramah gender, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Morowali Dalam Angka Tahun 2025(diolah)

Gambar 2.43
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Morowali Tahun 2020–2024

Grafik partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tren menurun dari tahun 2020 hingga 2024 dengan angka terendah Tahun 2023 sebesar 24.21 persen yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya kesempatan kerja, tanggung jawab domestik yang lebih besar, atau dampak sosial ekonomi pascapandemi. Peningkatan di tahun 2024 memberi sinyal positif, namun tetap perlu intervensi kebijakan inklusif dan program pemberdayaan perempuan agar partisipasi tenaga kerja perempuan dapat terus didorong.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing suatu daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan daerah tersebut untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Aspek daya saing mencakup kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

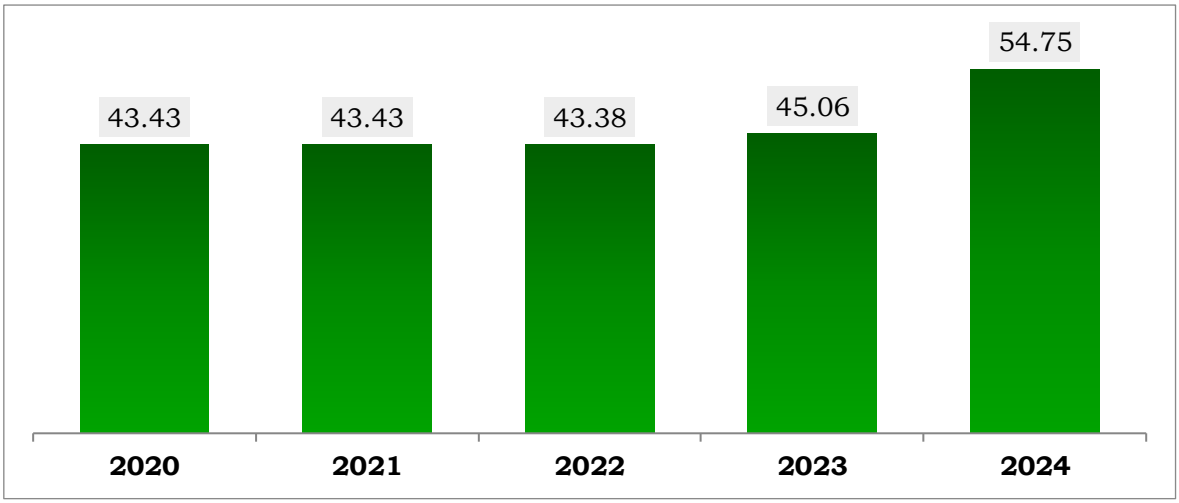
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator angka ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

A. Angka Ketergantungan

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain

itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Tahun 2025, (data diolah)

Gambar 2.44
Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Morowali 2020-2024

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua**.** Pada kurun waktu 2020, 2021, 2022 dan 2013, Rasio Ketergantungan di Kabupaten Morowali di bawah 50 persen dan pada Tahun 2024 di atas 50 persen. Pada Tahun 2024, rasio ketergantungan 54,75 yang berarti 54,75 persen dari jumlah penduduk adalah tidak produktif ditanggung 45,25 persen penduduk yang produktif, angka ini makin kecil makin baik.

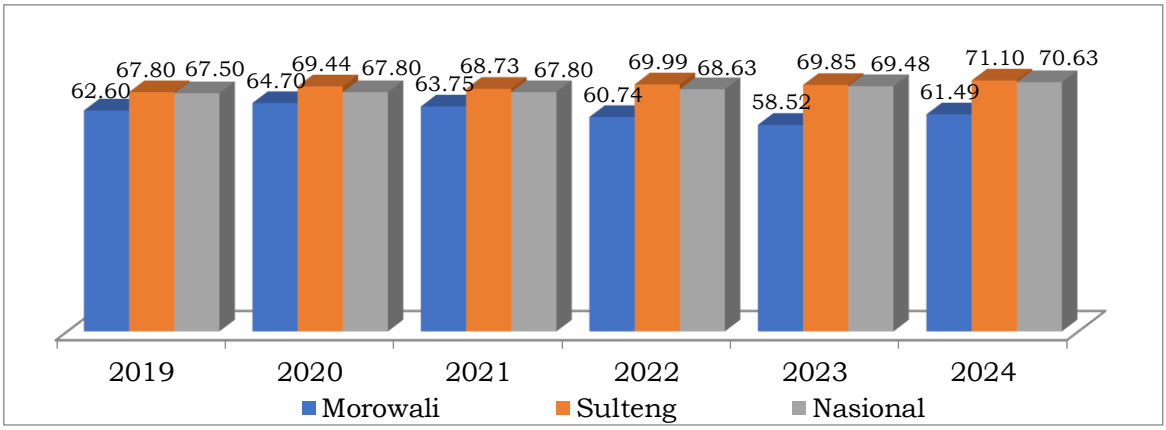
Sedangkan jika dilihat dari sisi rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua, untuk kasus Kabupaten Morowali kurun waktu 2020-2024 lebih besar angka ketergantungan muda dari pada angka ketergantungan tua. Hal ini dapat berimplikasi kepada kebijakan pemerintah tentang penyediaan fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana olah raga. Sangat diharapkan sarana dan prasarana digunakan sebagai saluran minat dan bakat generasi muda serta mengoptimalkan kualitas diri generasi penerus di Kabupaten Morowali dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan semangat untuk survive dalam menyambut era keterbukaan ekonomi.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Prokduktivitas Ekonomi

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yaitu yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, terhadap total penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan sejauh mana penduduk suatu wilayah terlibat dalam aktivitas produktif dan menjadi ukuran penting dalam menilai dinamika pasar tenaga kerja serta kapasitas daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusianya. Semakin tinggi TPAK, semakin besar kontribusi penduduk terhadap perekonomian.

Grafik tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Morowali selama periode 2019–2024 secara umum berfluktuasi dan berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Morowali sempat menurun drastis Tahun 2023 yang dipengaruhi oleh dinamika ketenagakerjaan, pergeseran struktur ekonomi, atau dampak kebijakan pascapandemi.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Gambar 2.45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

Kesenjangan yang cukup besar antara TPAK Kabupaten Morowali dan rata-rata provinsi maupun nasional juga mencerminkan perlunya strategi peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal agar dapat mengimbangi potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, TPAK Kabupaten Morowali adalah terendah pertama, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Bangkep	73.66	72.97	71.98	74.63	72.76	73.48
Banggai	67.11	69.79	71.80	73.84	71.70	71.70
Morowali	**62.96**	**64.70**	**63.75**	**60.74**	**58.52**	**61.49**
Poso	72.60	74.78	73.54	72.41	71.07	68.65
Donggala	65.69	63.93	67.47	72.03	66.57	68.42
Tolitoli	62.38	65.95	64.04	64.70	68.80	68.91
Buol	67.14	69.75	67.52	69.18	69.43	70.50
Parimo	68.30	72.50	68.82	74.05	73.30	74.68
Touna	78.69	75.33	74.86	68.47	75.06	75.08
Sigi	69.16	69.24	70.76	72.69	70.94	75.92
Balut	65.41	67.20	61.42	58.37	59.17	68.98
Morut	65.76	69.85	68.47	69.93	70.33	70.35
Kota Palu	65.63	66.46	65.07	64.68	69.28	70.50
Sulteng	67.80	69.44	68.73	69.99	69.85	71.10
Nasional	67.50	67.80	67.80	68.63	69.48	70.63

Sumber: BPS Tahun 2025 (data diolah)

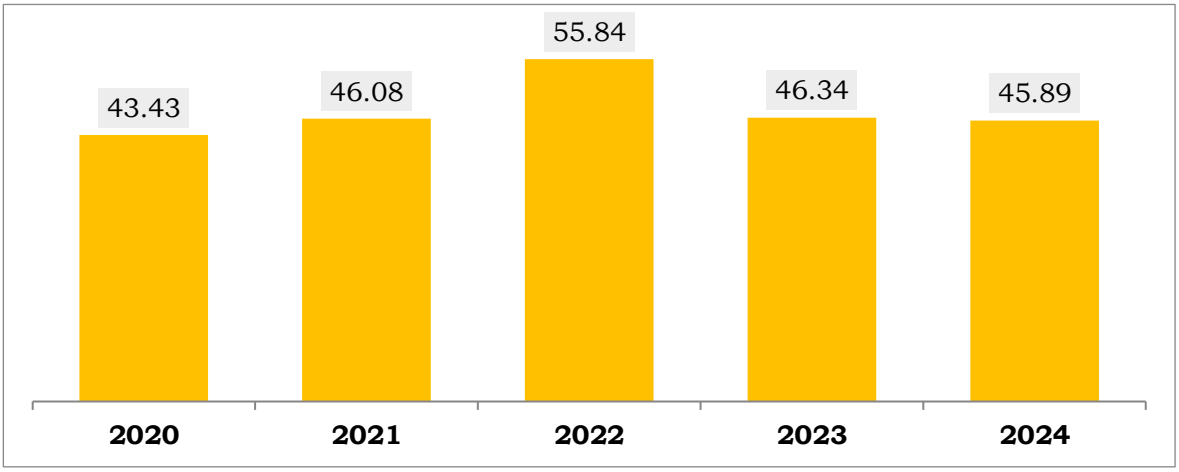
Berdasarkan tabel di atas, TPAK Kabupaten Morowali selama periode 2019–2024 menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan daerah lain, sehingga menempatkan Kabupaten Morowali sebagai kabupaten dengan TPAK terendah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Kabupaten dengan TPAK tertinggi adalah Kabupaten Sigi sebesar 75.92 persen, Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 75.08 persen dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 74.68 persen serta berada diatas rata-rata provinsi (71.10 persen) dan nasional (70.63 persen) yang menunjukkan partisipasi tenaga kerja yang tinggi. Kinerja TPAK Kabupaten Morowali yang rendah ini tidak sebanding dengan potensi ekonominya, dan menunjukkan adanya tantangan struktural dalam penyerapan tenaga kerja lokal atau partisipasi kerja perempuan, pemuda, dan sektor informal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

B. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menyebarkan inovasi. Inovasi di sini mencakup berbagai aspek seperti teknologi, kebijakan, serta praktik terbaik dalam sektor publik dan swasta. Kemampuan inovatif suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, indeks inovasi daerah tercatat sebesar 43,43 kemudian meningkat pada Tahun 2022 menjadi 46,08. Angka ini mengalami peningkatan cukup tajam pada tahun 2022, mencapai 55,84, yang menunjukkan adanya perbaikan

dan upaya inovatif yang berhasil diimplementasikan pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2024, indeks inovasi kembali turun menjadi 45,89.



Sumber : Manual Book Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 (Data Diolah)

Gambar 2.46
Indeks Inovasi Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Peningkatan indeks inovasi pada tahun 2022 mencerminkan berbagai inisiatif dan program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali untuk mendorong inovasi. Ini bisa termasuk peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, penguatan infrastruktur teknologi dan komunikasi, serta kebijakan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi mungkin juga meningkat pada periode ini, mendorong pertumbuhan inovasi yang signifikan.

Namun, penurunan indeks pada tahun 2023 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa keberlanjutan upaya inovatif tersebut mungkin menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan penurunan ini termasuk berkurangnya investasi dalam R&D, masalah dalam implementasi kebijakan, atau kurangnya dukungan yang berkelanjutan untuk program inovasi. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, diperlukan pendekatan yang lebih konsisten dan terstruktur untuk memastikan pertumbuhan inovasi yang berkelanjutan.

Selanjutnya data Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan dalam kemampuan inovatif masing-masing daerah. Kota Palu mencatat indeks tertinggi dengan 51,05 dalam kategori "Inovatif," menunjukkan kemampuan yang baik dalam menciptakan dan mengadopsi inovasi. Di sisi lain, Kabupaten Donggala mencatat indeks terendah sebesar 5,1 dan masuk dalam kategori "Kurang Inovatif," menunjukkan tantangan besar dalam aspek inovasi.

Tabel 2.41
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Skor Indeks	Predikat
Bangkep	33,84	Inovatif
Banggai	59,81	Inovatif
Morowali	**45,89**	**Inovatif**
Poso	26,16	Korang Inovatif
Donggala	6,10	Korang Inovatif
Tolitoli	39,81	Inovatif
Buol	34,55	Inovatif
Parimo	49,39	Inovatif
Touna	50,47	Inovatif
Sigi	38,14	Inovatif
Balut	40,89	Inovatif
Morut	39,99	Inovatif
Kota Palu	55,91	Inovatif
Sulteng	55,22	Inovatif

Sumber : Manual Book Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024

Kabupaten Morowali, dengan indeks inovasi 45,89, juga masuk dalam kategori "Inovatif." Meskipun tidak setinggi Kota Palu (55,91) atau Banggai (59,81), angka ini menunjukkan bahwa Morowali memiliki potensi yang signifikan dalam bidang inovasi. Dibandingkan dengan kabupaten lain yang masuk dalam kategori "Kurang Inovatif" seperti Banggai Poso (26,16) dan Donggala (6,10), Morowali menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal inovasi. Indeks ini mencerminkan adanya upaya dan program yang telah berhasil meningkatkan kapasitas inovasi di Morowali, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan, peningkatan infrastruktur teknologi, dan kebijakan yang mendukung inovasi.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Indeks Ekonomi Hijau

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

B. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indonesia Blue Economy Index (IBEI) bertujuan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja ekonomi biru di berbagai daerah di Indonesia. Ekonomi biru merupakan pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

C. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer memainkan peran penting dalam upaya transisi energi menuju sistem yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Peningkatan kontribusi EBT seperti tenaga surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi nasional, yakni sebesar 17-19 persen pada tahun 2025.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Kondisi Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini memuat indikator-indikator seperti rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.1.3.5 Integritas Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global yang dilengkapi dengan indikator-indokator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang iklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan pedesaan mandiri yang berkelanjutan, yang dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks

Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi yang relatif tinggi akan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi di suatu daerah perlu dikendalikan, sehingga diharapkan tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

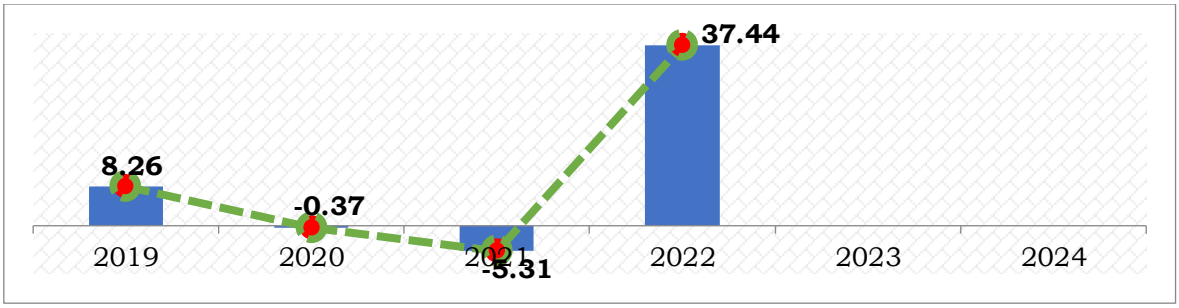
Tabel
Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Inflasi	0,83	2,48	6,62	4,35	1,23

Sumber: BPS Sulawesi Tengah Tahun 2025 (data diolah)

B. Pertumbuhan Industri

Kabupaten Morowali telah berubah menjadi *Sulawesi Mining Industry* di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah selama beberapa tahun terakhir telah menjadi kawasan pertambangan bouksit dan nikel terbesar keenam di dunia (menurut US Geological Survey). Para pakar pertambangan memperkirakan Kabupaten Morowali mempunyai prospek kegiatan industri yang luar biasa besar karena di bawah tanahnya tersedia materi lithium 40 persen dari produksi lithium dunia. Pertumbuhan industri diukur dari jumlah industri setiap tahun di Kabupaten Morowali.



Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Gambar 2.47
Pertumbuhan Industri Kabupaten Morowali Tahun 2019-2025

Merujuk pada data yang dipublikasi oleh BPS, diketahui pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali cenderung naik dan berfluktuatif. Tahun 2019 pertumbuhan Industri sebesar 8.26 persen, kemudian pada Tahun 2020 pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar -0.37 persen sampai Tahun 2021 sebesar -5.31 persen. Tahun 2022 industri di Kabupaten Morowali meningkat sebesar 37.44 persen. Meski, pertumbuhan jumlah industri tidak stabil, namun nilai produksi dan kontribusi Sektor Industri di Kabupaten morowali selalu meningkat setiap Tahun. Hal ini dikarenakan industri yang terdapat di Kabupaten Morowali adalah industri besar yang tetap beroperasi.

C. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang mencakup distribusi dan pertukaran barang dan jasa antar pelaku usaha, konsumen, serta antarwilayah. Sektor ini menjadi penghubung utama antara produsen dan konsumen, serta berperan penting dalam mendorong perputaran ekonomi daerah. Perdagangan yang berkembang mencerminkan dinamika permintaan, daya beli masyarakat, serta efisiensi logistik dan infrastruktur. Sebagai salah satu sektor strategis, perdagangan turut mendukung pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kategori ini terdiri atas subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.42
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Morowali Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Juta Rp)						
ADHB	45,349,583.00	62,148,344.30	98,916,807.40	146,772,468.40	158,046,434.90	173,864,990.00
ADHK 2010	34,102,749.30	43,902,294.40	55,001,244.60	70,621,469.60	84,987,244.40	98,808,770.00
Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rp)						
ADHB	960,770.50	949,451.70	1,065,441.30	1,832,172.10	1,996,082.90	2,419,030.00
ADHK 2010	620,626.90	589,746.00	642,836.10	1,042,806.90	1,096,933.80	1,231,820.00
Kontribusi Sektor (%)						
ADHB	2.12	1.53	1.08	1.25	1.26	1.39
ADHK 2010	1.82	1.34	1.17	1.48	1.29	1.25

Sumber: BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali selama periode 2019–2024 berdasarkan ADHB dan ADHK 2010 mengalami fluktuasi. Meskipun nilai absolut PDRB sektor perdagangan mengalami peningkatan Tahun 2020-2023, kontribusi terhadap PDRB total justru mengalami penurunan. Tahun 2019, kontribusi sektor perdagangan sebesar 2.12 persen (ADHB) dan 1.82 persen (ADHK), namun terus

menurun hingga 1.39 persen (ADHB) dan 1.25 persen (ADHK) Tahun 2024. Penurunan kontribusi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan tidak secepat sektor-sektor lainnya seperti pertambangan atau industri pengolahan yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Morowali. Meskipun peran perdagangan tetap penting dalam mendukung perputaran barang dan jasa, kondisi ini mencerminkan perlunya strategi penguatan sektor perdagangan agar tetap kompetitif dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek layanan umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang terbagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta penunjang pemeirntahan. Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Morowali. Layanan umum mencakup penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur dasar, transportasi, air bersih, dan energi, yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Indikator kinerja pelaksanaan pembangunan pada aspek ini selama periode 2019–2024 menjadi tolok ukur penting untuk menilai efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan umum yang merata, inklusif, dan berkualitas menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi, kerangka hukum, yang memuat indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan pilar penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif. Untuk mengetahui capaian pembangunan di bidang ini,

terdapat lima indikator utama yang dapat diukur sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 di Kabupaten Morowali

No	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	975	975	825	825	825
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	8.00	8.00	5.00	14.00	14.00
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7.00	7.00	7.00	14.00	14.00

Sumber: SIPD Kabupaten Morowali Tahun 2024

Berdasarkan tabel ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama Tahun 2020-2024, terlihat bahwa jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami penurunan, begitupula tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) menglalami peningkatan. Hal serupa terjadi pada cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota yang stabil pada angka 7 layanan selama 2020–2022, dan meningkat menjadi 14 layanan Tahun 2023-2024. Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek penanganan ketertiban dan kedaruratan, meskipun diiringi dengan berkurangnya jumlah petugas Linmas yang berdampak pada efektivitas jangka panjang.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan, memuat tentang indikator-indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Tabel 2.44

EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA, KINERJA DAERAH DAN KINERJA KUNCI

TAHUN 2020 S/D 2024

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKKLPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4							9
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**										
1,1	**Ketahanan Energi,Air dan Kemandirian Pangan**										
1	Indeks Ketahanan Pangan		√	√		82,44	81,98	81,51	82,36	81,44	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan		√	√		4,97	7,03	6,69	7,9	4,14	
3	Konsumsi Listrik Perkapita		√	√		337,29	411,5	391,41	362,6	335,24	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum		√			30,90	31,25	36,33	36,15	37,30	
5	Kapasitas Air Baku			√		60.613,80	60.613,80	60.613,80	60.613,80	66.563,6	
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan			√		14,71	14,95	15,40	15,56	37,30	

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKKLPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
1,2	**Kualitas Lingkungan Hidup**										
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		√	√		0	0	0	0	0	
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		√	√		NA	29,515.50	30,643,58	32,164.53	31,107.13	
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanna Penuh Pengumpulan Sampah		√	√		60	60	65	65	70	
4	Persentase timbulan sampah yang dikelola (daur ulang)			√		NA	49,17	NA	NA	92,59	
5	Proporsi Limbah B3 yang dikelola			√		31,25	37,5	62,5	81,5	83,33	
1,3	**Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim**										
1	Penurunan Insensitas Emisi GRK		√	√		21,21	-12,21	17,83	11,27	18,52	
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)		√	√		173.80	174.82	174.82	173.25	171.17	

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKK LPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		√			NA	NA	NA	0,34	0,34	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		√	√		63,71	82,33	81,01	79,27	80,84	
1,4	**Demografi**										
1	Rasio Penduduk		√			122,9	122,53	122,15	122,35	115	
2	Kepadatan Penduduk		√			29,55	30,69	32,21	31	36,36	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk		√			0,95	4,54	2,01	1,93	8,16	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
2,1	**Kesejahteraan Ekonomi**										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		√	√		28.93	25.15	28.21	20.34	16.26	
2	Tingkat Kemiskinan	√	√	√		13,43	13,75	12,58	12,31	11,55	

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKK LPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3	PDRB Per Kapita	√	√	√		274.653,69	334.608,67	421.701,28	498.616,86	570.117,47	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka		√	√		5,21	5,08	3,20	2,84	2,84	
5	Indeks Gini	√	√	√		0,290	0,297	0,285	0,281	0,275	
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal			√		42	45	42	48	49	
7	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	√	√	√		73.06	73.12	73.39	73.82	74.36	
2,2	**Kesehatan untuk Semua**										
1	Usia Harapan Hidup	√	√	√		69,18	69,23	69,23	69,37	70,84	
2	Prevalensi Stunting		√	√		NA	28,90	23,30	26,00	22,60	
3	Angka Kematian Ibu	√		√		65,62	353,24	282,26	127,63	248,02	
4	Angka Kematian Anak	√		√							

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKK LPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
*	Angka Kematian Bayi	√		√		13.45	14.45	23.39	14.36	NA	
*	Angka Kematian Balita	√		√		14.44	15.90	25.81	15.95	3.60	
5	Cakupan penemuan kasus TB (treatment coverage)					207	271	354	361	705	
6	Angka Keberhasilan pengobatan TB (treatment success rate)					80	90.2	103.6	90	89.9	
7	Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional		√			149.225	160.434	163.600	178.220	214.927	
8	Indeks Keluarga Sehat		√			0.2	0.412	0.432	0.432	0.444	
9	Indeks Kesehatan					0,756	0,757	0,757	0,76	0,79	
2,3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**										
1	Rata-rata Lama Sekolah	√	√	√		9,33	9,34	9,35	9,37	9,38	
2	Harapan Lama Sekolah	√	√	√		13,34	13,35	13,36	13,38	13,39	

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKK LPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3	Angka Literasi/Numerasi :		√								
4	Literasi Membaca SD					NA	42,86	47,44	52,05	56,92	
5	Literasi Membaca SLTP					NA	54,89	58,65	62,01	65,94	
6	Numerasi SD					NA	31,87	35,83	40,98	50,19	
7	Numerasi SLTP					NA	54,89	58,65	56,33	58,44	
8	APS PAUD					0,00	0,38	0,29	0,16	0,12	
9	APS SD/SMP	√				0,00	0,20	0,18	0,38	0,32	
10	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi			√		NA	NA	NA	NA	11,50	
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		√	√		NA	NA	NA	58,71	61,68	
12	Indeks Literasi Digital		√			NA	NA	40,77	45,97	44,98	

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKKLPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
13	Indeks Pendidikan					67,68	68,22	68,28	68,4	68,46	
2,4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**										
1	Rumah Layak Huni	√		√		72,64	78,25	81,71	82,78	82,55	RPJPD
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bersih			√		89,64	93,17	91,91	90,97	88,92	RPJPD
3	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak			√		NA	NA	NA	NA	23,59	RPJPD
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (100%)					0	0	0	0	0	
2,5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**										
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama					67,46	72,39	75,30 *	75,80 *	76,2 *	
2	Persentase Jalan Kondisi Mantap			√		56,76	58,71	33,90	29,80	32,46	RPJPD

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKKLPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase Akses Jaringan Internet			√		59,09	78,76	86,33	86,90	87,00	RPJPD
2,6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif**										
1	Indeks Perlindungan Anak		√			NA	81,14	78,84	NA	NA	
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		√	√		NA	50,54	57,72	66,33	66,60	RPJPD
3	Indeks Pembangunan Keluarga					NA	50,54	57,72	66,33	66,60	
4	Indeks Ketimpangan Gender		√	√		0,568	0,601	0,581	0,57	0,476	RPJPD
5	Indeks Pemberdayaan Gender					51,56	51,08	55,25	56,01	64,5	
6	TPAK Perempuan			√		47,84	46,44	36,97	24,21	30,82	RPJPD
7	Indeks Pembangunan Gender		√			84,89	85,03	85,14	85,19	85,42	
8	Indeks Pembangunan Pemuda		√			51,10	52,00	53,2	54,10	55,00	

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKK LPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
3,1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**										
1	Angka Ketergantungan		√			43,43	43,43	43,38	45,06	54,75	
3,2	**Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi**										
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			√		6,13	6,27	NA	NA	NA	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan		√	√		35,25	24,88	31,91	25,29	20,01	
3	Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum		√	√		-10,48	14,2	56,25	16,93	15,41	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	√	√			64,7	63,75	60,74	58,52	61,49	
5	Indeks Inovasi Daerah		√	√		43,43	46,08	55,84	46,34	45,89	

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKK LPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase UMKM yang naik kelas					NA	NA	2,06%	4,05%	5,18%	
3,3	**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**										
1	Indeks Ekonomi Biru Indonesia		√	√		NA	NA	NA	44,78	39,20	
3,4	**Transformasi Digital**										
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		√	√		NA	NA	NA	NA	NA	
3,5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**										
1	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)			√		19,04	22,75	39,19	47,1	54,66	
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)			√		10.174	26.837	37.313	37.876	39.511	
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)			√		16.791	45.313	66.841	69.778	77.647	

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKKLPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
4	Ekspor Barang dan Jasa			√		39.402	46.652	71.906	79.976	85.535	
3,6	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**										
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)			√		34	7	79	426	108	
2	Presentase Desa Mandiri		√	√		0,79	0,79	2,83	17,5	30,95	
3	Indeks Desa Membangun					0,6147	0,6261	0,6528	0,6871	0,7286	
3,7	**Stabilitas Ekonomi Makro**										
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		√	√		1,89	2,41	2,75	3,67	6,48	
2	Tingkat Inflasi		√	√		0,83	2,48	6,62	4,35	1,23	
3	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi			√		31,43	40	45,5	45,75	46,01	RPJPD

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKK LPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
4	Pertumbuhan Industri	√				-0,37	-5,31	37,44	NA	NA	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
4,1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**										
1	Indeks Reformasi Hukum		√	√		NA	NA	NA	45,1	87,18	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		√	√		NA	1,35	1,97	2,88	3,25	
3	Indeks Reformasi Birokrasi			√		NA	C	CC	CC	B	
4	Indeks Pelayanan Publik		√	√		NA	54,4	61,95	60,9	73,43	
5	Indeks Integritas Nasional		√	√		NA	74,56	73,55	71,86	NA	
6	Nilai SAKIP					C	C	C	CC	B	
4,2	**Hukum Berkeadilan, Keamananan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial**										

NO	INDIKATOR	Permendagri 86	INMEN No 2	RPJPD	IKK LPPD	CAPAIAN					KET.
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Penegakan Perda		√	√		89%	90%	100%	100%	100%	
2	Indeks Profesionalitas ASN			√		NA	48,73	48,21	67,39	62,67	
4,3	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel**										
1	Indeks Daya Saing Daerah		√	√		0	0	3,13	2,26	2,99	
2	Nilai Maturitas SPIP			√		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Nilai Kapabilits APIP			√		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4	Survei Penilaian Integritas			√		NA	74,56	73,55	71,86	NA	
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			√		NA	NA	60,97	81,05	81,05*	

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.45
Eavlausi Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci
Tahun 20202 s/d 2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah						
A	**Urusan Pemerintahan Wajib**						
1	**Wajib Pelayanan Dasar**						
1.1	**Pendidikan**						
1	Skor Literasi/Numerasi SD/SMP*						
-	Skor Literasi SD	NA	42,86	47,44	52,05	56,92	
-	Skor Literasi SMP	NA	54,89	58,65	62,01	65,94	
-	Numerasi SD	NA	31,87	35,83	40,98	50,19	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
-	Numerasi SMP	NA	54,89	58,65	56,33	58,44	
2	Skor Literasi/Numerasi PAUD *						
-	Harapan Lama Sekolah	9,33	9,34	9,35	9,37	9,38	
-	Rata-Rata Lama Sekolah	13,34	13,35	13,36	13,38	13,39	
3	Indeks Pendidikan	67,68	68,22	68,28	68,4	68,46	
4	Angka Putus Sekolah						
*	APS SD	0,00	0,38	0,29	0,16	0,12	
*	APS SMP	0,00	0,20	0,18	0,38	0,32	
*	APS SMA	0,44	0,45	0,48	5,10	0,00	
5	Angka Melek Huruf	98,76	98,65	99,14	98,91	99,25	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
6	Akreditasi Sekolah di Kabupaten Morowali						
*	Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD)	NA	NA	NA	20,33	NA	
	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	NA	NA	NA	84,97	NA	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	NA	NA	NA	97,3	NA	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	NA	NA	NA	88,89	NA	
7	Angka Partisipasi Kasar						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	108.95	109.42	109.40	96.86	107.45	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	103.84	102.31	99.41	95.01	103.78	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	81,03	83,39	98,22	89,15	96,68	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
8	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	100	100	100	100	100	
9	Angka Partisipasi Murni						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	94,72	95,07	93,67	93,68	92,34	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	73,49	73,23	73,13	74,53	78,18	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	67,54	69,71	70,62	79,34	70,45	
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	98.84	97.06	97.78	97.04	96.86	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	94.97	94.40	94.97	95.39	95.00	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	89,35	89,75	90,06	92,49	NA	
11	Angka Kelulusan						

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
*	SD	100	100	100	100	100	
*	SMP	100	100	100	100	100	
*	SMA	100	100	100	100	100	
12	Angka Yang Melanjutkan						
*	SD	100	100	100	98,4	98,53	
*	SMP	100	98,90	99,71	99,03	99,12	
*	SMA	73,18	76,80	76,41	79,00	NA	
13	Fasilitas Pendidikan						
14	Rasio Ketersediaan Sekolah						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	1:120	1:108	1:99	1:95	1:95	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	1:160	1:160	1:170	1:175	1:175	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	1 : 251	1 : 275	1 : 269	1 : 200	1 : 200	
15	Rasio Guru/Murid Sekolah						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	10,2	11,55	11,39	11,46	11,09	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	12,29	11,81	12,73	13,15	12,53	
16	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah						
*	Pendiidkan Anak Usia Dini (SD/MI)	1:22	1:23	1:23	1:17	1:13	
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	1:14	1:14	1:14	1:12	1:12	
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 19	1 : 19	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	NA	82,37	87,69	99,96	90,14	
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	NA	92,53	94,2	99,53	111,67	
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	NA	69	80,12	93,58	99,42	
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	NA	100	100	100	100	
1.2	**Kesehatan**						
1	Umur Harapan Hidup	69,18	69,23	69,23	69,37	69,41	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
2	Prevalensi Stunting	NA	28,9	23,3	26	22,6	
3	Indeks Kesehatan	0,756	0,757	0,757	0,76	0,79	
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	2,6	14,5	7,6	14,5	10,5	
5	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	3,6	15,1	9,5	16,1	12,2	
6	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	10,8	12,5	11,3	11,9	8,1	
7	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	65,6	353,2	214	129	237	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	149.225	160.434	163.600	178.220	214.927	
9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	1,22	1,48	0,8	1,0	1,1	
10	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,254	0,268	0,261	0,257	0,221	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
11	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,012	0,012	0,011	0,017	0,015	
12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,396	0,506	0,448	0,53	0,533	
13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	4.198	4.425	5.963	7.640	9.243	
14	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	
16	Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak	145	140,9	155,5	119,9	125,7	
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	207	271	354	361	705	
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	127.99	161.40	200.86	201.46	354.33	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	77	59	176	183	394	
20	Penderita Diare Yang Ditangani	1,795	2,304	2,911	2,865	3,167	
21	Angka Kejadian Malaria	6,18	5,96	10,78	5,58	6,38	
22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0,007	0,003	0,020	0,035	0,040	
23	Cakupan Puskesmas	122.22	122.22	133.33	133.33	120.00	
24	Cakupan Pembantu Puskesmas	19.55	18.57	18.57	18.57	19.29	
25	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	80.49	78.33	82.18	74.09	77.24	
26	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	NA	NA	1.82	2.13	2.21	
27	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	NA	50	50	100	100	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
28	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	NA	100%	100%	100%	74.93%	
29	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	NA	100%	100%	100%	100%	
30	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	NA	100%	100%	100%	100%	
31	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	NA	100%	100%	100%	100%	
32	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	62.29	100%	100%	99.89%	
33	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	NA	100%	100%	100%	75.46%	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
34	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	NA	94.3	100%	100%	83.19%	
35	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	100%	100%	100%	86.72%	
36	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	100%	100%	100%	91.92%	
37	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	NA	100%	100%	100%	89.22%	
38	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	NA	100%	100%	100%	90.56%	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	NA	100%	100%	100%	100%	
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
1	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	18,4	18,5	18,7	18,9	19	
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,15	0,19	0,18	0,24	0,20	
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,0059	0,0057	0,0054	0,0053	0,0056	
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	19,98	20,08	24,3	31,79	25,28	
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	82,8	78,34	71,8	65,22	75,16	
6	Rasio Jaringan Irigasi	0,697	0,72	0,87	0,61	NA	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
7	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	89,64	93,17	91,91	90,97	88,92	
8	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk	2,05	1,98	2,08	2,06	2,36	
9	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	46,42	46,7	51,35	53,95	
10	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di Wilayan Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	53,66	54,01	56,60	59,82	
11	rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	NA	65,46	46,14	68,26	87,00	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
12	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	NA	13,47	56,69	70,46	72,29	
13	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	NA	68,97	71,48	78,28	78,50	
14	rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	NA		1,58	100	43,27	
15	tingkat kemantapan jalan	NA	60,81	64,62	45,05	33,22	
16	rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	NA	2,12	7,45	10,00	9,4	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
17	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	NA	100	100	100	100	
1.4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**						
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	72,64	78,25	81,71	82,78	82,55	
3	Rasio Rumah Layak Huni	72,64	78,25	81,71	82,78	82,55	
4	capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	NA	135	100	100	100	
5	capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	NA	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
6	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	NA	NA	5,89	2,51	3,67	
7	penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	NA	19,97	17,45	17,22	6,65	
8	persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	NA	93,81	97,91	97,91	97,91	
1.5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**						
	Pol PP						
1	Angka Kriminalitas	28,00	19,42	19,42	9,21	9,21	
2	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	975	975	825	825	825	
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	8	8	5	14	14	
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	NA	100	75	100	100	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	NA	75	50	92,86	61,11	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	NA	NA	100	60,78	1,67	
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	NA	NA	100	60,78	28,67	
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	NA	NA	100	100	84,51	
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	NA	100	100	78,57	100	
10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	NA	50	5	13	38	
	Penanggulangan Bencana						
1	Indeks Resiko Bencana	173.80	174.82	174.82	173.25	171.17	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	NA	NA	NA	0,34	0,34	
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7.00	7.00	7.00	14.00	14.00	
1.6	**Sosial**						
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	50.330	50.680	51.030	52.411	53.411	
2	Persentase PMKS yang tertangani	99	107,67	116,34	89,03	89,04	
3	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	1	1	0	0	
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100	100	
5	Korban bencana alam (Jiwa/KK)	605	0	2.850	414	394	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	8	0	0	0	0	
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	17,55	23,74	39,2	43,73	
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	NA	100	100	100	100	
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**						
2.7	**Tenaga Kerja**						
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	NA	69,78	187,55	94.53	175.67	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.21	4,01	3.20	2.84	2.84	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,7	63,75	60,74	58,52	61,49	
4	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang)	28	32	35	38	41	
5	Rasio Lulusan S1/S2/S3	14,27	14,87	15,12	15,72	16,32	
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	83,33	100	26,67	50	
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	NA	3,51	5,2	5,85	14,87	
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	NA	100	55,55	100	62,5	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	NA	39,99	24,49	59,99	40,22	
2.8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,89	85,03	85,14	85,19	85,42	
2	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	0,568	0,601	0,581	0,57	0,476	
3	Indeks Pemberdayaan Gender	51,56	51,08	55,25	56,01	64,5	
4	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan dan swasta	8,59	9,99	11,74	10,59	21,21	
5	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	4	4	4	4	4	
6	Rasio KDRT	0,21	0,15	0,15	0,21	0,21	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
7	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,84	46,44	36,97	24,21	30,82	
8	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	1,03	1,03	1,06	1,03	1,07	
9	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	0,93	0,93	0,87	1,03	0,92	
10	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	1,09	1,09	1,01	1,18	1,1	
11	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	NA	NA	25,17	6,89	32,49	
12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	NA	100	100	100	100	
13	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	NA	17,65	16,66	20,03	0,021	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
2.9	**Pangan**						
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,44	81,98	81,51	82,36	81,44	
2	Ketersediaan Pangan Utama	152,75	158,9	132,32	235,63	249,85	
3	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
	Energi (Kilo Kal)	2,268.83	2,153.32	2,040.88	2,256.01	2,067.61	
	Protein Perkaapita (Gram)	65.42	64.35	61.15	68.42	64.10	
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	NA	NA	540,02	50,85	76,93	
2,1	**Pertanahan**						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	NA	NA	100	100	100	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
2	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	NA	NA	100	100	100	
3	persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	NA	NA	100	100	NA	
4	persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	NA	100	55	57,6	NA	
5	persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	NA	100	NA	NA	NA	
2.11	**Lingkungan Hidup**						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	82,33	81,01	80,01	78,17	
2	Indeks Kualitas Air	NA	15,75	68,89	67,33	64,39	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	NA	38,36	92.22	92,26	83,46	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
4	Indeks Kualitas Udara	NA	28,47	86,2	83,33	92,6	
5	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
9	Penetapan Hak MHA	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
10	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	
11	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	NA	15,88	15,13	14,19	18,15	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
12	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	NA	75	60	33,33	9,71	
2.12	**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	NA	1	0,99	1	0,99	
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	NA	0,18	0,25	0,13	0,06	
3	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
5	Perekaman KTP elektronik	NA	100	99,02	100	99,58	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	NA	18,46	31,82	61,56	45,59	
7	Kepemilikan akta kelahiran	NA	89,03	97,68	97,17	97,62	
8	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	NA	17,95	18,92	100	100	
2.13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6147	0,6261	0,6528	0,6871	0,7286	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100	100	100	100	100	
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	143	143	143	143	144	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
4	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	
5	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	
6	Persentase pengentasan desa tertinggal	NA	74	86	44.19	0	
7	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	NA	25.67	48.65	23.75	44,44	
2.14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	NA	50,54	57,72	66,33	66,60	
2	Angka Stunting (SSGI)	NA	28,9	23,3	26	22,6	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	33.33	3.82	4.96	1,67	11.04	
4	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	80.08	88.54	87.34	85.99	88.69	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	85.09	57.14	68.71	99.75	59.37	
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	39.16	15.90	17.54	25.41	16.70	
7	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	
8	TFR (Angka Kelahiran Total)	NA	NA	0.911	02.04	1.81	
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	NA	58.74	69.02	72.18	66.81%	
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	NA	0.07	0.15	8.81	17.81%	
2,2	**Perhubungan**						
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	17.145,00	18.241,00	18.851,00	32.400,00		
2	Rasio Ijin Trayek	20	10	12	36	NA	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	3	3	NA	
4	Pemasangan Rambu-Rambu	310	45	57	189	NA	
5	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1:5	1:7	1:9	01:11	NA	
6	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun						
	Angkutan Laut						
	Jumlah Penumpang Turun	8.726,00	9.556,72	9.676,72	11.604,00	NA	
	Jumlah Penumpang Naik	8.726,00	9.194,62	9.718,62	10.692,00	NA	
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	8.419,00	210.788,55	214.033,55	6.684,00	NA	
	Jumlah barang muat (ton)	200.751,00	470.110,20	500.409,20	5.964,00	NA	
	Angkutan Udara						
	Jumlah Penumpang Datang	32.301,00	31.271,00	31.271,00	56.092,00	NA	
	Jumlah Penumpang Berangkat	58.447,00	21.973,00	21.973,00	50.431,00	NA	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	15.247,00	270.442,00	244.256,00	450.705,00	NA	
	Jumlah barang muat (ton)	122.089,00	100.059,00	99.202,00	280.291,00	NA	
7	rasio konektivitas Kabupaten/Kota	NA	NA	0.49	0.51	0.51	
8	kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	NA	17	0.87	0	0.34	
2,2	**Komunikasi dan Informatika**						
1	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	NA	1,35	1,97	2,88	3,25	
2	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Layanan	NA	2,11	2,87	3,70	4,00	
3	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen	NA	1,00	1,00	1,18	1,64	
4	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Tata Kelola	NA	1,10	1,30	2,50	2,80	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
5	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Kebijakan	NA	1,00	1,30	2,90	3,50	
6	Akses Jaringan Komunikasi	59,09	78,76	86,33	86,90	87,00	
7	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	81.56	84.05	79.09	77.88	81.71	
8	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	39.05	55.63	61.03	61.22	68.48	
9	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	12.25	8.47	60.04	6.5	8.69	
10	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	NA	100	75.68	76.32	74.36	
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	NA	90	34,86	97,3	100	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
12	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NA	100	57,44	68,36	100	
2,2	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
1	Persentase Koperasi Aktif	36,36	36,36	39,1	40,12	43,2	
2	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	NA	7,33	21,31	21,54	21,92	
3	persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	NA	12,76	1,9	4,05	7,95	
2,2	**Penanaman Modal**						
1	Persentase Peningkatan Investasi	NA	27,05	33,55	-4,99	28,10	
2	Nilai Investasi	22.648.600.000.000	28.778.945.480.000	96.602.530.000.000	91.786.100.000.000	117.577.986.923.142	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	67	87	87	70	70	
4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	22.648.600.000.000	28.778.945.480.000	96.602.530.000.000	91.786.100.000.000	117.577.986.923.142	
5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	NA	27,05	33,55	-4,99	28,10	
2,2	**Kepemudaan dan Olahraga**						
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	51,10	52,00	53,20	54,10	55,00	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	NA	0,81	1,83	2,21	2,14	
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	NA	2,02	78,73	62,20	21,50	
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	NA	1	171	15	1	
2,2	**Statistik**						

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
2	Buku Kabupaten dalam angka	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
3	Buku “PDRB”	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalammelakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	
2,2	**Persandian**						
1	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	NA	1,35	1,97	2,88	3,25	
2	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Layanan	NA	2,11	2,87	3,70	4,00	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen	NA	1,00	1,00	1,18	1,64	
4	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Tata Kelola	NA	1,10	1,30	2,50	2,80	
5	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Kebijakan	NA	1,00	1,30	2,90	3,50	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	100	0	0	52,4	
2,2	**Kebudayaan**						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	NA	68,18	90,62	90,22	80	
2,2	**Perpustakaan**						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	NA	6,4	70,63	27,81	156,14	
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	2286	2628	2508	5105	5105	
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	NA	39,43	56,86	61,28	60,53	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
2,2	**Kearsipan**						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	NA	42,64	0	27,51	27,28	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	NA	1	0	1	1	
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**						
3,3	**Kelautan dan Perikanan**						
1	Nilai Tukar Nelayan	NA	NA	NA	104,40	93,22	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	NA	NA	NA	114,76	91,42	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	3.18	2.62	02.08	1.72	1.51	
4	Produksi Perikanan (ton)						
	Produksi Perikanan Laut	32203,2	33309,3	33420,8	37775	33449	
	Produksi Perikanan Darat	618,9	2993	2981	3463		
5	Produksi Perikanan Budidaya	18260	58414	2220,32	34292	9505,24	
6	Konsumsi Ikan	51	56,41	57,3	52,33	64,16	
7	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
3,3	**Pariwisata**						
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi , Makan, Minum	-10,48	14,2	56,25	16,93	15,41	
2	Jumlah Kunjungan Wisata	5495	7241	3624	3516	6194	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Lama Kunjungan Wisata	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	NA	-0.79	10,29	4,39	1,63	
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	NA	17,36	-50,99	460	96,96	
6	Tingkat hunian akomodasi	NA	18,03	100	28,61	23,51	
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	NA	0,01	0,01	0,01	0,01	
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	NA	0,01	0,01	0,01	0,01	
3.27	**Pertanian**						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	NA	NA	NA	101,83	117,69	
2	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	3.18	2.62	02.08	1.72	1.51	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
	Padi	4,56	5,111	4,567	4,9	4,015	
	Jagung	1,581	1,581	1,581	4,1	NA	
	Ubi Jalar	20,395	20,395	20,395	12,974	NA	
	Ubi Kayu	29,069	29,069	29,069	25,544	NA	
	Kacang Tanah	1,077	1,077	1,077	1,06	NA	
	Kacang Kedelai	20.82	20.82	20.82	11.10	NA	
	Kacang Hijau	0.66	0.66	0.66	1.00	NA	
4	Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
	Padi	44.915,00	46.221,00	42.583,00	26.940,00	NA	
	Jagung	8.010,58	4.368,42	4.937,22	684,7	NA	
	Ubi Jalar	1.091,51	1.378,25	778,44	648,7	NA	
	Ubi Kayu	4.823,76	6.259,73	5.070,48	3.677,57	NA	
	Kacang Tanah	59,47	78,43	55,12	45,07	NA	
	Kacang Kedelai	303,88	190	267,3	352	NA	
	Kacang Hijau	57,986	45,43	34,37	41,5	NA	
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	NA	-74.93	-25.61	48.37	-41,87	
3,3	**Perdagangan**						
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1.53	01.08	1.25	1.26	1.39	
2	Net Ekspor Barang Dan Jasa (ADHK)	30,229.00	39,453.40	37,654.87	52,683.40	53,552.96	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	NA	100	56,96	100	19,35	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	NA	100	58,33	8,33	79,56	
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	NA	1,89	8,09	0,17	1,57	
3,3	**Perindustrian**						
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	65.63	65.42	67.36	70.13	73.00	
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	NA	5,43	7,68	5,63	17,6	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di	NA	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
	Daerah kabupaten/kota						
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	100	100	100	100	
3,3	**Transmigrasi**						
1	Persentase penduduk miskin di Kawasan transmigrasi yang di Bina	NA	NA	NA	NA	NA	
4	**Unsur Pendukung**						
4,1	**Sekretariat Daerah**						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	C	CC	CC	B	
2	Nilai Sakip	C	C	C	CC	B	
3	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	NA	NA	NA	NA	NA	
4,2	**Sekretariat DPRD**						

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
5	**Unsur Penunjang**						
5,1	**Perencanaan**						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5,2	**Keuangan**						
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	NA	60,97	81,05		
2	Indeks Penyerapan Anggaran	NA	NA	NA	NA	NA	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
3	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	NA	NA	NA	NA	NA	
4	Indeks Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	
5	Persentase SILPA Terhadap APBD	5,16	13,44	22,37	14,55	30,41	
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
7	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	NA	NA	NA	NA	NA	
8	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
*	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	NA	NA	NA	NA	NA	
*	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	NA	NA	NA	NA	NA	
*	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	NA	NA	NA	NA	NA	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
*	Total Kredit/PDRB (%)	NA	NA	NA	NA	NA	
	Inklusi Keuangan (%)	NA	NA	NA	NA	NA	
9	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	NA	14,6	16,04	13,69	14,96	
10	Rasio PAD	NA	31,2	22,6	30,87	35,09	
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	NA	3	3	3	3	
5,3	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**						
1	Indeks Profesionalitas ASN	NA	48,73	48,21	67,39	62,67	
2	Presentase disiplin ASN						
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	NA	219,7	64,47	63,63	62,1	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenagakesehatan)	NA	67,62	20,92	19,36	23,68	
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	NA	5,68	10,34	8,88	23,32	
5.5	**Penelitian dan Pengembangan**						
1	Indeks Inovasi Daerah	43,43	46,08	55,84	46,34	45,89	
6	**Unsur Pengawasan**						
6,1	**Inspektorat**						
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	NA	NA	74,56	73,55	71,86	
7	**Unsur Kewilayahan**						

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					KET.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2						9
7.1	**Kecamatan**						
1	Angka Kriminalitas	28,00	19,42	19,42	9,21	9,21	
8	**Unsur Pemerintahan Umum**						
8,1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**						
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	67,46	72,39	75,30	75,80	76,2	

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 menenkankan bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas utama dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Morowali selama periode 2019-2023 mencerminkan peran APBD sebagai instrumen utama dalam pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan. Evaluasi pelaksanaan APBD periode tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah memberikan kontribusi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. Gambaran ini menjadi dasar bagi perencanaan keuangan yang lebih terarah dan strategis untuk lima tahun ke depan.

2.2.1.1. Kinerja APBD

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset yang menjadi milik daerah. Pengelolaan keuangan daerah berfokus pada optimalisasi penerimaan serta mobilisasi sumber daya untuk mendukung program prioritas pembangunan melalui belanja daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah terus diupayakan agar pengelolaan keuangan mampu mendukung pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Morowali mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. APBD sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja (otorisasi), pedoman dalam perencanaan kegiatan (perencanaan), alat pengawasan terhadap realisasi anggaran (pengawasan), serta instrumen dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, APBD juga memiliki fungsi alokasi dalam menciptakan lapangan kerja dan mencegah pemborosan sumber daya serta fungsi distribusi dalam menjaga keadilan sosial dalam kebijakan fiskal daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 menunjukkan peran penting APBD sebagai alat pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah dan efisiensi belanja menjadi aspek utama dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU)

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. Struktur belanja daerah menunjukkan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal, dengan alokasi anggaran yang diarahkan untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Penguatan strategi fiskal diperlukan agar pendapatan daerah semakin optimal, belanja semakin efisien, dan pembiayaan tetap terkendali. Ke depan, pengelolaan APBD harus lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan pembangunan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Morowali.

Secara umum, realisasi dan pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut ini.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN**					
	A. Pendapatan Asli Daerah	310,035,234,830.19	342,477,281,405.69	365,423,439,486.41	604,842,155,981.29	1,040,860,702,662.41
	B. Pendapatan Transfer	950,310,721,772.00	1,163,244,070,798.00	1,241,778,035,961.00	1,377,057,801,292.00	1,916,472,936,378.00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32,256,371,064.58	27,944,689,550.00	9,846,525,000.00	0.00	9,032,755,284.00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,292,602,327,666.77**	**1,533,666,041,753.69**	**1,617,048,000,447.41**	**1,981,899,957,273.29**	**2,966,366,394,324.41**
2	**BELANJA**					
	A. Belanja Operasi	746,071,783,487.80	877,397,367,922.96	984,016,324,566.05	1,250,162,885,130.07	1,469,106,582,399.76
	B. Belanja Modal	281,977,622,416.40	265,271,692,859.15	270,600,055,246.44	543,928,058,678.00	669,791,931,658.06
	C. Belanja Tak Terduga	29,559,824,590.00	17,114,835,478.93	1,220,318,225.00	912,948,000.00	0.00
	D. Belanja Transfer	176,651,080,091.50	231,245,919,731.67	190,008,112,349.35	226,812,984,830.00	264,734,252,890.00
	JUMLAH BELANJA	**1,234,260,310,585.70**	**1,391,029,815,992.71**	**1,445,844,810,386.84**	**2,021,816,876,638.07**	**2,403,632,766,947.82**
	SURPLUS /(DEFISIT)	**58,342,017,081.07**	**142,636,225,760.98**	**171,203,190,060.57**	**(39,916,919,364.78)**	**562,733,627,376.59**
3	**PEMBIAYAAN**					
	A. Penerimaan Pembiayaan	10,785,438,665.30	67,849,651,981.51	199,187,411,009.15	355,578,669,400.38	312,648,749,009.60
	B. Pengeluran Pembiayaan	1,270,966,733.34	11,270,966,733.34	14,770,966,733.34	2,770,966,734.00	2,770,966,733.34
	PEMBIAYAAN NETTO	**9,514,471,931.96**	**56,578,685,248.17**	**184,416,444,275.81**	**352,807,702,666.38**	**309,877,782,276.26**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**43,538,655,500.15**	**92,728,284,964.19**	**277,787,157,221.71**	**312,890,783,301.60**	**872,611,409,652.85**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan ini melalui strategi kebijakan fiskal yang tepat guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator kemandirian fiskal daerah yang berasal dari empat sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan PAD dengan menggali potensi ekonomi daerah secara optimal. Sementara itu, Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), masih menjadi sumber pendapatan terbesar bagi sebagian besar daerah, termasuk Kabupaten Morowali. Meskipun dana transfer membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, daerah perlu meningkatkan efektivitas pemanfaatannya agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan, diperlukan strategi yang berorientasi pada penguatan sektor ekonomi lokal serta penguatan sistem administrasi perpajakan dan retribusi. Pemerintah daerah dapat mendorong investasi di sektor unggulan seperti industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) juga dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani APBD. Dengan pendekatan yang lebih inovatif dan terintegrasi, pendapatan daerah dapat dikelola secara lebih efektif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Secara umum, berdasarkan analisis data pendapatan daerah pada Tabel 2.112 diatas, dapat dibuat kesimpulkan berikut:

1. Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan, pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sebesar Rp1,292,602,327,666.77 menjadi Rp2,966,366,394,324.41 Tahun 2024 dengan tren pertumbuhan positif

rata-rata 21.44 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, dengan pertumbuhan tertinggi Tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 39.17 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya upaya optimalisasi pendapatan daerah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

2. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   PAD mengalami pertumbuhan tertinggi dengan rata-rata 38.89 persen selama lima tahun terakhir. PAD meningkat dari Rp310,035,234,830.19 Tahun 2020 menjadi Rp1,040,860,702,662.41 Tahun 2024, menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Komponen utama PAD yang berkontribusi signifikan adalah Pajak Daerah yang tumbuh rata-rata 59.18 persen serta Retribusi Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 34.72 persen. Meski demikian, terdapat fluktuasi pada retribusi daerah, terutama Tahun 2021-2022, yang mengalami pertumbuhan negatif dan meningkat kembali Tahun 2023. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil sebesar 22.64 persen, sementara Lain-lain PAD yang Sah tumbuh 17.38 persen.

3. **Pendapatan Transfer**

   Pendapatan Transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, dengan rata-rata pertumbuhan 16.40 persen. Nilainya meningkat dari Rp950,310,721,772.00 Tahun 2020 menjadi Rp1,916,472,936,378.00 Tahun 2024. Mayoritas pendapatan transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tumbuh 16.19 persen, dengan Dana Perimbangan sebagai bagian terbesar yang mengalami kenaikan 18.28 persen. Dana Insentif Daerah mengalami pertumbuhan negatif, yakni -40.00 persen, meskipun tidak setiap tahun tersedia dalam jumlah yang konsisten. Dana Desa mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata 8.00 persen, menunjukkan ketidakstabilan dalam alokasi anggaran. Di sisi lain, Pendapatan Transfer Antar Daerah tumbuh cukup signifikan sebesar 25.68 persen, yang mencerminkan peningkatan kerja sama antar daerah dalam pendanaan pembangunan.

4. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata yang negatif, yaitu -21.90 persen. Tahun 2019, pendapatan dari kategori ini melonjak drastis dari Rp32,256,371,064.58 Tahun 2020, kemudian menurun drastis Tahun 2024 menjadi sebesar Rp9,032,755,284.00. Komponen utama dalam kategori ini adalah hibah, yang juga mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pendapatan dari ketentuan

peraturan perundang-undangan mengalami lonjakan besar Tahun 2020 dengan perolehan Rp24,084,360,000.00, namun kembali menurun hingga tidak tercatat Tahun 2022 dan 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp9,032,755,284.00 Tahun 2024.

PAD menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun Kabupaten Morowali masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya peningkatan dan stabilisasi PAD perlu terus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, terutama dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang lebih efisien. Pajak daerah dalam struktur PAD belum menjadi sumber utama pendapatan daerah, masih rendahnya nilai transaksi ekonomi yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan potensi pajak daerah, terbatasnya wajib pajak dan belum berkembangnya sistem pengelolaan pajak daerah yang moderen. Selain itu, juga disebabkan kurang berkembangnya penerimaan dari retribusi daerah, belum berjalannya retribusi di beberapa sektor, dan belum tersusunnya kerangka regulasi daerah yang berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, ketidakstabilan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan perlunya strategi yang lebih terencana dalam mengelola hibah dan pendapatan dari ketentuan peraturan perundang-undangan agar tetap menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Tantangan dalam lima tahun kedepan dalam rangka pengembangan inovasi pendanaan daerah adalah 1). Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi melalui digitalisasi sistem perpajakan serta penguatan kepatuhan wajib pajak. 2). Inovasi pendanaan daerah seperti pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerbitan obligasi daerah, dan skema pendanaan berbasis proyek dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. 3). Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Anggaran dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. 4). Kemitraan dengan Sektor Swasta dalam bentuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk membantu pembiayaan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, serta berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Sementar aitu, untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 55 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menetapkan belanja diklasifikasikan dalam bentuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD, untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi efektivitas, serta dilengkapi dengan prinsip keadilan (equity) bagi semua, agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Berdasarkan Tabel 2.112 realisasi dan pertumbuhan APBD Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024, komponen Belanja daerah dapat disimpulkan bahwa :

1. Belanja Daerah

Total belanja daerah mengalami tren pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata 16.35 persen selama periode 2020-2024. Belanja daerah meningkat dari Rp1,234,260,310,585.70 Tahun 2020 menjadi Rp2,403,632,766,947.82 Tahun 2024, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi Tahun 2023 sebesar 39.84 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah, yang dipengaruhi oleh ekspansi pembangunan, peningkatan belanja operasional, serta stimulus ekonomi pasca-pandemi. Namun, fluktuasi dalam pertumbuhan tahunan mengindikasikan adanya

dinamika dalam kebijakan fiskal daerah yang perlu diperhatikan agar tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah.

2. **Belanja Operasional**

   Belanja operasional menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan rata-rata pertumbuhan 16.97 persen. Kenaikan tertinggi terjadi Tahun 2023 sebesar 27.05 persen, yang mencerminkan peningkatan biaya untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta berbagai kebutuhan operasional pemerintahan. Belanja pegawai mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata 7.77 persen, relatif lebih rendah dibandingkan komponen belanja lainnya. Sementara itu, belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar sebesar 25.35 persen, yang mencerminkan adanya peningkatan dalam pengadaan barang dan jasa guna mendukung kegiatan pemerintahan. Namun, belanja bunga menunjukkan tren negatif dengan rata-rata pertumbuhan -1.58 persen, mengindikasikan kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi beban bunga pinjaman atau mengoptimalkan sumber pembiayaan lainnya.

3. **Belanja Modal**

   Belanja modal, yang mencerminkan investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap, mengalami pertumbuhan rata-rata 24.18 persen selama lima tahun terakhir. Kenaikan signifikan terjadi Tahun 2023 sebesar 101.01 persen, yang menunjukkan adanya kenaikan investasi dalam pembangunan fisik dan proyek strategis daerah. Namun, belanja modal cenderung stagnan, bahkan mengalami kontraksi Tahun 2021 sebesar -5.92 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi ruang fiskal daerah.

4. **Belanja Tak Terduga**

   Belanja tak terduga mengalami volatilitas yang sangat tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan ekstrem sebesar 2.299.87 persen. Peningkatan terbesar terjadi Tahun 2020 dampak alokasi dana untuk penanganan pandemi, kemudian mengalami penurunan drastis di tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja tak terduga sangat bergantung pada kondisi darurat dan situasi tertentu yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah.

5. **Belanja Transfer**

   Belanja transfer menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 7.09 persen, dengan penurunan paling rendah Tahun 2020 sebesar -13.69 persen sebelum meningkat di tahun-tahun berikutnya. Ini mencerminkan dinamika dalam alokasi dana transfer ke pemerintah desa atau lembaga terkait, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan belanja daerah yang tumbuh positif menunjukkan peningkatan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik, tetapi fluktuasi dalam berbagai komponen belanja mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pengalokasian belanja yang lebih efisien dan berbasis kinerja perlu diperhatikan agar dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, strategi untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja perlu diperkuat guna menghindari defisit fiskal yang berkelanjutan.

C. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran guna mendukung program pembangunan daerah. Pembiayaan daerah mencakup berbagai sumber pendanaan yang tidak termasuk dalam pendapatan daerah, seperti penerimaan pinjaman, hasil penjualan aset daerah, dana cadangan, serta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya. Dengan adanya mekanisme pembiayaan, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan secara lebih strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan belanja tetap dapat terpenuhi, terutama dalam kondisi defisit atau ketidakcukupan pendapatan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan sebaiknya mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan umum. Selama Tahun 2020-2024, Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tumbuh rata-rata 171.18 persen selama lima tahun terakhir. SILPA meningkat

dari Rp10,785,438,665.30 Tahun 2019 menjadi Rp 312,648,749,009.60 Tahun 2024, menunjukkan adanya surplus anggaran yang semakin besar dari tahun ke tahun. Namun, sumber penerimaan lainnya seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, dan penerimaan pinjaman daerah tidak tercatat selama periode ini, menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan instrumen pembiayaan lainnya secara optimal

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Selama Tahun 2020-2024, Pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan Tahun 2021 dan 2024 dampak penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang.

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Jika pembiayaan netto bernilai positif, artinya pemerintah daerah membutuhkan tambahan dana untuk menutup defisit. Sebaliknya, jika bernilai negatif, menunjukkan adanya surplus anggaran yang digunakan untuk pelunasan kewajiban atau penguatan kas daerah. Selama tahun 2020-2024, Pembiayaan netto mengalami peningkatan dari Rp9,514,471,931.96 Tahun 2020 menjadi Rp309,877,782,276.26 Tahun 2024, mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal yang signifikan. Sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan surplus sebesar Rp43,538,655,500.15 Tahun 2020 dan mencapai Rp872,611,409,652.85 Tahun 2024. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien, namun perlu adanya diversifikasi sumber pembiayaan agar tidak hanya bergantung pada SILPA.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Morowali sebaiknya difokuskan pada strategi yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal dan optimalisasi investasi daerah. Pengeluaran pembiayaan perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki prospek bisnis berkelanjutan serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pembayaran cicilan pokok utang harus dikelola secara disiplin agar tidak membebani anggaran di masa depan, dengan menjaga rasio

utang tetap dalam batas aman sesuai regulasi keuangan daerah. Pemerintah juga perlu mengalokasikan dana cadangan secara strategis untuk mendukung program prioritas yang bersifat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, pengeluaran pembiayaan yang tidak produktif perlu diminimalkan, sementara investasi yang dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Morowali dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan stabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan

2.2.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Dalam neraca daerah, terdapat tiga komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset daerah mencakup seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, termasuk aset lancar seperti kas dan piutang, serta aset tetap seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur. Kewajiban mencerminkan utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, seperti utang jangka pendek dan jangka panjang. Sementara itu, ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban yang mencerminkan kekayaan bersih daerah. Neraca daerah berfungsi sebagai alat evaluasi untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif.

Penyusunan neraca daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel guna memberikan gambaran keuangan yang valid bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, DPRD, serta masyarakat. Dengan adanya neraca daerah yang jelas, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih terukur dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta kebijakan fiskal. Selain itu, neraca daerah juga menjadi dasar dalam mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, termasuk dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Salah satu aspek penting dalam neraca daerah adalah pemeliharaan aset daerah agar tidak mengalami penurunan nilai, serta pengelolaan kewajiban agar tidak membebani anggaran daerah di masa mendatang.

Neraca daerah dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang kebijakan investasi dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan informasi dalam neraca untuk menentukan strategi dalam pengalokasian sumber daya, mengoptimalkan aset yang dimiliki, serta

mengelola utang secara lebih bijaksana. Neraca yang sehat akan mencerminkan keseimbangan antara aset dan kewajiban serta menunjukkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelolaan neraca daerah perlu terus dilakukan agar dapat menjadi instrumen yang mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Morowali menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran, dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca. Kinerja Neraca Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Neraca Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**ASET**					
	A. Aset Lancar	103,449,836,177.25	255,009,325,644.28	437,657,874,130.01	389,567,356,352.02	1,009,215,956,525.26
	B. Investasi Jangka Panjang	14,849,873,532.95	24,419,567,139.95	37,891,983,341.95	39,152,698,119.95	40,362,843,256.95
	C. Aset Tetap	2,170,826,036,599.44	2,273,090,493,174.24	2,331,091,781,887.37	2,720,076,171,389.52	2,997,118,650,310.96
	D. Aset Lainnya	81,161,252,177.87	69,395,193,223.51	88,853,481,563.84	649,763,389,235.62	201,829,133,425.08
	JUMLAH ASET	**2,370,286,998,487.51**	**2,621,914,579,181.98**	**2,895,495,120,923.17**	**3,798,559,615,097.11**	**4,248,526,583,518.25**
2	**KEWAJIBAN**					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	65,286,821,108.17	27,221,508,067.86	36,015,032,367.92	16,773,598,555.22	30,658,620,983.32
	B. Kewajiban Jangka Panjang	11,438,700,599.96	10,167,733,866.62	8,896,767,133.28	7,625,800,399.28	6,354,833,666.60
	JUMLAH KEWAJIBAN	**76,725,521,708.13**	**37,389,241,934.48**	**44,911,799,501.20**	**24,399,398,954.50**	**37,013,454,649.92**
3	**EKUITAS**					
	Ekuitas	2,293,561,476,779.38	2,584,525,337,247.50	2,850,583,321,421.97	3,774,160,216,142.61	4,211,513,128,868.33
	JUMLAH EKUITAS	**2,293,561,476,779.38**	**2,584,525,337,247.50**	**2,850,583,321,421.97**	**3,774,160,216,142.61**	**4,211,513,128,868.33**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2,370,286,998,487.51**	**2,621,914,579,181.98**	**2,895,495,120,923.17**	**3,798,559,615,097.11**	**4,248,526,583,518.25**

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024

Berdasarkan data neraca daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024, dapat dibuat analisis sebagai berikut.

1. **Aset Daerah**

   Aset daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 14.81 persen selama periode 2020-2024, menunjukkan peningkatan dalam kepemilikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah daerah. Aset lancar tumbuh pesat dengan rata-rata 102.44 persen, dipengaruhi oleh kenaikan dalam kas daerah dan piutang transfer antar daerah menunjukkan adanya peningkatan likuiditas dan pengelolaan kas yang lebih optimal. Investasi jangka panjang, khususnya penyertaan modal pemerintah daerah, juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 29.73 persen yang menandakan adanya peningkatan peran investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, aset tetap meningkat rata-rata 8.32 persen, dengan dominasi jalan, irigasi, dan jaringan sebagai komponen terbesar. Peningkatan aset tetap ini menunjukkan adanya fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

2. **Kewajiban Daerah**

   Kewajiban daerah mengalami tren penurunan dengan rata-rata -1.08 persen, terutama pada kewajiban jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar -12.91 persen menunjukkan adanya upaya pengurangan utang daerah, baik dari pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Kewajiban jangka pendek juga mengalami fluktuasi, dengan kenaikan pada beberapa tahun awal sebelum mengalami penurunan Tahun 2023-2024. Penurunan ini dapat mencerminkan kebijakan daerah dalam mengurangi utang jangka pendek dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban. Namun, beberapa kewajiban seperti utang bunga dan bagian lancar utang jangka panjang masih perlu mendapatkan perhatian untuk menghindari beban fiskal yang berlebihan di masa depan.

3. **Ekuitas Daerah**

   Ekuitas daerah terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 15.33 persen, menunjukkan peningkatan kapasitas keuangan daerah dan semakin besarnya kekayaan bersih yang dimiliki. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan adanya surplus dalam pengelolaan anggaran dan keberhasilan dalam mengelola aset serta kewajiban. Dengan pertumbuhan ekuitas yang cukup baik, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat kapasitas fiskalnya guna mendukung pembangunan daerah. Namun, untuk mempertahankan tren positif ini, pemerintah daerah perlu tetap fokus pada strategi optimalisasi aset, efisiensi belanja, serta pengelolaan utang yang lebih terukur guna menjaga stabilitas keuangan daerah di masa mendatang.

Selanjutnya dilakukan analisis keuangan yang terdiri atas Rasio keuangan yang di analisis, yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (leverage). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. **Rasio Lancar (*Current Ratio*)**

   Rasio lancar mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban jangka pendek. Nilai rasio lancar Kabupaten Morowali meningkat dari 1.58 Tahun 2020 menjadi 32.92 Tahun 2023, menunjukkan perbaikan likuiditas daerah. Pada Tahun 2020, rasio masih di bawah standar ideal (2.0), mengindikasikan keterbatasan likuiditas dalam menutup kewajiban jangka pendek. Namun, peningkatan drastis Tahun 2021-2024 disebabkan oleh kenaikan kas daerah, aset lancar lainnya, atau penurunan kewajiban jangka pendek. Meski demikian, rasio yang terlalu tinggi seperti Tahun 2024 perlu dicermati karena dapat menunjukkan kurangnya optimalisasi aset lancar dalam investasi atau program pembangunan. Secara keseluruhan, Nilai rasio lancar mengindikasikan bahwa asset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali sangat cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan daerah untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.

2. **Rasio Cepat (*Quick Ratio*)**

   Rasio cepat merupakan ukuran likuiditas yang lebih ketat dibandingkan rasio lancar karena hanya memperhitungkan aset yang benar-benar dapat digunakan dengan cepat untuk membayar kewajiban jangka pendek. Perhitungannya dilakukan dengan membagi aset likuid (kas, piutang, dan aset setara kas) dengan kewajiban jangka pendek. Rasio cepat yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset likuid yang cukup untuk menutup utang jangka pendek tanpa harus menjual persediaan atau aset lainnya. Rasio cepat Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan dari 1.38 Tahun 2020 menjadi 32.11 Tahun 2024, mencerminkan peningkatan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Pada Tahun 2020 (1.38), rasio masih di bawah standar ideal (1.0), yang mengindikasikan keterbatasan aset likuid dalam menutupi kewajiban segera. Namun, meningkat Tahun 2021 (8.74), Tahun 2022 (11.24) hingga 2024 menunjukkan peningkatan kas atau aset likuid lainnya serta penurunan kewajiban jangka pendek. Secara keseluruhan, Rasio Cepat Kabupaten Morowali mengambarkan kemampuan aset lancar dalam menyelesaikan hutang secara cepat cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan daerah untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang

lebih likuid. Selain itu, peningkatan nilai rasio berarti pemerintah Kabupaten Morowali memiliki aset yang cukup untuk membayar utang

3. **Rasio Utang terhadap Total Aset (*Total Debt to Total Assets Ratio*)**
   Rasio ini mengukur sejauh mana total aset daerah dibiayai oleh utang. Dihitung dengan membagi total kewajiban (utang jangka pendek dan panjang) dengan total aset, rasio ini menunjukkan tingkat risiko keuangan daerah. Semakin tinggi rasio utang terhadap total aset, semakin besar ketergantungan daerah pada pinjaman dan semakin tinggi risikonya jika terjadi kesulitan keuangan. Nilai Rasio utang terhadap aset Kabupaten Morowali mengalami penurunan signifikan dari 3.24 Tahun 2020 menjadi 0.87 Tahun 2024, menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap total aset semakin kecil. Peningkatan rasio Tahun 2020 sebesar 3.24 dapat mengindikasikan peningkatan utang yang lebih cepat dibanding pertumbuhan aset, namun Tahun 2021-2022 (1.43 dan 1.55) rasio ini mulai menurun. Penurunan ini mencerminkan upaya daerah dalam mengurangi ketergantungan pada utang atau adanya peningkatan aset yang lebih besar dibanding kewajiban. Meskipun tren ini menunjukkan kondisi keuangan yang lebih sehat, rasio yang terlalu rendah seperti Tahun 2023-2024 juga dapat mengindikasikan bahwa daerah kurang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal untuk mempercepat pembangunan. Secara keseluruhan, Rasio total hutang terhadap total aset selama periode tersebut menunjukkan nilai yang relatif kecil, sehingga Pemerintah Kabupaten Morowali mempunyai kemampuan untuk melunasi utang jika melakukan pinjaman kepada kreditur.

4. **Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)**
   Rasio ini membandingkan total utang dengan ekuitas daerah untuk mengukur seberapa besar pendanaan daerah berasal dari utang dibandingkan dengan sumber daya sendiri. Perhitungan dilakukan dengan membagi total kewajiban dengan total ekuitas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang untuk membiayai operasional dan investasi, yang dapat meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah dapat mengindikasikan bahwa daerah kurang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal yang berpotensi membantu pertumbuhan ekonomi. Nilai Rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Morowali mengalami penurunan dari 3.35 Tahun 2020 menjadi 0.88 Tahun 2024, mencerminkan penurunan ketergantungan terhadap utang dalam struktur pendanaannya. Peningkatan Tahun 2020 (3.35) menunjukkan bahwa utang sempat mendominasi ekuitas, namun tren penurunan

Tahun 2021 (1.45) mengindikasikan penguatan ekuitas atau penurunan kewajiban. Meskipun ini menunjukkan kondisi keuangan yang lebih stabil, rasio yang terlalu rendah Tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa daerah kurang memanfaatkan pendanaan eksternal untuk mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, keseimbangan antara utang dan ekuitas tetap perlu diperhatikan agar pembiayaan daerah tetap optimal.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Proyeksi pendapatan daerah disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam menghasilkan penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Proyeksi pendapatan daerah harus dibuat dengan pendekatan yang terukur secara rasional, dengan mempertimbangkan tren historis penerimaan, kebijakan fiskal, serta faktor ekonomi yang mempengaruhi potensi pendapatan. Pendapatan daerah sendiri terdiri dari tiga komponen utama, yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam proses perolehannya serta tingkat kestabilannya sebagai sumber penerimaan.

Proyeksi pendapatan Tahun 2026-2030 secara umum didasarkan penerimaan pendapatan selama Tahun 2020-2024, mencerminkan tren pertumbuhan anggaran dalam jangka panjang. Tren ini merefleksikan sejauh mana kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan dari berbagai sumber, serta efektivitas strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, dalam penyusunan anggaran, mengandalkan tren historis semata tidak selalu akurat, terutama karena adanya faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan daerah. Sebagai contoh, dana perimbangan yang menjadi sumber utama pendapatan daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, sehingga penentuan besarannya tidak dapat sepenuhnya diproyeksikan berdasarkan tren sebelumnya. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi pendapatan harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber pendapatan, serta memperhitungkan asumsi-asumsi yang dapat memengaruhi penerimaan di masa mendatang, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan regulasi fiskal, serta kondisi sosial dan politik yang berkembang.

Faktor utama yang memengaruhi proyeksi pendapatan adalah kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah, yang berkorelasi erat dengan kondisi perekonomian lokal. Misalnya, penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi

masyarakat serta aktivitas sektor pariwisata dan perhotelan. Selain itu, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga perlu dipertimbangkan guna memperluas basis penerimaan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil proyeksi pada Tabel 2.114 menggunakan metode Geometrik, Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2026 hingga 2030. Jumlah pendapatan meningkat dari Rp3,310,914,514,028.98 Tahun 2026 menjadi Rp4,695,828,081,741.44 Tahun 2030. Komponen terbesar berasal dari pendapatan transfer yang terus mengalami peningkatan, sehingga menggambarkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. PAD menunjukkan peningkatan moderat dengan sumber PAD tertinggi berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber lokal. Berdasarkan hasil proyeksi pada Tabel 2.114 menggunakan metode Geometrik, Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2026 hingga 2030. Jumlah pendapatan meningkat dari Rp3,310,914,514,028.98 Tahun 2026 menjadi Rp4,695,828,081,741.44 Tahun 2030. Komponen terbesar berasal dari pendapatan transfer yang terus mengalami peningkatan, sehingga menggambarkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. PAD menunjukkan peningkatan moderat dengan sumber PAD tertinggi berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp801,085,168,390.77 Tahun 2026 meningkat menjadi Rp1,253,335,453,058.65 Tahun 2030 dengan kenaikan sebesar 11.84 persen pertahun, Retribusi Daerah sebesar Rp330,393,488,916.55 Tahun 2026 meningkat menjadi Rp432,107,892,800.18 Tahun 2030 dengan kenaikan sebesar 6.94 persen pertahun, Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp115,395,985,274.83 Tahun 2026 meningkat menjadi Rp134,168,145,661.46 Tahun 2030 dengan kenaikan sebesar 3.84 persen pertahun, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp4,906,524,152.38 Tahun 2026 meningkat menjadi Rp5,857,843,201.01 Tahun 2030 dengan kenaikan sebesar 4.53 persen pertahun. Sehingga dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber lokal.

Sementara dari struktur Belanja Daerah, tren serupa terlihat di mana total belanja juga meningkat secara progresif, dari Rp2,620,068,451,376.83 Tahun 2026 menjadi Rp4,047,894,547,493.43 Tahun 2030. Belanja operasi tetap menjadi komponen dominan yang menyerap sebagian besar anggaran, diikuti oleh belanja modal yang juga mengalami pertumbuhan positif. Peningkatan belanja ini menggambarkan

upaya pemerintah daerah Kabupaten Morowali dalam memperkuat pelayanan publik, infrastruktur, dan respons terhadap kebutuhan tak terduga. Namun, peningkatan belanja harus tetap dijaga efisiensinya agar tidak melampaui kemampuan pendapatan yang ada, meskipun dalam seluruh periode proyeksi masih menunjukkan adanya surplus anggaran.

Pembiayaan daerah menunjukkan bahwa dalam periode proyeksi, pemerintah daerah tidak mencantumkan penerimaan pembiayaan, termasuk dari SiLPA, yang menandakan bahwa seluruh anggaran direncanakan untuk terealisasi secara penuh tanpa menyisakan dana lebih di akhir tahun. Pengeluaran pembiayaan meningkat dari tahun ke tahun, yang menyebabkan pembiayaan netto selalu negatif. Ketiadaan SiLPA dalam proyeksi ini mengindikasikan tidak adanya dana cadangan dari efisiensi atau sisa belanja, sehingga pembiayaan jangka panjang seperti penyertaan modal atau pelunasan kewajiban harus ditutupi murni dari kapasitas anggaran tahun berjalan.

Tabel 2.90
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Morowali

NO	URAIAN	*BASELINE* TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN**						
	A. Pendapatan Asli Daerah	1,040,860,702,662.41	1,251,781,166,734.52	1,374,212,430,181.46	1,509,645,275,044.05	1,659,526,766,475.59	1,825,469,334,721.30
	B. Pendapatan Transfer	1,916,472,936,378.00	2,049,291,993,848.53	2,189,453,165,412.32	2,339,921,304,653.41	2,585,439,600,666.72	2,858,676,564,169.55
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9,032,755,284.00	9,841,353,445.93	10,272,404,726.86	10,722,336,053.89	11,191,974,373.05	11,682,182,850.59
	JUMLAH PENDAPATAN	**2,966,366,394,324.41**	**3,310,914,514,028.98**	**3,573,938,000,320.63**	**3,860,288,915,751.36**	**4,256,158,341,515.37**	**4,695,828,081,741.44**
2	**BELANJA**						
	A. Belanja Operasi	1,469,106,582,399.76	1,600,976,072,741.21	1,747,898,923,643.81	1,911,778,957,278.04	2,194,194,634,261.46	2,528,246,572,129.35
	B. Belanja Modal	669,791,931,658.06	736,196,818,429.99	809,185,255,672.99	889,409,953,434.66	1,024,903,608,430.07	1,181,038,510,437.74
	C. Belanja Tak Terduga	0.00	10,589,473,518.80	12,581,353,487.69	14,947,906,078.72	19,357,971,861.22	25,069,134,941.46
	D. Belanja Transfer	264,734,252,890.00	272,306,086,686.83	280,094,487,348.05	288,105,649,041.17	300,554,055,488.99	313,540,329,984.89
	JUMLAH BELANJA	**2,403,632,766,947.82**	**2,620,068,451,376.83**	**2,849,760,020,152.54**	**3,104,242,465,832.59**	**3,539,010,270,041.74**	**4,047,894,547,493.43**
	SURPLUS /(DEFISIT)	**562,733,627,376.59**	**690,846,062,652.15**	**724,177,980,168.09**	**756,046,449,918.77**	**717,148,071,473.63**	**647,933,534,248.01**
3	**PEMBIAYAAN**						
	A. Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. Pengeluran Pembiayaan	2,770,966,733.34	2,862,013,004.68	2,956,432,911.98	3,054,361,669.29	3,208,143,670.77	3,370,639,562.56
	PEMBIAYAAN NETTO	**(2,770,966,733.34)**	**(2,862,013,004.68)**	**(2,956,432,911.98)**	**(3,054,361,669.29)**	**(3,208,143,670.77)**	**(3,370,639,562.56)**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024 (Diolah kembali : Proyeksi Menggunakan Metode Geometrik)

Proyeksi APBD Tahun 2026-2030 selain sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga menjadi dasar untuk menghitung kapasitas riil daerah, yakni kemampuan aktual pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Komponen penghitungan kapasitas riil adalah penerimaan daerah, serta pengeluaran daerah. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah), serta penerimaan pembiayaan daerah (pencairan dana cadangan dan perhitungan perkiraan awal SiLPA). Sementara itu, pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaaan daerah untuk memenuhi ketiga prioritas tersebut. Gambaran Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2026-2030, adalah penghitungan kerangka pendanaan yang diproyeksikan ke depan, yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.91

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	3,310,914,514,028.98	3,573,938,000,320.63	3,860,288,915,751.36	4,256,158,341,515.37	4,695,828,081,741.44
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Penerimaan	3,310,914,514,028.98	3,573,938,000,320.63	3,860,288,915,751.36	4,256,158,341,515.37	4,695,828,081,741.44
	Dikurangi:					
4	Hibah, Bansos, Transfer dan BTT	450,921,262,097.80	482,133,558,763.06	517,050,479,067.69	577,672,688,782.24	650,380,925,623.82
5	Pengeluaran Pembiayaan	2,862,013,004.68	2,956,432,911.98	3,054,361,669.29	3,208,143,670.77	3,370,639,562.56
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**2,857,131,238,926.50**	**3,088,848,008,645.58**	**3,340,184,075,014.37**	**3,675,277,509,062.35**	**4,042,076,516,555.06**

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Morowali terpada pada Tabel 2.115, dimana Kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Morowali periode Tahun 2026-2030, dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) prioritas sebagai berikut.

1) **Prioritas Pertama** : Untuk membiayai belanja wajib berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan Perundang-Undangan, yakni:
   a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
   c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan untuk penggunaan pada belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia;
   d. Belanja Fungsi Pengawasan, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7236/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diarahkan pengalokasian sebesar 0.75 persen-1 persen.
2) **Prioritas Kedua** : Kapasitar riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Morowali.
3) **Prioritas Ketiga** : Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel 2.92

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan**	2,857,131,238,926.50	3,088,848,008,645.58	3,340,184,075,014.37	3,675,277,509,062.35	4,042,076,516,555.06
2	**Prioritas I**	1,599,993,493,798.84	1,729,754,884,841.53	1,870,503,082,008.05	2,058,155,405,074.92	2,263,562,849,270.83
3	**Prioritas II**	1,142,852,495,570.60	1,235,539,203,458.23	1,336,073,630,005.75	1,470,111,003,624.94	1,616,830,606,622.02
4	**Prioritas III**	114,285,249,557.06	123,553,920,345.82	133,607,363,000.58	147,011,100,362.49	161,683,060,662.20

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Sub Bab 2.3 Dokumen Ranwal RPJMD Kabupaten Morowali Periode 2025-2029 berisi tentang hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh daerah serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan biasanya mencakup kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan, seperti tata kelola pemerintahan yang belum optimal, rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta belum optimalnya pengentasan kemiskinan. Permasalahan pembangunan daerah *(problems of regional development)* ditemukan berdasarkan hasil evaluasi capaian atas kinerja pembangunan daerah periode RPJMD 5 (lima) tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan dari level nasional maupun global sebagai tantangan *(threats)* dan peluang *(opportunities)* yang perlu dikelola dengan baik. Dimana, kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di suatu daerah pada masa mendatang disebut sebagai isu-isu strategis daerah *(regional strategic issues)*.

Isu strategis, di sisi lain, merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Isu-isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis atas isu-isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif terhadap berbagai kondisi yang tidak ideal, atau permasalahan yang akan dihadapi, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Analisis isu-isu strategis ini menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan Panjang.

Gambaran umum masalah pembangunan Kabupaten Morowali diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam beberapa dokumen laporan hasil. Salah satu dokumen hasil pelaksanaan tersebut yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023, yang mencakup prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, masalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian kinerja utama dan kinerja daerah serta capaian indikator kinerja program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu permasalahan juga merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainbale Development Goals, SDGs) yang tercantum dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029, juga hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen penanggulangan kemiskinan

(RPKD) periode 2025-2029. Selain diperoleh dari evaluasi pelaksanaan pembangunan pada dokumen hasil evaluasi, permasalahan daerah juga diperoleh dari mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti statistik daerah, survei, dan laporan kinerja. Selain itu identifikasi permasalahan pembangunan daerah juga diperoleh secara bottom up dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan masukan langsung mengenai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pembangunan juga berasal dari identifikasi isu-isu strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Memastikan bahwa permasalahan yang diidentifikasi selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta daerah. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah secara berturut-turut akan dijelaskan pada bagian berikut.

2.3.1.Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1. Permasalahan Pokok Daerah

Permasalahan pokok daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali 2025-2029 adalah isu-isu utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini diidentifikasi melalui evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan analisis kondisi terkini. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan atas kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam mengelola dan memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Merujuk pada rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab II dokumen RPJMD tahun 2025-2029 ini juga hasil penelaahan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 yang telah disusun sebelumnya, maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Morowali selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan: secara spesifik yakni kurangnya pelaksanaan dalam akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
2. Belum Meratanya Kualitas Dan Daya Saing Sumber daya Manusia: Pendidikan yang belum sinkron dengan ketersediaan lapangan kerja,

dan keterampilan masyarakat yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;

3. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah: Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang belum efektif;
4. Menurunnya Peran dan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Pariwisata dalam Perekonomian: Pemanfaatan sumberdaya alam pertanian, perikanan dan pariwisata yang belum optimal dan berkelanjutan;
5. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah Kecamatan: Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antar wilayah terutama infstruktur di wilayah pulau dan daratan utama, serta infrastruktur penghubung antar daratan dan kepulauan;
6. Tingginya Pelanggaran Penataan Ruang: pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lapangan usaha belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tataruang, dan meningkatnya konversi lahan produktif bagi pertanian, perikanan dan pariwisata untuk industri tambang dan pemukiman;
7. Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurun: tantangan seperti pencemaran dan degradasi lahan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan yang kurang terkendali.

Beberapa masalah pokok daerah tersebut di atas dapat dipilah berdasarkan masalah-masalah dan akar masalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.93
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;	Tatakelola pemerintahan yang belum efektif dan efisien	1. Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan
			2. Belum optimalnya Penerapan Kerja Aparatur Berbasis Kinerja
			3. Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK
			4. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN
			5. Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD
		Rendahnya Kinerja Pelayanan Publik	1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
			2. Masih ditemukan adanya keluhan-keluhan pada sektor pelayanan publik
			3. Masih kurangnya sektor layanan publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.	Belum Meratanya	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	1. Masih rendahnya minat anak Usia Sekolah untuk melanjutkan pendidikan

	kualitas dan daya saing SDM	masih rendah Tahun 2022 meningkat menjadi 9,35.	2. Kurangnya jumlah Guru sesuai kompetensi yang dibutuhkan
			3. Belum meratanya distribusi Guru pada seluruh wilayah kecamatan
		Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)	1. Masih tingginya angka putus sekolah dan meningkat pada jenjang SMA
			2. Belum optimalnya bantuan beasiswa pendidikan pemerintah dan CSR untuk antisipasi angka putus sekolah belum optimal
		Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai	1. Belum memadainya sarana prasarana sekolah masih khususnya wilayah Kepulauan
			2. Belum memadainya Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung sekolah yang belum memadai;
			3. Masih lemahanya teknologi pembelajaran dan masih terbatasnya jaringan/akses Internet mendukung model/sistem belajar berbasis daring (online) dan pelaksanan Pembelajaran jarak jauh (PJJ);
			4. Belum berkembangnya ekosistem digital sebagai pembelajaran karena terbatasnya sarana prasarana.
		Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai	1. Belum optimalnya pemerataan dan distribusi guru secara geografis maupun secara keahlian berdasarkan mata pelajaran yang belum optimal
			2. Belum optimalnya tingkat kesejahteraan guru
		Usia Harapan Hidup (UHH) masih rendah	1. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan Rumah Sakit, Puskemas dan Puskemas Pembantu
			2. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit khususnya di wilayah kecamatan Menui Kepulauan, Sombori dan Bungku Selatan
			3. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
		Tenaga Medis dan non medis masih minim	1. Terbatasnya jumlah medis dan non medis perawat
			2. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter terbatas, khususnya Dokter Spesialis
		Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai	1. Masih terbatasnya sarana prasarana RSUD Morowali (Bungku)
			2. Masih sangat terbatasnya sarana Prasarana RSUD Pratama Paku
			3. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
3.	Masih Tingginya Angka	Garis kemiskinan di	1. Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024

	kemiskinan dan Ketimpangan pembangunan wilayah	Kabupaten Morowali masih tinggi	mengalami peningkatan setiap tahunnya, Tahun 2021 Rp. 478.409 per orang, meningkat pada tahun 2024 sebanyak Rp.590.027 per orang.
			2. Tingginya harga kebutuhan pokok (basic needs)
			3. Terbatasnya ketersediaan produksi kebutuhan pokok dibandingkan dengan permintaan khususnya kawasan industri.
		Bantuan sosial belum semuanya tepat sasaran	1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi PKH bagi rumah tangga miskin;
			2. Masih adanya data inclusion error dan exclusion error bagi rumah tangga miskin.
		Kondisi sosial ekonomi dan ketimpangan infrastruktur wilayah	1. Masih rendahnya kondisi pendidikan dan kesehatan keluarga
			2. Masyarakat miskin tidak memiliki asset liability
			3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni rumah tangga miskin
			4. Rendahnya akses atas infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin (Air Bersih, Listrik, Sanitasi) khususnya di wilayah Kecamatan Bungku Selatan, Sembori dan Menui Kepulauan
		Kantong Kemiskinan yang sulit diakses	1. Adanya kendala Geografis dan Topografi, dimana kantong-kantong utama kemiskinan terutama berada di Kecamatan Bungku Selatan, Sembori dan Kecamatan Menui Kepulauan
			2. Terdapat status desa sangat tertinggal sebanyak 2 desa dan desa tertinggal sebanyak 62 desa pada Tahun 2022, namun pada tahun 2024 status desa tertinggal dan sangat tertinggal 0, berkembang 60, maju 33, mandiri 33.
4.	Menurunnya peran dan kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan kelautan dan Pariwisata dalam perekonomian	Menurunnya produksi Pertanian (Padi, Jagung, Ubi dan kacang)	1. Masih rendahnya produktivitas dan Kualitas komoditi pertanian
			2. Terbatasanya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsinta, Pupuk/Obat-obatan Terbatas
			3. Menurunya nilai tambah (value added) produk pertanian
		Pariwisata dan ekonomi kreatif belum berkembang	1. Belum optimalnya Sektor Pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah
			2. Belum optimalnyakontribusi sektor ekonomi kreatif
		Menurunnya hasil tangkapan ikan laut dan menurunnya budidaya ikan air laut dan tawar	1. Kegagalan budidaya rumput laut
			2. Menurunnya hasil perikanan tangkap
			3. Belum optimalnya pengolahan perikanan
			4. Kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas perikanan
5.			1. Proporsi jalan kondisi mantap di Kabupaten Morowali masih rendah,

	Belum optimalnya pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar antar wilayah Kecamatan dan antara daratan dan kepulauan	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik masih Rendah	hingga Tahun 2024 sebesar 32,46 persen. Kondisi ini terjadi salah satunya disebabkan adanya penambahan panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten.
			2. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) dari 26,82 persen Tahun 2021 menurun menjadi 24,30 persen pada Tahun 2022
			3. Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan dan Bungku Selatan.
			4. Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk
		Menurunnya persentase sarana Sanitasi layak	1. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Morowali hingga tahun 2024 mencapai 23,59 persen, dan belum terdapat rumah tangga bersanitasi aman.
			2. Rendahnya penyediaan air baku/bersih untuk daerah baru
		Cakupan Layanan Telekomunikasi Belum memadai	1. Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi
			2. Masih adanya wilayah desa blankspot jaringan komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau.
		Ketersediaan Air Bersih terjadi peningkatan namun masih Rendah	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali periode waktu 2020-2024, mengalami perkembangan berfluktuasi sampai Tahun 2024 sebesar 88,92 persen lebih rendah dari capaian tahun 2020.
		Jaringan Irigasi masih rendah	1. Sarana Pengairan yang ada, jumlahnya belum memadai, termasuk pengelolaan yang masih Buruk
			2. Banyaknya irigasi tehnis yang mengalami kerusakan.
6.	Ketaatan dalam pelaksanaan aturan tata ruang	Alih fungsi lahan yang tinggi	1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan niaga
			2. Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP)
			3. Pola pemanfaatan ruang yang kurang dijalankan
			4. Pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan
		Rendahnya produktivitas lahan bekas tambang	Praktek penambangan yang tidak sesuai dengan peraturan

7.	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurun	Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	1. Sering terjadinya Bencana Banjir di beberapa tempat khususnya pada wilayah pertambangan
			2. Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang mencemari sungai dan laut
			3. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air
			4. Belum tertatanya pengelolaan limbah berbahaya khususnya pada pengolohan hasil tambang.
			5. Terbatasnya Prasarana TPA
			6. Belum berjalannya mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga
			7. Menurunnya kualitas sumber air tanah dan pencemaran air
			8. Rendahnya curah hujan tersebut memicu kemarau panjang dan kekeringan serta kerusakan Hidrologi sumber air
			9. Pemanasan Global memicu perubahan iklim
			10. Pencemaran air laut di kawasan wilayah pertambangan
			11. Makin terbatasnya wilayah penangkapan ikan di laut, karena pencemaran ataupun lalu lintas trasportasi dari kapal/tongkang perusahaan pertambangan
			12. Makin terbatasnya hasil tangkapan nelayan disebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut
			13. Indeks kualitas lingkungan hidup yang masih cukup rendah sebesar 80,54, tren terancam semakin menurun akibat aktivitas industri, khususnya pada wilayah Keamatan Bahodopi sekitarnya dan Kecamatan Bungku Barat.
		Masih tinggi dampak resiko bencana	1. Meningkatnya risiko bencana pasca Tambang
			2. Meningkatnya kerusakan lingkungan akibat eksplorasi SDA dan tatakelola industri yang tidak ramah lingkungan.
			3. Pemetaan risiko bencana, mitigasi dan sistem informasi kebencanaan rendah
			4. Masih Rendahnya Penanganan Daerah Pasca Bencana
			5. Mitigasi Bencana masih rendah
		Masih banyaknya timbunan sampah yang belum tertangani	1. Kurangnya fasilitas TPST
			2. Kurangnya fasilitas daur ulang
			3. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sumber: Dianalisis berdasarkan hasil konsultasi dan Integrasi Pelingkupan KLHS RPJPD/RPJMD masalah Pokok Tahun 2024.

2.3.1.2. Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan

Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan dalam penyusunan RPJMD merujuk pada isu-isu utama yang dihadapi oleh daerah dalam berbagai bidang atau urusan pemerintahan. Setiap urusan pemerintahan memiliki permasalahan spesifik yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan urusan, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih spesifik dan efektif untuk mengatasi setiap permasalahan tersebut.

Berdasarkan kajian normatif, analisis berbagai dokumen rencana sampai dengan analisis gambaran umum Kabupaten Morowali, sehingga menghasilkan beberapa rumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Morowali. Berkaitan dengan hal tersebut gambaran kondisi Pelayanan umum Kabupaten Morowali yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan. Adapun beberapa permasalahan pembangunan tersebut berdasarkan urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.94
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

Kode	Urusan	Permasalahan
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	
1.01	**Pendidikan**	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 107,45, jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 103,78 jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 96,68. 2. Angka Partisipasi Murni (APM)) tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 92,34. Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 78,18. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 70,45. Capain ini mengambarkan penyelenggaran wajib belajar 9 tahun belum berhasil dengan baik.

		3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2024 untuk Tingkat SD/MI sebesar 96,86. Tingkat SMP/MT sebesar 95,00. Tingkat SMU/MA/SMK pada tahun 2023 sebesar 92,49. 4. APS tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,12 relatif kecil, jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 0,32 dan jenjang pendidikan SMU/MA/SMK pada tahun 2023 relatif besar yaitu sebesar 5,10. 5. Rasio Ketersediaan Sekolah tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 1:95, Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 1:175. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/ SMK sebesar 1:200. 6. Angka Lulusan SMA/SMK/MA sebesar telah mencapai 100 persen pada tahun 2023. Yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2023 masih mencapai 79,00 persen, diperlukan usaha dan kerja keras pemerintah, untuk mendorong lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi 7. Rasio guru/murid per kelas di Kabupaten Morowali Tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,08 Pada jenjang pendidikan SMP/MT sebesar 0,01. Pada jenjang pendidikan SMU/MA/SMK sebesar 0,01.
1.02	**Kesehatan**	1. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2024 mencapai 10,5. 2. Angka Kematian Neonatal hingga Tahun 2024, mencapai 8,35, angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup, 8,35 diantaranya meninggal sebelum mencapai usia 28 hari. Angka ini merupakan indikasi belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu hamil sampai ke wilayah terpencil, proses kelahiran dan pasca kelahiran. 3. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 mencapai 237, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 237 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 7 orang dimana terdiri dari 3 kematian ibu hamil, 2 kematian ibu bersalin, dan 2 kematian ibu nifas. Standar nasional angka kematian ibu adalah 183/100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di kabupaten

		Morowali sangat tinggi, berada 65 angka di atas standar nasional. 4. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Morowali tahun 2024 mencapai 69,41. 5. Rasio puskesmas pada tahun 2020 sebesar 0,254, mengalami penurunan setiap tahun dan tahun 2024 sebesar 0,221. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding dengan penambahan jumlah puskesmas. 6. Ada ibu hamil yang belum mendapat suplemen bumil, karena tidak melakukan kunjungan bumil K4.
1.03	**Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Morowali masih rendah, hingga Tahun 2024 sebesar 32,46 persen. 2. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Dari 26,82 persen Tahun 2021 menurun menjadi 24,30 persen pada tahun 2022 3. Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru khususnya pada wilayah menui kepulauan, Sambori dan Bungku Selatan. 4. Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk
1.04	**Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	1. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kabupaten Morowali dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 30,9 persen dan pada tahun 2024 sebesar 37,30 persen. Penduduk Kabupaten Morowali belum dapat menjangkau air bersih terutama di wilayah Kepulauan Salabangka Sambori, dan Menui Kepulauan. 2. Rasio Rumah Layak Huni (RLH) pada Tahun 2020 sebesar 72,64 persen dan Pada tahun 2024 sebesar 82,55 persen. 3. Konsumsi listrik perkapita pada tahun 2020 sebesar 337,29 kWh/kapita, mengalami perkembangan secara fluktuasi kurun waktu lima tahun terakhir, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 335,24. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan ketersediaan listrik yang tetap.

1.05	**Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	1. Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat masih menjadi masalah umum di Kabupaten Morowali. 2. Demonstrasi dan tuntutan pekerja terhadap perusahan meningkat, sehingga menganggu ketertiban umum 3. Tindakan pengeboman ikan, pembiusan masih menjadi masalah di Kepulauan Salabangka dan Kecamatan Menui Kepulauan dan Sambori. 4. Kejahatan siber patut diantisipasi 5. Sarana dan Prasarana pendukung dan operasional Satpol PP dan Damkar belum memadai.
1.06	**Bidang Sosial**	1. PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2020 sebesar 50.330 jiwa, mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 53.411 jiwa. 2. Persentase PMKS yang tertangani tahun 2020 sebesar 99 persen dan tahun 2024 sebesar 89,04 persen. Dengan demikan masih banyak PMKS yang belum tertangani. 3. Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tahun 2022 sebanyak 7 Kelompok. 4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2024 sebanyak 100 persen. 5. Korban bencana alam tahun 2020 sebanyak 605 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 2.850 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 414 jiwa, dan 2024 sebanyak 394 jiwa.
2	**Bidang Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar**	
2.07	**Bidang Tenaga Kerja**	1. Pada Tahun 2020 Angka Pengangguran terbuka Morowali sebesar 5,21 persen dan Tahun 2024, persentase TPT Kabupaten Morowali menurun secara signifikan menjadi 2,84 persen. 2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang) sebanyak 28 Orang tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 41 Orang. 3. Rasio Lulusan S1/S2/S3 tahun 2020 sebesar 14,27, mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 16,32. 4. Belum adanya *link and match* antara pendidikan Tenaga Kerja dan kebutuhan dalam bursa kerja dan industry yang berkembang. 5. Informasi bursa kerja terbatas;

		6. Tingkat pendidikan tenaga kerja lokal masih rendah rata-rata berpendidikan SMP/MTs 7. Adanya *bottleneck* antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan pendidikan dan skiil yang dimiliki calon tenaga kerja.
2.08	**Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta pada tahun 2020 sebesar 8,59 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 21,21. 2. Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD tahun 2024 sebesar 4 persen, masih sangat kecil. 3. Rasio KDRT pada tahun 2020 sebesar 0,21, mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,15. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi menjadi 0,21. 4. Masyarakat masih melakukan *doing gender*—tindakan membedakan jenis kelamin, karena belum memahami secara jelas konsep gender
2.09	**Bidang Pangan**	1. Rasio Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2020 sebesar 152,75 mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 249,85. 2. Ketersediaan protein perkapita pada tahun 2020 sebesar 65,42, mengalami penurunan setiap tahunnya, dan pada tahun 2024 sebesar 64,10. 3. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring pesatnya peningkatan jumlah penduduk akibat masuknya tenaga kerja dari daerah lain 4. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan komersial 5. Rendahnya pertumbuhan penyediaan prasarana irigasi pada wilayah- wilayah baru dan potensial bagi peningkatan ketersediaan pangan terutama padi 6. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan *upstream* (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS

2.10	**Bidang Pertanahan**	1. Tumpang tindih *(overlapping)* antar penggunaan lahan terutama antara lahan pertanian masyarakat dengan penggunaan untuk pertambangan 2. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal. 3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal 4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten belum optimal. 5. Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal.
2.11	**Bidang Lingkungan Hidup**	1. Belum adanya target cakupan wilayah rawan bencana yang mendapat penyuluhan dan pelatihan simulasi penanganan bencana. 2. Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan pertambangan yang mencemari air sungai dan laut untuk kegiatan perikanan. 3. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan daratan (terutama hutan) dan ekosistem perairan laut. 4. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca akibat berkurangnya daerah tangkapan air. 5. Meningkatnya timbunan sampah di wilayah perkotaan dan kawasan cepat tumbuh yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai 6. Semakin menurunnya tutupan terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak sesuai anjuran 7. Kabupaten Morowali dilalui patahan (sesar) aktif Matano sehingga termasuk daerah rawan gempa
2.12	**Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	1. Kurangnya penduduk yang memiliki e-KTP, walaupun penduduk yang memiliki KTP meningkat penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2022 sebesar 132.824,27. 2. Kurangnya penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK). 3. Kurangnya bayi yang memiliki akta kelahiran.

2.13	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**	1. *Span of control dan span of management* wilayah pembinaan sangat luas Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) belum sebanding dengan minimnya pembiayaan. 2. Data kelompok binaan belum dimuktahirkan sehingga menyulitkan pembinaan oleh Tim Penggerak PKK 3. Fasilitas pembinaan PKK di tingkat kecamatan masih terbatas 4. Masyarakat mempunyai pola pikir bahwa posyandu adalah milik Dinas Kesehatan, bukan milik masyarakat sehingga tanggung jawab operasionalnya diserahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali
2.14	**Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	1. Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali tahun 2020 sebesar 80,08 persen dan Tahun 2024 sebesar 88,69. 2. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2020 sebesar 85,09 persen, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 59,37. 3. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2020 sebesar 39,16 persen, dan mengalami penurunan setiap tahun dan pada tahun 2024 hanya mencapai 16,70. 4. Minimnya pemahaman penduduk atas makna program Keluarga Berencana; 5. Terbatasnya Tenaga Penyuluh KB di wilayah terpencil dan kepulauan pada Kecamatan Bungku Selatan, Sambori dan Menui Kepulauan; 6. Terbatas akses masyarakat miskin dan di wilayah terpencil pada Program KB.
2.15	**Bidang Perhubungan**	1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan Peralatan Uji KIR; 2. Minimnya fasilitas pelabuhan laut, terminal bus, bandara Morowali; 3. Terbatasnya rambu-rambu lalu-lintas pada daerah rawan Lakalantas. 4. Rasio izin trayek di bawah target yakni mencapai 20 poin di Tahun 2020 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 36 poin. 5. Kuantitas penumpang dan barang yang terangkut terbatas akibat kurangnya angkutan laut antar kecamatan di wilayah kepulauan.
2.16	**Bidang Komunikasi Dan Informatika**	1. Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi terutama wilayah kepulauan.

		2. Masih adanya wilayah desa *blank-spot* Jaringan Komunikasi khususnya di wilayah pegunungan dan pulau-pulau (Menui Kepulauan dan Salabangka). 3. Belum optimalnya penggunaan website sebagai sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. 4. Anggaran yang terbatas didalam penyiapan infrastruktur tower BTS dan akses jaringan internet pada wilayah terpencil
2.17	**Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**	1. Persentase koperasi aktif pada tahun 2020 sebesar 36,36 persen, mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2024 menjadi 43,20 persen. 2. Minimnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi 3. Minimnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 4. Terbatasnya akses modal bagi UKM 5. Terbatasnya akses informasi pasar bagi UKM 6. Terbatasnya interkoneksi dengan Kawasan Industri yang ada.
2.18	**Bidang Penanaman Modal**	1. Infrastruktur baik transportasi maupun energi dalam mendukung penanaman modal masih terbatas. 2. Sektor penanaman modal masih terfokus pada industri ekstraksi berbasis sumber daya alam khususnya pertambangan 3. Promosi investasi belum memadai 4. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta) pada tahun 2020 sebanyak 104 investor, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 225 Investor. 5. Jumlah nilai investasi berskala nasional .(PMDN/PMA) pada tahun 2020 realisasi investasi sebesar US$ 22.684 Milyar, pada tahun 2024 mengalami peningkatan nilai investasi menjadi US$ 117.577 Triliun.
2.19	**Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**	1. Data jumlah organisasi kepemudaan, kegiatan organisasi kepemudaan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan masih terbatas 2. Kontribusi organisasi kepemudaan serta koordinasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah masih terbatas 3. Jumlah prasarana olah raga belum memadai 4. Sinkronisasi perencanaan kegiatan olah raga belum memadai
2.20	**Bidang Statistik**	1. Beberapa publikasi penting bagi Kabupaten Morowali belum ada dan belum dijadikan kegiatan rutin yang dikerjasamakan dengan

		pihak badan Pusat Statistik seperti PDRB sembilan Kecamatan baik pendekatan lapangan usaha maupun penggunaan, Indeks Gini, NTP (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), NTP Nelayan, dan lain-lain 2. Terintegrasinya Sistem Data statistik belum terintegrasi dan termanfaatkan dengan baik didalam pengambilan keputusan
2.21	**Bidang Persandian**	1. Anggaran mendukung persandian sangat terbatas 2. Sampai dengan tahun 2020 belum adanya tenaga sandiman di kabupaten Morowali 3. Keamanan data dan informasi daerah sangat diperlukan didalam menjalankan pemerintahan termasuk keamanan tanda tangan pejabat daerah menghindari pemalsuan
2.22	**Bidang Kebudayaan**	1. Alokasi anggaran bagi kegiatan kebudayaan masih minim. 2. Sumber Daya Manusia dan sarana-prasarana kegiatan kebudayaan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan masih minim 3. Identifikasi dan riset situs kebudayaan belum dilakukan
2.23	**Bidang Perpustakaan**	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada tahun 2020 realisasi sebanyak 2.286 orang dan terjadi peningkatan jumlah pengunjung setiap tahun dan tahun 2024 menjadi 5.105 orang. 2. Kemampuan literasi masyarakat kepualuan yang masih rendah. 3. Minat baca masyarakat masih minim yang disebabkan minimnya koleksi buku di perpustakaan 4. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih belum memadai 5. Belum dilakukannya identifikasi perpustakaan tingkat komunitas
2.24	**Bidang Kearsipan**	1. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih belum memadai 2. Pengelola kearsipan masih terbatas; 3. Tradisi tata kelola arsip daerah belum dibudayakan.
3	**Urusan Pilihan**	
3.25	**Pertanian**	1. NTP belum mencapai nilai 100 2. Menurunya kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB. 3. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan kelompok tani.

		4. Belum optimalnya peran PPL Pertanian dalam peningkatan SDM petani, produksi dan pemasaran hasil pertanian. 5. Kualitas-Produk pertanian masih rendah 6. Terbatasanya Sarana Prasarana Produksi Petani Seperti Modal Usaha, Alsintan, Pupuk/Obat-obatan Terbatas. 7. Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah 8. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, permukiman dan niaga. 9. Rendahnya penyediaan irigasi pada daerah baru
3.26	**Bidang Kelautan Dan Perikanan**	1. Masih rendahnya pendapatan dan kesejahteraan nelayan 2. Kegagalan budidaya rumput laut, 3. menurunnya hasil perikanan tangkap, 4. Lemahnya daya tawar nelayan 5. Sangat terbatasnya kewenangan kabupaten didalam pengelolaan kelautan dan perikanan 6. Terbatasnya sarana dan prasarana alat tangkap ikan bagi nelayan 7. Terbatasnya anggaran didalam mendukung pengembangan perikanan 8. Belum optimalanya pengembagan rumput laut 9. Besarnya potensi perikanan tangkap Kabupaten Morowali yang belum dikelola 10. Belum optimalnya pelestarian dan pengawasan lingkungan perikanan.
3.27	**Bidang Pariwisata dan EKonomi Kreatif**	1. Masih rendahnya kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten 2. Belum optimalnya penataan Daya Tarik Wisata (DTW) 3. Belum terintegrasinya pemasaran destinasi pariwisata antar daerah sesuai potensi. 4. Masih rendahnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif. 5. Rendahnya Kontribusi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB.
3.30	**Bidang Perdagangan**	1. Masih rendahnya akses permodalan bagi Pedagang/Usaha Mikro/ informal 2. Program Pengembangan UMKM
3.31	**Bidang Perindustrian**	1. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali mengalami penurunan atau bahkan berkurang dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,37 persen.

		Ditahun 2022 industri di Kabupaten Morowali meningkat sebesar 37,44 persen. 2. Rasio PDRB industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 35,25 persen, mengalami penurunan setiap tahun dan pada tahun 2024 menjadi 20,01. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali tidak bisa mengandalkan industri pengolahan.
3.32	**Bidang Transmigrasi**	1. Tidak adanya pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru dari Tahun 2014–2022 2. Diperlukan Penyiapan Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Permukiman Transmigrasi baru
4	**Urusan Pemerintahan Penunjang**	
4.01	**Sekretariat Daerah**	1. Reformasi Birokrasi belum berjalan maksimal 2. Nilai SAKIP Pemerintah Masih dalam Kategori Rendah 3. Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4. Belum terbangunnya Fasilitasi Kerjasama Daerah. 5. Masih terbatasnya aparatur UKPBJ 6. Terbatasnya Aparatur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JF-PPBJ) 7. Masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola pengadaan barang/jasa. 8. Belum stabilnya harga komoditi pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat 9. Perlu adanya pengembangan Aparatur yang Profesional, Adaptif dan responsif 10. Perlu adanya peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, penyusunan SOP dan Penerapan Standar Pelayanan minimal 11. Belum optimalnya kordinasi penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah
4.02	**Sekretariat DPRD**	Belum optimalnya capaian kinerja Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda
5.01	**Perencanaan**	1. Masih rendahnya ASN yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan 2. Dokumen perencanaan belum sinkron

		3. Pengolahan data dan informasi pembnagunan daerah belum optimal 4. Koordinasi perencanaan masih perlu ditingkatkan
5.02	**Keuangan**	1. Kurang optimalnya capaian pendapatan PAD 2. Alokasi anggaran untuk pencapaian target pembangunan sulit tercapai
5.03	**Kepegawaian**	Belum optimalnya penegakan hukuman disiplin ASN
5.04	**Pendidikan Dan Pelatihan**	Belum optimalnya capaian aparatur yang mengikuti diklat struktural fungsional dan teknis
5.05	**Penelitian Dan Pengembangan**	Masih rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
6.01	**Inspektorat Daerah**	1. Masih kurangnya tindak lanjut temuan pemeriksaan internal 2. Kurangnya aparatur pemeriksa yang profesional dan berkualitas auditor
7.01	**Kecamatan**	1. Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan. 2. Infrastruktur pendukung pelayanan publik di kecamatan belum memadai.
8.01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**	1. Kurangnya Cakupan Sekolah, Ormas, dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan; 2. Belum optimalnya cakupan Pendidikan politik masyarakat; 3. Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan; 4. Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.

2.3.2. Isu Strategis

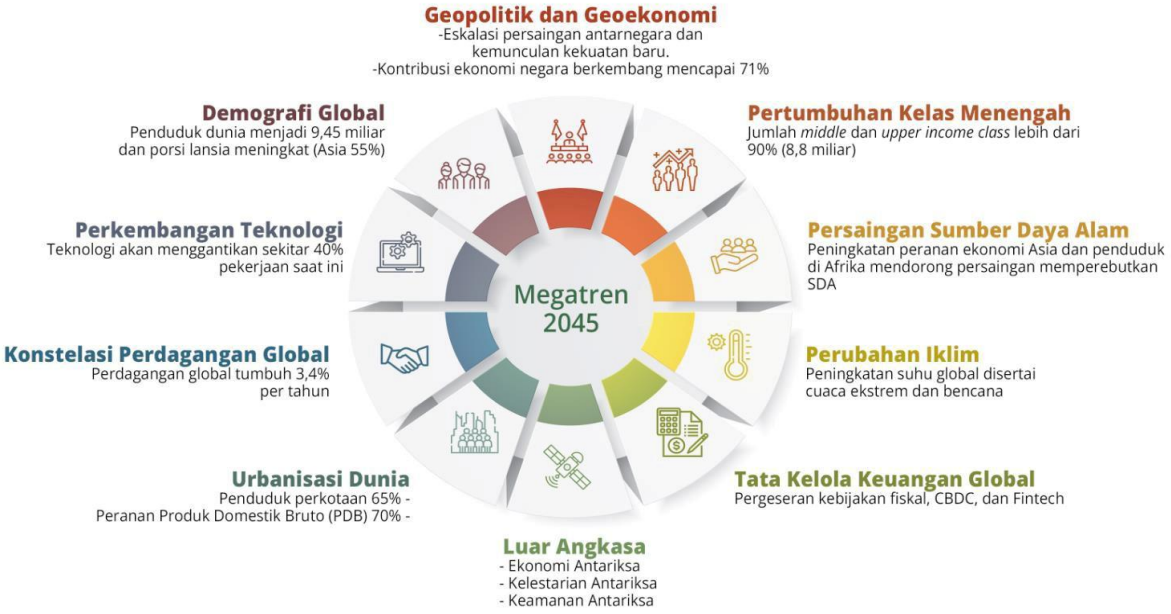
2.3.2.1. Isu Strategis Global

Isu strategis *(strategic issues)* adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dalam penyusunan RPJMD sebagaiman diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, Provinsi dan daerah, serta pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Sementara penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan khususnya Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali. Melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, pada proses Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dilakukan juga penelaahan terhadap isu strategis Global yang mempengaruhi Indonesia, SDGs 2023, Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045, Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi yang temuat dalam Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika internasional, nasional dan regional.

A. Isu Strategis Global Megatren 2045

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: (1) perkembangan demografi global; (2) geopolitik dan geoekonomi; (3) perkembangan teknologi; (4) peningkatan urbanisasi dunia; (5) konstelasi perdagangan global, (6) tata kelola keuangan global; (7) pertumbuhan kelas menengah (*middle class*); (8) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam; (9) perubahan iklim; dan (10) pemanfaatan luar angkasa *(space economy).*



Gambar 2.124
Megatren Tahun 2045

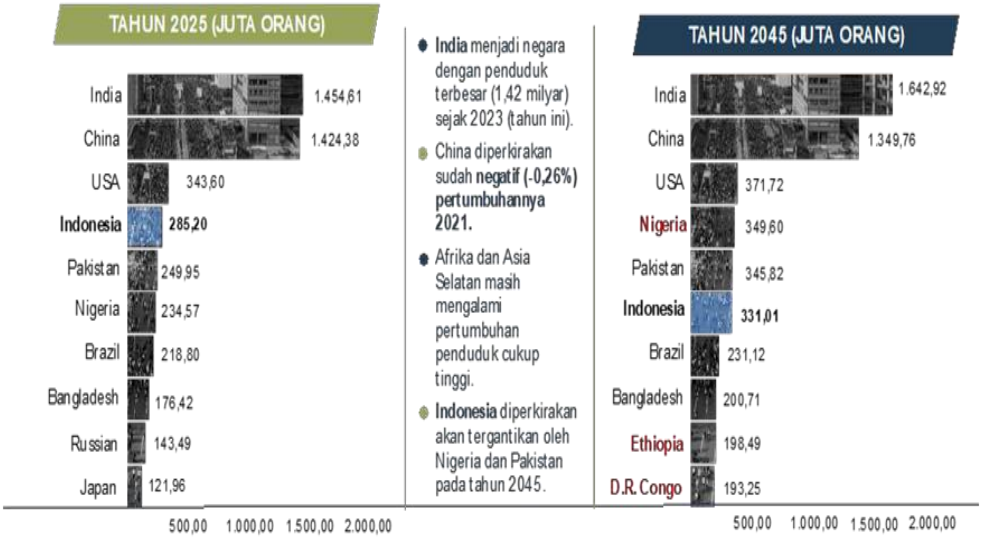
B. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia**.** Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diprakirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global

memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran.



Sumber: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022 dan Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.125
Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Tahun 2025 dan 2045

Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

C. Geopolitik dan Geoekonomi

1) Geopolitik

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia**.** Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi

pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan setiap negara. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas**.** Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo- Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo- Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

2) Perang Tarif USA dan China

Kebijakan Tarif Trump. Kebijakan tarif Trump adalah langkah yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengenakan tarif impor terhadap barang-barang dari berbagai negara. Tarif resiprokal

yang ditetapkan Trump mengacu pada kebijakan perdagangan, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor atau bea masuk yang serupa maupun sebanding dengan tarif yang dibebankan oleh negara lain terhadap barang-barang ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dan meningkatkan produksi dalam negeri.

Berikut adalah beberapa poin utama dari kebijakan tarif Trump:

1. Tarif Universal: Tarif universal sebesar 10% dikenakan pada semua barang impor dari negara-negara asing.
2. Tarif Timbal Balik: Tarif timbal balik khusus dikenakan pada negara-negara yang dianggap memberlakukan tarif impor lebih tinggi terhadap produk AS. Indonesia, misalnya, dikenakan tarif sebesar 32%.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa penghitungan tarif impor Trump tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas. uga, angka-angka itu muncul karena AS memperkirakan negara seperti Indonesia mengenakan tarif 64 persen terhadap produk AS. hubungan dagang antara Indonesia dan AS, Tanah Air mencatat surplus sebesar US$ 16,8 miliar. Angka tersebut selanjutnya dibagi dengan jumlah nilai impor AS dari Indonesia yang berada di angka US$ 28,3 miliar, sehingga menghasilkan persentase sekitar 64 persen. Persentase tersebut berikutnya dianggap oleh pihak Amerika Serikat sebagai tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk-produk dari negaranya. Dampak tarif tersebut bagi ekonomi Indonesia adalah :

1. Penurunan Ekspor: Tarif yang tinggi menyebabkan produk Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, sehingga menurunkan daya saing dan volume ekspor.
2. Tekanan pada Sektor Industri: Sektor-sektor seperti tekstil, peralatan listrik, dan minyak nabati yang bergantung pada ekspor ke AS mengalami tekanan signifikan.
3. Potensi Resesi: Kebijakan tarif ini dapat memicu resesi ekonomi di Indonesia pada kuartal IV 2025, dengan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan.
4. Pelemahan Rupiah: Guncangan di pasar keuangan global akibat kebijakan tarif Trump menyebabkan kurs rupiah terhadap dolar AS jatuh ke level terendah sepanjang sejarah.
5. PHK dan Pengangguran: Peningkatan biaya produksi dan penurunan ekspor dapat menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatkan angka pengangguran.

China telah mengambil beberapa langkah strategis untuk menghadapi kebijakan tarif yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump:

1. Tindakan Balasan: China menaikkan tarif atas barang-barang Amerika Serikat dari 84% menjadi 125% sebagai respons langsung terhadap tarif yang
2. Diplomasi dan Aliansi: Presiden Xi Jinping mengajak Uni Eropa untuk bersatu menghadapi kebijakan dagang sepihak Amerika Serikat. China berusaha memperluas poros diplomasi dengan menjadikan Eropa sebagai mitra dalam menyeimbangkan dominasi dagang AS
3. Pembatasan Impor Produk Budaya: China mengurangi impor film asal Amerika Serikat sebagai langkah untuk menyesuaikan selera pasar dan sebagai sinyal bahwa produk budaya juga bisa menjadi senjata dalam perang dagang
4. Revitalisasi Ekonomi: China tetap teguh dalam menghadapi ancaman tarif tambahan dari Trump, dengan menyatakan akan terus melawan kebijakan tarif tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan negara yang bermitra.
5. Stabilitas Ekonomi Global: China menyebut ancaman tarif Trump telah menimbulkan kekhawatiran dalam keseimbangan ekonomi global untuk menghadapi kebijakan tarif Trump.

Dampak kebijakan tarif China dalam menghadapi kebijakan tarif Trump memiliki beberapa implikasi penting bagi ekonomi global dan Indonesia.

Adapun dampak Global yang akan dihadapi adalah:

1. Perlambatan Ekonomi Global: Perang tarif antara AS dan China menyebabkan ketidakpastian ekonomi global, yang berdampak pada penurunan investasi dan perdagangan internasional.
2. Volatilitas Pasar Keuangan: Kebijakan tarif ini meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global, termasuk pasar saham dan mata uang.

Adapun dampak bagi Ekonomi Indonesia adalah:

1. Penurunan Ekspor: Tarif tinggi yang dikenakan oleh AS dan China menyebabkan penurunan permintaan produk Indonesia di kedua negara tersebut
2. Tekanan pada Sektor Industri: Sektor-sektor seperti tekstil, elektronik, dan komoditas mengalami tekanan akibat penurunan ekspor dan peningkatan biaya produksi
3. Pelemahan Rupiah: Ketidakpastian ekonomi global akibat perang tarif menyebabkan pelemahan kurs Rupiah terhadap Dollar AS
4. Inflasi: Peningkatan biaya impor dan produksi dapat menyebabkan inflasi di Indonesia, yang berdampak pada penurunan daya beli.
5. Diversifikasi Pasar: Indonesia berusaha untuk diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain yang dapat menjadi mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan China.

3) Geoekonomi

Nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan**.** Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai *output* dunia. Pada tahun 2045, nilai *output* negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai *output* yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang**.** Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional

yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai *output* dunia.

D. Perkembangan Teknologi Informasi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing, Auto Robotic System, 3D,* dan *Future Technologies*.



Gambar 2.126
Disrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik (Gambar diatas). Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Perkembangan kemajuan IT telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Saat ini, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga

keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, IoT, AI, dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D *printing*, *rapid prototyping*, *powder bed system*, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Perkembangan teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas- tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (remote working) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola work from anywhere (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan

terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

E. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negaraemerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan

sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

F. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7 (Grafik 2.1.2). Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang

berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara- negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

G. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

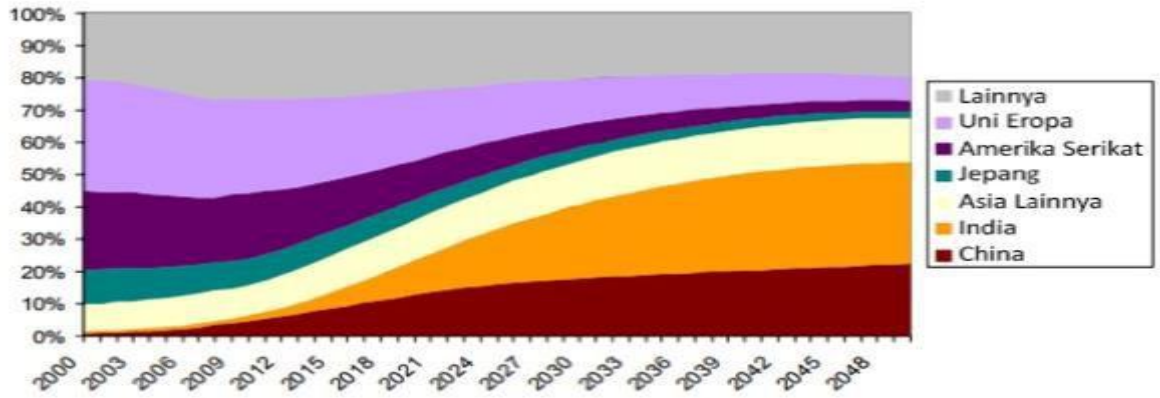
Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI),

dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

H. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.



Gambar 2.127
Share Konsumsi Penduduk Kelas Menengah Global, 2000-2050

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual–metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

I. Degradasi Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang**.** Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

J. Perubahan Iklim

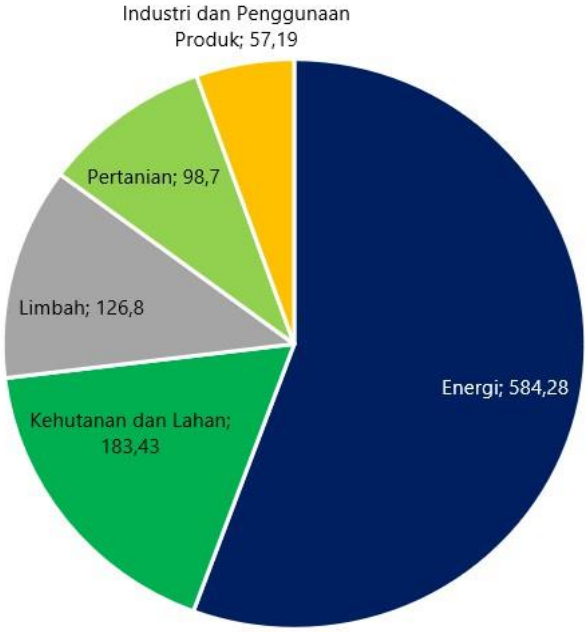
Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori *kode merah bagi manusia***.** Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat *Celcius* di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan laut Indonesia berkisar 0,7- 0,9 cm/tahun. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Terdapat 18.000 km garis pantai Indonesia berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, penduduk miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun selama periode tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global. Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO2e atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO2e (Our World in Data based on the Global Carbon Project, 2022). Kontribusi emisi GRK Indonesia tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk.



Gambar 2.128
Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Juta ton CO2e)

Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak berubah**.** Pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini masih bertumpu pada energi fosil, bersifat

eksploitatif terhadap sumber daya alam, serta penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan emisi GRK nasional akan terus meningkat hingga dua kali lipat mencapai 2,27 GtCO2e di tahun 2045.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2023 memberikan peringatan bahwa waktu untuk bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi elektrolisis *Green Hydrogen* (GH2) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai *feedstock* industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

K. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir**.** Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia *(common heritage of humankind)*, yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa *(space economy)*, kelestarian antariksa *(space sustainability)*, dan keamanan antariksa *(space security)*.

L. Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu strategis global mengambil sumber salah satunya dari *Sustainable Development Goal's (SDG's)* sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun TPB dimaksud memberikan panduan dalam pembangunan secara global yang berkelanjutan yang mencakup 4 (empat) dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan) yang terdiri dari:

1. Tujuan 1 tanpa kemiskinan;
2. Tujuan 2 tanpa kelaparan;
3. Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera;
4. Tujuan 4 pendidikan berkualitas;
5. Tujuan 5 kesetaraan gender;
6. Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak;
7. Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau;
8. Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Tujuan 9 industri, inovasi dan infrastruktur;
10. Tujuan 10 berkurangnya kesenjangan;
11. Tujuan 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan;
12. Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Tujuan 13 penanganan perubahan iklim.

Pembangunan dan aktivitas masyarakat juga telah mengakibatkan berbagai masalah lingkungan *(environmental problems)* dan berbagai gangguan kesehatan yang diakibatkan buruknya kondisi dan kualitas lingkungan. Perkembangan produksi kemudian dipicu oleh peningkatan dan gaya hidup konsumsi masyarakat telah mengakibatkan produksi sampah melimpah di berbagai negara. Produksi sampah yang melimpah ini tanpa diikuti oleh pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sampah menumpuk dan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang *(developing countries)*.

Perilaku manusia dan kegiatan ekonomi juga telah menghasilkan emisi yang terus meningkat di berbagai negara. Polusi udara dan air telah mengakibatkan merebaknya berbagai penyakit, bahkan kematian. Penurunan kondisi sanitasi dan makanan yang tidak sehat telah mengakibatkan kematian sebanyak 1,7 miliar manusia setiap tahunnya. Polusi udara di perkotaan telah mengakibatkan kematian sekitar 800 ribu orang setiap tahunnya. Pencemaran tembaga (*lead*) telah mengakibatkan 13 juta manusia cacat, dalam bentuk keterbelakangan mental, dan penyakit kardiovaskular. Upaya mengintegrasikan pencapaian SDGs di Indonesia dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB). Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan

konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Regulasi ini menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya.

Pelaksanaan SDG's berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Untuk keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDG's tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDG's.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. Dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB Kabupaten Morowali.

M. Dunia menghadapi Ancaman Bencana Alam Global

Sejak masa lalu manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali melenyapkan populasi. Pada zaman dahulu, manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan sang maha pencipta. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa atau tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun kehancuran. Kata bencana dalam Bahasa Inggris "disaster" berasal dari kata Bahasa Latin "dis" yang bermakna "buruk" atau "kemalangan" dan "aster" yang bermakna "dari bintang-bintang". Kedua kata tersebut jika dikombinasikan akan menghasilkan arti "kemalangan yang terjadi di bawah bintang", yang berasal dari keyakinan bahwa bintang dapat memprediksi suatu kejadian termasuk peristiwa yang buruk.

Menjelang akhir abad ini, banyak bagian dunia akan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus, yang disebabkan perubahan iklim. Menurut para ahli, bencana yang dimaksud mulai dari gelombang panas dan kebakaran, sampai hujan lebat dan ombak besar bahkan tsunami yang akan menghantam kawasan pantai. Manusia akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi. Tingkat karbon dioksida, gas methana dan gas-gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu akibat Perubahan Iklim Peningkatan suhu bumi memicu musim hujan yang sulit diprediksi, kemarau panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini sedang terjadi di negara bagian USA, wilayah Eropa dan Asia. Sebaliknya, di kawasan yang biasanya lebih basah, justru terjadi hujan lebat dan banjir. Di laut, peningkatan suhu memicu badai yang semakin besar yang menimbulkan bencana karena permukaan air laut yang terus naik. Sampai saat ini para pakar hanya mempelajari dampak perubahan iklim ini satu per satu. Mereka belum mempertimbangkan kemungkinan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini terjadi sekaligus.

Perjanjian iklim yang ditandatangani di Paris tahun 2015 oleh 195 negara menyerukan supaya dilakukan usaha terkoordinir untuk mencegah kenaikan suhu bumi diatas dua derajat Celsius menjelang akhir abad ini. Kalau emisi gas karbon dioksida berlanjut pada tingkat yang sekarang, kota-kota didunia kemungkinan akan dilanda empat jenis bencana alam sekaligus. Termasuk di antaranya adalah hujan lebat, kenaikan permukaan laut, dan ombak besar yang akan menghantam kota itu. Kalau itu terjadi maka kawasan-kawasan pantai di daerah tropis akan menghadapi bencana paling besar.

Cuaca ekstrem, angin topan, dan tornado adalah beberapa bencana alam yang sering terjadi pada tahun 2019-2022 diperkirakan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana-bencana ini sering kali dikaitkan dengan perubahan iklim global. Oleh karena bencana alam adalah sesuatu yang kompleks, dan perubahan iklim dapat memperparah kondisinya. Pemanasan global yang terjadi sebagai salah satu efek perubahan iklim menyebabkan kandungan uap air di atmosfer semakin meningkat. Semakin tingginya kadar uap air akan mempengaruhi tingkat kelembapan di atmosfer. Kondisi atmosfer yang lembap akan memicu terjadinya badai besar yang terjadi. Ancaman badai semakin diperparah oleh berkurangnya perbedaan suhu antara ekuator dengan kutub. Akibat adanya *global warming*, temperatur di kutub mengalami lebih banyak peningkatan jika dibandingkan dengan perubahan temperatur yang terjadi di ekuator. Peningkatan suhu yang sangat drastis di kutub membuat perbedaan suhu

antara ekuator dengan kutub menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini sebenarnya membuat potensi kejadian badai dengan intensitas kecil semakin jarang terjadi. Namun, secara bersamaan, hal tersebut ternyata meningkatkan ancaman terbentuknya badai berintensitas tinggi di atmosfer bumi.

Gempa bumi dan likuifaksi yang maha dasyat terjadi di Palu-Sulawesi Tengah dan di Turki dan Suriah merupakan contoh nyata dari ancaman bencana alam global yang dihadapi dunia saat ini. Isu ini sangat penting karena bencana alam dapat berdampak besar pada kehidupan manusia, ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup planet bumi. Beberapa ancaman bencana alam pasca gempa bumi dan bencana lainnya yang sering terjadi antara lain a) Kerusakan lingkungan dan kehilangan habitat menyangkut Bencana alam seperti gempa bumi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan kehilangan habitat bagi makhluk hidup. Dampak ini dapat mengancam mempertahankan spesies tertentu dan menyebabkan efek domino pada ekosistem secara keseluruhan; b) Kesehatan dan kesejahteraan manusia yaitu Bencana alam global seperti gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran penyakit, kekurangan pangan dan air, serta kondisi sanitasi yang buruk; c) Gangguan ekonomi menyangkut pasca Bencana alam dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara atau wilayah secara signifikan. Kerusakan infrastruktur, perkebunan, dan fasilitas produksi dapat mempengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat memicu kenaikan harga dan inflasi, serta mengurangi pendapatan dan lapangan kerja; d) Konflik dan keamanan yaitu Bencana alam dapat memicu konflik dan keamanan. Ketika masyarakat merasa tidak diuntungkan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antarkelompok. Selain itu, situasi darurat seperti ini juga dapat memungkinkan kelompok-kelompok ekstrimis untuk memperluas pengaruh mereka; e) Perubahan iklim dimana Bencana alam global seperti gempa bumi berkontribusi pada perubahan iklim. Dimana, gempa bumi dapat menyebabkan aktivitas vulkanik, yang dapat melepaskan efek rumah kaca ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global.

Oleh karena itu, penting bagi dunia secara global untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, Likuifaksi, tanah longsor, banjir bandang, gunung berapi dan lain-lain baik melalui upaya penanggulangan, adaptasi, maupun penanganan darurat. Upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif antar negara, antar wilayah provinsi,

Kabupaten/Kota dan antar sektor untuk memastikan keberlangsungan hidup planet kita dan kesejahteraan umat manusia di masa depan.

N. Daya Dukung dan Daya Tampung

1) Daya Dukung Sumber Daya Alam

Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi, keanekaragaman hayati, dan sebagainya.

Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektare dari tahun 2025 sampai tahun 2060 (BaU). Hal tersebut dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu hektare selama kurun 2020-2045. Begitu pula dengan luas lahan sawah yang diproyeksikan akan terus menurun hingga 7 juta hektare yang diiringi dengan menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektare/tahun akibat degradasi tanah.

Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Indonesia**.** Secara umum, pada situasi *baseline* suplai air domestik pada tingkat nasional masih mampu memenuhi permintaan air keseluruhan. Namun pada skala pulau, pada wilayah tertentu di tahun 2000, tingkat ketersediaan air mulai menunjukkan kelangkaan yang dipengaruhi oleh kebutuhan air yang tinggi dan penurunan luas tutupan hutan lahan. Sampai dengan tahun 2045, tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, sudah berada pada tingkat langka atau kritis.

Daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral cukup besar tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan**.** Walaupun Indonesia memiliki berbagai sumber daya energi dan mineral seperti nikel, tembaga, bauksit, gas, dan batu bara yang diperkirakan cukup tinggi termasuk yang berada di laut dalam, namun tingkat cadangan terbukti yang telah ditemukan relatif lebih rendah dari yang diperkirakan. Eksplorasi cadangan energi sumber daya mineral membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, dan kapasitas SDM yang memadai.

Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun. Ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan mengalami penurunan. Ketersediaan lahan mengalami tekanan dengan semakin meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan

lain. Ketersediaan dan pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Penurunan kualitas lahan dan air juga berdampak nyata pada menurunnya daya dukung untuk penyediaan pangan. Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati berdampak pada penurunan keragaman sumber pangan. Nantinya, potensi kerentanan pangan di beberapa wilayah perlu diwaspadai.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran, perubahan iklim, dan persebaran Jenis Asing Invasif (JAI). Alih fungsi lahan yang diproyeksikan terus terjadi dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat spesies kunci, seperti: Gajah, Orang utan, dan Harimau Sumatera; Badak dan Owa Jawa; Anoa; Babi rusa; Orang utan Borneo; dan Gajah Kalimantan. Luas habitat spesies kunci diproyeksikan menurun 6,6 juta hektare selama 2020-2045.

Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan antara lain pada aktivitas perikanan tangkap, pembangunan pesisir, transportasi dan pariwisata. Sampah plastik menurunkan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati laut secara signifikan serta berdampak pada kualitas sumber pangan akuatik, keselamatan pelayaran, dan daya tarik wisata bahari. Lebih lanjut, naiknya suhu air laut semakin memperburuk daya dukung ekosistem laut salah satunya mengancam pemutihan yang semakin luas pada ekosistem terumbu karang.

2) Daya Tampung

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Saat ini 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar (WWF, 2019) dan sekitar 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga tidak layak minum (UNICEF, 2022). Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4,7 juta ton BOD per tahun dan berisiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan IPAL, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memadai. Selain itu, pencemaran sumber daya air juga terjadi akibat tidak baiknya pengelolaan limbah dari baik industri, pertanian, maupun pertambangan. Peningkatan beban *biological oxygen demand* (BOD) diperkirakan mencapai 3.000 ribu ton/tahun, jauh di atas beban maksimum (600 ribu ton/tahun). Selain itu, komponen Indeks Kualitas Air (IKA) nasional memiliki nilai yang paling

rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan komponen lainnya dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKA memiliki tren fluktuatif dengan rata-rata tahun 2015-2021 sebesar 52,35 (KLHK, 2021).

Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu. Konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari, atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari) khususnya di daerah perkotaan.

Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas**.** Berdasarkan indeks kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas gambut pada tahun 2021, sebanyak 11 provinsi dalam kondisi buruk hingga sangat buruk terutama akibat kebakaran hutan dan lahan. Persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, tanpa adanya intervensi, daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 atau lebih cepat. Timbulan sampah pada tahun 2045 diprediksi mencapai 82,2 juta ton, ditambah dengan timbulan akibat susut dan limbah pangan (*food loss and waste*) yang mencapai sekitar 334 kg per kapita sehingga berkontribusi pada *overcapacity* TPA.

Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. *Ocean Health Index* (OHI) Indonesia berada pada peringkat 181 dari 221 negara dengan skor 62,66 yang mengindikasikan rendahnya pengelolaan yang berkelanjutan yang utamanya disebabkan oleh aktivitas perikanan, pariwisata, transportasi dan sampah laut. Selain itu, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai bagian dari IKLH sudah mulai dikembangkan dengan angka capaian tahun 2021 dan 2022 sebesar 81,04 dan 84,41. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di beberapa wilayah pulau besar di Indonesia memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda-beda.

Kualitas air dan tanah juga diperkirakan turun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus meningkat. Diperkirakan timbulan sampah akan melebihi kapasitas daya tampung TPA di mana sampah terkelola kurang dari 10 persen. Turunnya kualitas air terlihat dari beban *Biological Oxygen Demand* (BOD) yang diperkirakan mencapai 3000 ribu ton/tahun, jauh di atas beban maksimum (600 ribu ton/tahun). Disisi lain, diproyeksikan persentase tutupan lahan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya laju alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan.

Tabel 2.90 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Ekoregion pada Tahun 2045

O. Krisis Pangan Dunia

Ancaman krisis pangan global sangat serius dan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, konflik, ketidakstabilan ekonomi, dan kesulitan distribusi pangan. Perubahan iklim ekstrem menyebabkan gangguan pada pertanian, seperti siklon dan hujan di atas normal, yang merusak areal pertanian dan memicu gagal panen. Selain itu, konflik dan ketidakstabilan ekonomi juga menghambat produksi dan distribusi pangan, sementara kesulitan distribusi dan tingginya harga pupuk juga turut memperparah krisis pangan.

Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mencatat, lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Jumlah itu meningkat hampir 200 juta orang dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan sebelum pandemi Covid-19. Menurut WFP, krisis pangan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang mematikan. Konflik masih menjadi penyebab kelaparan terbesar. Sebanyak 70 persen orang di dunia yang menderita kelaparan tinggal di wilayah terdampak perang dan kekerasan. Krisis iklim juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kelaparan global.

Perubahan iklim ekstrem menghancurkan kehidupan, tanaman dan mata pencarian, serta melemahkan kemampuan masyarakat untuk mencari makan. Selain itu, harga pupuk global meningkat drastis. Dampak perang di Ukraina mengganggu produksi dan ekspor pupuk global sehingga mengurangi pasokan, menaikkan harga, dan mengancam panen. Harga pupuk yang tinggi dapat mendorong terjadinya krisis ketersediaan pangan, dengan produksi jagung, beras, kedelai, dan gandum semuanya turun pada tahun 2022.

Untuk mengatasi ancaman krisis pangan global, diperlukan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta upaya untuk meningkatkan produksi pangan dan menjaga stabilitas harga. Mitigasi dapat dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, sementara adaptasi dapat dilakukan dengan mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selain itu, perlu juga peningkatan kerjasama internasional dalam mengatasi krisis pangan dan memastikan akses pangan bagi semua orang.

2.3.2.2. Isu Nasional

A. Isu Nasional Umum

A.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri

bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan s€mua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara. Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap kebuakan pembangunan yang menegaskan perlindungan, p€nghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sccara bersama sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tePat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

A.2. Pertahanan, Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Ekonomi

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan. Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dcngan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita. Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan meskipun s€mpat terkontraksi cukup dalam pada tahun 2O2O akibat pandemi Corona Virus Disease 2019. Sebelum pandemi Corona Virus Disease 2019, pencapaian Gross National hrcome per kapita tahun 2Ol9 menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara Upper-Middle btome Countries. Namun demikian, adanya pandemi mengakibatkan penurunan Grcss IVatrbnal Income per kapita sehingga Indonesia turun menjadi negara Louer Middle Iname Countries. Berbagai

upaya pemulihan yang dilakukan menyebabkan perekonomian Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif, ditandai oleh peningkatan Gross National Income per kapita dan menjadikan Indonesia kembali ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Dalam lima tahun terakhir, kinerja pertumbuhan industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami tekanan pada tahun 2020.

Salah satu kontribusi paling signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional datang dari sektor industri baja. Sektor industri baja sangat berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui nilai tambah serta menjadi multiplier effect bagi peningkatan daya saing ekonomi. Pertumbuhan industri baja di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara terus didorong untuk memenuhi permintaan produk besi baja dari luar negeri, terutama China, dan peningkatan produksi domestik untuk produk ferronikel.

Program strategis yang mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto industri pengolahan antara lain (1) pemberlakuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, (2) insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah sektor otomotif, (3) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, (4) peningkatan jumlah standar nasional Indonesia industri, (5) program making Indonesia 4.0, (6) pengembangan sekolah menegah kejuruan link and match industri, (7) sertifikasi tenaga kerja industri, serta (8) program harga gas bumi tertentu. Penyediaan lapangan kerja per tahun berhasil ditingkatkan kembali setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019.

Pencapaian ini didorong melalui program bantuan berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019, stimulus ekonomi, kartu pra-kerja, pembukaan kembali sektor-sektor ekonomi secara bertahap dalam sektorsektor padat karya, dan penyelenggaraan pelatihan kerja dan uji kompetensi.

A.3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan signifrkan dalam beberapa tahun terakhir, berkat upaya pemerintah yang terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial hingga graduasi bantuan sosial. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, serta meminimalisasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh berbagai krisis.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, upaya ini menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong penurunan angka

kemiskinan di Indonesia secara bertahap. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau, sebagai kunci dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan, serta laedit usaha rakyat yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, program desa wisata dan produk unggulan desa mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur dasar yang merata juga menjadi prasyarat penting untuk mendukung pengurangan kemiskinan, dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan akses listrik di daerah terpencil,

Tingkat kemiskinan meningkat pada tahun 2020 akibat kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun demikian, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial maka tingkat kemiskinan dapat kembali menurun hingga tahun 2023.

Program perlindungan sosial yang terintegrasi menjadi landasan utama dalam upaya pengurangan kemiskinan, mencakup program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, serta bantuan sosial tunai. Selain itu, inovasi perlindungan sosial adaptif dirancang untuk menghadapi berbagai risiko dan krisis, seperti Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang melindungi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Registrasi sosial ekonomi menjadi dasar penting untuk pemutakhiran dan pengelolaan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi memanfaatkan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial dari berbagai sumber untuk mempermudah identifikasi dan penyaluran bantuan kepada yang berhak.

A.4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2O19 hingga tahun 2023 mencapa.i 73,55 (berdasarkan proyeksi sensus 2O1O) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi sensus 2020), B€rbegei pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses

pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pencapaian pada bidang kesehatan di antaranya (l) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, (2) penurunan stunting dan wasting pada balita, (3) pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (4) peningkatan kualitas rumah sakit dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (5) peningkatan kapasitas obat dan makanan memenuhi syarat. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat pada tahun 2023, meski sempat turun pada 2020–2021 akibat pandemi Corona Virus Disease 2019.

Pencapaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional didorong dengan adanya intervensi dari pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) berhasil diturunkan dari tahun ke tahun. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai salah satu regulasi pemerintah dalam mendorong percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. Provinsi Bali dan Papua merupakan provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah meningkat cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki capaian tertinggi, sedangkan daerah yang perlu didorong dalam upaya percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan antara lain Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

A.5. Pembangunan Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem rangroue dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana. Namun demikian, implementasi kebilakan pengelotraan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tertinggi berada pada Provinsi Papua Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Maluku

Utara, sedangkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang perlu dioptimalkan berada pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kualitas lingkungan hidup salah satunya dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi suatu daerah yang sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa.

A.6. Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Lapangan Kerja

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pcngcmbangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan Peningkatan ekosistem digital.

A.7. Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi (*basic needs*) dan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*), karena hal tersebut akan ikut menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Letak geografis dan luas wilayah Indonesia

menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk sumber pangan yang dihasilkan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga ikut andil mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pangan yang akan di konsumsi.

Secara umum potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia sebagai pilihan konsumsi masyarakat terbilang cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempahan dan bumbu-bumbuan, 40 jenis bahan minuman serta 1.260 jenis tanaman obat. Hal ini membuktikan bahwa bangsa kita sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya atau biasa disebut keanekaragaman hayati mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta ekosistem dengan proses ekologi dari bentuk kehidupan yang merupakan bagiannya.

Akibat belum maksimalnya pengelolaan hasil komoditas pangan menyebabkan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun setiap tahunnya angka produktivitas padi Indonesia selalu ada peningkatan antara 1-3 persen atau selama 30 tahun terakhir produksi panen padi telah meningkat dua kali lipat, bahkan untuk produksi jagung bisa meningkat sampai empat kali lipat. Sehingga pencapaian prestasi tersebut masih dirasakan belum signifikan, mengingat berdasarkan hitungan angka yang dihasilkan dari impor beberapa komoditas bahan pangan yang masuk ke Indonesia, tercatat cukup tinggi angka peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan bangsa kita masih mengalami permasalahan di sektor ketahanan pangan.

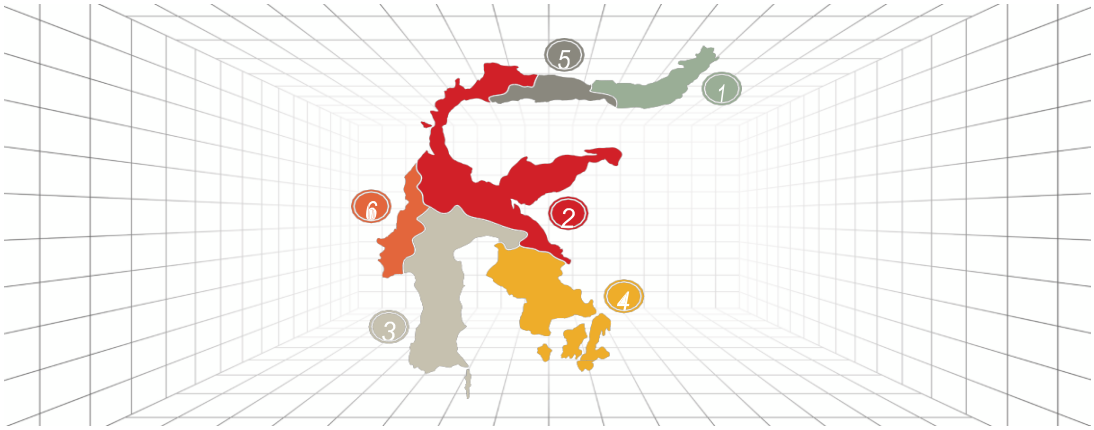
B. Isu Regional Sulawesi

Isu mengenai pembangunan kawasan Kepulauan Sulawesi menjadi salah satu acuan penting bagi pengembangan wilayah Kabupaten Morowali. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40 persen (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional. Dalam dokumen RPJPN Tahun 2025-2029 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi. Arah kebijakan RPJMN untuk wilayah Sulawesi adalah:

- **Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumberdaya Alam**

Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfokus pada Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional.

Dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 juga menjabarkan arahan kebijakan untuk Wilayah Sulawesi. dimana Wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 7,0 persen pada tahun 2022 dan diproyeksikan menjadi 7,7 persen pada tahun 2029. Potensi peningkatan kontribusi tersebut didukung posisi geografis Sulawesi yang berada di antara 2 (dua) ALKI serta keuntungan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara, serta beragamnya sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata.



Gambar 2.129
Prioritas Pengembangan Regional Wilayah Sulawesi

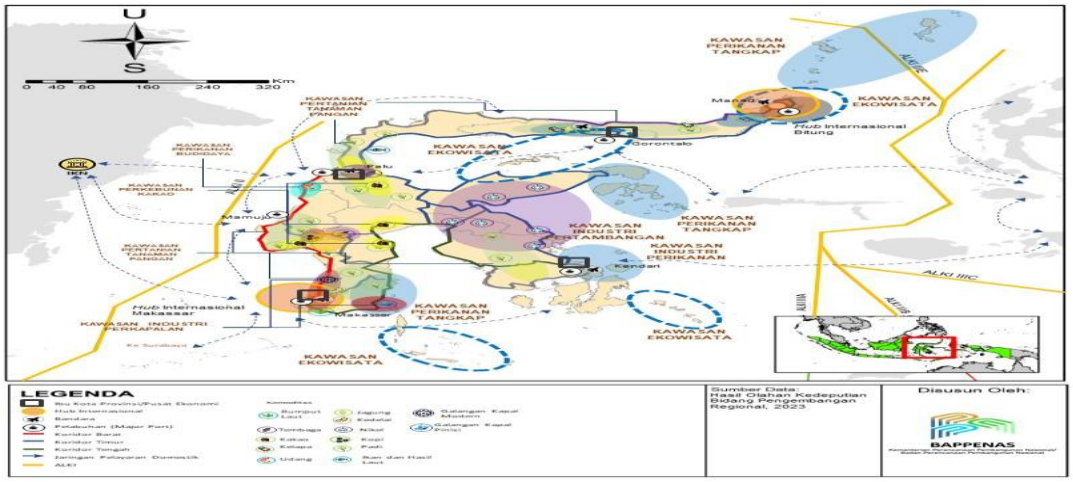
No	Provinsi	Tema
1	Sulawesi Utara	Gerbang perdagangan Asia Timur dan aAsifik, serta Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Destinasi Ekowisata
2	Sulawesi Tengah	Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan
3	Sulawesi Selatan	Sentra Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Perikanan dan Rumput Laut
4	Sulawesi Tenggara	Sentra Pengolahan hasil pertambangan, Pertanian dan Destinasi Pariwisata Bahari
5	Gorontalo	Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan
6	Sulawesi Barat	Sentra Pengolahan Hasil Perkebunan

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai "Penunjang Ekonomi IKN berbasis SDA" secara khusus kedudukan Provinsi Sulawesi Tengah berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral pada Kawasan Industri Morowali-Morowali Utara, dan lumbung pangan nasional. Untuk itu dibangun konektivitas antarwilayah yang menjadi kunci rantai nilai domestik (*Domestic Value Chain*), diperkuat dengan *Global Value Chain* melalui skema kerja sama regional dan Peran Perguruan Tinggi (Pentahelix). Ke depannya pertumbuhan tinggi daerah akan lebih diimbangi dengan upaya-

upaya yang inklusif dan berkelanjutan melalui perkuatan kebijakan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, pembangunan di Wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas:

1. pembangunan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.
2. pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa, dan kopi.
3. pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi *hub* dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital. *Kelima*, peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.
4. perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya di kawasan perbatasan.
5. peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

Rincian arah kebijakan yang berfokus kepada kelima prioritas di atas adalah sebagai berikut.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 2.130

Tema Pembangunan dan Arah kebijakan Wilayah Sulawesi dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 khususnya Morowali sebagai Kawasan Industri (KI) Prioritas Nasional

➢ **Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Aspek Pengembangan	Lokasi Prioritas
1	Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali
2	Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara (Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral)	Kabupaten Morowali dan Morowali Utara
3	Kawasan Hilirisasi Gas Bumi Sulaurcsi Tengah	Kabupaten Banggai
4	Kawasan Pertanian Panga dan Perkebunan Sulawrsi Tengah	Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Buol, dan Tolitoli
5	Kawassn Perikatran dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT)	Kabupaten Parigi Moutong,, Donggala, Morowali, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan
6	Kawasan Hilirisasi Rumput Laut Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
7.	Kawasan Perdesaan Prioritas	Kabupaten Morowali
8	Kawasan Perbatasan Prioritas	Kec. Paleleh Barat, Kec Gadung, Kec. Bokat, Kec Biau, Kec. Keramat Kab Buol Kec. Tolitoli Utara, Kec. Dakopamean dan Kec Dampal Utara Kab Tolitoli
9	Kawasan Transmigrasi	KT. Tampolore Kab Poso KT Bungku Kab Morowali

		KT Palolo Kab Sigi
10	Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah	Taman Nasional Lore Lindu Kab Sigi Taman Nasional Kepulauan Togean Kab Tojo Una-Una Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Tolitoli
11	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu	Kota Palu

Kabupaten Morowali bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena wilayahnya menjadi pusat pertambangan industri dan pengolahan biji nikel. Kabupaten Morowali memiliki tambang nikel salah satu terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki pelabuhan laut yang cukup besar, sehingga memudahkan proses ekspor-impor barang. Dalam pembangunan nasional, Kabupaten Morowali diharapkan dapat menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kabupaten Morowali merupakan Kawasan Peruntukan Industri khususnya pada Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali; Kawasan Industri di Kabupaten Morowali. Pemerintah pusat juga telah menetapkan beberapa proyek strategis nasional di provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali yang berkaitan dengan pengembangan industri hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi. Salah satunya adalah proyek penambangan dan pengolahan nikel berbasis rendah karbon dan terintegrasi yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia dan IMIP.

Di samping itu Kabupaten Morowali juga memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan seperti ***pulau/Kecamatan*** Sembori yang belum dikembangkan secara baik sebagai suatu Kawasan Pariwisata Nasional.

2.3.2.3. Isu Provinsi Sulawesi Tengah

Isu strategis Sulawesi Tengah diperlukan sekali sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat top down tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali dengan Propinsi Sulawesi Tengah. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah.

Isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sumber dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Terdapat isu-isu Strategis di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia

Dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia maka diperlukan Transformasi Sosial yang dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada masing-masing bidang pembangunan.

a.1. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanankesehatan, serta responsiveness sistem kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa permasalahan bidang kesehatan yang perlu dutangani secara ekstra yakni Angka Kematian Ibu yang masih tinggi (264/100.000 kelahiran), stunting masih tinggi 27,2%, prevalensi obesitas, kasus TBC, ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, serta kualitas rumah sakit dan puskesmas yang perlu ditingkatkan.

a.2. Sementara pada bidang pendidikan masih menghadapi tantangan di antaranya, belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah antara lain disebabkan oleh saranaprasarana pendidikan yang belum memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global juga masih rendah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan

untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang seperti: akses pendidikan belum merata, kaulitas pendidikan masih rendah, PTK bersertifikat masih kurang dan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Perguruan Tinggi.

a.3. Adapun perlindungan sosial berfokus untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, perempuan dan perlindungan anak serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

a.4. Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terdapat lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) adalah pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak. Upaya yang tengah dilakukan Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR disusul tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada tanggal 28 September 2018, meninggalkan penderitaan dan trauma mendalam yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat, khususnya pada perempuan dan anak. Berbagai masalah sosialpun bermunculan seperti meningkatnya kasus perkawinan anak, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, pelecehan dan kekerasan seksual, perempuan rentan terserang penyakit reproduksi, terganggunya

hak Pendidikan anak, serta hak perempuan terkait sanitasi yang belum terpisah dengan laki-laki.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan kasus anak sebanyak 246 kasus yang dihitung dari Januari hingga Oktober 2019. Dari 246 kasus tersebut, sebanyak 82 kasus atau sebesar 9,7 persen adalah kasus perkawinan anak di bawah umur. Pada awal Tahun 2019, jumlah perkawinan anak masih relatif kecil karena beberapa perkawinan dilaksanakan "di bawah tangan" sehingga belum semuanya terungkap. Akan tetapi pada Bulan Agustus hingga Oktober 2019 jumlah perkawinan anak meningkat disebabkan karena permasalahan ekonomi dan lingkungan. Selain perkawinan anak, kasus lain yang dialami para penyintas di hunian sementara (huntara) adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT pasca bencana selama satu tahun, terhitung sejak Oktober Tahun 2018 hingga Oktober 2019 sebanyak 76 kasus. Jenis kasus yang terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik seperti perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yaitu penelantaran anak dan istri.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulteng selama periode 2016-2020 mengalami penurunan dari 91,97 poin pada 2016 menjadi menjadi 91,87 poin pada 2020. Demikian pula pada periode 2019-2020 menurun dari 92,01 poin menjadi 91,87 poin. Secara historis, penurunan IPG dimulai dari Tahun 2014 yakni sebesar 92,69 poin menjadi 92,25 poin atau terjadi penurunan terbesar yakni 0,44 poin pada periode tersebut. Lalu pada periode 2015-2016 menurun lagi menjadi 91,91 poin atau menurun 0,34 poin, lalu menurun lagi menjadi 91,66 poin atau mengalami penurunan sebesar 0,25 poin pada periode 2016-2017, sebelum meningkat lagi sebesar 0,42 poin menjadi 92,08 pada 2018. Ada tiga dimensi komponen pembentuk IPG yakni UHH laki-laki dan perempuan, HLS laki-laki dan perempuan, RLS Perempuan, dan Pengeluaran Perkapita Pertahun (*Purchasing Power Parity)*. Pada Tahun 2020, komponen UHH, UHH laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 66,77 tahun 70,72 tahun. Pada komponen HLS, laki-laki lebih singkat daripada perempuan masing-masing 13,07 tahun dan 13,51 tahun. Sebaliknya, pada komponen RLS, RLS laki-laki lebih lama daripada perempuan yakni masing-masing 9,07 tahun dan 8,58 tahun. Hal ini berarti kecenderungan perempuan bersekolah justru dikorbankan demi Pendidikan laki-laki di dalam setiap keluarga.

b. Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah jangka menengah dalam rangka keluar dari Provinsi pendapatan Tinggi dan mengejar pertumbuhan

berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya cenderung mengalami penurunan. Sulawesi Tengah memiliki beberapa komoditas unggulan daerah dari sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan seperti: padi, jagung, kakao, kelapa dalam, sapi potong, rotan, getah pinus, nikel, gas alam, ikan tuna dan rumput laut. Sampai saat ini, tingkat produktivitas sektor unggulan daerah masih berada dalam kategori rendah karena nilai tambah produk yang belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat Sulawesi Tengah, meskipun persentase tenaga kerja dan profesi di sektor petani, pekebun, penambang dan nelayan memiliki persentase terbesar dibandingkan profesi lainnya. Jika dilihat dari Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut Lapangan Usaha (persen) pada tahun 2023, maka lapangan usaha pertanian, perikanan dan kelautan memberikan andil yang cukup besar yaitu 14,78% yang menempati posisi kedua dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,59% (BPS Sulteng, 2024).

Tingkat produktivitas sektor unggulan yang masih minim disebabkan oleh proporsi tenaga kerja yang besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan cenderung memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang rendah sehingga akses petani/pekebun/nelayan terhadap kemampuan pengelolaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi terutama lahan, peralatan dan modal adalah sangat minim yang selanjutnya tingkat pengembalian dari keuntungan usaha akan menjadi rendah dan cenderung penduduk pada profesi sektor-sektor unggulan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2–3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya. Selain itu, biaya pengolahan produk pangan lokal juga cukup tinggi sehingga menyebabkan harga jual produk pangan lokal kurang kompetitif

dibandingkan beras dan terigu. Selain itu, konsumsi juga dipengaruhi oleh selera dan preferensi masyarakat terhadap makanan. Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal sebagai pangan pokok ternyata tidak setara dengan beras atau terigu. Walaupun di beberapa kabupaten seperti Donggala, Sigi, Tojo Una- Una, Buol dan Morowali, diversifikasi pangan antara beras, jagung, ubi kayu dan sagu berjalan cukup baik, sehingga tetap dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan seperti diperlukan upaya pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dengan tetap menjaga nilai gizi.

Subsektor perkebunan memainkan peran yang cukup penting dalam ekonomi nasional. Sekitar seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian disumbang oleh subsektor perkebunan. Subsektor ini juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan devisa negara melalui ekspor produk-produk hasil pertanian. Hingga kini, subsektor perkebunan masih dihadapkan pada persoalan struktural seperti relatif rendahnya produktivitas tanaman perkebunan yang diusahakan perkebunan rakyat dibandingkan dengan perkebunan besar, baik yang dikelola perusahaan negara maupun swasta. Hal ini terlihat jelas pada komoditas kopi, kakao, dan tebu yang merupakan komoditas perkebunan strategis yang sebagian besar dibudidayakan oleh perkebunan rakyat. Selain itu, ketimpangan produktivitas lahan dan tenaga kerja yang cukup lebar juga terjadi antar wilayah.

Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan ekspor pertanian hingga tiga kali lipat melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks). Khusus untuk subsektor perkebunan, Kementan akan fokus pada komoditas strategis perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, lada, pala, dan vanili, serta dengan tetap dengan komoditas andalan ekspor yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, teh, dan tembakau. Dalam pelaksanaannya Kementan tidak berkerja sendiri, Kementan akan merangkul berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, sehingga diharapkan nantinya terbangun Korporasi petani. Petani dan pekebun harus berada dan menjadi mitra Swasta dan BUMN, sehingga petani terangkat pendapatan dan kesejahteraannya.

Daerah penghasil kakao Indonesia adalah Sulawesi Selatan 184.000 ton atau sebesar 28,26 persen; Sulawesi Tengah 137.000 ton atau sebesar 21,04 persen; Sulawesi Tenggara 111.000 ton atau sebesar 17,05 persen; Sumatera Utara 51.000 ton atau sebesar 7,85 persen; Kalimantan Timur 25.000 ton atau sebesar 3,84 persen; Lampung 21.000 ton atau sebesar 3,23 persen dan daerah lainnya 122.000 ton atau sebesar 18,74 persen. Pemerintah menetapkan empat provinsi di Sulawesi sebagai produsen utama kakao nasional yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Keempat provinsi itu

sudah sejak lama bergelut dengan komoditas kakao sehingga lebih potensial dikembangkan sebagai sentra pengembangan kakao berikut industri pengolahannya. Selain itu juga didukung dengan kondisi alam beriklim tropis yang dibutuhkan bagi tanaman budidaya kakao.

Pada 2020, keempat provinsi tersebut masih tercatat sebagai provinsi penghasil kakao tertinggi yakni Sulawesi Tengah sebanyak 127,3 ribu ton, Sulawesi Tenggara sebanyak 114,9 ribu ton, Sulawesi Selatan sebanyak 103,5 ribu ton dan Sulawesi Barat sebanyak 71,3 ribu ton. Komoditi kakao menjadi primadona petani di Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Sigi. Lima desa yang telah ditetapkan sebagai sentra pengembangan komoditas perkebunan khususnya kakao organik adalah Desa Berdikari, Desa Karunia, Desa Bahagia, Desa Sintuwu dan Desa Petimbe.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestrasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (*replanting*) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha. *Replanting* dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit. Salah satu data global yang digunakan untuk men-judge Indonesia adalah data yang baru-baru ini dirilis Global Forest Watch (GFW) yang merupakan data dari *global land analysis and discovery*, *University of Marryland* menyebutkan Indonesia berada pada posisi 10 teratas dengan laju deforestasi tertinggi. Dengan menggunakan informasi tutupan lahan, GFW mengkategorikan hutan primer sebagai area dengan kerapatan tutupan pohon minimum 30 persen. Konversi lahan perkebunan sawit di Indonesia bermula dari penanaman kelapa sawit pada lahan yang terlebih dahulu terdegradrasi akibat kegiatan industri lain seperti kegiatan penebangan dan karet. Salah satu penyebab dari tingginya angka deforestasi tersebut dipengaruhi pemberian izin baik perkebunan maupun pertambangan. Terdapat 54 perusahaan yang mengantongi izin usaha perkebunan (IUP)

dan izin lokasi (Inlok) dengan luas total mencapai 713.217 hektare, tersebar di Kabupaten Donggala, Buol, Morowali, Banggai, Tojo Unauna, Tolitoli dan Morowali Utara.

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Sulteng berada pada tingkat terendah di Pulau Sulawesi dengan nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 75,10 poin atau berada pa da urutan ke 17 dari 34 provinsi di Indonesia. Sulteng memerlukan kebijakan pemanfaatan secara optimal ketersediaan lahan pangan pertanian dan berkelanjutan (LP2B) dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah pusat berupa pembangunan Kawasan Pertanian Food Estate yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi Sulteng menyiapkan lahan pertanian dalam Kawasan LP2B yang produktif untuk dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat petani dan swasta dengan mekanisme pola kerja yang saling menguntungkan.

Terkait kebijakan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulteng selama pandemi virus corona dinilainya sudah sinkron, seperti memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dan bantuan-bantuan pertanian ke petani tetap lancar dan tidak terganggu meski berlaku kebijakan pembatasan akses keluar masuk antar wilayah. Adapun isu strategis dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyangkut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
2. Ketersediaan Pangan;
3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
5. Penanganan kerawanan pangan/Cadangan Pangan Daerah.

c. Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan

Sulawesi Tengah merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki potensi penangkapan cukup besar karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki empat wilayah pengelolana perikanan (WPP) yakni WPP NRI-713 Selat Makasar di sebelah barat, WPP NRI-716 Laut Sulawesi di sebelah Utara, WPP NRI-714 Teluk Tolo, dan Laut Banda sebelah Selatan, dan WPP NRI-715 Teluk Tomini Laut Maluku di di sebelah timur sehingga memiliki garis pantai yang panjang. Luas wilayah perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan 193.923,75 Km^2 terbagi atas 3 kelompok wilayah pengelolaan perikanan yang diistilahkan Cluster, yakni Cluster I (Selat Makasar/Laut Sulawesi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Tolitoli dan Buol), Cluster II (Teluk Tomini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una dan sebagian Banggai), dan Cluster III (Teluk Tolo meliputi Kabupaten Banggai, Baggai Kepulauan, Banggai Laut dan Morowali/Morowali Utara). Mengingat jumlah penduduk dan diikuti

kebutuhan pangan ikan yang semakin meningkat, upaya untuk menumbuhkan kegiatan usaha perikanan guna peningkatan produktivitas usaha perikanan, pendapatan nelayan dan pembudidaya, kualitas gizi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta pengurangan angka kemiskinan di kawasan pesisir masih memiliki peluang yang cukup besar. Selanjutnya, dengan keberadaan wilayah perairan tersebut, maka potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di provinsi ini sangat besar baik potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun bioteknologi kelautan. Selain itu, investasi Pemerintah di sektor kelautan perikanan dalam 10 tahun terakhir cukup signifikan mencapai Rp 200 miliar untuk pembangunan pelabuhan dan sarana, prasarana serta fasilitas untuk nelayan, belum termasuk pembangunan kapal-kapal penangkap ikan bertonase 30 GT. Namun demikian, para nelayan yang menangkap ikan di laut Sulteng cenderung menjual hasil tangkapannya ke luar daerah.

d. Daya Saing Kepariwisataan

Sulawesi Tengah memiliki keanekaragaman wisata yang meliputi wisata Bahari, wisata alam serta wisata budaya yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Beberapa potensi wisata berbasis kealamiahan sumberdaya alam laut seperti Kepulauan Togean, Kepulauan Sambori, Banggai Kepulauan (Paisupok), Biodiversitas Lore Lindu, dan wisata air terjun di ebeberapa kabupaten. Isu strategis kedepannya yaitu bagaimana meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui nilai tambah pariwisata yang saling terkait satu sama lainnya. Kondisi saat ini, pariwisata yang ditawarkan belum memiliki hubungan obyek wisata yang saling terkait dan mendukung antara satu dengan lainnya, misalnya wisata Bahari yang ditawarkan belum dilengkapi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti: bandara dan pelabuhan yang memadai, hotel dan cottage, restaurant dan kuliner lokal serta aksesibilitas jalan yang memadai.

Kondisi obyek wisata yang tidak berdiri sendiri atau wisata yang dapat menggerakkan pusat-pusat perekonomian lainnya maka akan membukan lapangan kerja baru bagi masyarakat lainnya. Sudah saatnya, pariwisata Sulawesi Tengah mempromosikan paket wisata bernilai tambah. Sulawesi Tengah tidak hanya sekedar melakukan strategi business as usual atau hanya menjadi trend followers tetapi keanekaragaman budaya, bahasa, kuliner, dan alam yang dimiliki dapat mengantarkan Sulawesi Tengah menjadi pusat pariwisata nasional bahkan dunia.

Kedepannya isu pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tengah harus diikuti dengan kegiatan mempertahankan kualitas lingkungan (carrying capacity), meningkatkan kualitas tata kelola destinasi,

meningkatkan pelayanan pariwisata yang prima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, membuka aksesibilitas udara, darat, dan laut, membuka peluang investasi sektor pariwisata, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya di daerah-daerah wisata.
Upaya peningkatan pariwisata yang berkualitas ditunjukkan dengan peningkatan nilai tambah yang dapat diterima oleh Sulawesi Tengah atau masyarakat setempat, peningkatan nilai devisa melalui peningkatan lama tinggal dan belanja para wisatawan, peningkatan kualitas destinasi, kesiapan industri dan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Penerimaan nilai tambah dipersiapkan dengan peningkatan daya saing dan membangun ketahanan sektor pariwisata, termasuk melalui diversifikasi aktivitas ekonomi dalam rantai pasok pariwisata, perbaikan lingkungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif dan berkenambungan serta pembangunan citra pariwisata Sulawesi Tengah yang berkualitas.

e. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Sulteng

Reformasi Birokrasi konteks daerah Sulawesi Tengah tetap mengacu pada pada RoadMap Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi yakni bertumpu pada masalah- masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalah-masalah mendasar yakni: Manajemen Perubahan Birokrasi, Organisasi yang gemuk, Peraturan Perundang- Undangan *overlaping* (tumpeng tindih), SDM Aparatur tidak Kompoten, Tumpang Tindih Kewenangan, Pelayanan Publik masih buruk, Pola pikir *Rule-based* dan Budaya kinerja belum terbangun.

Namun dalam konteks Daerah Sulawesi Tengah disesuaikan dengan kondisi karaktek Daerah, situasi Sosial politik, budaya dan kondisi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu Fokus Sentral Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah: Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, Perampingan- Pengabungan OPD sesuai Tugas dan Fungsi dan Penggunaan Teknologi Informasi serta *Big Data* dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan.

Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mengantisipasi juga Pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur dengan mempersiapkan Birokrasi Pemerintah Sulawesi Tengah yang ***Responsif*** perubahan-perubahan dan mampu menjadi patner seimbang secara kualitatif dengan kebutuhan Ibukota Negara Baru.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas diarahkan pada peningkatan tata kelola ASN dengan meningkatan kualitas SDM ASN serta menerapkan system merit dan manajemen talenta ASN. Sementara itu dilakukan peningkatan kualitas layanan publik terpadu (fisik dan non fisik) yang inklusif berbasis digital. Pemerintahan yang efektif danefisien akan dilaksanakan berbasis digital dan inovatif yang didukung oleh penguatan impelementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat Daerah, peningkatan Integritas ASN, penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk kemandirian fiskal berbasis elektronik serta penataan kelembagaan daerah menuju organisasi pemerintahan yang modern, adaptif dan profesional Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan Integritas partai politikdan pemberdayaan masyarakat sipil, pemberdayaan masyarakat sipil untuk terwujudnya Open Government Partnership. Stabilitasi ekonomi daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan danmeningkatkan peran sektor keuangan dalam mendorong aktivitas pembangunan, sertastabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Serta meningkatkan investasi di provinsi Sulawesi Tengah.

f. Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan data BPS (2021), Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 12,30 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 389,71 ribu orang, meningkat masing-masing sebesar 1,36 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, dan 8,50 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2021.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 sebesar 9,03 persen, naik menjadi 9,13 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2022 sebesar 13,87 persen, turun menjadi 13,79 persen pada September 2022 . Per Maret 2022, jumlah penduduk miskin pada September 2022 di daerah perkotaan naik sebanyak 2,67 ribu orang (dari 90,26 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 92,93 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 1,32 ribu orang (dari 298,09 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 296,77 ribu orang pada September 2022).

Sementara Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp. 557.183,-/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 423.390,- (75,99 persen), dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 133.793,- (24,01 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Tengah memiliki 5,11 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.847.205,-/rumah tangga miskin/bulan Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, kue basah, gula pasir, telur ayam ras, cabe rawit, mie instan, dan bawang merah. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

g. Dilema Industrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup

Beberapa isu lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;
2. Kerusakan hutan kawasan dari hutan *mangrove* di pesisir akibat kegiatan pertambangan dan pemukiman, pembalakan liar, (Ilegal Logging), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan;
3. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan/lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan *illegal logging*;
4. Menurunya kemampuan daya dukung dan daya tampung (termasuk debit air) beberapa sungai yang disebabkan oleh semakin berkurangnya daerah tangkapan air di hulu dan penggunaan air oleh kegiatan pertambangan dan industri logam dasar;
5. Sedimentasi yang tinggi di muara sungai dan tingginya aliran permukaan akibat semakin berkurang hutan dan masuk ke wilayah perairan laut yang menyebabkan terjadi kekeruhan sehingga mengganggu pertumbuhan terumbu karang, rumput laut dan ikan;
6. Kerusakan terumbu karang yang tidak terkontrol pada wilayah kepulauan, yang disebabkan oleh penggunaan bahan peledak, potasium dan bius dalam penangkapan ikan, serta kurangnya pengawasan oleh masyarakat dan aparat berwajib;

7. Rendahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggalian, kerusakan bentang alam dan bentang lahan, eksploitasi yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, menurunnya kualitas tanah dan air, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca, meningkatnya debu, meningkatnya tingkat sedimentasi, bertambahnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi hutan dan lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terganggunya pasokan air bersih,terganggunya sistem air tanah, peningkatan alih fungsi lahan, memicu terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir, dan sebagainya.
8. Meningkatnya kegiatan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kondisi lingkungan hidup juga terus memburuk seiring dengan terus di bukanya lahan-lahan baru untuk pembangunan kelapa sawit dan pertambangan. Krisis pangan dan air juga melanda di beberapa daerah belakangan ini akibat kondisi lingkungan yang terus memburuk. Kondisi ini tentu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai dua digit itu.
9. Sampah masih menjadi permasalahan serius di ibu kota kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Tengah. Selama Tahun 2020 saja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu perharinya mencatat sampah dihasilkan kurang lebih sebanyak 228 ton atau 228 meter kubik. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, volume sampah selalu mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2019 hanya menghasilkan 117 ton sampah perharinya. Angka itu didapat dari total sampah yang diangkut 38 armada dalam sehari. Data itu menurutnya menunjukkan bahwa ada satu sistem persampahan yang harus dibenahi yakni dari pemukiman warga sebagai tempat produsen sampah. Terlebih di Tahun 2019, tiap hari 30 persen sampah merupakan sampah plastik yang susah terurai. Belum lagi perilaku buruk masyarakat diperparah dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif. Permasalahan lain adalah kurangnya inisiasi pemerintah untuk menambah sumberdaya/fasilitas Armada angkutan sampah yang dimiliki DLH tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang harus mengangkut sampah di total 245 TPS. Kota Palu sudah seharusnya terus berupaya melakukan perubahan seperti daerah atau perkotaaan lain di Indonesia. Dicontohkan di Kota Surabaya yang sudah mendorong badan khusus yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sampah. Inovasi sangat dibutuhkan dalam hal

pengelolaan sampah. Jangan hanya memakai metode lama sistem kumpul-angkut-buang. Apalagi masyarakat sangat jarang yang mengikuti anjuran program Reduce, Reuse, Recycle (3R).

10. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungn Hidup dan Kehutanan Nomor sk.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tercatat seluas 264.874 Ha lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan di Sulawesi Tengah dalam kategori kritis. Kondisi lahan-lahan yang kritis itu sangat berpengaruh terhadap daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan ancaman bencana hidrometerologi di masa yang akan datang jika tidak secepatnya diatasi. Penanganan lahan kritis harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis dan teknik pembibitan serta mengaktifkan semua unsur/elemen dengan melibatkan masyarakat. Terjadinya lahan kritis tersebut terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan. Kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama daerah-daerah resapan air makin berkurang, akibatnya terjadi krisis air tanah. Di sisi lain di beberapa kawasan berkemiringan cukup tajam menjadi rawan longsor, karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian karena resapan air ke tanah berkurang, terjadilah *over-flow* pada air permukaan. Ketika kondisi ini beresonansi dengan sistem drainase yang buruk di perkotaan terjadilah banjir. Banjir akan membawa berbagai penderitaan.

Permasalahan utama industrialisasi berbasis tambang juga terkait langsung dengan mata pencaharian yang "tergusur" terutama lingkungan pertanian. Hadirnya perusahaan tambang ini kemudian sering menjadi topik utama dampak pertambangan. Misalnya, 1) petani yang kini beralih profesi sebagai pekerja (buruh) tambang, hal ini terjadi karena problem kesuburan tanah yang berdampak pada kurangnya hasil pertanian. Begitu pula, terdapat persoalan minimnya perhatian pemerintah dalam hal peningkatan mutu pertanian seperti dengan pembuatan akses jalan tani, irigasi penunjang persawahan serta introduksi teknologi pertanian. Harga pasca panen juga menjadi bagian problem mendasar. Setelah musim panen tiba, harga turun, namun ketika musim tanam, penawaran harga naik. Sehingga dengan hasil panen rendah dan harga hasil panen murah, petani terus mengalami kekurangan. Topik lain yang menjadi perbincangan adalah

2) petani yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pekerja di perusahaan tambang; 3) upah yang tidak layak bagi para pekerja; 4) perekrutan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia (lokal), dll. Selain apa yang telah disebutkan di atas, ada topik reklamasi pasca tambang yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Reklamasi pasca tambang pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki kondisi tanah setelah aktivitas pertambangan selesai. Reklamasi pasca tambang penting menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Selain hal ini sudah pasti merusak lingkungan, ada hal-hal penting lainnya yang perlu dilihat lebih dalam. Misalnya, areal-areal bekas eksploitasi ketika kandungan mineralnya telah habis dikeruk, harus segera dilakukan kegiatan reklamasi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang berdampak pada bencana lingkungan, banjir dan longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat di lingkar tambang. Hadirnya perusahaan tambang di Kabupaten Morowali misalnya mungkin di satu sisi berdampak pada meningkatnya PAD dari sektor sumber daya alam mineral.

Namun, di sisi lain juga perlu dilihat apakah kehadiran industri ekstraktif berbasis tambang ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang atau justru merugikan mereka. Sebelumnya, petani secara umum mengusahakan pertanian padi sawah basah, perkebunan merica dan pala. Setelah hadir dan beroperasinya perusahaan-perusahaan tambang, sebagian lahan yang tadinya merupakan sumber ekonomi petani kini telah menjadi areal eksploitasi perusahaan tambang. Hal ini terjadi karena sebelumya petani (pemilik tanah) telah melakukan proses jual beli tanah dengan perusahaan tambang (ganti rugi lahan). Setelah petani kehilangan tanah dan mendapatkan harga ganti rugi lahan, hasilnya pun digunakan untuk membuat usaha-usaha kecil, misalnya pembangunan rumah kos-kosan, yang pada saat itu memang memenuhi kebutuhan tempat tinggal banyak para pekerja (buruh) tambang yang datang dari daerah lain. Selain itu, ada juga sebagian petani yang menggunakan hasil ganti rugi lahannya sebagai ‘uang muka’ pembelian kendaraan berupa mobil serta kendaraan roda dua (sepeda motor), bahkan ada yang sampai memiliki dua kendaraan mobil dengan status angsuran setiap bulan berjalan. Pasca kehilangan tanah dan tidak lagi mengusahakan pertanian, banyak petani yang kemudian terintegrasi sebagai pekerja (buruh) tambang. Singkatnya, kehidupan mereka menjadi bergantung pada perusahaan tambang. Dalam skala makro, rezim Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara mesti menjadi payung regulasi Pemerintah Provinsi Sulteng Bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM agar

korporasi yang beroperasi di bidang pertambangan diharuskan melakukan divestasi atau melepas sahamnya hingga 51 persen kepada BUMN dan BUMD agar terjadi pemberdayaan BUMD sehingga pendapatan asli daerah meningkat

h. Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi

Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, dan Sigi, pada Jumat malam, 28 September 2018, benar- benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Betapa tidak gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dana prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang menghilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.

Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrasturktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait. Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m^2. Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut. Pasca gempa bumi 28 September 2018, maka pembangunan jangka Panjang yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Sulteng dan RPJMD Periode 2025-2029 nantinya wajib merujuk pada Indeks Risiko Bencana di Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (PNBP) Tahun 2020. Kejadian Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifasi pada tiga tahun yang lalu terjadi sekitar 28 km di Utara kabupaten Donggala atau 80 km di sebelah barat Kota Palu menghendaki perlunya memitigasi bencana. Provinsi Sulteng pada 2020 mempunyai IRBi sebesar 144,96 poin termasuk kategori tinggi. Di Tahun 2016, IRBI Sulteng mencapai 150,25 poin, pada 2017 mencapai 147,43 poin, pada 2018 dan 2019 masing-masing IRBI Sulteng mencapai 146,39 poin dan 144,96 poin. Hal ini berarti IRBI Sulteng pada 2019 dan 2020 mempunyai nilai yang sama. Bencana yang mengancam Sulteng meliputi gempa, Tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, abrasi, gelombang ekstrim. Pada 2020, sembilan daerah di Sulteng masuk kategori IRBI tinggi yakni Kabupaten Morowali Utara 177,20 poin; Morowali 173,80 poin; Banggai Kepulauan 163,42 poin; Banggai 163,20 poin; Banggai Laut 163,20; Kota Palu 162,70 poin; Tolitoli 159,20 poin; Donggala 157,12 poin; dan Buol 149,60 poin. Sedangkan 4 (empat) daerah lainnya berada pada kategori IRBI sedang yakni Kabupaten Sigi 48,13 poin; Parigi Moutong 108,39 poin; Poso 121,14 poin; dan Kabupaten Tojo Una-Una 137,60 poin.

i. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Tahun ini ditargetkan dapat beroperasi delapan kawasan industri dan 10 kawasan industri lainnya masih tahap perencanaan terus dipacu agar dapat segera beroperasi. Berdasarkan catatan Kemenperin selama periode Tahun 2015-2017, sektor manufaktur yang telah menanamkan modalnya di seluruh kawasan industri di Indonesia mencapai Rp 126,5 triliun. Investasi selama tiga tahun tersebut terdiri dari PMA sebesar Rp 103 triliun dan PMDN hingga Rp 23,5 triliun. Terdapat 3 (tiga) kawasan industri di Indonesia timur ditargetkan mulai beroperasi Tahun 2017. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Konawe di Sulawesi Tenggara, Bitung di Sulawesi Utara, dan Palu di Sulawesi Tengah. Pada akhir Tahun 2020, Pemerintah menetapkan sebanyak 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) masuk dalam sektor kawasan proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan kawasan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang diterbitkan pada 17 November 2020. Perlu diketahui, Pemerintah telah menetapkan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun sebagai PSN. Salah satu kawasan industri dan KEK di Sulawesi Tengah adalah Kawasan Industri Morowali. Kawasan Industri

Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah proyek kawasan industri strategis nasional yang diprioritaskan dalam program pengembangan basis industri logam dasar terus dipacu pembangunannya sebagai wujud implementasi arahan Pemerintah Pusat untuk memfokuskan agenda pemerintah di Tahun 2017 pada pemerataan industri di luar Pulau Jawa yang berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, kawasan industri Morowali turut mendorong langkah pemerintah dalam program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Dalam waktu efektif sejak 2013 sampai dengan sekarang perkembangan industri di Morowali sangat pesat sekali.

Kawasan Industri berbasis nikel yang dikelola PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) di Kabupaten Morowali, merupakan kawasan tambang nikel terbesar di Indonesia. Selain itu, terdapat kawasan industri lainnya dalam proses konstruksi yaitu kawasan industri dikelola Transon Group/Transon Bumindo Resources di Desa Laroenae Kecamatan Bungku Pesisir, dan Kawasan Industri dikelola PT. Stardust Estate Investment (SEI). Dengan fakta itu, peluang untuk menjadi kawasan industri berstatus obyek vital nasional terbuka lebar. Untuk pengembangan lebih optimal di Kawasan industri di Morowali dibutuhkan SDM yang memiliki keahlian. Ketersediaan SDM yang ahli adalah faktor penting dalam memacu pertumbuhan industri, selain melalui pengembangan teknologi dan peningkatan investasi. SDM tersebut dapat diperoleh dari dibangunnya Politeknik industri Morowali yang baru berjalan 1 tahun dengan jurusan Teknik perawatan mesin, teknik listrik dan teknik kimia /material. Diharapkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang meneruskan jenjang pendikan ke Politeknik tersebut umumnya berasal dari lulusan SMA daerah setempat. Lulusan dari politeknik ini nantinya akan diserap oleh pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah perindustrian Morowali.

Pengembangan kawasan industri merupakan upaya untuk mendorong tumbuhnya industri nasional sekaligus upaya untuk penyebaran industri. Harapannya Pulau Jawa bukan satu-satunya pusat ekonomi. Sebaliknya, industri nasional dapat tersebar ke pulau- pulai lain selain Pulau Jawa. Dengan pembangunan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa, diharapkan peran wilayah di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri akan terus meningkat. Selain itu, menurut Kementerian Perindustrian, Kawasan industri Palu difokuskan pada pengolahan karet dan minyak astiri, Konawe untuk *smelter* nikel, dan Bitung untuk industri farmasi berbasis herbal. Kawasan industri tersebut memiliki lokasi yang strategis seperti Kota Palu yang memiliki pelabuhan sendiri. Meski demikian, pembangunan kawasan industri tersebut masih

terkendala pembangunan infrastruktur. Terutama untuk kawasan industri Bitung dan Palu yang masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, ataupun air baku.

Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun sebuah kawasan industri, dan untuk kawasan di luar Jawa, belum banyak yang berminat. Untuk itu, Pemerintah pun harus memberikan insentif bagi industri yang mau berinvestasi di kawasan, baik sebagai *tenant* ataupun infrastruktur pendukung. Dengan begitu, pengembangan kawasan industri dapat berjalan dan menarik lebih banyak investasi. Insentif yang diberikan pemerintah seperti pembebasan bea masuk atas impor mesin dan atau barang dan bahan keperluan industri, PPh penanaman modal, pengurangan PPh Badan dan pembebasan PPN atas impor. Insentif tersebut diharapkan dapat melancarkan pembangunan 14 kawasan industri di luar pulau Jawa. Besarnya insentif diberlakukan berdasarkan wilayah pembangunan, semakin ke timur insentifnya juga makin besar. Ke-14 kawasan industri yang tengah dikembangkan adalah Sei Mangkei (CPO & Karet), Kuala Tanjung (Alumina), Landak (Feronikel), Palu (Rotan), Bitung(Agro & Logistik), Buli, Haltim (Feronikel),Teluk Bintuni (Petrokimia), Tanggamus (Perkapalan), Ketapang (Alumina), Jorong (Feronikel), Batulicin (Feronikel), Bantaeng (Feronikel), Konawe (Feronikel), dan Morowali (Feronikel). Dari 14 ini, yang sudah beroperasi di Sei Mangkei, Bantaeng, dan Morowali. Untuk tiga tahun ke depan, juga akan dipercepat pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, Dumai, Berau (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), JIIPE (Gresik), Kendal, dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Serang, Banten). Pembangunan kawasan-kawasan industri tersebut dilakukan dengan pendekatan Indonesia sentris dalam rangka mengurangi kesenjangan sekaligus membangun dari pinggiran.

Khusus untuk Kawasan industry Morowali pemerintah menargetkan kawasan industri ini mampu menarik investasi senilai Rp 78 triliun dan menciptakan tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang. Keberadaan industri di kawasan ini juga akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, melalui hilirisasi mineral. Kawasan ini akan difokuskan pada pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam dengan bahan dasar nikel. Penyerapan tenaga kerja yang dikelola PT. IMIP dapat direalisasikan apabila pabrik *stainless steel* berkapasitas 2 juta ton beroperasi. Kebutuhan tenaga kerja pelaksana di kawasan industri mencapai 11.257 orang dan tenaga kerja *level* supervisor sebanyak 1.577 orang. Pada tahap kedua 2017-2020 penambahan kebutuhan tenaga kerja pelaksana mencapai 10.800 orang dan tenaga kerja supervisor mencapai 1.620 orang.

j. Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki wilayah yang berupa daratan utama dan kepulauan. Paling tidak terdapat 4 kabupaten yang memiliki wilayah administratif pulau dan daratan. Gugusan pulau-pulau di Kepulauan Banggai, Togean, Salabangka dan Kepulauan Menui yang secara administratif masing-masing merupakan wilayah pulau memiliki masalah dalam sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, transportasi, dan pelayanan pemerintahan lainnya sehingga mengalami kesenjangan yang sangat nyata dibandingkan dengan wilayah daratan Sulawesi Kabupaten Morowali. Kesenjangan dalam berbagai hal tersebut bermuara kepada kesenjangan kesejahteraan masyarakatnya. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi berakibat tingginya biaya transpor sehingga harga-harga bahan makanan, termasuk air minum yang pada banyak desa harus membeli air mineral yang justru didatangkan dari Kendari, barang- barang dan jasa kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan menjadi lebih mahal.

Demikian pula pada wilayah Kabupaten Banggai Laut, terutama di Kecamatan Bokan Kepulauan dan Bangkurung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di lain pihak, sumber pendapatan keluarga yang utama bertumpu pada usaha di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan sebagai nelayan dan budidaya rumput laut. Usaha perikanan pada umumnya masih dilaksanakan dengan peralatan sederhana dengan kapasitas yang sangat kecil yang hasilnya ditekan oleh biaya produksi/operasional yang tinggi dan harga jual hasil produksi yang rendah. Di gugusan Kepulauan Salabangka, usaha budidaya Rumput Laut yang sampai dengan Tahun 2012 masih merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, terus mengalami penurunan luasan budidaya dan produksinya, satu sama lain ditengarai sebagai akibat dari rusaknya ekosistem perairan laut sekitar. Oleh karena itu, tidaklah aneh bila tingkat kemiskinan yang tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, APK dan APM yang rendah, derajat kesehatan masyarakat yang rendah berada di wilayah kepulauan ini. Kesenjangan taraf hidup masyarakat antar kedua wilayah ini (kepulauan dan daratan) menjadi isu strategis yang harus dijawab secara komprehensif, serius dan berkelanjutan.

k. Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri

Keberadaan kawasan industri dengan puluhan ribu pekerja sesungguhnya adalah sebuah potensi pasar yang besar bagi produk-produk lokal seperti bahan makanan, pakaian seragam pekerja, usaha pemondokan/kos-kosan, rumah makan, *cleaning service,* dan lain-lainnya. Dari sekian banyak dan besar peluang pasar tersebut sebagian

sudah termanfaatkan yaitu jasa rumah makan/*warteg*, kos- kosan, toko/kios barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dilakukan oleh pendatang secara tidak teratur. Ketidakteraturan ini menimbulkan masalah baru berupa kemacetan arus lalu lintas, kesehatan lingkungan, dan keamanan. Di lain pihak, ketidakteraturan tersebut berakibat hilangnya potensi PAD bagi Pemerintah Daerah. Peluang lainnya seperti kebutuhan bahan makanan, pakaian seragam, *cleaning service* masih belum termanfaatkan. Koneksitas antar Kawasan Industri dengan Pelaku Ekonomi Lokal (Petani, Nelayan, Peternak, Usaha Industri Garmen/Pejahitan dan lainnya) dalam memenuhi kebutuhan kawasan industri akan bahan makanan, dan lainnya yang belum terbangun secara baik harus segera diprogramkan secara baik dan berkelanjutan agar kawasan industri juga dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi lokal secara nyata.

l. Potensi Geopark Sulawesi Tengah

Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi *(Geosite)* dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi *(Geoheritage),* Keragaman Geologi *(Geodiversity),* Keanekaragaman Hayati *(Biodiversity),* dan Keragaman Budaya *(Cultural Diversity),* serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi *(Geodiversity)* yang bernilai, Keragaman Geologi *(Geodiversity).* Keragaman ini memiliki nilai Warisan Geologi *(Geoheritage)* yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati *(Biodiversity)* dan Keragaman Budaya *(Cultural Diversity).* Nilai-nilai inilah yang dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan taman bumi yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, dan pengembangan taman bumi itu sendiri.

Pengembangan taman bumi dilakukan melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (Geopark) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia menganggap pengembangan taman bumi ini menjadi sangat penting. Ini ditunjukkan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi atau Geopark.

Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi, merupaka pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan Geopark (Pasal 2). Tujuannya, seperti yang tertulis di Pasal 3, Melakukan tata kelola pengembangan Geopark guna mewujudkan pelestarian *Geoheritage*, *Biodiversity*, dan *Cultural Diversity* yang dilakukan secara bersama- sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konversi, edukasi, dan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Terdepat sebanyak 110 potensi warisan geologi yang ada di Indonesia, 3 (tiga) di antaranya berada di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu-koro, Danau Poso dan sekitarnya, Danau Kars Banggai Kepulauan. Danau Poso memiliki fenomena yang jarang ditemukan di Indonesia, di mana fenomena itu adalah adanya batu-batuan dasar kerak bumi. Selain itu, ia juga didukung oleh situs-situs megalitikum kelas dunia, serta didukung keberadaan sumberdaya hati ikan sidat. Keberadaan sidat anguilla marmorata atau dalam bahasa lokal kami menyebutnya masapi yang melimpah dibandingkan tempat lain di seluruh indonesia, menjadi salah satu alasan mengapa Danau Poso menjadi danau prioritas nasional untuk dilindungi. Namun, Danau Poso memiliki banyak hal lain yang perlu dilindungi selain sidat.

Danau Poso adalah danau tektonik. Sebagai danau tektonik, maka Danau Poso merupakan salah satu bukti sejarah peristiwa terbentuknya Pulau Sulawesi. Danau Poso adalah salah satu danau purba di dunia. Sebagai danau purba, Danau Poso memiliki keanekaragaman hayati endemik yang dimiliki dunia. Pemerintah Kabupaten Poso hampir setiap tahunnya menerima para peneliti dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk menggali dan menulis tentang Danau Poso. Ini menunjukkan banyak orang memberikan perhatian ke Danau Poso karena memiliki keunikan dan kekhasan yang luar biasa. Selain bagi para peneliti dan akademisi, Danau Poso merupakan sumber kehidupan masyarakat Poso. Selama ratusan tahun, Danau Poso dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air minum dan irigasi, menjadi sarana transportasi, menjadi obyek wisata, membuka lapangan pekerjaan yang menunjang perekonomian warga antara lain dengan menjadi nelayan, atau membuka usaha kecil. Di Danau Poso terdapat kebudayaan warga yang berkembang, antara lain wayamasapi-sebuah cara menangkap ikan secara tradisional menggunakan pagar dari bambu; monyilo-cara menangkap ikan menggunakan tombak dengan bantuan lampu petromaks pada malam hari, serta mosango. Sebagai aset kehidupan masyarakat, tentu saja Danau Poso perlu untuk dikelola dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensi mengenai *geopark* dan mengenai potensi *geopark* di Danau Poso yang sedang diusulkan ini

diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk model pembangunan berbasis danau dan sungai di Kabupaten Poso. Bukan hanya model pembangunan berkelanjutan yang melindungi alam, melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga sejarah dan kebudayaan tapi juga model pembangunan dimana pemerintah daerah berkolaborasi langsung dengan masyarakat serta para akademisi dalam mewujudkannya.

m. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Pasal 34A dan 34B serta regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka isu strategis terkait pengarusutamaan transformasi digital adalah pertama, infrastruktur digital. Selain infrastruktur terkait konektivitas antar penduduk secara fisik berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandara maupun infrastruktur fisik lainnya berupa irigasi maupun Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), infrastruktur digital menjadi sarana dan prasarana yang menghubungkan antar penduduk sebagai wahana pembangunan berbasis pembangunan komunitas. Pemerintah Provinsi Sulteng wajib mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa percepatan penetrasi pita lebar, dukungan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam memfasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, efisien. Infratruktur dimaksud tidak hanya terbatas pada gorong-gorong *(ducting),* tetapi mencakup pula tiang telekomunikasi *(tower)* dan lubang kabel *(manhole)* untuk dapat digunakan secara Bersama dan terjangkau.

Kedua, Pemerintah Digital. Pemerintah Provinsi Sulteng perlu menyelenggarakan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) melalui layanan administrasi pemerintah secara elektronik yang diimplementasikan melalui layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan system penghubung layanan.

Ketiga, Ekonomi Digital. Satu dari beberapa pendorong daya saing ekonomi Sulteng adalah strategi memanfaatkan teknologi digital melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi, *digital farming* maupun system pembayaran digital melalui Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) seperti QR code Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi non tunai maupun di sisi hulu melalui melalui *Drone Participatory Rural Appraisal* dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan termasuk memperkirakan potensi lestari perikanan dan kelautan sebagai implementasi *Maximum Sustainability Yield (MSY)*, serta di sektor lainnya seperti pariwisata dan transportasi maupun jasa pergudangan. Keempat, Masyarakat Digital. Implementasi

pengarusutamaan transformasi digital dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng. Selain itu, sesuai Misi 1 Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar dan Misi 4 Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Misi 8 Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital dapat dilakukan melalui system Pendidikan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja dalam era industri 4.0 melalui fasilitasi literasi digital pada masyarakat dan talenta digital.

2.3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Morowali

A. Penelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Morowali nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali tahun 2019-2039. Diman RTRW dibutuhkan untuk mengarahkan pembangunan yang produktif, terkendali, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Morowali Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Morowali maka terjadi perubahan besar terhadap batas-batas Wilayah Kabupaten Morowali yang berimplikasi terhadap RTRW Kabupaten Morowali.

Perencanaan Tata Ruang Morowali Tahun 2019-2039 yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam Struktur dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat perumahan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Morowali bertujuan untuk Mewujudkan Kabupaten Morowali yang Berdaya Saing, dengan konsep pengembangan Industri, Pariwisata, Minapolitan, dan Agropolitan dengan memperhatikan Asas Penataan Ruang. Kebijakan Penataan Ruang daerah terdiri atas:

1. Pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan PPK dan pusat pelayanan lingkungan PPL secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau-pulau kecil untuk mendukung investasi;

2. Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
3. Pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
4. Pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar;
5. Pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh;
6. Pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
7. Penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya.

Beberapa pengembangan kawasan yang akan dilakukan:

1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi antara pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) secara berjenjang dan merata antara Wilayah darat dan pulau- pulau kecil untuk mendukung investasi meliputi:
   a. mengusulkan PKL hingga pada Wilayah pulau-pulau kecil untuk mendorong kemandirian kawasan perkotaan;
   b. menghubungkan antar PKL, PPK dan PPL melalui jaringan transportasi secara terpadu antara transportasi darat, laut, dan udara;
   c. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
   d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil;
   e. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana air baku hingga kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil; dan
   f. mengembangkan sistem jaringan parasarana lingkungan yang meliputi sistem jaringan air limbah, persampahan, dan drainase khususnya pada kawasan permukiman perkotaan.
2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan meliputi:
   a. mempertahankan kawasan hutan lindung diluar kawasan *outline*yang telah ditetapkan, dari kegiatan industri, pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya yang dapat merubah fungsi alam, bentang alam dan ekosistem alami;

b. membatasi pertumbuhan permukiman pada kawasan perlindungan setempat;
c. menyediakan ruang terbuka hijau RTH public dan privat untuk kepentingan masyarakat di kawasan perkotaan;
d. membatasi pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan konservasi;
e. emempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung geologi;
f. mengendalikan pertumbuhan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya pada kawasan rawan bencana;
g. mempertahankan dan menjaga kelestarian benda cagar budaya yang bernilai tinggi;
h. mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem mangrove; dan
i. merehabilitasi kawasan lindung yang telah berubah fungsi.

3) Strategi pengembangan kawasan agropolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan terdiri atas:
a. menetapkan kawasan agropolitan
b. mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) pangan;
c. mengembangkan pasar sentra pengembangan agrobisnis (SPA) yang lebih representatif untuk meningkatkan daya tarik pembeli lokal dan regional;
d. mengembangkan sistem jaringan jalan usaha tani yang terkoneksi dari lahan pertanian, tempat pengolahan hasil pertanian dan tempat pemasaran.
e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian lahan basah; dan
f. menetapkan dan meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4) Strategi pengembangan kawasan minapolitan yang berorientasi pada sumber daya lokal dan kebutuhan pasar terdiri atas:
a. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dengan dukungan balai benih ikan;
b. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan;
c. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan ikan; dan
d. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil dengan Wilayah darat sebagai jalur distribusi.

5) Strategi pengembangan kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam untuk pemenuhan target Indonesia sebagai negara industri tangguh terdiri atas:

a. menetapkan dan membangun kawasan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.

6) Strategi pengembangan sektor pariwisata alam/bahari, sejarah dan budaya, dan pariwisata buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan terdiri atas:
   a. mengembangkan wisata bahari seperti wisata pantai, wisata pulau-pulau kecil, ekowisata mangrove, dan wisata alam bawah laut, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
   b. mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat;
   c. mengembangkan wisata alam seperti wisata air terjun, wisata penangkaran/perlindungan satwa, wisata goa, dan wisata puncak, dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;
   d. menjaga dan mengembangkan kelestarian kawasan dan/atau benda cagar budaya, serta kawasan lainnya yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi sebagai daya tarik wisata sejarah dan budaya;
   e. menjaga dan mengembangkan festival-festival budaya masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata budaya; dan
   f. mengembangkan wisata buatan untuk memberikan daya tarik yang berberbeda sebagai destinasi alternatif dalam menunjang sektor pariwisata yang unggul.

7) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:
   a. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten darisudut kepentingan ekonomi; dan
   b. menata dan mengembangkan kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.

B. Isu dan Penyelarasan Dokumen KLHS RPJMD Morowali 2025-2029

SDGs merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negaradi dunia. SDGs dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan keberlanjutan MDGs. Ada banyak tujuan dari konsep SDGs. Namun ada tiga tujuan utama. *Pertama,* SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. *Kedua,* SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. *Ketiga,*

target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia. Untuk mencapai tujuan SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan derah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali pada khususnya.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Aturan tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs. Regulasi tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya. Pelaksanaan SDGs berarti juga melaksanakan tujuan pembangunan nasional dan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Agenda SGDs juga untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi negara maju. Hal ini juga menunjukkan pemerintah mengambil tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda MDGs di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional yang mengacu pada target dan sasaran global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan, serta sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran TPB/SDGs sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, Presiden RI Kembali menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB.

Berdasarkan Perpres Nomor 111/2022, presiden telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka

menengah nasional Tahun 2020-2025. TPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:

a. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
b. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
c. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
d. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah membentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas dewan pengarah nasional, tim pelaksana nasional, kelompok kerja nasional, dan tim pakar dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2025. Dengan telah ditetapkannya Perpres 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional Tahun 2025 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*

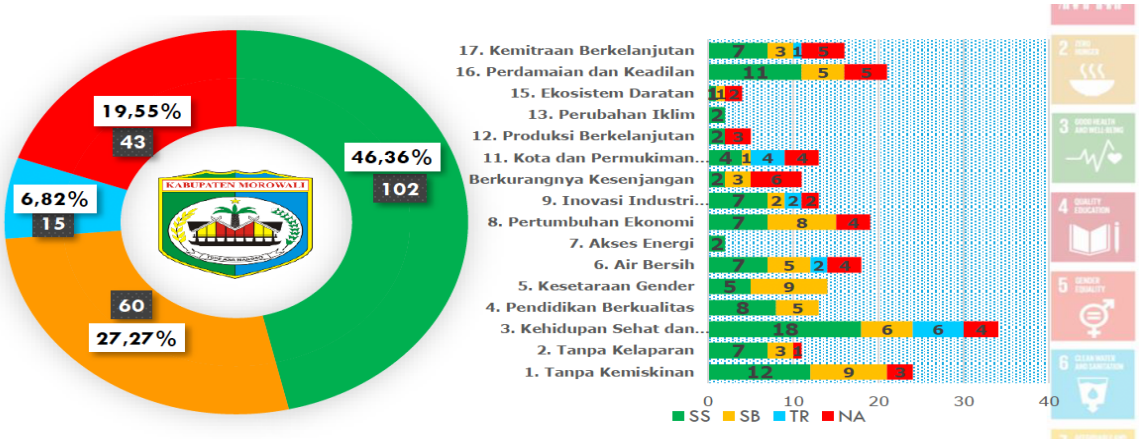
Penilaian capaian TPB dilakukan di Kabupaten Morowali berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pencapaian Tujuan Pembnaguinan Berkelanjutan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2025-2029 dan merupakan komitmen pelaksanaan dan pencapaian SDGs yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Kategori capaian indikator TPB Kabupaten Morowali berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yakni: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (warna hijau). (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (arna orange), (3) tidak relevan (warna biru), dan (4) tidak ada data (warna merah). Kategori “Hijau” berarti capaian indikator telah sesuai dengan target RPJMN sampai pada tahun 2023 (target Perpres No, 59 tahun 2017); kategori “Orange” sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target RPJMN sampai pada tahun 2023 (target Perpres No, 59 tahun 2017); kategori “Biru” tidak relevannya indikator dengan keadaan yang sesungguhnya; selanjutnya kategori “Merah” bermakna bahwa indikator TPB tersebut belum ada dalam program OPD di Kabupaten Morowali, sehingga data indikator yang diinginkan tidak ada datanya. Pencapaian TPB di Kabupaten Morowali dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Pencapaian TPB di Kabupaten Morowali

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	TR	NA	Jumlah Indikator
1. Tanpa Kemiskinan	12	9	0	3	24
2. Tanpa Kelaparan	7	3	0	1	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	6	6	4	34
4. Pendidikan Berkualitas	8	5	0	0	13
5. Kesetaraan Gender	5	9	0	0	14
6. Air Bersih	7	5	2	4	18
7. Akses Energi	2	0	0	0	2
8. Pertumbuhan Ekonomi	7	8	0	4	19
9. Inovasi Industri Infrastruktur	7	2	2	2	13
10. Berkurangnya Kesenjangan	2	3	0	6	11
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	4	1	4	4	13
12. Produksi Berkelanjutan	2	0	0	3	5
13. Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
15. Ekosistem Daratan	1	1	0	2	4
16. Perdamaian dan Keadilan	11	5	0	5	21
17. Kemitraan Berkelanjutan	7	3	1	5	16
Jumlah	**102**	**60**	**15**	**43**	220
Persentase	***46,36 %***	***27,27 %***	***6,82 %***	***19,55 %***	*100 %*

Sumber: KLHS RPJMD KAbupaten Morowali Tahun 2025-2029.

Persentasi pencapaian tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.131
Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Morowali

Dari kajian terhadap permasalahan yang telah digambarkan pada uraian sebelumnya serta memperhatikan lingkungan strategis global, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Morowali untuk RPJMD 2025-2029 adalah sejalan dengan isu strategis RPJPD periode waktu 2025-2045 pada gambar berikut.



Gambar 2.132
Isu Strategis RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045

B. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kompetensi ASN

Kualitas Sumberdaya Manusia merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk *(*enlarging *people choice).* IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam konteks ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningat-kan kualitas penduduk sebagai sumber daya dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraaan ekonomi (daya beli). IPM adalah indeks komposit diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit

yang disusun dari tiga komponen: (1) kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) ekonomi. SDM berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

IPM Kabupaten Morowali sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Morowali, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2018-2022. Kondisi ini ditunjukan Tahun 2018 dimana IPM sebesar 71,14, terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72,55. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2022 masuk kategori tinggi. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 72,91, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28. Kelemahan dari pencapaian IPM Kabupaten Morowali yang tinggi saat ini hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah Kecamatan daratan yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dan Kesehatan serta ekonomi yang lebih baik dibandingkan pada kecamatan berbasis pulau yaitu pada Kecamatan Menui Kepulauan, kecmatan Sembori dan Kecmatan Bungku Selatan yang mengalami ketertinggalan aspek sosial ekonomi.

Aspek manajemen sumberdaya aparatur Kabupaten Morowali juga tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif dalam bentuk pengembangan SDM aparatur yang mampu menjawab tantangan era disrupsi dan industri 4.0. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian mesti diatasi jika memperbaiki dan mereformasi birokrasi dimana perbaikan kesejahteraan melalui perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

C. Hilirisasi Industri Pengolahan SDA dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kabupaten Morowali memiliki potensi SDA yang diperkirakan lebih dari 200.000 Ha tambang nikel. Potensi pertambangan nikel Morowali terkenal hingga mancanegara, dengan kualitas nomor satu di Asia

Tenggara. Pertambangan nikel menjadi andalan dari perekonomian Morowali. Terdapat puluhah perusahaan pertambangan nikel besar di daerah ini yang menyerap tenaga kerja lokal hingga 19.000 orang. Dampak dari besarnya potensi sumberdaya alam tersebut terlihat Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali, di mana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Morowali dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan besaran PDRB serta peningkatan PDRB Perkapita.

Menjadikan pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan kedepan bagi Kabupaten Morowali, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas atau inklusif, jika pertumbuhan ekonomi berkonstribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadinya pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Tidak hanya daerah berkembang *(emerging)*, seringkali di daerah maju juga memiliki tantangan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap upaya nyata penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya.

Hilirisai pndustri pengolahan Nikel dianggap sebagai katub penyelamat dari inklusifitas pertumbuhan ekonomi di wilayah pertambangan, Sejak bergulirnya program hilirisasi sumber daya alam, terutama logam nikel di Kabupaten Morowali, belum memberikan multiplier effect bagi penurunan kemiskinan diwilayah remot area pertambangan. Pengolahan Industri turunan Nikel berupa *Ferronickel (FENI), Nickel Pig Iron (NPI)*, dan baja tahan karat yang diproduksi oleh sejumlah pabrik peleburan (smelter) Nikel di Kabupaten Morowali saat ini belum dapat memberikan pengaruh signifikan bagi tumbuhnya IKM yang berbasis hilirisasi nikel seperti prodak panci dan peralatan *home industry*. Pertumbuhan Industri pengolahan smelter dalam kerangka hilirisasi nikel pada sisi lain hanya berdampak pada tumbuhnya sektor UMKM di wilayah Kecamatan yang ada Industri karena banyaknya karyawan yang membutuhkan berbagai keperluan hidup. Selain itu, aglomerasi ekonomi di wilayah tersebut juga ikut meningkat tajam.

Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali tata kelola pembangunan yang baik, sejatinya akan diukur dari pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam bebagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat

yang berkeadilan sebagai perwujudan pemerintah hadir di tengah masyarakat. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali berdasarkan ADHK 2010 kurun waktu 2018-2022. Perekonomian Kabupaten Morowali yang diukur melalui indikator pertumbuhan PDRB memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata per Tahun sebesar 42,94 persen yang jauh lebih tinggi dari pertumbunan PDRB Sulawesi Tengah sebesar 11,72 persen. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 112,20 persen. Hingga Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sebesar 20,20 persen. Selanjutnya di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tetap tumbuh positif dan sangat tinggi yakni sebesar 28,93 persen. Hal ini menunjukan perekonomian Kabupaten Morowali tidak terdampak pandemi Covid-19, yang mana berdampak di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Morowali mencapai 25,15 (lebih rendah dari tahun sebelumnya). Selanjutnya data pada tahun 2022 ekonomi Morowali masih dua digit diangka 28,21 meningkat dari tahun sebelumnya.

Terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 62,22 persen, Sektor Konstruksi sebesar 151,77 persen dan Sektor Jasa Keuangan sebesar 34,62 persen. Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan kecil dan negatif yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (3,00%), sektor lainnya yakni Jasa Pendidikan (0,48%), Konstruksi (14,62) persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,81 persen. Sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali, mengingat pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya. Diperlukan peningkatan produktivitas di Sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor Pertanian. Salah satu yang menyebabkan ekonomi Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif yakni berasal dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali yang tumbuh sangat besar dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sampai dengan tahun 2022 ekonomi Morowali Tumbuh sebesar 28,21 persen, tumbuh jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,31 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,17 persen.

Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menyisahkan masalah bagi kabupaten Morowali karena angka kemiskinan yang masih tinggi hingga Tahun 2022 sebesar 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali hingga Tahun 2019, masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana, persentase penduduk

miskin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen dan nasional sebesar 9,54 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Morowali ternyata belum sepenuhnya mampu memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam kemiskinan, dan cenderung melebar jarak pendapatan kemiskinan di antara penduduk miskin. Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya memberikan jaminan pemrataan ekonomi dan kesejahteraan masayarkat yang meningkat serta angka kemiskinan yang menurun. Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan masyarakat tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Kabupaten Morowali masih memiliki isu strategis berkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi penurunan angka kemiskinan belum berhasil (Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif). Pada sisi lain Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi faktanya masih banyak masyarakat miskin atau golongan menengah kebawah yang berada terutama masyarakat miskin khususnya pada wilayah pegunungan dan pulau-pulau. Konsentrasi kemiskinan di kabupaten morowali Sebagian besar berada pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Menui Kepulauan.

Sejalan dengan hal itu Konsentrasi masalah sosial khususnya penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kawasan 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah sudah melakukan sinergi antar sektor. Masalah Kemiskinan lebih cepat diatasi, apabila semua potensi

daerah bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha harus digerakkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan khususnya di Kabupaten Morowali.

Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Berlaku pada bulan Januari 2022 terdapat 91.623 orang. Sedangkan dalam kurun waktu Januari- Mei tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah TKA yang berlaku, yaitu sebanyak 96.574 orang pada bulan Mei 2022. (sumber Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI). Isu Ribuan tenaga kerja asing atau TKA Cina memadati wilayah industri di kawasan Morowali sejak awal tahun 2018 sampai tahun 2022 menghangat namun tidak semuanya benar. Data tentang jumlah karyawan lokal (Indonesia) yang saat ini bekerja di kawasan Morowali Industrial Park (IMIP) pada tahun data yang tercatat di Kemenaker jumlah TKA di seluruh Indonesia pada 2019 sebanyak 109.546 orang, kemudian pada 2020 turun menjadi 93.761 orang, lalu di 2021 menjadi 88.271 orang dan pada 2022 turun lagi menjadi 70.571 orang. Para Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja secara bersama dengan pekerja local di wilayah kawasan pabrik, pelabuhan Jetty, dan central kitchen khususnya pekerja yang berasal dari Tiongkok. Pelibatan Para Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja untuk transfer teknologi kepada karyawan Indonesia sehingga setiap tahunnya jumlahnya akan berkurang setelah kemampuan dan skiil tenaga kerja dalam negeri khususnya di Kabupatenm morowali mampu untuk mengoprasikan berbagai tehnologi pengolahan industry tambang nikel.

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali pada tahun mendatang bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi tengah perlu menyiapkan strategi kedepan didalam menyiapkan calon tenaga kerja yang seusia dengan kebutuhan industri melalui penyelenggaran sekolah vokasi, pelatihan dan magang kerja sehingga dampak keberadaan Industri dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi mampu menyerap tenaga kerja local diwilayah remot area Kabupaten Morowali dan calon pekerja di Propinsi Sulawesi Tengah.

D. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting.

Kemiskinan *(poverty)* adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Perkembangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Morowali

diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali mengalami penurunan kurun Tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 14,34 persen, dan menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 13,75 persen. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin Tahun 2015 sebanyak 17,79 ribu jiwa, dan Tahun 2019 sebanyak 16,61 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali juga menurun sebesar 16,50 ribu jiwa atau sebesar 13,43 persen. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 13,75 persen atau sebanyak 17,07 ribu jiwa. Tahun 2022, pandemic sudah dapat dikendalikan, berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang juga meningkat, sehingga penduduk miskin menurun cukup signifikan menjadi 12,58 persen atau sebanyak 15,86 ribu jiwa.

Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomian maupun pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali antara lain yakni meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

E. Konektivitas Infrastruktur Antar Wilayah

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah–daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti Jalan dan Jembatan, transportasi, irigasi tehnis dan non tehnis, perumahan dan pemukinan, telekomunikasi serta kelistrikan. Adanya kesejangan Infrastruktur pada wilayah khususnya di Kecmatan Bungku Tengah dan Menui Kepulauan merupakan isu strategis utama yang dihadapi Kabupaten Morowali saat ini.

Infrastruktur yang baik adalah modal fisik *(physical capital)* bagi masyarakat dalam menjalakan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik.

Jaringan jalan yang baik, memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maupun terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik *(physical capital)* bagi masyarakat dalam menjalakan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali dari Tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan masih sangat rendah dari total panjang jalan yang ada. Secara keseluruhan tidak mencapai 50 persen dari Tahun 2018-2022. Tahun 2018 prorporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali sebesar 0,31, menurun hingga Tahun 2019 menjadi 0,13, diakibatkan bencana alam yang terjadi berdampak pada banyaknya jalan yang mengalami kerusakan, sehingga prorposi panjang jalan dalam kondisi baik di Tahun tersebut menurun sangat signifikan menjadi 0,133 atau hanya sebesar 13,30 persen dari totat panjang jalan yang ada, dan ditahun 2020 sebesar 0,14. Sampai dengan tahun 2022 sebesar 0,184.

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan, di mana Pembangunan sarana dan Prasarana Pelayanan publik dan listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi juga masih diperlukan dimasa yang akan datang guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Morowali baik di tingkan Kabupaten, kecamatan maupun di desa.

F. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas

Tatakelola pemerintahan yang baik melalui institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima *(public services)*. Dimana, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah subjek dan objek dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri, atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Morowali di masa mendatang.

Pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan

agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, menjadi isu utama di dalam penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Morowali dalam periode awal RPJPD kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 yaitu periode RPJMD 2025-2029.

Pelayanan publik sebagai dampak perubahan orientasi layanan dari birokrasi daerah memerlukan: 1). standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif Perangkat Daerah itu sendiri; 2). rasionalisasi penataan organisasi sudah dilakukan, namun tetap diperlukan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien. Adanya unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang *fragmented* dan mengedepankan ego-sektoral; 3). mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinan bagi dunia bisnis/pelaku swasta yang cepat sesuai dengan arahan undang-undang cipta kerja; 4). pengembangan penatalaksanaan diperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural 5). aplikasi layanan *online* baik dari perencanaan, pengganggaran, pelayanan publik tak terelakkan untuk merespon tuntutan industri 4.0 dewasa ini.

Di samping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memerlukan berbagai penyesuaian *(adjustment)* termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penggangaran daerah.

G. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Saat ini merupakan era "*sharing & platform based*". Kebangkitan era tersebut ditandai dengan: (1) data merupakan pelumas baru dalam kegiatan ekonomi (*internet of things, big data, cloud, OLT/ blockchain, artificial intelligence, dan robotics*) dan, (2) model bisnis berbasis platform (*platform based*). Model bisnis *platform based* misalnya; (1) Perusahaan transportasi' tanpa kendaraan; (2) Penyedia "*breaking news*" tanpa menyusun berita; (3) Penyedia *photosharing* tanpa membuat foto; (4) Jasa

komunikasi tanpa infrastruktur telekomunikasi; (5) Peritel bervaluasi tinggi tanpa memiliki *inventory*; (6) Penyedia akomodasi tanpa memiliki kamar; (7) Media popular tanpa membuat *content*; (8) Pertemuan, seminar, webinar, rapat virtual dan pengelolan kantor dari jarak jauh; (9) pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ)/kuliah daring menjadi model baru (PJJ/digitalisasi pendidikan).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Saat ini dunia berada pada Industri 4.0 dimana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah *smart factory* akan menjadi hal yang lumrah dengar di era Industri 4.0 sebagaimana saat ini kita mendengar istilah *smartphone, smartcard* dan istilah-istilah lain ditambahkan kata *smart*. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online.

Pembatasan interaksi fisik antar manusia menyebabkan berbagai bentuk Layanan pemerintah berubah menjadi online, *Work from Home (WFH)* dan budaya rapat during (online) menjadi sebuah kebiasaan baru didalam menyelesaikan berbagai tugas pemerintahan, transaksi ekonomi dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidaklah berlebihan kalau Pelayanan pemerintah dan transaksi ekonomi yang berbasis teknologi digital. pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ) untuk layanan Pendidikan kedepan di Kabupaten Morowali akan berjalan seiring dengan adaptasi pada tehnologi Pendidikan saat ini.

H. Potensi dan Mitigasi Bencana

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Kabupaten Morowali terdiri dari 10 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan dan 126 desa yang tersebar di bagian tenggara Pulau Sulawesi sehingga jika dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali umumnya terletak pada pesisir pantai di perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan hutan dan lereng pegunungan. Kondisi geografis ini berpengaruh pada kemiringan dan ketinggian lahan dari permukaan laut (dpl). Kabupaten Morowali rentan terhadap proses-proses tektonik aktif karena dilewati oleh sesar aktif Matano. Oleh karena itu, kabupaten ini sangat rentan terhadap gempa bumi besar, tsunami, dan banjir. Perubahan iklim di masa mendatang cenderung memperbesar intensitas badai ekstrem yang mengakibatkan banjir besar. Selain itu, intensitas dan cura hujan yang tinggi dan semakin berkurangnya daerah tangkapan hujan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Morowali berpotensi untuk lebih meningkatkan terjadinya banjir dan longsor.

Kondisi Topografi di Kabupaten Morowali yang merupakan perbukitan dan pegunungan, membuat kabupaten ini rawan longsor, aliran debris, dan erosi. Potensi-potensi bahaya ini menghasilkan sejumlah besar sedimen yang mengisi dasar sungai dan menyebabkan lebih banyak terjadi banjir dan penambahan sedimen di daerah pesisir. Di daerah pesisir, hilangnya hutan bakau juga telah menyebabkan meningkatnya abrasi pantai. Daerah dataran rendah di pantai juga berisiko terkena intrusi air laut akibat gelombang pasang dan tsunami. Banjir sering terjadi di Kabupaten Morowali selama musim hujan, sedangkan kekeringan sering terjadi di musim kemarau. Perkiraan adanya perubahan iklim di masa depan, diperkirakan akan meningkatkan intensitas bencana banjir dan kekeringan.

Terjadinya penggundulan hutan karena penebangan dan pertambangan, serta konversi hutan menjadi perkebunan di kemudian hari dapat memperburuk masalah pengelolaan daerah tangkapan air. Daerah yang gundul dan tidak ditanami kembali sangat rentan terhadap erosi. Hujan deras menggerakkan sejumlah besar sedimen ke arah daerah tangkapan air, sehingga memperburuk banjir dan mempengaruhi bangunan dan infrastruktur secara signifikan.

Beberapa Tahun terakhir terdapat bencana Alam yang melanda Kabupaten Morowali banjir bandang, Gempa Bumi dan Longsor yang terjadi pada kurun Tahun 2019 s/d 2022. Peningkatan sedimentasi juga

telah menyebabkan terhadap hilangnya tanaman mangrove di pantai. Akibat dari fenomena iklim yang ekstrim dan semakin berkurangnya daerah tangkapan air di kawasan hutan Kecamatan Bungku Tengah. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Morowali berdasarkan RTRW Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut.

a. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bahodopi dan Kecamatan Bungku Pesisir
b. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bahodopi.
c. Kawasan rawan bencana gempa bumi berupa kawasan sempadan sesar aktif terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Tengah, Kecamatan Bungku Timur.
d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang, terdapat di Kecamatan Witaponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah dan sebagian Kecamatan Bungku Timur

I. Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Industri pertambangan Nikel tentu tidak bisa lepas dari dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bukan tidak sedikit lahan-lahan bekas penambangan diberbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Morowali yang rusak, sebagai akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Morowali yang utama adalah makin tingginya kerusakan lingkungan *(environmental damage)* sebagai akibat adanya eksploitasi sumberdaya alam pertambangan nikel yang sangat massif berdampak pada penurunan produktivitas tanah, penyimpangan tata ruang, deforestasi, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, banjir, pencemaran air dan udara, terganggunya flora dan fauna, terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk, serta perubahan iklim mikro *(microclimate change).*

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki setidaknya 72 juta cadangan Nikel (Ni) termasuk Limonit, atau sebesar 52 persen dari total cadangan nikel dunia sebanyak 139.419.000 Ton Ni (Booklet Peluang Investasi Nikel Indonesia, Kementerian ESDM, 2020). Karenanya, kegiatan pertambangan nikel sebagian besar hanya tersebar di 4 provinsi, dimana terkandung 90 persen dari seluruh cadangan sumber nikel yang ada di Indonesia, 3 provinsi berada di Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara), serta 1 provinsi di Maluku (Maluku Utara).

Merujuk pada data walhi dan kementerian ESDM hingga Tahun 2022, disebutkan terdapat sebanyak 19 perusahaan smelter yang mengolah bijih nikel menjadi berbagai produk setengah jadi, yang tersebar di beberapa wilayah dengan total kapasitas produksi mencapai 12,437,000 Ton per tahun, 14 diantaranya terdapat di pulau Sulawesi, dengan kabupaten morowali Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang memiliki smelter terbesar yaitu 9 (sembilan) Smelter.

Konsep Hilirisasi pertambangan nikel pertama di Indonesia dilakukan oleh *Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)*. Di kawasan ini hilirisasi nikel dilakukan untuk menghasilkan berbagai jenis produk nikel diantaranya feronikel, nickel pig iron, dan stainless steel. Hilirisasi Komoditas nikel di Indonesia selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dengan larangan ekspor nikel kadar rendah dengan pertimbangan untuk pertambahan nilai dari komoditas nikel melalui proses pengolahan dalam negeri untuk mendukung masifnya pembangunan smelter beberapa tahun terakhir. Di tahun yang sama presiden Jokowi juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, dengan hadirnya peraturan ini semakin memperlihatkan ambisi besar pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem komoditas nikel dari hulu hingga hilir.

Di sisi lain kampanye terhadap transisi energi fosil ke energi terbarukan melalui pengembangan industri baterai untuk mendukung ekosistem mobil listrik dan peralihan dari kendaraan industri mobil berbahan bakar fosil ke energi listrik tidak terlihat signifikan, perkembangan ekspansi pertambangan nikel yang ada di Indonesia. kebutuhan nikel kelas 1 (Ni 99,9 persen) untuk produksi baterai jenis lithium-ion hingga saat ini tidak ditemukan di Indonesia, sebagian besar dikarenakan kualitas bijih nikel yang ditemukan di Indonesia berkadar di bawah 1,7 persen Ni, dan dibutuhkan teknologi pengolahan hidrometalurgi untuk menghasilkan kualitas nikel yang lebih baik, berbeda dengan pengolahan bijih nikel yang selama ini digunakan di Indonesia dengan teknik pengolahan pirometalurgi untuk menghasilkan nikel kelas 2 seperti *Nickel Pig Iron*, Feronikel, dan *Nickel Matte* yang sebagian besar digunakan dalam industri stainless steel.

Sejalan dengan meningkatnya izin usaha pertambangan untuk komoditas nikel, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Kerusakan lingkungan, Deforestasi, perampasan ruang, hingga pemiskinan rakyat juga semakin masif terjadi. Masifnya pemberian izin bagi perusahaan tambang khususnya pertambangan nikel di Pulau Sulawesi, menimbulkan berbagai dampak ekologis yang besar, dimulai dari

kerusakan hutan atau deforestasi, hingga pencemaran di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. kebutuhan akan lahan yang luas dari industri pertambangan nikel ini pun dipermudah oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi hingga kawasan hutan lindung yang selama ini terus dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat dan lokal.

J. Penggunaan dan Konversi Lahan

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Morowali tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan atau regulasi yang berlaku apabila merujuk paradigma kegiatan industri pertambangan yang mengacu pada konsep pertambangan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta penerapan kawasan pertambangan yang dapat memberikan manfaat diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat atau dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR), studi kelayakan teknik, ekonomi, lingkungan (Studi Amdal), reklamasi dan pengelolaan lingkungan, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Hampir seluruh kecamatan di wilayah daratan Kabupaten Morowali, memiliki potensi yang besar apabila dikembangkan untuk pertambangan dan pertanian. Namun, saat ini sedang terjadi kegiatan pengelolaan penambangan secara besar-besaran, banyak perusahaan besar yang berdatangan untuk menggali kekayaan bumi di wilayah yang kaya akan nikel ini. Kedatangan para pemburu hasil bumi di wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan hasil buminya ini (nikel), mendapatkan respon dari masyarakat khususnya petani, ada yang pro dan kontra terhadap kegiatan penambangan ini. Petani beranggapan bahwa kehadiran tambang di Daerah Morowali akan berdampak positif bagi pertanian dan lingkungan di sekitarnya. Namun ada pula yang beranggapan akan berdampak negatif nantinya. Kabupaten Morowali khususnya daerah Kecamatan Bungku Timur yang dulunya hanya dikenal sebagai daerah agraria sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani maupun nelayan, kini sebagian masyarakatnya beralih profesi sebagai buruh maupun karyawan di perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut sebagai akibat dari adanya alih fungsi lahan.

Pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali terjadi perubahan tutupan/penggunaan lahan pada kontribusi peningkatan luas tutupan/penggunaan lahan dari satu atau 2 beberapa kategori tutupan/penggunaan yang diikuti penurunan luas kategori lainnya pada suatu periode tertentu. Seperti yang di ketahui bahwa konversi lahan hutan (tidak terbangun) menjadi penggunaan lahan lain (terbangun) merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di dunia

dan memiliki dampak langsung diantaranya polusi udara, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global dengan turunnya pengikat CO^2, erosi, kumuh sekitar DAS, dll. Hal ini banyak terjadi di Kecamatan Bahodopi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan wilayah yang terdapat perusahaan tambang. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional karena memiliki sumber daya alam strategis nasional berupa sumber daya mineral nikel yang keberadaannya mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya inkonsistensi penataan ruang wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) banyak terjadi pada KSN karena sebahagian besar lokasi KSN Bahodopi dan sekitarnya berada di kawasan lindung dalam RTRW Kabupaten Morowali. RTRW sangat baik untuk pengendali perubahan tata guna lahan, mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah. Sebagian lokasi penambangan terletak di kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, tubuh air, dan konservasi perairan).

K. Ketahanan Pangan dalam Aktivitas Pertambangan

Isu utama terkait kebutuhan pangan di sekitar kawasan tambang Morowali adalah adanya ketimpangan antara peningkatan aktivitas penambangan dan penurunan produktivitas pertanian lokal, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi tinggi. Ketergantungan pada impor beras dan bahan pangan lain juga meningkat, sementara ketahanan pangan lokal tergerus akibat perluasan area tambang. Isu pangan di kawasan tambang Morowali menjadi semakin kompleks akibat hilirisasi nikel yang masif, menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan, namun juga dampak negatif terhadap pertanian dan sumber daya alam. Kerusakan ekologi, terutama di lahan pertanian, menyebabkan gagal panen dan meningkatnya angka kelaparan serta kekurangan gizi, terutama di kalangan anak-anak.

Hilirisasi nikel di Morowali, khususnya di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), mendorong peningkatan kebutuhan pangan, terutama karena banyaknya pekerja tambang yang membutuhkan pasokan makanan. Aktivitas tambang menyebabkan kerusakan ekologi, seperti pencemaran air dan tanah, sehingga pertanian kesulitan beroperasi dan hasil panen berkurang. Gagal panen dan kerusakan ekologi berdampak pada peningkatan angka kelaparan dan stunting (kekurangan gizi) di kalangan anak-anak, terutama di daerah industri nikel. Pencemaran limbah tambang juga memengaruhi kualitas air dan sumber daya hayati, termasuk ikan, yang mengurangi sumber penghasilan masyarakat pesisir. Peningkatan kebutuhan pangan dan penurunan produksi lokal menyebabkan ketergantungan Morowali pada impor, yang dapat memicu kenaikan harga dan masalah logistik.

Upaya yang perlu dilakukan adalah Meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi, pupuk, dan sarana pertanian modern untuk

memenuhi kebutuhan pangan lokal. Melakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah tambang, untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap air, tanah, dan sumber daya hayati. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang berubah, seperti tanaman pangan lokal dan komoditi lain. Melakukan program ketahanan pangan yang terintegrasi, termasuk pelatihan pertanian, penyediaan bibit, dan dukungan pemasaran produk pertanian. Selain itu, Memastikan perusahaan tambang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

L. Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Kota Kecil dan Kawasan Perdesaan

Kabupaten Morowali yang terletak di Sulawesi Tengah, telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh pemerintah Indonesia. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada Kawasan Industri Morowali (KI Morowali), yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Keputusan Permenko Perekonomian No 9 Tahun 2022. Morowali memiliki potensi besar dalam industri pengolahan mineral, terutama ferronikel dan stainless steel. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan mencakup area seluas 4.000 hektar. Pengembangan infrastruktur di kawasan ini telah dipercepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pembangunan jalan, revitalisasi drainase, dan pengelolaan sampah. Selain itu, pengembangan kawasan perdesaan di sekitar Morowali juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemugaran permukiman kumuh, peningkatan kapasitas jalan, dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bahodopi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai isu strategis seperti kemacetan, banjir, dan penumpukan sampah di kawasan tersebut.

Selain ituPada tahun 2017, melalui serangkaian rapat koordinasi antara Kementerian PUPR dan kementerian yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan seperti: Kementerian DPDTT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta dikomandoi Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, dicapai kesepakatan bahwa pengembangan kawasan perdesaan menjadi tanggung jawab bersama lintas kementerian dengan istilah pengembangan kawasan yang disepakati bersama yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). KPPN merupakan kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang

mendukung pengembangan 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Dengan adanya KPPN, program-program lintas K/L yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan dapat difokuskan pada lokasi lokasi KPPN tersebut, sehingga pada akhir tahun penanganan yaitu tahun 2019 didapatkan kawasan perdesaan yang sudah dikembangkan secara komprehensif sehingga mampu berdikari, menjadi pilar pengembangan ekonomi wilayah, mensejahterakan masyarakat dan dapat direplikasi pada kawasan-kawasan perdesaan lain di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Morowali pada khususnya. Melalui potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Morowali dengan luas 4.045,15 KmÇ wilayah pengelolaan laut dari total luas wilayah 9.517.15 Km^2 mengharapkan pengelolaan ruang kawasan sentra produksi perikanan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berbasis minapolitan dengan lokasi di Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa indikasi intervensi yang akan dilakukan menurut kawasan di Kabupaten Morowali adalah:

1. **Kawasan Perkotaan Kecil**; Kabupaten Morowali: Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi), dengan output: bantuan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja serta bantuan pembangunan rumah swadaya, pemugaran permukiman kumuh, bantuan prasarana dan sarana umum bidang perumahan, Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahomakmur dan Keurea, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat, Sistem Pengelolaan Persampahan termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahodopi, penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
2. **Kawasan Industri Morowali**: Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali, melalui:
   - Pengembangan Kawasan Industri (KI) Indonesia Huabao Industrial Park, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Stardust,
   - Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan output: pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali,
   - Peningkatan investasi kawasan, dengan output: penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal, percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan dan

penataan kawasan industri, serta pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku,

- Pengembangan kemitraan usah Pelebaran Jalan Akses Bandar Udara Morowali dan rantai pasok, dengan output: kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka, fasilitasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan, pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar di KI Prioritas, dan inkubasi bisnis untuk pembentukan wirausaha industri,
- Penyediaan pendidikan dan pelatihan, dengan output: pembangunan gedung dan penyediaan peralatan pendidikan tinggi vokasi industri,
- Pengembangan industri nikel sulfat, dengan output: penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel,
- Pembangunan industri baterai, dengan output: fasilitasi industri dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor serta perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi,
- Pengembangan industri kendaraan bennotor listrik berbasis baterai, dcngan output: fasilitasi industri dalam rangka pcnguatan struktur industri dalam negeri serta peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi darl restrukturisasi mesin/pcralatan sentra IKM dan UPT logam, mesin, elektronika, dan alat angkut,
- Pengembangan industri stainless steel, dengan outpuf monitoring dan evaluasi perkembangan industri, fasilitasi peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri,
- Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang Bejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional, dcngan output penurunan emisi Gas Rumah Kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dar pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau,
- Harmonisasi kebijaksn industri nikel, dengan output penguatan standarisasi untuk hilirisasi.

3. **Kawassn Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT):** Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) di Kabupaten Morowali dan 4 Kabupaten lain di Sulawesi Tengah, melalui:
   - Pengembangan input produksi perikanan, dengan, output penyaluran benih ikan dan Penyaluran calon induk unggul ikan,

- Pengembangan sarana produksi perikanan, dengan output, penyaluran sarana penangkapan dan budidaya ikan,
- Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan pendampingan masyarakat kclautar dan pcrikanan, dengan output bantuan sarana pengembangan usaha nelayan, perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, dan pendanaan usaha nelayan.

4. **Kawasan Perdesaan Prioritas,** Pengembangan Kawasan Perdesaan prioritas Kabupaten Morowali, melalui:
   - Penyediaan layanan dasar, dengan output pcEenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala dan sistem pengelolaan persampahan, berbasis masyarakat,
   - Peningkatan aksesibilitas, dengan output pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/Lastmile dan akses internet,
   - Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan output pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan,
   - Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal ekowisata, dengan output preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi kemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bcncana iklim.
   - Peningkatan kapasitas tata kelola data kelembagaan berbasis digital, dengan output pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD.

Tabel 2.96
Rumusan Isu Strategis Daerah Kabupaten Morowali

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Geografi wilayah	Wilayah perbatasan dengan 2 provinsi	Hilirisasi Industri dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Geopolitik dan Geoekonomi	Pertahanan, Keamanan Negara	Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dan daratan	Konektivitas Sinfrastruktur antar Wilayah
Hidrologi	Penurunan debit air sungai	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Daya Dukung	Pembangunan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup. dan Perubahan Iklim
Klimatologi	Peningkatan suhu udara dan banjir	Mitigasi Risiko kebencanaan dan Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup. dan Perubahan Iklim
Penggunaan Lahan	- Terjadi degradasi lahan akibat tambang. - Konversi lahan pertanian produktif	Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan	Pemanfaatan Luar Angkasa	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Penggunaan dan konversi lahan
Tanaman Pangan	Penurunan produktivitas komoditi pertanian	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Krisis Pangan Dunia	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan
Tanaman Hortikultura	Produksi rendah	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Krisis Pangan Dunia	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan
Tanaman Perkebunan	Penurunan luas lahan dan produksi	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Krisis Pangan Dunia	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peternakan	Penurunan populasi ternak	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Krisis Pangan Dunia	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan
Perikanan dan Kelautan	Penurunan produksi	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	SDGs dan Degradasi SDA	Ketahanan Pangan Nasional	Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan
Hutan	Penurunan tutupan hutan	Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan	Perubahan iklim dan Degradasi SDA	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Penggunaan dan konversi lahan
Sumberdaya hayati	Penurunan biodiversitas	Pemanfaatan Keanekaragaman hayati	Daya Dukung	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Penggunaan dan konversi lahan
Daya dukung dan Daya Tampung	Penurunan DDTL pangana, air dan keanekaragaman hayati	Mitigasi Risiko kebencanaan dan Perubahan Iklim	Daya Dukung dan Daya Tampung	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Energi dan Sumberdaya Mineral	Kapasitas terpasang rendah	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan	SDGs	Pembangunan Lingkungan Hidup	Dilema Industri	Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional
Air	- Penurunan kualitas air - Air minum layak	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Daya Dukung dan Daya Tampung	Pembangunan Lingkungan Hidup	Industri Berbasis Sumberdaya Alam	Penggunaan dan konversi lahan
Pangan	Penurunan ketersediaan pangan lokal	Ketahanan Pangan, Air Minum Layak dan Sanitasi Lingkungan	Daya Dukung dan Daya Tampung	Ketahanan Pangan Nasional	Arah Pembangunan Strategis Prov Sulawesi Tengah	Ketahanan pangan dalam aktivitas pertambangan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kemiskinan dan Kependudukan	-Peningkatan laju pertumbuhan -Kemiskinan masih tinggi	Hunian layak, terjangkau bebas kekumuhan	Kemiskinan, Demograsfi Global	Penanggulangan Kemiskinan	Kemiskinan di Sulteng	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting
Ketenaga-kerjaan	Pengangguran	Hilirisasi Industri dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pertumbuhan Kelas menengah	Peningkatan Lapangan Kerja	Sumberdaya Manusia	Serbuan Tenaga Kerja Asing
Sumberdaya Wisata Alam	Degradasi SDA	Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan	Degradasi sumberdaya alam	Pembangunan Lingkungan Hidup	Daya Saing Kepariwisataan	Penggunaan dan Konversi Lahan
Kawasan Strategis Nasional	Masalah ketimpangan dan sosial meningkat	Hilirisasi Industri dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Megatren 2045 dan Konstelasi Perdagangan	Penunjang superhub ekonomi nusantara	Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan PSN	Potensi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Kota Kecil dan Kawasan Perdesaan
Sumberdaya manusia	Penurunan kualitas SDM	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kompetensi ASN	Urbanisasi Dunia	Infrastrukturdan Peningkatan kualitas SDM	Sumberdaya Manusia	Kualitas SDM dan Kompetensi ASN
Pelayanan Pemerintahan dan birokrasi	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan.	Tatakelola Keuangan Global	Memperkokoh Ideologi Pancasial dan Demokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan
Geologi dan topografi	Sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan banjir)	Mitigasi Risiko kebencanaan dan Perubahan Iklim	Dunia menghadapi bencana alam global	Pembangunan Lingkungan Hidup	Penanganan pasca gempa bumi, Tsunami dan Liquifaksi, Geopark Sulteng	Potensi dan mitigasi bencana

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Teknologi Informasi	Permasalahan sosial dan adaptif		Perkembangan teknologi informasi	Pengembangan Infrastruktur	Pengarusutamaan Transformasi Digital	Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi
Pertumbuhan ekonomi	Didominasi sektor pertambangan	Hilirisasi Industri dan Serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Perang tarif USA-China	Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Ekonomi	Inkoneksitas antara Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri	Hilirisasi Industri Pengolahan SDA

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Rumusan Visi

Visi pemerintah daerah adalah pernyataan aspiratif yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan arah strategis yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Visi ini biasanya mencerminkan cita-cita dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Visi pemerintah daerah yang terpilih dari pemilihan kepala daerah tahun 2024 merupakan dasar dan pedoman serta bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana prinsip Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus realistis, disusun dan dirumuskan secara rinci disertai dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia. Pengerahan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga

pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terselenggara secara berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Dasar aturan yang menjadi acuan perumusan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Morowali 2025-2029 adalah:

1. Visi dan misi RPJPD Kabupaten Morowali tahun 2025-2045 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 (Visi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 adalah **"Kabupaten Morowali sebagai Daerah Industri Berbasis Sumberdaya Alam Berkelanjutan yang Maju, Berkeadilan dan Sejahtera"**).
2. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2019-2023 dan RPD Kabupaten Morowali 2024-2026;
3. Visi dokumen masterplan Pemetaan dan Pengembangan Kawasan Industri Morowali dengan City Branding "Morowali Terdepan bersama dalam industri nikel yang berkeadilan";
4. Idenstifikasi Isu Global, Megatrend (kecendrungan) 2045, SDGs 2030 dan aspek lainnya yang ikut mempengaruhi pencapaian pembangunan Kabupaten Morowali sampai dengan 2045;
5. Integrasi dan harmonisasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Morowali tahun 2025-2045;
6. Hasil penelaah dan harmonisasi serta mempedomani Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025);
7. Integrasi dan harmonisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Morowali tahun 2025-2029;
8. Berpedoman pada Peraturan Daerah Morowali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali 2019-2039.

Selain itu, penyusunan visi dan misi Kabupaten Morowali juga diselaraskan dengan perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terpilih periode 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, baik skala lokal, regional, nasional maupun isu global, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2025 – 2029 adalah:



"Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan"

Sebagai harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Morowali 5 (lima) tahun ke depan, pada hakekatnya Penjelasan/Penjabaran Visi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:

1. **Kabupaten** adalah tingkat pemerintahan daerah di Indonesia yang berada di bawah provinsi. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan memiliki wilayah administratif yang terdiri dari beberapa kecamatan. Setiap kabupaten memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten bertanggung jawab atas berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.
2. **Morowali**: adalah kesatuan wilayah, masyarakat kabupaten dan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Poso berdasarkan Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan, termasuk sarana dan prasarana serta kelembagaan yang dipisahkan dari kabupaten induk. Daerah otonom Kabupaten Morowali merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur, dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Morowali menunjukkan kesatuan pemerintah dan masyarakat beserta semua potensi sumberdaya alam yang dimiliki dan dikelola bagi kemaslahatan masyarakat Morowali dan kemajuan Negara Republik Indonesia.
3. **Maju**, dimaknai sebagai suatu keadaan yang menggambarkan kondisi Kabupaten Morowali yang maju berdasarkan capaian hasil-hasil pembangunan daerah meliputi pemenuhan pada capaian indikator pembangunan bidang infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya, politik dan tata kelola pemerintahan. Daerah yang maju juga ditandai dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, kualitas pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, kualitas pelayanan sosial yang lebih baik, ketersediaan prasarana dan sarana berbasis teknologi mutakhir, dan didukung dengan hadirnya aktivitas ekonomi modern yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan ekosistem digital dan

teknologi informasi berbasis akses internet cepat dan terjangkau, serta pencapaian yang tinggi pendapatan masyarakat dan daerah;

4. **Mandiri**, dimaknai sebagai suatu keadaan yang menandakan bahwa Kabupaten Morowali menjadi kabupaten yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah berdasarkan kemampuan dalam pencapaian pendapatan asli daerah yang tinggi dan berkelanjutan. Kemandirian pembangunan diperoleh melalui optimalisasi pemanfaatan berbagi potensi sumber daya alam dengan penggunaan teknologi yang tinggi dan ramah lingkungan serta dilakukan oleh sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, berdaya saing dan berbudaya, sehingga Kabupaten Morowali diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan akselerasi capaian hasil-hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
5. **Berkeadilan**, diartikan bahwa pembangunan di Kabupaten Morowali dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pemerataan capaian pembangunan yang tersebar pada seluruh masyarakat dan wilayah di Kabupaten Morowali berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki. Pembangunan Kabupaten Morowali yang berkeadilan juga mempertimbangkan konsep keadilan bagi semua penduduknya, yang dimaknai sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah yang diukur berdasarkan pemerataan pembangunan baik antar desa, kecamatan, dan wilayah daratan maupun wilayah kepulauan. Ketersediaan infrastruktur yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan dasar, non layanan dasar, pilihan dan penunjang yang memenuhi aspek kuantitas dan kualitas yang semakin berkeadilan ditandai dengan penyediaan infrastruktur daerah yang baik dan modern, menciptakan pelayanan yang baik, berkulitas, merata, didukung oleh distribusi sumberdaya manusia yang merata. Mengembangkan dan mewujudkan kekuatan-kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumberdaya alam berkelanjutan sebagai upaya akselerasi pemerataan di wilayah perkotaan dan perdesaan, daerah terpencil dan terisolir dalam penyediaan infrastruktur, dan teknologi informasi yang maju.

Visi RPJMD Morowali diselaraskan dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, RPJM Nasional 2025-2029, serta Visi RPJPD Kabupaten Morowali 2025-2045 (setidaknya mengandung makna kata maju dan berkeadilan). Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Keterkaitan Visi RPJMD Morowali 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan Visi RPJPN periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Visi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045	**"BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEBAGAI WILAYAH PERTANIAN DAN INDUSTRI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN 2025-2029"**	KABUPATEN MOROWALI SEBAGAI DAERAH INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN YANG MAJU, BERKEADILAN, DAN SEJAHTERA
		Visi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029
		TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERKEADILAN

Gambar 3.1
Hubungan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, serta Visi RPJPD Kabupaten Morowali 2025-2045 dengan Visi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

Pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahap pembangunan ke-satu dari RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045. Dalam upaya mengukur pencapaian visi RPJMD Morowali Tahun 2025-2029, maka ditetapkan sasaran visi yang tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Visi RPJMD Morowali Tahun 2025-2029

No	SASARAN VISI RPJMD KABUPATEN MOROWALI 2025-2045	TARGET SASARAN	
		BASELINE 2025	SASARAN 2029
	PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA		
1	DRB perkapita (Rp Juta)	1.262,78	2.117,22
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	40,3	46,60
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	75,17	74,99
	PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG		
1	Tingkat Kemiskinan (%)	11,06-11,56	8,05
2	Rasia Gini (Indeks)	0,272	0,260
3	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	45,85	41,92
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,99	11,79
	PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH DI DAERAH YANG MENINGKAT		
3	Indeks Inovasi Daerah	48,18	58,75
		Inovatif	Inovatif
	Indeks Daya Saing Daerah	2,99	3,37
	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA		
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,75-73,00	77,50-78,00
	PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERRO EMISSION		
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	16,13	16,09
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,95	82,16

Sumber: RPJPD Morowali 2025-2045 yang Diolah, 2025

Tabel 3.2

Keterkaitan Sasaran RPJMD Provinsi Sulteng dan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

No	SASARAN VISI RPJMD PROVINSI SULAWESI TENGAH 2025-2045	TARGET SASARAN		SASARAN VISI RPJMD KABUPATEN MOROWALI 2025-2045	TARGET SASARAN	
		BASELINE 2025	SASARAN 2029		BASELINE 2025	SASARAN 2029
	PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA			**PENINGKATAN PENDAPATAN PERKAPITA**		
1	DRB perkapita (Rp Juta)	140,14-141,20	258,7	DRB perkapita (Rp Juta)	1.262,78	2.117,22
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	49,15	58,75	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	40,3	46,60
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	40,97 - 41,45	45,50-550,00	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	75,17	74,99
	PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG			**PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG**		
1	Tingkat Kemiskinan (%)	11,06-11,56	8,87 – 9,50	Tingkat Kemiskinan (%)	11,06-11,56	8,05
2	Rasia Gini (Indeks)	0,298 – 0,302	0,290 – 0,300	Rasia Gini (Indeks)	0,272	0,260
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,93	2,21	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	45,85	41,92
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,72	12,95 – 14,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,99	11,79
	PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH DI DAERAH YANG MENINGKAT			**PENINGKATAN KEPEMIMPINAN DAN PENGARUH DI DAERAH YANG MENINGKAT**		
3	Indeks Inovasi Daerah	75 - 80	77 – 83	Indeks Inovasi Daerah	48,18	58,75
		Sangat Inovatif	Sangat Inovatif		Inovatif	Inovatif
	Indeks Daya Saing Daerah	3,43	3,82	Indeks Daya Saing Daerah	2,99	3,37
	PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA			**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA**		
4	Indeks Modal Manusia	0,50	0,54	Indeks Pembangunan Manusia	74,5	75,60
	PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERRO EMISSION			**PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERRO EMISSION**		
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	77,96	85,77	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,75	82,60	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,95	82,16

Sumber: RPJPD Morowali 2025-2045 yang Diolah, 2025

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin terwujudnya visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi RPJMD 2025 – 2029 memperhatikan tahapan pertama atau tahapan awal pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Morowali. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa pada tahap/periode pertama RPJPD, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Rumusan misi RPJMD disusun sedemikian rupa sehingga sejalan dengan Misi RPJMNas tahun 2025-2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025), untuk memberikan kerangka acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran berikut indikatornya serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi daerah. Rumusan misi tersebut sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena pentingnya pernyataan misi, maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, sebagai acuan dalam perumusan strategi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan, yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Sebagai penjabaran visi pembangunan Kabupaten Morowali yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Periode 2025–2029, maka berdasarkan konsultasi publik dan masukan dari stakeholder, dan FGD bersama pimpinan OPD di lingkungan Pemda Morowali, dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter dan berbudaya;
3. Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan;
4. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan;
5. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.

Adapun penjelasan misi pembangunan diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani

Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*):
   - Transparansi: memastikan semua proses pemerintahan terbuka dan dapat diakses oleh publik.
   - Akuntabilitas: setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
   - Partisipasi Publik: melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*):
   - Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan.
   - Integritas: Menjaga kejujuran dan moralitas tinggi dalam setiap aspek pemerintahan.
3. Transformasi Tata Kelola:
   - Efisiensi dan Efektivitas: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal.
   - Profesionalisme: Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah.
4. Birokrasi yang Melayani:
   - Pelayanan Publik yang Prima: Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada masyarakat.
   - Responsif: Cepat tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan bersih, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Morowali.

Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkarakter dan Berbudaya

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter dan berbudaya bertujuan untuk mengembangkan masyarakat Morowali yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, serta memiliki karakter yang kuat dan budaya yang kaya. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Kesehatan:
   - Kesehatan Fisik: meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat Morowali memiliki tubuh yang sehat.

- Kesehatan Mental: Menyediakan dukungan dan layanan kesehatan mental untuk menjaga kesejahteraan psikologis masyarakat.

2. Karakter:
   - Pendidikan Karakter: mengintegrasikan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan untuk membentuk individu yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
   - Etika dan Moral: mendorong nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas.
3. Budaya:
   - Pelestarian Budaya: melestarikan dan mengembangkan budaya lokal agar tetap hidup dan dihargai oleh generasi muda.
   - Penghargaan terhadap Keragaman: menghargai dan merayakan keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa.

Dengan fokus pada aspek-aspek ini, diharapkan sumber daya manusia di Kabupaten Morowali dapat berkembang secara holistik, menjadi individu yang sehat, berkarakter kuat, dan memiliki budaya yang kaya.

Misi 3: Memajukan Sarana dan Prasarana Inklusif dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Kepulauan

Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan bertujuan untuk memastikan bahwa semua wilayah, baik daratan maupun kepulauan, mendapatkan akses yang sama terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan daerah Morowali. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Sarana dan Prasarana Inklusif:
   - Infrastruktur Transportasi: membangun dan meningkatkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk memastikan konektivitas yang baik antara wilayah daratan dan kepulauan.
   - Aksesibilitas: memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus.
   - Ketersediaan sarana publik: menyediakan sarana pelayanan public yang mudah, terjangkau dan efisien guna menunjang pembangunan di wilayah terpencil dan kepulauan.
2. Pemerataan Pembangunan:
   - Pembangunan Berkeadilan: mengalokasikan sumber daya secara merata untuk pembangunan di wilayah terpencil, kepulauan dan kurang berkembang.

- Pengembangan Wilayah: mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah yang kurang berkembang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah daratan dan kepulauan.

3. Dukungan Pembangunan:
   - Fasilitas Publik: membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan masyarakat di wilayah daratan dan kepulauan.
   - Teknologi dan Komunikasi: membangun fasilitas teknologi informasi guna meningkatkan akses terhadap informasi dan memperlancar komunikasi guna mendukung pembangunan yang inklusif.

Dengan fokus pada aspek-aspek ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan secara merata dan inklusif, sehingga semua wilayah, baik daratan maupun kepulauan, dapat berkembang secara optimal.

Misi 4: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, serta Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan

Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, dilakukan terintegrasi, ramah lingkungan dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Pengembangan Sektor Pertanian:
   - Peningkatan Produksi: meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal, regional, nasional, dan serta produktivitas tanaman hortikultura dan perkebunan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
   - Teknologi Pertanian: menggunakan input dan teknologi modern (pertanian dan informasi) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi hasil pertanian, dan diversifikasi produk pertanian.
2. Pengembangan Sektor Peternakan:
   - Ketahanan Pangan Asal Ternak: meningkatkan produksi ternak spesifik lokasi untuk memastikan ketersediaan pangan asal ternak yang cukup, dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
   - Nilai Tambah Produk Ternak: mengembangkan produk olahan ternak untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
3. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan:
   - Sumber Daya Laut: memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan.

- Sumberdaya di perairan umum: memanfaatkan sumberdaya pesisir, air payau dan air tawar untuk pengembangan perikanan budidaya.
- Teknologi Perikanan: menggunakan teknologi penangkapan ikan, budidaya yang ramah lingkingan guna meningkatkan efisiensi dan hasil perikanan, serta diversifikasi olahan hasil perikanan.

4. Pengembangan Sektor Pariwisata:
   - Destinasi Wisata: Mengembangkan destinasi wisata lokal untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.
   - Promosi Wisata: Meningkatkan promosi wisata untuk memperkenalkan potensi wisata daerah.
5. Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan:
   - Produk Kreatif Lokal: Mengembangkan produk kreatif lokal yang unik dan memiliki nilai jual tinggi.
   - Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha kreatif untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.

Dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor ini, diharapkan kemakmuran masyarakat dapat meningkat secara signifikan melalui pemanfaatan potensi lokal dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Misi 5: Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang kuat dan adil dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut adalah beberapa poin utama dari misi ini:

1. Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan:
   - Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   - Keadilan Ekonomi: Memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam:
   - Pemanfaatan Berkelanjutan: Menggunakan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang.
   - Konservasi: Melindungi dan melestarikan ekosistem alam untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
3. Revitalisasi Lingkungan:

- Rehabilitasi Ekosistem: Memulihkan ekosistem yang rusak akibat aktivitas manusia untuk mengembalikan fungsi alam yang optimal.
- Pengurangan Emisi: Mengurangi emisi karbon dan polusi untuk menjaga kualitas udara dan air.

4. Hilirisasi dan Industrialisasi:
   - Pengembangan Industri: Mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
   - Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri.

Dengan fokus pada aspek-aspek ini, diharapkan perekonomian dapat tumbuh secara kokoh dan berkeadilan, serta lingkungan dapat terjaga dengan baik melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Morowali Periode 2025-2045, juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029 dan RPJM Nasional periode 2025-2029, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali menjadi bagian integral dari program provinsi dan nasional. Dengan demikian, rumusan Misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMN sebagai arah dan kebijakan pembangunan nasional sesuai tabel berikut:

Tabel 3.3

Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, dan Misi RPJMN (Asta Cita/Prioritas Nasional) Tahun 2025-2029 dan Misi/Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045

Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMN (Asta Cita/PN) Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045
Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	**Misi 4** Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.	**Astacita 1/PN 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) **Astacita 7 / PN 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	**MISI 1 :** Mewujudkan Kesinambungan Transformasi Tatakelola Pemerintahan Baik (Good Governance) Dan Reformasi Birokrasi Daerah Yang Melayani
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkarakter dan Berbudaya	**Misi 1** Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.	**Astacita /PN 4** Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas **Astacita 8 / PN 8** Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	**MISI 2 :** Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi, memperkuat Ketahanan Sosial Budaya.
Misi 3: Memajukan Sarana dan Prasarana Inklusif dalam Mendukung Pemerataan	**Misi 3** Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata	**Astacita 3 / PN 3** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	**MISI 4 :** Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang serta Pemenuhan Sarana

Misi RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMN (Asta Cita/PN) Tahun 2025-2029	Misi RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045
Pembangunan Wilayah Daratan dan Kepulauan	ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro maritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Astacita 6/PN 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Prasarana dan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkesinambungan
Misi 4: Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, serta Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Kewilayahan	**Misi 2** Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.	**Astacita / PN 2** Menetapkan sistim pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. **Astacita 3 / PN 3** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro maritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	**MISI 3 :** Transformasi Perekonomian yang Tangguh dan berkesinambungan melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Sejahtera berkeadilan berbasis Hilirisasi Industri SDA dan pertanian serta pariwisata Berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.	**Misi 3** Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.	**Astacita 5 / PN 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	**MISI 5:** Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali selama Periode 2025–2029, terdiri dari Indikator kinerja Makro Bupati dan Wakil Bupati serta Indikator Sasaran Misi Pembangunan tahun 2025-2029 yang diturunkan dari misi dan sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045. Secara umum dapat diuraikan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali 2025-2029:

A. Tujuan dan Sasaran Misi 1

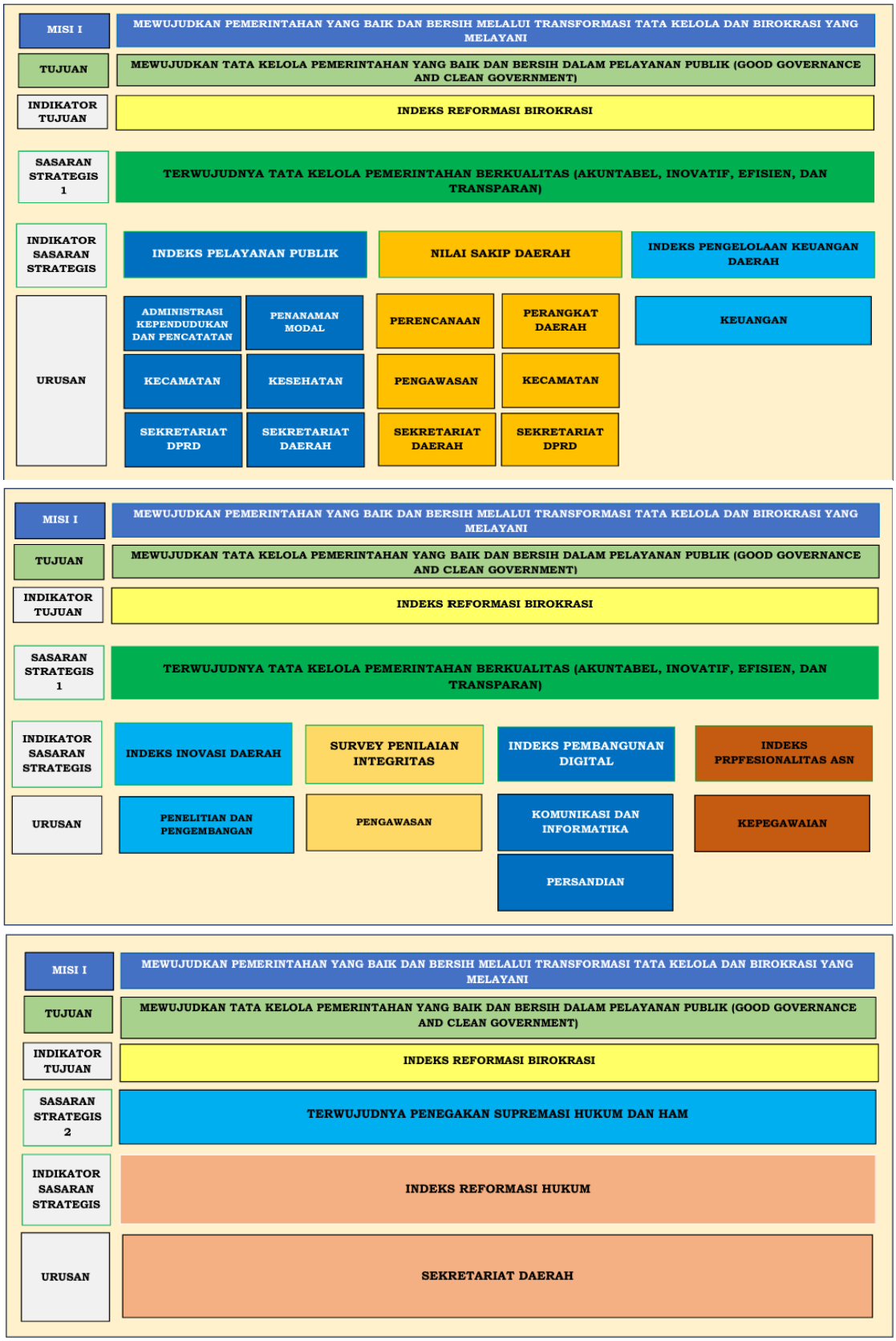
Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui transformasi birokrasi yang melayani adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan di Kabupaten Morowali. Tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Reformasi birokrasi di Kabupaten Morowali bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, agile, dan fluid melalui penyederhanaan struktur, penggunaan teknologi digital, dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Transformasi birokrasi harus berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, responsif, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk memastikan keberhasilan transformasi, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif, seperti audit kinerja dan penggunaan indikator yang jelas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 1 ini adalah:

1. **Tujuan:** mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam pelayanan publik (*Good Governance and Clean Government*), dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Tujuan tersebut memiliki **Sasaran**:
   a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan).
   b. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM.

Hasil penyusunan cascading dan perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis menurut misi pembangunan Kabupaten Morowali disajikan pada gambar dan tabel berikut.



Gambar 3.1

Logframe Tujuan dan 2 Sasaran Strategis pada Misi 1

Tabel 3.4

Rumusan Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan Indikatornya pada Misi 1

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 **Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani**	1.1 Mewujudkan tata Kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	BB	BB	BB	BB	
		1.1.2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	C	B	B	B	A	A	DUKCAPIL, DPM-PTSP, DINAS KESEHATAN, SEKRETARIAT DPRD, SETDA, KECAMATAN
			Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B	BB	BB	A	A	A	BAPPELITBANGDA, SETDA, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT, SEMUA OPD, KECAMATAN
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A	BPKAD, BPPD
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	48,18	50,59	53,12	55,78	58,57	59,15	BAPPELITBANGDA
			Survei Penilaian Integritas	Predikat	71,86	72,94	73,89	74,92	75,97	77,04	INSPEKTORAT
			Indeks Pembangunan Digital	Indeks	4,99	5,00	5,01	5,02	5,03	5,04	KOMINFO
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68,11	69,81	71,56	73,35	75,18	77,06	BKPSDM
		1.1.2 Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,40	87,62	87,84	88,06	88,28	88,50	SETDA, SEKRETARIAT DPRD

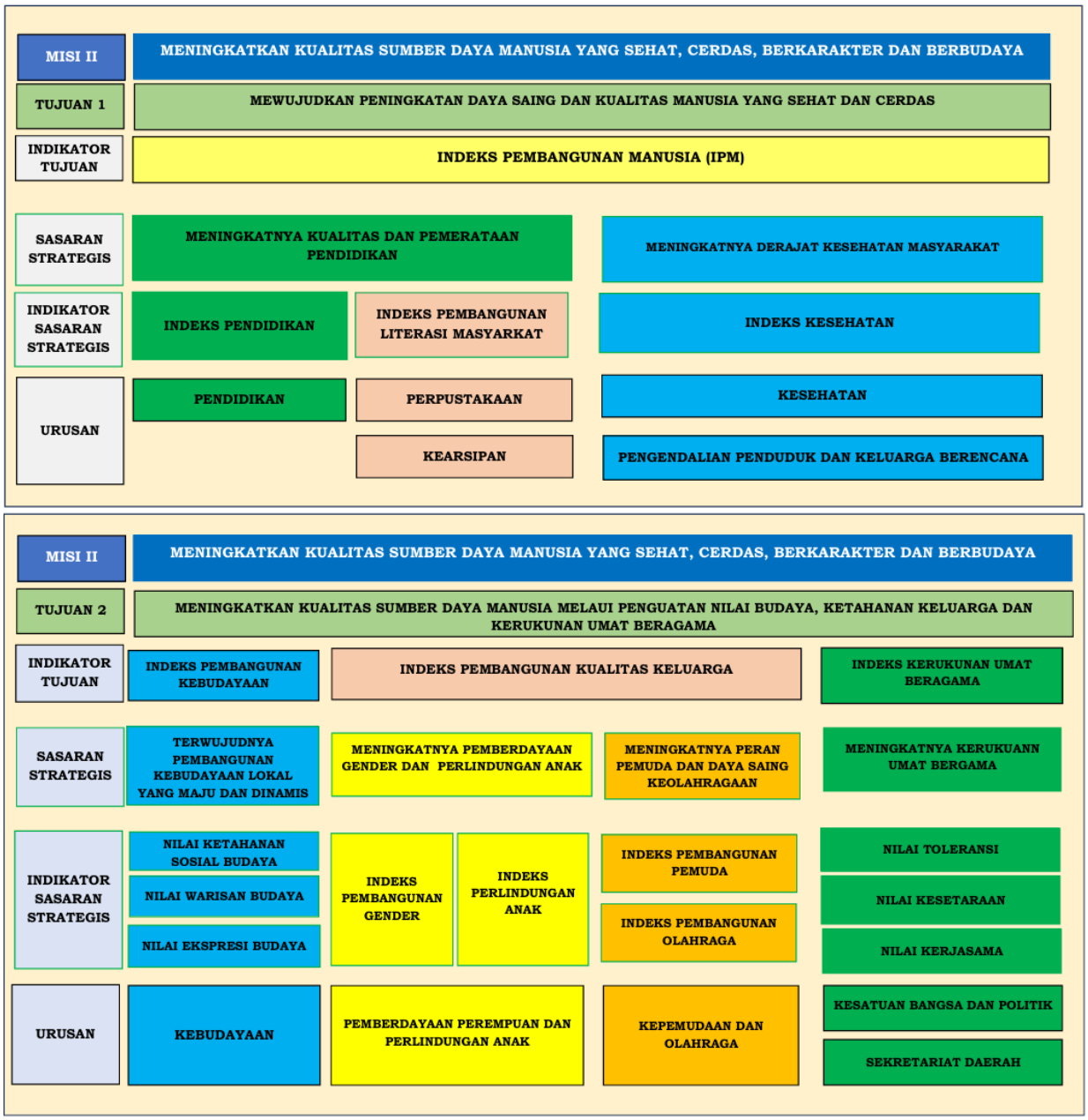
B. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter dan berbudaya.

Misi pembangunan 2 Kabupaten Morowali bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, kompeten, dan sehat secara fisik, serta memiliki karakter kuat dan menjunjung tinggi budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Morowali berkomitmen untuk mencapai tujuan ini melalui pendidikan inklusif, program kesehatan komprehensif, pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Program unggulan seperti Pendidikan Plus (+) dan Kesehatan Plus (+) fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, perbaikan infrastruktur sekolah, penyuluhan gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan berkala, dan peningkatan fasilitas kesehatan yang menjangkau daerah terpencil. Dengan pendekatan ini, diharapkan generasi muda Morowali siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 2 ini adalah:

1. **Tujuan 1:** Mewujudkan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter, dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
   Tujuan 1 memiliki **sasaran strategis**:
   a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan.
   b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2. **Tujuan 2:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan nilai budaya, ketahanan keluarga, dan kerukunan umat beragama.
   Tujuan tersebut memiliki **sasaran strategis**:
   a. Terwujudnya pembangunan kebudayaan lokal yang maju dan dinamis.
   b. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak.
   c. Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan.
   d. Meningkatnya kerukunan umat beragama.



Gambar 3.1

Logframe Tujuan 1 dan 2 serta Sasaran Strategis pada Misi 2

Tabel 3.5
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 2

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter dan berbudaya**	2.1. Mewujudkan Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Manusia Yang Sehat dan Cerdas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,75 - 73.00	74,5 - 75	75,5 - 76	76,5 - 77	77,5 - 78	78,5 - 80	
		2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	68,46	69,83	71,23	72,65	74,10	75,59	DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	59,88	60,78	61,57	62,43	63,31	64,20	
		2.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,79	0,81	0,822	0,838	0,855	0,872	DINAS KESEHATAN
	2.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melaui Penguatan Nilai Budaya, Ketahanan Keluarga dan Kerukunan Umat Beragama		Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,74	48,74	49,47	50,21	50,97	51,73	52,51	
		2.2.1 Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan Lokal Yang Maju dan Dinamis	Nilai Ketahanan Sosial Budaya								DINAS PENDIDIKAN
			Nilai Warisan Budaya								
			Nilai Ekspresi Budaya								
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga								
		2.2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	0,55	0,60	0,64	0,70	0,74	0,78	Dinas PMDP3A
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	79,14	79,44	79,74	80,04	80,34	80,64	
		2.2.3 Meningkatnya Peran Pemuda dan Daya Saing Keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	68,01	69,03	70,06	71,11	72,18	73,26	DISPORA
			Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks							
			Indeks Kerukunan Umat Beragama		57,75	60,64	63,67	66,85	70,20	73,71	
		2.2.4 Meningkatnya Kerukuann Umat Beragama	Nilai Toleransi	Niali							Sekretariat Daerah, Kesbangpol
			Nilai Kesetaraan	Niali							
			Nilai Kerjasama	Niali							

C. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi 3: Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan

Misi meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang inklusif, seperti sarana dan prasarana, di Kabupaten Morowali memiliki makna penting dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan yang berkelanjutan. Adapun infrastruktur dasar utama yang diperlukan adalah infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi (perhubungan) darat dan laut, komunikasi dan informasi, infrastruktur pertanian, perikanan, pariwisata, energi listrik dan air serta sosial budaya, olahraga dan kepemudaan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, akan tercipta konektivitas yang lebih baik, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih merata. Di wilayah kepulauan Kabupaten Morowali, pembangunan infrastruktur inklusif seperti pelabuhan dan dermaga (umum dan perikanan) yang dilengkapi fasilitas aksesibilitas, transportasi laut yang ramah disabilitas, jaringan telekomunikasi yang merata, sumber energi terbarukan, serta fasilitas kesehatan yang mudah diakses, sangat penting untuk mendukung pemerataan pembangunan. Pelabuhan dengan ramp dan lift, kapal feri dengan kursi roda dan toilet yang dapat diakses, serta peningkatan jaringan internet dan telekomunikasi akan memastikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan. Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya atau angin dan klinik dengan fasilitas aksesibilitas akan menyediakan sumber energi yang berkelanjutan dan layanan kesehatan yang menjangkau daerah terpencil. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ini akan mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Kabupaten Morowali.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 3 ini adalah:

1. **Tujuan pembangunan adalah:** meningkatkan kualitas dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung akselerasi pembangunan wilayah yang adil dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan adalah Indeks Infrastruktur Daerah.
2. Tujuan tersebut memiliki **sasaran strategis**:
   a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar.
   b. Meningkatnya ketersediaan dan konektivitas jaringan transportasi darat dan laut.



Gambar 3.2
Logframe Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

Tabel 3.6
Rumusan Tujuan, 2 Sasaran dan Indikator pada Misi 3

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 Memajukan (Meningkatkan penyediaan) sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan												
	3.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Yang Adil dan Berkelanjutan			Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	74,00	77,00	79,40	82,00	84,80	87,40	
		3.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Dasar	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks							Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		3.1.2	Meningkatnya Ketersediaan dan Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Laut	Rasio Konektifitas	Rasio	6,31	6,38	6,46	6,52	6,59	6,66	Dinas Perhubungan

D. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi 4: Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan.

Misi meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Morowali melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumberdaya alam lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti lahan pertanian yang subur, sumber daya laut yang melimpah, dan keindahan alam yang menarik wisatawan, serta mendorong inovasi dalam usaha ekonomi kreatif, masyarakat dapat memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik. Pengembangan sektor-sektor ini akan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan secara holistik dan inklusif.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 4 ini adalah:

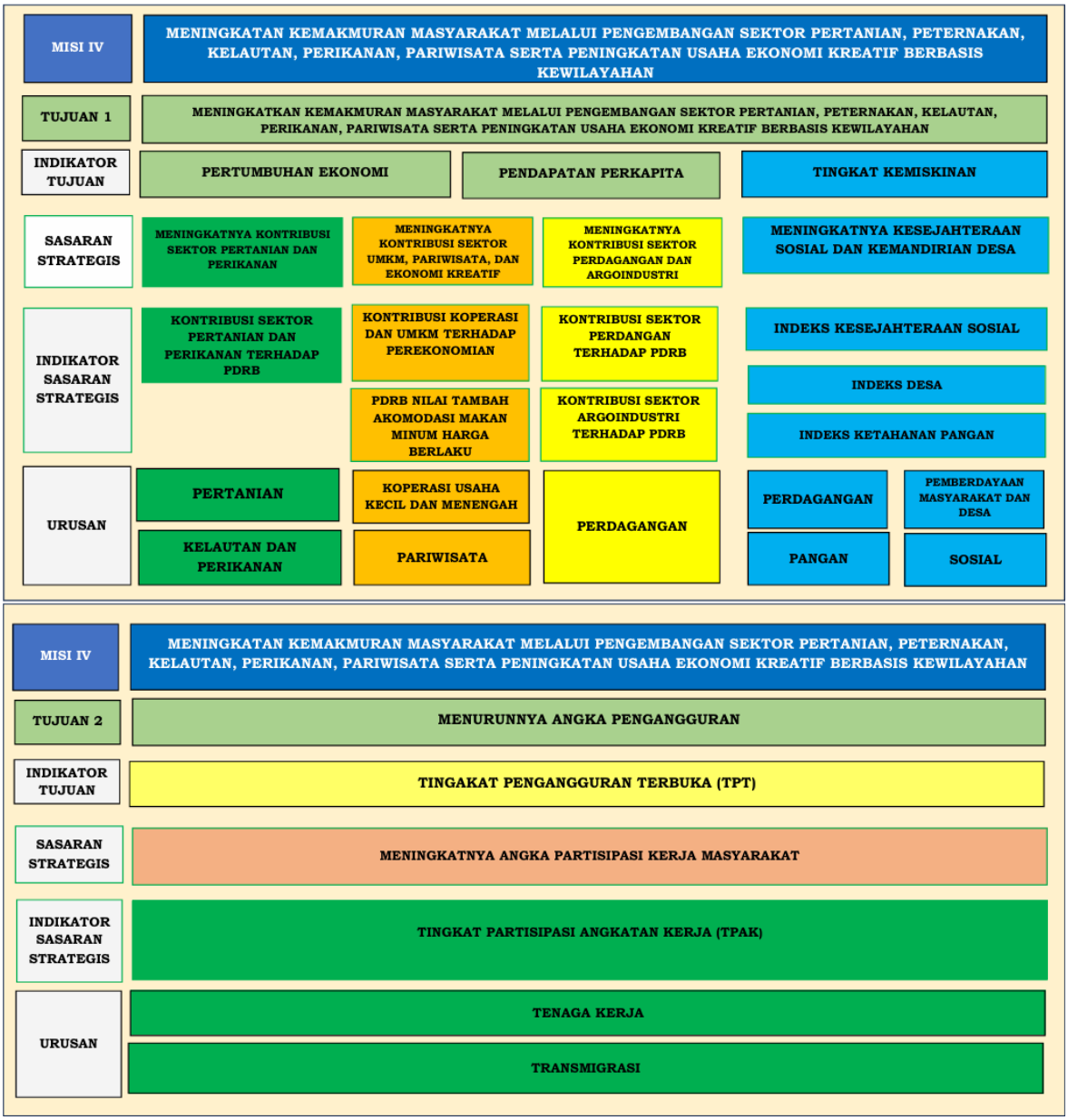
1. **Tujuan 1** pembangunan pada misi 4 adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta ekonomi Usaha Kreatif berbasis Kewilayahan. Tujuan 1 memiliki indikator tujuan yakni pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan tingkat kemiskinan.

   Tujuan tersebut memiliki **sasaran strategis** yakni:

   a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan,
   b. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif,
   c. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan agroindustri.
   d. Meningkatnya kesejahteraan social dan kemandirian desa.

2. **Tujuan** 2 pembangunan pada misi 4 adalah untuk menurunkan angka pengangguran atau dengan kata lain memperluas lapangan kerja, dengan indikator tujuan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

   Adapun **sasaran strategis** dari tujuan tersebut adalah meningkatnya partisipasi angkatan kerja (TPAK).



Gambar 3.1
Logframe Tujuan 1 dan 2 serta Sasaran Strategis pada Misi 4

Tabel 3.7
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 4

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4. Meningkatkan (Kesejahteraan) kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan	4.1 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan		Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	12,99	14,00	14,41	14,82	15,25	15,70	
			Pendapatan Perkapita (ADHK)	Ribu (Rupiah)	570.117,47	615.726,87	664.985,02	718.183,82	775.638,52	837.689,61	
			Tingkat Kemiskinan	Persentase	11,35	11	9,98	9,28	8,63	8,02	
		4.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Persentase	0,83	0,85	0,86	0,88	0.90	0.90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan
		4.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian	Persentase	24,00	24,72	25,47	26,23	27,02	27,83	Dinas Koperasi dan UMKM, DISPORA
			PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	Persentase	55,75	56,59	57,33	58,13	58,94	59,77	
		4.1.3 Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan dan Agroindustri	Kontribusi sektor perdangangan terhadap PDRB	Persentase	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
			Kontribusi sektor agroindustri terhadap PDRB								
		4.1.4 Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kemandirian Desa	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	44,25	44,80	45,36	45,78	46,20	46,62	Dinas PMDP3A, Sosial, Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Perdagangan Dan Perindustrian
			Indeks Desa	Indeks	0,7286	0,7577	0,7881	0,8196	0,8524	0,8865	
			Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81,44	81,52	81,60	81,68	81,77	81,85	
	4.2 Menurunnya Angka Pengangguran		Tingakat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	2,55	2,50	2,43	2,36	2,29	2,2	
		4.2.1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kerja Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase	59,69	60,88	62,10	63,34	64,61	65,90	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah

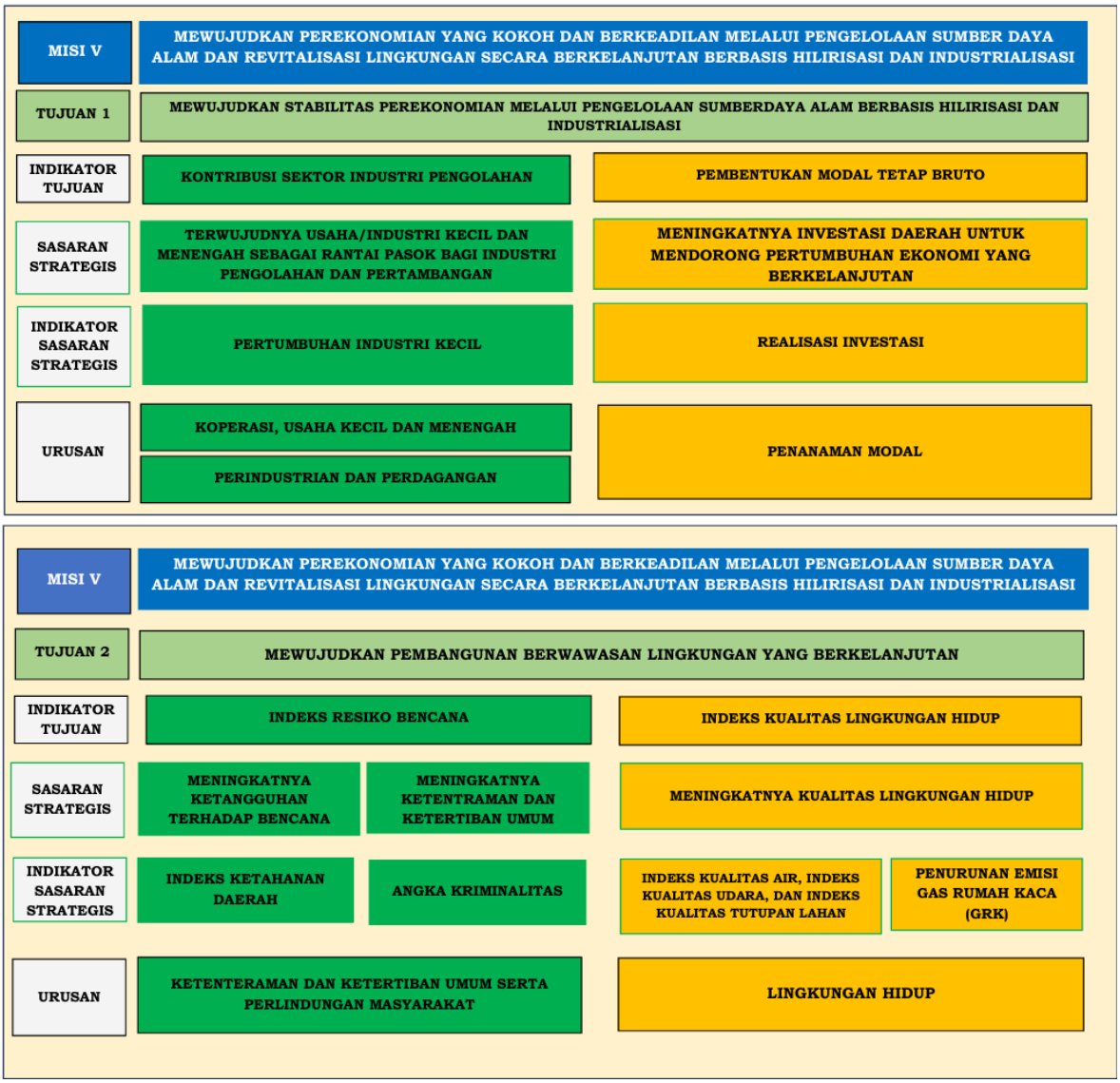
E. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Misi 5: Mewujudkan stabilitas perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.

Urgensi misi 5 mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan di Kabupaten Morowali melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi, produk lokal dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Revitalisasi lingkungan yang berkelanjutan akan menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dalam menjaga kualitas lingkungan, diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat. Strategi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Berdasarkan penjabaran misi sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali pada misi 5 ini adalah:

1. **Tujuan 1 adalah**: Mewujudkan Stabilitas Perekonomian melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis Hilirisasi dan Industrialisasi, dengan indikator tujuan yakni kontribusi sektor industri pengolahan dan pembentukan modal tetap bruto.
   Tujuan 1 pada misi 5 ini memiliki **sasaran strategis** yakni:
   a. Terwujudnya peran usah/industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok bagi industri pengolahan dan pertambangan;
   b. Meningkatnya Investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. **Tujuan 2** adalah: Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan, dengan indikator tujuan pembangunan yakni indeks resiko bencana dan indeks kualitas lingkungan hidup.
   Tujuan 2 tersebut memiliki **sasaran strategis** yakni:
   a. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;
   b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.
   c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 3.1

Logframe Tujuan 1 dan 2 serta Sasaran pada Misi 5

Tabel 3.8
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Misi 5

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi											
	5.1 Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Melalui Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Hilirisasi dan Industrialisasi		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase	21,43	21,86	22,30	22,74	23,20	23,66	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	Ribu (Rupiah)	40.301,79	41.107,83	41.929,98	42.768,58	43.623,95	44.496,43	
		5.1.1 Terwujudnya Usaha/Industri Kecil dan Menengah Sebagai Rantai Pasok Bagi Industri Pengolahan dan Pertambangan	Pertumbuhan Industri Kecil	Persentase	5,47	5,58	5,69	5,80	5,92	6,04	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		5.1.2 Meningkatnya Investasi Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Realisasi Investasi	Milyar	122.281.105,44	128.395.160,71	136.098.870,35	145.625.791,28	157.275.854,58	171.430.681,49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5.2 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	160,90	151,25	142,17	133,64	125,62	120,29	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,95	79,74	80,54	81,34	82,16	82,98	
		5.2.1 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,37	0,40	0,43	0,46	0,50	0,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamongpraja
			Angka Kriminalitas	Persentase	19,00-17,50	17,50-16,00	16,00-13,50	13,50-12,00	12,00-10,50	10,50-9,00	
		5.2.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Persentase	66,97	69,64	72,43	75,33	78,34	81,47	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	Persentase	83,59	83,71	83,84	83,96	84,09	84,21	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persentase	92,79	92,99	93,18	93,38	93,58	93,77	
			Penurunan Emis Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase	18,49	25,75	32,42	38,67	44,26	49,21	

3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyatakan bahwa perumusan strategi dalam RPJMD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk emncapai tujuan dan sasaran RPJMD.. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Rumusan strategi akan dijadikan acuan dalam mengimplementasikan sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Morowali dalam kurun waktu lima tahun kedepan mengacu pada prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang diatur dalam arah kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu *economically feasible, socially acceptable dan environmentally sustainable*.

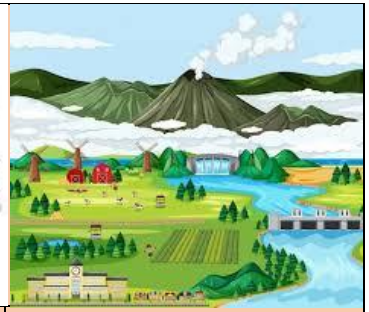
3.4.1 Penahapan Pembangunan

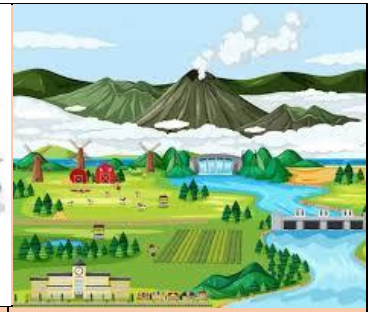
Sebelum perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Morowali, perlu dirumuskan fokus pembangunan pada setiap tahun pada periode 2025-2029. Penahapan fokus pembangunan didasarkan pada focus pembangunan pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Morowali, dan visi misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali periode 2025-2029 serta permasalahan dan urgensi kondisi pembangunan Kabupaten Morowali. Penahapan pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahunnya.

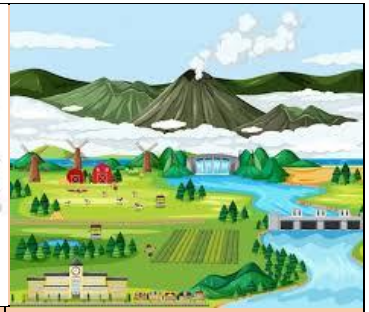
Tahapan pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini.

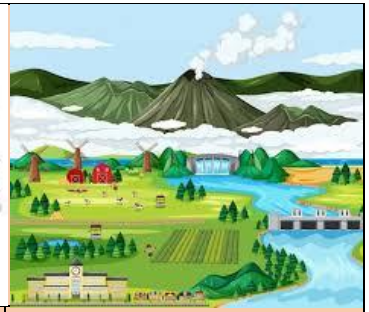
Tabel 3.9
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

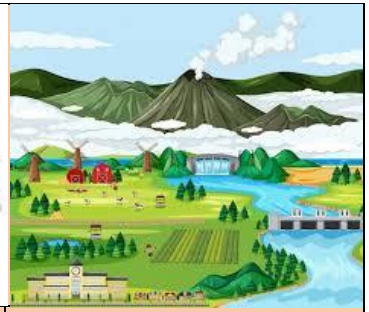
Bidang/Urusan Pembangunan	 TAHAP I (2025)	 TAHAP II (2026)	 TAHAP III (2027)	 TAHAP IV (2028)	 TAHAP V (2029)
Reformasi Birokrasi	Penguatan integritas aparatur sipil dan kepemimpinan Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil	Peningkatan kapasitas SDM aparat dan Masyarakat Peningkatan pemahaman regulasi dan aspek hukum bagi aparat dan masyarakat	Transformasi digital dan transparansi Kolaborasi dan partisipasi publik	Peningkatan Pelayanan publik dan pengawasan, serta tata kelola keuangan	Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan
Pendidikan	Penataan Sumberdaya Manusia Pendidik (Guru) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan wilayah kecamatan. Penambahan prasarana dan sarana kelas pada wilayah yang memiliki	Peningkatan Sumberdaya Manusia Pendidik (Guru) dan penyediaan di daerah tugas. Penambahan prasarana dan sarana kelas pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.	Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Pendidik dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan wilayah kecamatan. Pemantapan prasarana dan sarana kelas pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.	Perbaikan kesejahteraan Sumberdaya Manusia Pendidik dan tenaga pendidikan distribusi yang merata sesuai kebutuhan wilayah kecamatan. Pemeliharaan prasarana dan sarana kelas pada wilayah	Peningkatan kesejahteraan Sumberdaya Manusia Pendidik dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan wilayah kecamatan. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kelas.

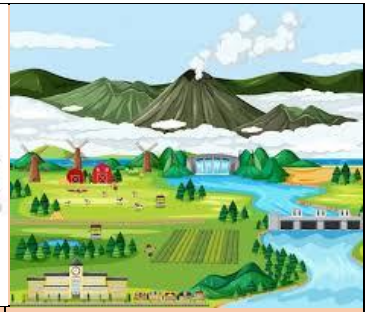
Bidang/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2025)	**TAHAP II (2026)**	**TAHAP III (2027)**	**TAHAP IV (2028)**	**TAHAP V (2029)**
	keterbatasan fasilitas pendidikan.			yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan.	
Kesehatan	Penataan Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan. Pemenuhan Prasarana dan sarana kesehatan guna mempermudah akses pelayanan kesehatan	Peningkatan skill Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan. Pemenuhan ketersediaan Prasarana dan sarana kesehatan guna mempermudah akses pelayanan kesehatan.	Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan. Peningkatan kualitas Prasarana dan sarana kesehatan guna mempermudah akses pelayanan kesehatan	Perbaikan kesejahteraan Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan. Pemantapan Prasarana dan sarana kesehatan guna mempermudah akses pelayanan kesehatan	Peningkatan kesejahteraan Sumberdaya Manusia kesehatan (Dokter dan Tenaga Kesehatan) dan distribusi yang merata sesuai kebutuhan tiap wilayah kecamatan. Pemenuhan Prasarana dan sarana kesehatan guna mempermudah akses pelayanan kesehatan
Pertanian	Identifikasi dan pemetaan lahan pertanian potensial untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi dan kedelai	Pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura.	Diversifikasi produk pertanian dengan pengembangan tanaman biofarmaka dan buah-buahan.	Pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Peningkatan ekspor produk pertanian unggulan Pengembangan sistem informasi pertanian

Bidang/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2025)	**TAHAP II (2026)**	**TAHAP III (2027)**	**TAHAP IV (2028)**	**TAHAP V (2029)**
	berdasarkan potensi kawasan daratan dan kepulauan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petani dalam teknik pertanian modern dan ramah lingkungan. Penyediaan sarana pertanian berbasis mekanisasi pertanian	Pembangunan fasilitas irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian tanaman pangan Pengembangan fasilitas penunjang panen dan pascapanen tanaman pangan, fasiltas penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan ketersediaan pangan melalui partisipasi anggota rumah tangga dan pemanfaatan pekarangan	Peningkatan akses pasar untuk produk pertanian melalui kerjasama dengan koperasi dan perusahaan Pengembangan ketersediaan pangan melalui partisipasi anggota rumah tangga dan pemanfaatan pekarangan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian Pengembangan ketersediaan pangan melalui partisipasi anggota rumah tangga dan pemanfaatan pekarangan	untuk mendukung keputusan petani.
Perikanan	• Pemetaan wilayah perikanan budidaya dan tangkap	• Pengembangan teknologi budidaya perikanan yang lebih efisien	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan melalui perikanan	Pengembangan produk olahan perikanan	Peningkatan ekspor produk perikanan

Bidang/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2025)	**TAHAP II (2026)**	**TAHAP III (2027)**	**TAHAP IV (2028)**	**TAHAP V (2029)**
	• Pengembangan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan, pabrik es dan *cold storage* berbasis BUMDES/Koperasi • Peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan bantuan teknis	• Pengembangan teknologi penangkapan ikan kapasitas besar dan sesuai dengan kapasitas nelayan. • Pengembangan pasar dan jaringan distribusi hasil perikanan	budidaya dan perikanan tangkap Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan	untuk pasar lokal dan ekspor Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan perikanan	Pengembangan sistem informasi perikanan untuk mendukung keputusan nelayan
Pariwisata	Promosi dan pengembangan destinasi wisata utama berbasis alam dan laut seperti Kepulauan Sombori, pasir putih Tangofa dan bahoumumpa, air terjun Pofua'a Bente, dan Pulau Dua Laut. Peningkatan aksesibilitas ke lokasi	Pengembangan fasilitas wisata seperti penginapan/*cottage*, restoran, dan pusat informasi. Pelatihan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata dan pelayanan wisatawan Pemantapan akses jalan ke lokasi wisata	Promosi internasional destinasi wisata Morowali Peningkatan keamanan dan kebersihan di lokasi wisata Pengembangan produk wisata melalui Integrasi wisata alam dengan wisata budaya	Pengembangan wisata budaya dan sejarah Peningkatan fasilitas kesehatan dan keselamatan di lokasi wisata Rehabilitas sumberdaya kawasan wisata alam yang mengalami degradasi habitat seperti	Pengembangan wisata alam dan ekowisata. Peningkatan promosi wisata Morowali di tingkat nasional dan internasional

Bidang/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2025)	**TAHAP II (2026)**	**TAHAP III (2027)**	**TAHAP IV (2028)**	**TAHAP V (2029)**
	wisata dengan pembangunan jalan dan fasilitas transportasi			terumbu karang, mangrove, lamun dan hutan di sekitar kawasan wisata air terjun.	
Industri dan Pertambangan	Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendorong kemitraan IKM di Kawasan Industri. Koordinasi dan fasilitasi dalam mendukung kebijakan rehabilitasi lahan eks pertambangan koordinasi dan fasilitasi upaya dalam rangka pengawasan terhadap aktivitas tambang untuk	Penyediaan SDM lokal bagi pekerja tambang sesuai kebutuhan perusahaan Fasilitas triparti dalam peningkatan kesejahteraan buruh tambang. Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan prasarana persampahan di kawasan tambang	Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang melalui program CSR Peningkatan rehabilitasi lahan bekas tambang menjadi kawasan yang produktif	Peningkatan efisiensi dan produktivitas tambang Pemanfaatan teknologi pengolahan nikel yang lebih ramah lingkungan	Peningkatan kontribusi sektor tambang nikel terhadap PDRB Morowali Keberlanjutan pemanfaatan teknologi pengolahan nikel yang lebih efisien dan ramah lingkungan Pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi kawasan yang produktif

Bidang/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2025)	**TAHAP II (2026)**	**TAHAP III (2027)**	**TAHAP IV (2028)**	**TAHAP V (2029)**
	mengurangi dampak lingkungan.				
Infrastruktur Perhubungan	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur perhubungan darat dan laut guna memperlancar alur distribusi barang dari daratan ke kepulauan dan menurunkan harga barang di wilayah pulau.	Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur perhubungan dari daratan ke kepulauan Penyediaan sumber energi kelistrikan di daerah kepulauan	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur perhubungan darat dan laut guna memperlancar alur distribusi barang dari daratan ke kepulauan dan menurunkan harga barang di wilayah pulau.	Peningkatan dan pemerataan kapasitas perhubungan darat dan laut guna memperlancar alur distribusi barang dari daratan ke kepulauan dan menurunkan harga barang di wilayah pulau. Peningkatan sumber energi kelistrikan di daratan dan kepulauan	Pemeliharaan dan pemantapan Infrastruktur perhubungan darat dan laut guna memperlancar alur distribusi barang dari daratan ke kepulauan dan menurunkan harga barang di wilayah pulau.
Infrastruktur Dasar	Penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi guna memperlancar informasi dan pelayanan pendidikan,	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komunikasi guna memperlancar informasi dan pelayanan pendidikan,	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komunikasi guna memperlancar informasi dan pelayanan pendidikan,	Peningkatan dan pemerataan kapasitas jaringan komunikasi guna memperlancar informasi dan pelayanan pendidikan,	Pemeliharaan dan Pemantapan infrastruktur jaringan komunikasi guna memperlancar informasi dan pelayanan pendidikan,

Bidang/Urusan Pembangunan					
	TAHAP I (2025)	**TAHAP II (2026)**	**TAHAP III (2027)**	**TAHAP IV (2028)**	**TAHAP V (2029)**
	kesehatan dan umum lainnya.	kesehatan dan umum lainnya.	kesehatan dan umum lainnya.	kesehatan dan umum lainnya.	kesehatan dan umum lainnya.
Infrastruktur Olahraga, Seni dan Budaya	Pemetaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya Fasilitasi pengembangan skill dan fasilitas olahraga, seni dan budaya guna peningkatan prestasi	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya Fasilitasi pengembangan skill dan fasilitas olahraga, seni dan budaya guna peningkatan prestasi	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya Fasilitasi pengembangan skill dan fasilitas olahraga, seni dan budaya guna peningkatan prestasi	pemeliharaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya Pengembangan even olahraga, seni dan budaya skala regional dan nasional	pemeliharaan infrastruktur kepemudaan dan olahraga, seni dan budaya Pengembangan even olahraga, seni dan budaya skala nasional dan internasional
Lingkungan	Koordinasi dengan provinsi dan nasional dalam penyusunan regulasi daerah yang spesifik Pemanfaatan teknologi dan inovasi serta infrastruktur lingkungan	Penguatan kapasitas dan sumberdaya antara lain optimalisasi anggaran dan sumberdaya manusia	Kolaborasi multipihak dalam program pelestarian lingkungan Edukasi dan partisipasi publik dalam kampanye kesadaran lingkungan.	Mengoptimalkan pelaksanaan dokumen AMDAL oleh pelaku industri yang memiliki dampak pada lingkungan	Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan lingkungan

Arah kebijakan pada tahun pertama ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas IKM-UMKM dan sumber daya pangan pertanian serta perikanan, memperkuat pilar pertumbuhan hilirisasi industri pengolahan, dan mengoptimalkan permintaan produk industri pengolahan berbasis industri pertambangan hijau. Kabupaten Morowali diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional. Kebijakan ini juga mencakup penataan kawasan industri strategis nasional, penataan pola ruang dan pemanfaatan ruang, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang didukung oleh tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan mengoptimalkan digitalisasi pelayanan pemerintahan daerah serta percepatan reformasi birokrasi yang profesional dan melayani.

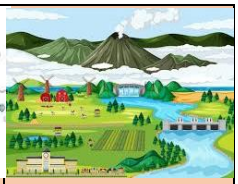
Untuk mewujudkan visi Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan perlu ditetapkan langkah-langkah dan upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang jelas serta terarah hingga Tahun 2029. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Morowali mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dengan efektif dan efisien.

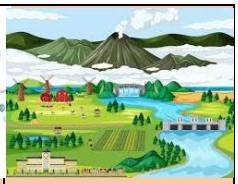
Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tahapan RPJPD Kabupaten Morowali Tahap ke- Satu. RPJPD kesatu ditujukan untuk mencapai Morowali Juara (Maju, Mandiri dan berkeadilan) sehingga tingkat ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan mineral yang terbatas potensinya dapat direduksi dengan mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata. Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disebutkan bahwa pada tahap/periode pertama RPJPD, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Penguatan modal dasar pembangunan dilakukan dengan mengarahkan seluruh sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata, dengan fokus pada hilirisasi industri dan daya saing ekspor hasil hilirisasi nikel yang didukung oleh usaha-usaha rumah tangga (home industry) seperti IKM dan UMKM. Kebijakan ini juga mendorong ekonomi dan investasi hijau, serta mempersiapkan ekonomi daerah pasca tambang secara dini. Selain itu, kebijakan ini mencakup perbaikan dan reklamasi lingkungan hidup di wilayah eks tambang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan sosial dasar, percepatan penyelesaian kemiskinan dan penghapusan kelaparan, serta menciptakan pertumbuhan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

3.4.2 Lokus Pembangunan Kabupaten Morowali

Penyajian lokus pembangunan untuk Kabupaten Morowali berdasarkan kecamatan dan wilayah pengembangan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan perhatian yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifiknya. Dengan mengelompokkan lokus pembangunan berdasarkan kecamatan, pemerintah dapat fokus pada isu-isu lokal yang unik dan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, penyajian berdasarkan wilayah pengembangan memungkinkan identifikasi potensi dan tantangan yang lebih luas, seperti pengembangan kawasan industri di Bahodopi. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah untuk memastikan bahwa setiap wilayah dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. LOkus pembangunan Kabupaten Morowali didasarkan pada pentahapan pembangunan, selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Kecamatan Lokus Pembangunan Kabupaten Morowali
Tahun 2025-2029

Aspek Pengembangan Lokus					
	TAHAP I (2025)	**TAHAP II (2026)**	**TAHAP III (2027)**	**TAHAP IV (2028)**	**TAHAP V (2029)**
Pengembangan kawasan Kota Kecil	Bahodopi dan Bungku Tengah		Pulau Paku Bungku Selatan		
Kemiskinan		Bungku Selatan, Menui Kepulauan	Bungku Barat	Witaponda	
Prasarana Pendidikan	Bahodopi dan Bungku Tengah	Bungku Selatan Menui Kep dan Sambori	Witaponda, Bungku Pesisir, Bungku Timur	Bumi Raya dan Bungku Barat	
SDM Pendidikan	Seluruh Kecamatan				
Prasarana Kesehatan	Bahodopi dan Bungku Tengah	Bungku Selatan Menui Kep dan Sambori	Witaponda, Bungku Pesisir, Bungku Timur	Bumi Raya dan Bungku Barat	
SDM Kesehatan	Seluruh Kecamatan				
Infrastruktur Perhubungan dan Komunikasi	Bungku Selatan dan Sambori	Menui Kep. dan Bungku Pesisir	Witaponda dan Bumi Raya	Bungku Timur dan Bungku Pesisir	Bungku Tengah dan Barat
Infrastruktur Energi dan Air	Witaponda, Bungku Barat, Bumi Raya, Bungku Tengah	Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Sambori	Bungku Timur, dan Bungku Pesisir	Bahodopi	
Jalan dan perumahan	Bahodopi dan Bungku Tengah	Menui Kepulaua, Bungku	Bumi Raya, Witaponda	Bungku Timur, dan Bungku Pesisir	

Aspek Pengembangan Lokus					
	TAHAP I (2025)	**TAHAP II (2026)**	**TAHAP III (2027)**	**TAHAP IV (2028)**	**TAHAP V (2029)**
		Selatan, Sambori			
Pertanian dan Peternakan	Bumi Raya	Witaponda, Bungku Barat	Bungku Pesisir, Sambori Bungku Selatan dan Menui	Bumi Raya, Witaponda dan Bungku Barat	Bumi Raya, Witaponda dan Bungku Barat
Perikanan	Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sambori	Bumi Raya, Witaponda, Bungku Pesisir	Bungku Tengah, Bungku Barat	Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sambori	Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sombori
Lingkungan dan RTH	Bungku Tengah, Bahodopi	Bungku Pesisir, Bungku Timur	Bungku Barat, Witaponda	Bungku Selatan Sambori, Menui Kepulauan	Bumi Raya,
Pariwisata		Bungku Pesisir dan Sambori	Bungku Tengah dan Bungku Selatan	Menui Kepulauan	
Ketenagakerjaan	Bahodopi dan Bungku Barat	Bungku Selatan dan Menui Kepulauan	Bungku Pesisir dan Bungku Timur	Witaponda dan Bumi Raya	
Perindustrian dan perdagangan	Bungku Tengah dan Bahodopi	Bungku Selatan dan Menui Kepulauan	Witaponda, Bumi Raya dan Bungku Barat	Bungku Pesisir dan Bungku Timur	

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, diperlukan adanya sebuah lembaga/badan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Perdesaan. Badan/lembaga tersebut disebut sebagai Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya,23 baik pada tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Sehubungan ketentuan tersebut, Bupati Morowali telah membentuk TKPKP Kabupaten Morowali sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/Kep.0264/DPMDP3A/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Morowali. Delineasi Kawasan Perdesaan sentra minapolitan salabangka di Kecamatan Bungku Selatan terdiri dari 16 (delapan) desa yang terletak di sebelah timur teluk tolo tepatnya berada di pesisir yang tepatnya berbatasan langsung sebelah selatan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kecamatan Menui Kepulauan. Keenam belas desa tersebut meliputi desa bakala, desa buajangka, desa kaleroang, desa padabale, desa paku, desa lakombulo, desa bungingkela, desa buton, desa koburu, desa jawi-jawi, desa pado-pado, desa umbele, desa umbele lama, desa polewali, desa

boelimau dan desa pulau dua. Luas Kawasan Perdesaan sentra minapolitan di Kecamatan Bungku Selatan mencakup 414,56 km2. Kedepan Wilayah Bahodopi akan menjelma menjadi wilayah yang bonafide yang berkembang pesat. Kerja sama kesepahaman pemerintah dan sejumlah para investasi di wilayah Morowali lebih dipererat, memperkokoh sinergitas sehingga Sumber daya Manusia, masyarakat mendapatkan hak sesuai. Mengarah pada subtansi pengembangan dan pesatnya warga maupun peningkatan perbaikan infrastruktur mulai dari unsur SDM sampai pada hadirnya Sejumlah perusahaan ternama, Desa Keurea, Watufia, Labota Bahomakmur Makarti, Tabo, Bahodopi, Dampala, Siumbatu dan Desa lele. Dua Desa yang menjadi titik empu Kordinat wilayah Investasi Asia, yakni Desa Bahodopi dan Keurea.

3.4.3 Arah Kebijakan

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Morowali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	
MISI I: Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi yang Melayani				
1.1.1.1.1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.1.1.1.1.1	penguatan pondasi reformasi birokrasi melalui penerapan area perubahan secara sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya Organisasi	Sekretariat Daerah Kesbangpol
		1.1.1.1.1.2	Penguatan Pondasi penerapan aplikasi yang telah beroperasi, mengonsolidasikan aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di internal maupun antar-instansi, serta interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Kominfo
1.1.1.1.2	Mewujudkan Aparatur pemerintahan yang berkualitas dan melayani	1.1.1.1.2.1	Penguatan SDM aparatur yang memeliki kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar	Sekretariat Daerah BKD
		1.1.1.1.2.2	Penguatan peran & Kualitas Pelayanan serta pemberdayaan Masyarakat OPD, Kecamatan dan Desa secara optimal dan berkelajutan	Sekretariat Daerah/BKD- PSDM
		1.1.1.1.2.3	Arah Kebijakan KLHS Hl. 253 : meletakkan fondasi penerapan standar pelayanan masyarakat di berbagai sektor.	Inspektorat Daerah
1.1.3.1.1	Mewujudkan pengawasan penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel	1.1.3.1.1.1	Peletakan Pondasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mengurangi resiko dan efektifitas pencegahan korupsi pada ASN dan pemda Morowali	SEKDA
		1.1.3.1.1.2	Penguatan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam pencegahan korupsi dan kerugian negara secara berkelanjutan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
			Optimalisasi penurunan persentase Korupsi di lingkungan pemerintah Morowali melalui pemetaan, pencegahan, dan mitigasi rawan korupsi	Sekda, Sekwan
1.1.4.1.1		1.1.4.1.1.1	Penguatana lokasi dana abadi Morowali, PAD dan Bagi Hasil Daerah sebagai pendanaan pembangunan daerah yang bersinergi dgn kebijakan	Dinas Pendapatan BPKAD

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	
	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		fiskal nasional menuju peningkatan kemandirian fiskal Morowali	
		1.1.4.1.1.2	Penguatan Meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara baik	
		1.1.4.1.1.3	Arah Kebijakan KLHS. Hal. 268 : •Penguatan Sistem Anti Korupsi; •Mengoptimalkan Penguatan Integritas Masyarakat, dan Penegakan Hukum; •Memperkuat kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah; •Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah	Sekretariat Daerah
MISI II: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berkarakter dan Berbudaya				
2.1.1.1.1	Mewujudkan pendidikan yang berkulitas dan berdaya saing	2.1.1.1.1.1	Penguatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi digital	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.1.1.1.1.2	Penguatan pondasi biaya pendidikan dan Optimalisasi kesetaraan pendidikan bagi penduduk putus sekolah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2.1.1.1.1.3	Arah Kebijakan KLHS hl. 105: Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; • Meningkatkankualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai-nilai dan karakter pribadi untuk lebih produktif; • Meningkatkankesetaraan kualitas layanan pendidikan; • Meningkatkanpemenuhan Anggaran Pendidikan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - (DPMD-P3A)
		2.1.1.1.1.4	Penguatan peran serta masyarakat dalam meningktakan kualitas pendidikan baik jalur formal maupun nonformal	PMD
		2.1.1.1.1.5	Meletakkan Pemerataan distribusi guru dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	Pendidikan dan Kebudayaan
		2.1.1.1.1.6	Penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter	Pendidikan Perpustakaan
2.1.1.1.1	Mewujudukan derajat kesehatan masyarakat yang	2.1.1.1.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan secara merata di seluruh wilayah	Kesehatan Rumah Sakit

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	
	optimal	2.1.1.1.1.2	Penguatan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan Rumah Sakit
		2.1.1.1.1.3	Arah Kebijakan KLHS Hal. 215: • Memperkuatakses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah; • Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; • Meningkatkan status gizi masyarakat; • Meningkatkan kesehatan ibu, anak; • PenguatanGerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); • Meningkatkanpemahaman masyarakat dan upaya pencegahan tentang penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan; • Memperkuataksesdanmutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah; • Penguatanpelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kesehatan Rumah Sakit Jamkesmas
		2.1.1.1.1.4	Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan, Gizi Ibu dan Anak dalam mengurangi angka stunting	PMD P2KB
		2.1.1.1.1.5	Arah Kebijakan KLHS Hl.216: • Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; • Meningkatkanstatusgizi masyarakat; • Meningkatkan kesehatan ibu, anak;	PMD Kecamatan dan Desa
		2.1.1.1.1.6	Penguatan sumber daya kesehatan serta tetap menjaga kualitas pelayanan yang keberlanjutan RS, Puskesmas dan Pustu untuk mengurangi angka kematian Ibu dan Anak	Kesehatan Rumah Sakit Puskesma
2.1.2.1.1	Mewujudukan pengarusutamaan gender yang optimal	2.1.2.1.1.1	Penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak	P3A
		2.1.2.1.1.2	Meletakkan pondasi kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan serta peran politik	

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
No.	Uraian	No.	Uraian	
		2.1.2.1.1.3	Penguatan kualitas SDM Morowali melalui optimalisasi peran dan fungsi keluarga	P2KB P3A
MISI 3; memajukan Sarana dan Prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan				
3.1.1.1.1	Mewujudkan perekonomian yang maju melalui Hilirisasi Industri SDA dan Investasi Hijau	3.1.1.1.1.1	Penguatan Produktivitas SDM IKM dan sumberdaya Pangan Pertanian, perikanan Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk Hilirisasi Industri pertambangan Perkuatan Pilar Pertumbuhan Industri Pengolahan Optimalisasi Permintaan Produk Industri Pengolahan	Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3.1.1.1.1.2	Arah Kebijakan KLHS Hl. 107: • Menciptakanpertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan;	Sosial
		3.1.1.1.1.3	investasi padat modal dan optimalisasi Industri smelter ramah lingkungan dan hilirisasi industri Peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok/nilai industri pertambangan nikel- pertanian/perikanan Investasi di sumber-sumber pertumbuhan baru: pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Perikanan dan Kelautan Tenaga Kerja Pora dan Pariwisata
		3.1.1.1.1.4	Penguatan pondasi nilai tambah Agro-fishery industry; Energi dan Mineral; Hilirisasi Industri Pengolahan, Pariwisata; serta Ekonomi Kreatif dan Digital berbasis IKM dan UKM	Pertanian Perikanan dan Kelautan Tenaga Kerja Pora dan Pariwisata
		3.1.1.1.1.5	Menumbuhkan kewirausahaan Mendorong Pembangunan infrastruktur sederhana perdesaan bersifat padat karya dan ekonomi sirkular Perbaikan iklim investasi hijau yang didukung iklim ketenagakerjaan kondusif dan hubungan industrial harmonis	Pertanian Perikanan dan Kelautan
		3.1.1.1.1.6	Arah Kebijakan KLHS hal. 231: • Peningkatan produktivitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan; • Peningkatan AksesLayanan Keuangan bagi UMKM dan Kewirausahaan; • Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; • Peningkatan kualitas Destinasi Wisata melalui KEK Pariwisata	Tenaga Kerja Koperasi UMKM Pariwisata

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	
3.1.1.1.2	Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi serta ketahanan pangan masyarakat	3.1.1.1.2.1	Arah Kebijakan KLHS hl. 204: • Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar; • Peningkatan kualitas SDM; Peningkatan daya saing; • Pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		3.1.1.1.2.2	Penguatan partisipasi klpk. rentan dlm pasar kerja Pengembangan skema dan pemantapan perlindungan sosial bagi tenaga kerja Pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi Pencaker Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		3.1.1.1.2.3	Arah kebijakan KLHS hl.108: • Meningkatkanakseske pendidikan dan pelatihan vokasi dan relevansi keahlian tenaga kerja; • Meningkatkankeahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang kompleks dan bernilai tambah tinggi; • Menciptakanlapangan pekerjaan yang layak, inklusif, dan bernilai tambah tinggi;	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tenaga Kerja
		3.1.1.1.2.4	Penguatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memeliki kapasitas enterprenaur, optimalisasi jaminan kesejahteraan tenga kerja meletakan pondasi dalam Resilinsi TK terhadap perubahan permintaan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan Industri dan Hilirisasi Industri	Tenaga Kerja
		3.1.1.1.2.5	Melatakkan pondasi ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi unggulan lokal desa dalam pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja Didesa dan memperkuat ketahanan pangan	PMD Tenaga Kerja
		3.1.1.1.2.6	Peningkatan ketersediaan energi dan protein perkapita dan peningkatan populasi ternak; melalui pengembangan agribisnis pertanian tanaman pangan, pengembangan agribisnis peternakan dan pengembangan agribisnis perkebunan serta pengembangan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan segar.	Pertanian Peternakan dan Keswan Pangan

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	
MISI IV : Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan kelautan dan perikanan, pariwisata, serta meningkatkan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan,				
4.1.1.1.1	Mewujudkan infrastruktur wilayah Kecamatan yang merata	4.1.1.1.1.1	Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan wilayah hingga tingkat desa di Kabupaten Morowali. Menata Infrastruktur pusat/ kawasan industri yang didukung oleh sarana perhubungan yang baik guna menunjang mobilitas barang dan masyarakat seta aktivitas industri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perhubungan Kominfo
		4.1.1.1.1.2	Rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi RTH/lahan hijau dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kabupaten	
		4.1.1.1.1.3	Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di seluruh wilayah kecamatan dan wilayah terpencil guna optimalisasi akses jaringan internet	
		4.1.1.1.1.4	Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan melancarkan arus lalulintas di kawasan industri melalui fasilitasi saran parasarana perhubungan	
4.1.1.3.1	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	4.1.1.3.1.1	Optimalisasi konsumsi listrik masyarakat hingga pulau- pulau dan wilayah terpencil Memfasilitasi pengembangan klaster Industri pengolahan SDA dengan pembangkit listrik berbasis EBT yang ramah lingkungan	SETDA Perumahan dan Kawasan Permukiman PU-PR
		4.1.1.3.1.2	Arah Kebijakan KLHS Hl.105- 106: • Memperluasjangkauan pelayanan ketenagalistrikan; • Meningkatkankualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan	
		4.1.1.3.1.3	Optimalisasi penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas	
		4.1.1.3.1.4	Perbaikan dan Peningkatan Kondisi Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman pada air minum dan sanitasi layak	
		4.1.1.3.1.5	Arah Kebijakan KLHS hl. 205: • LayananSanitasiyang Berkelanjutan; • PeningkatanAksesterhadap Sanitasi Aman	
		4.1.1.3.1.6	• Peningkatanpencapaian akses air minum layak 100% dan akses air minum aman yang terus meningkat; • LayananSanitasiyang Berkelanjutan; • Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman; • Tata kelolaber kelanjutan sumber daya air terpadu;	

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
No.	**Uraian**	**No.**	**Uraian**	
			• Tatakelolaberkelanjutan untuk perlindungan dan restorasi sumber daya air; • Pelibatan para pihak termasuk masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.	
MISI V : Mewujudkan stabilitas perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi.				
5.1.1.1.1	Meningkatkan mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	5.1.1.1.1.1	Penguatan Pondasi kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan Industri rendah karbon	Dinas Lingkungan Hidup Daerah BPBD
		5.1.1.1.1.2	Arah Kebijakan KLHS hl. 107: • Peningkatankesiapsiagaandan kemampuan adaptasi bencana;	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		5.1.1.1.1.3	Penguatan Pondasi transisi ekonomi hijau Morowali pasca Tambang yang memprioritaskan pembangunan dan investasi rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan setara dengan eksplorasi pertambangan. penguatan peraturan daerah yang mewajibkan Industri Pertambangan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), termasuk pengembangan biofuel, pembangunan pembangkit listrik Non disel dan batubara utk mengurangi emisi GRK.	Dinas PU Daerah
		5.1.1.1.1.4	Arah Kebijakan KLHS RPJPD : Menyelaraskan tujuan dan target pengendalian perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten dengan target pembangunan TPB Provinsi Sulawesi tengah, nasional, sub- nasional dan internasional.	DLH
		5.1.1.1.1.5	Penguatan melaksanakan kewajiban reklamasi Industri sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan Menguatkan penerapan Regulasi kewajiban jaminan reklamasi bagi perusahaan pertambangan, yang ditempatkan pada pemda Morowali sebagai pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan pada wilayah pertambang mikro	SETDA DLH
		5.1.1.1.1.6	Arah Kebijakan KLHS Hl.253 : Penguatan upaya pengurangan, penanganan, daur ulang, dan penggunaan kembali limbah; Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis dalam pengelolaan sampah dan limbah; Mendorong meningkatnya produk lokal ramah lingkungan;	DLH

MISI/STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		OPD PENANGGUNG JAWAB
No.	Uraian	No.	Uraian	
5.1.1.1.2	Mewujudkan Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hijau yang Sirkular	5.1.1.1.2.1	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat Desa hingga Ibukota Kecamatan	DLH Badan Penanggulangan Bencana
		5.1.1.1.2.2	Optimalisasi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 yang aman	

3.4.4 Program Prioritas/Unggulan Daerah Tahun 2025-2029

Program/agenda prioritas/unggulan Bupati dan Wakil Bupati Morowali merupakan janji-janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Morowali pada saat kampanye yang mendukung terhadap pencapaian visi "IKLAS JUARA" dan 5 misi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Morowali memiliki beberapa program prioritas yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa program utama yang akan dijalankan menurut 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah:

1. Program prioritas yang menjadi *tagline* dalam Misi 1 guna mewujudkan transformasi tatakelola dan dan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah "IKLAS JUARA Integritas", merupakan program unggulan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur sipil, peningkatan pelayanan, dan sarana pelayanan masyarakat.
2. Program prioritas yang menjadi *tagline* dalam Misi 2 guna meningkatkan pelayanan pendidikan adalah "IKLAS JUARA Pendidikan", dan layanan kesehatan yakni "Jemput Sakit, Pulang Sehat", serta layanan untuk keluarga (Perempuan, anak dan pemuda), olahraga dan budaya yang harmoni yakni "IKLAS JUARA Berbudaya".
3. Program prioritas yang menjadi *tagline* dalam Misi 3 melalui peningkatan aksebilitas, konektivitas, mobilitas dan distribusi sumberdaya guna efisiensi pelayanan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah daratan dan kepulauan yakni "IKLAS JUARA Terang dan Terkoneksi".
4. Program prioritas yang menjadi *tagline* dalam Misi 4 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi pengelolaan sumberdaya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan parawisata local (Agrominawisata) menjadi usaha ekonomi kreatif yakni "IKLAS JUARA Produktif dan Mapan". Sementara program prioritas yang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan dilakukan adalah "Bansos IKLAS JUARA" dan "Berkah IKLAS JUARA".
5. Program prioritas dalam Misi 5 guna mewujudkan stabilitas perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi memiliki *Tagline* yakni "IKLAS JUARA Lingkungan Harmoni".

Program-program ini sangat penting karena tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Morowali. Adapun program prioritas/unggulan tersebut disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.12
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VISI : Terwujudnya Kabupaten Morowali Yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan						
MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Melayani	**TUJUAN 1.1 :** Mewujudkan tata Kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)			Indeks Reformasi Birokrasi	**IKLAS JUARA Integritas**	
		Sasaran 1.1.1 : Terwujudnya pemerintahan yang melayani, akuntabel, inovatif dan transparan	1. Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan Intesifikasi Pendapatan	1. Persentase Jumlah SPPT yang Tertagih	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	2. Persentase objek pajak yang ditetapkan berdasarkan potensi pajak 3. Persentase objek pajak yang tertagih 4. Persentase peningkatan potensi pajak 5. Persentase realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 6. rasio Pajak dan Restribusi Daerag terhdap total PAD 7. Persentase potensip PAD yang ditetapkan sebagai objek		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				penerimaan daerah		
			1. Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Indeks Opini BPK atas LKPD 2. Deviasi realisasi belanja terhadap Belanja total dalam APBD 3. Persentase Anggaran sisa terhdap total anggaran tahun sebelumnya 4. Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan 5. Rasio Belanja Urusan Pemerintah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				umum (dikurangi transfer expenditures) 6. Indeks Manajemen Pengelolaan Aset		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPELITBANGDA
			Meningkatnya Pelayanan Publik dan Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Perangkat Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Terselenggaranya kegiatan dan pembinaan di bidang keagamaan, sosial pemasyarakatan yang difasilitasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pandaftaran Penduduk	Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Izin yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas pengelolaam aplikasi informatika	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas KOMINFO
		Sasaran 1.1.2 : Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Indeks Reformasi Hukum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Hukum
		Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Profesionalitas dan Kesejahteraan ASN	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
		Sasaran 1.1.4 : Meningkatnya Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Survei Penilaian Integritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspekrtorat Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter dan berbudaya	**TUJUAN 2.1 :** Meningkatkan Kualitas Manusia melalui pemerataan penindidikan dan pelayanan kesehatan untuk semua			Indeks Pembangunan Manusia	**IKLAS JUARA Pendidikan (Cerdas Berkarakter)** **IKLAS JUARA Kesehatan ("Jemput Sakit, Pulang Sehat")** **IKLAS JUARA Berbudaya**	
		Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas dan pemerataan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Daerah
		Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
		Sasaran 2.1.3 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPMP3A

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Sasaran 2.1.4 : Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan kebudayaan	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan Daerah
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL
MISI 3 : Memajukan sarana dan prasarana inklusif dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan	**TUJUAN 3.1 :** Meningkatkan Kualitas dan pemerataan penyediaan Sarana dan Prasarana dalam mendukung akselerasi pembangunan			Indeks Infrastuktur Daerah	**IKLAS JUARA Terang dan Terkoneksi**	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar, serta konektivitas antar wilayah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas KOMINFO
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio Konektivitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningktanya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Ketersediaan Sarana, Informasi,	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Korodinasi dan Disiplin Angkutan Penyebrangan		
MISI 4 : Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan	**TUJUAN 4.1 :** Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis kewilayahan			Pertumbuhan Ekonomi	**IKLAS JUARA Produktif dan Mapan (Dapur Hidup Keluarga Iklas)** **Bansos IKLAS JUARA Perlindungan Sosial Nelayan (PESONA) Musim Pancaroba** **Berkah IKLAS JUARA**	
				Persentase Penduduk Miskin		
				Tingkat Pengangguran Terbuka		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pendapatan Perkapita		
				Inflasi		
				Indeks Daya Saing Daerah		
				Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		
		Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanhan Pangan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Presentase Pengembangan Infratruktur Pertanian /Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanhan Pangan
			Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi peikanan budi daya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan Daerah
			Skor Pola Pangan Harapan	Indeks Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanhan Pangan
			Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanhan Pangan
		Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kontribusi sektor UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang naik kelas	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya kapasitas ekositem pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kemandirian Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMP3A
		Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barangg Penting	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
MISI 5 : Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya alam dan revitalisasi lingkungan secara berkelanjutan berbasis hilirisasi dan industrialisasi	**TUJUAN 5.1 :** Mewujudkan stabilitas Perekonomian melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis hilirisasi dan industrialisasi			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	**IKLAS JUARA Lingkungan Harmoni**	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 5.1.1 : Terwujudnya peran industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok bagi industri pengolahan dan pertambangan	Meningkatnya kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Pertumbuhan Industri Kecil	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Pembentukan Modal Tetap Bruto	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Persentase PMDN yang mendapat fasilitas / insentif kemudahan penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
	TUJUAN 5.2 : Mewujudkan pembangunan berwawasan			Penurunan intensitas emisi GRK		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	lingkungan yang berkelanjutan					
				Ruang Terbuka Hijau		
		Sasaran 5.2.1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunya pencemaran dan /atau kerusakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHD
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani di Wilayah kab	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLHD
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayat	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLHD
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLHD
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Pelaku Usaha pemilik izin Lingkungan, Izin PPLH yang terawasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLHD
			Meningktanya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Persentase Kasus Aduan Lingkungan Yang Terselesaikan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3)	Proporsi Limbah B3 yang dikelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLHD
		Sasaran 5.2.2 : Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
		Sasaran 5.2.3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Tingkat Gangguan Trantibmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satpol PP

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan

Tabel 3.13
Sinkronisasi Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Jenis Program Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Unggulan Kabupaten Morowali 2025-2029	Jenis Program Unggulan Kabupaten Morowali
1. Berani Cerdas	1. Nambaso (Anak Bisa Sekolah) : Sekolah Gratis, Pemberian BOSDA, pemberian Biaya Prekerin dan Uji Kompetensi 2. Kuliah Gratis 3. Beasiswa Kuliah S1 bagi Mahasiswa Berprestasi 4. Beasiswa Bagi Guru dan ASN di Dalam dan Luar Negeri 5. Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA/SMK berbasis Digital 6. Pelatihan Vokasional Siap Kerja bagi Milenial Gen-Z 7. Sulteng Career Center.	**IKLAS JUARA Pendidikan (Cerdas Berkarakter)**	a. Peningkatan beasiswa + bagi pelajar SD, SMP, SMA, b. Peningkatan beasiswa + Mahasiswa, c. Peningkatan bantuan studi + bagi mahasiswa, d. Tindaklanjut MoU dengan berbagai perguruan tinggi – Khususnya Kampus UNTAD 2 Morowali (Peningkatan Status Kampus Morowali). e. Bus gratis Siswa Juara – Penyediaan dan Penambahan dan Pemanfaatan jumlah Bus Sekolah Gratis
2. Berani Sehat	- Integrasi layanan Kesehatan Bersama BPJS, berobat Gratis Menggunakan KTP - Penanganan Stunting	**IKLAS JUARA Kesehatan**	➢ Memfasilitasi MEDICAL CHEK UP JUARA kesehatan bagi masyarakat;

	- Makan Bergizi Gratis - Pemeriksaan Kesehatan Gratis - Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum UNDATA dan MADANI - Mendorong RS. Undata dan Madani menjadi RS Rujukan Bertaraf Internasional - Jaminan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Naseha Kami) - Integrasi Layanan Kesehatan dengan Rumah Sakit Lainnya di Kota Palu	**("Jemput Sakit, Pulang Sehat")**	➢ Bantuan biaya rujukan kelas 3 (Palu, Makassar, Kendari) ➢ Memberikan pembiayaan ambulance GRATIS pada pasien kelas 3 rujukan palu, Makassar dan Kendari ➢ Ambulance laut *GRATIS* bagi wilayah kepulauan ➢ Peningkatan jumlah unit Ambulance berbasis kewilayahan ➢ Mewajibkan Tenaga Kerja memiliki BPJS ketenagakerjaan untuk Menjamin jika terjadinya PHK. ➢ Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga yang mumpuni untuk peningkatan pelayanan kesehatan RS, Puskesmas dan Puskesmas pembantu. ➢ Pelayanan kesehatan --- pada 1 Puskesmas 1 dokter Spesialis, Perawat, bidan dan Apoteker. ➢ Menu Juara Gizi Seimbang GRATIS ---- Makanan 4 sehat 5 sempurna sekali seminggu bagi Anak Sekolah PAUD dan Wajib Belajar 9 Tahun (SD-SMP).
3. Berani Lancar	- Pembangunan 1.000 Km Jalan Desa untuk menjamin konektivitas antar wilayah, - Perbaikan Infrastruktur jalan Provinsi Kondisi Rusak Berat sepanjang 462 Km, - Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (Bypass) Tambu-Kasimbar; - Melaksanakan rekonstruksi dan pembangunan beberapa ruas jalan melalui paket Multi Year Contrac (MYC) yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara, Banggai, Donggala, Sigi, Poso, Toli toli, Buol, Tojo Una-Una dan Parigi	**IKLAS JUARA Terkoneksi**	• Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kewenangan Kabupaten khususnya ke wilayah Kecamatan Sombori Kepulauan, Bungku Selatan dan Bungku Pesisir, serta Menui Kepulauan. • Penyediaan Tambatan Perahu. • Fasilitasi pembangunan pelabuhan Kapal Fery (Lafeu-Bungku Selatan-Sambori-Menui). • Penyediaan air bersih.

	Moutong. - Pembangunan Kawasan Agropolitan Buol, Toli2, Donggala dan Parimo, - Pembangunan Jembatan Penghubung Bangkep – Banggai Laut, - Pembangunan Gawalise Internasional Stadium (GIS), Jaminan ketersediaan Air Bersih bagi desa-desa yang belum mempunyai Akses Air Bersih.		
4. Berani Menyala	- Jaminan Ketersediaan Jaringan Internet bagi 686 Desa yang masih termasuk dalam wilayah Blank Spot, - Jaminan Ketersediaan Akses Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Penerangan Jalan Umum bagi Daerah yang belum terjangkau, - Peningkatan kualitas Layanan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana Poso agar dapat menjamin ketersediaan Pasokan Listrik Sulawei Tengah	**IKLAS JUARA Terang**	• Peningkatan kapasitas terpasang listrik di Kecamatan Daratan • Peningkatan jaringan dan kapasitas serta meteran listrik bagi masyarakat kepulauan. • Bantuan listrik tenaga disel dan surya bagi masyarakat di Pulau-Pulau Kecil.
5. Berani Sejahtera	♣ Jaminan Harga Bahan Pokok murah dan stabil ♣ Menjamin kebutuhan dasar Masyarakat miskin melalui program pangan daerah (PANADA) ♣ Graduasi Masyarakat miskin melalui UEP Graduasi ♣ Revitalisasi Rutilahu ♣ Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan UMKM	**Bansos IKLAS JUARA**	▪ Pasar sembako murah bagi masyarakat miskin. ▪ Bansos musim pancaroba bagi masyarakat kepulauan. ▪ Bansos rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
6. Berani Berkah	- Sulteng Berjamaah - Sulteng Mengaji, - Insentif bagi Guru Mengaji, Marbot, Pendeta/Tokoh Agama dan Pemangku Adat serta	**Berkah IKLAS JUARA**	▪ Bantuan sosial bagi pengurus rumah ibadah, dan guru mengaji. ▪ Bantuan sosial bagi masyarakat miskin lansia dan penyandang disabilitas.

	- perbaikan sarana prasarana keagamaan - Penyetaraan Status Pesantren, Madrasah dan Sekolah Keagamaan		▪ Pajak (Subsidi PBB) bagi masayarakat miskin, ▪ Bantuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin, penyandang disabilitas dan Memiliki Potensi untuk Dikembangkan. ▪ Bantuan sosial pembangunan rumah ibadah.
7. Berani Makmur	- Program Petani Milenial - Modernisasi Alsintan, Bibit dan Pemberian Subsidi Pupuk - Program Resi Gudang - Bantuan Alat Tangkap Nelayan - Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan - Jaminan Harga Jual Tinggi - Pembangunan Sentra Pangan Berbasis Kawasan dan Masyarakat - Pembangunan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	**IKLAS JUARA Produktif dan Mapan**	• Pertanian Plus (+) Terintegrasi: - Baseline data petani Calon Petan Calon Lahan (CPCL) - Validasi Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) - Kemudahan permodalan bagi petani (angsuran perpanen) - Asuransi petani jika terjadi gagal panen (banjir, serangan hama, dan penyakit) - Kebutuhan pupuk bersubsidi (Permentan 67 Tahun 2016 : Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani). - Pengembangan Pengelolaan Pupuk Organik - Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan, - Bantuan dan penyediaan benih unggul - Pertanian terintgrasi (Padi - Ternak Sapi; Sawit Ternak Sapi) • Perikanan dan Kelautan Plus: - Memberdayakan masyarakat kepulauan melalui Budidaya Karamba Jaring (Apung dan Tancap) terintegrasi dengan Usaha Wisata. - Memfasilitas pengadaan alat tangkap dengan Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten Morowali hanya pemberdayaan nelayan (peranan dinas perikanan dengan bumdes dan perusda). - Pemberdayaan nelayan melalui bantuan rompon.

			- Sinergitas program perikanan tangkap provinsi dan kabupaten. - Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. - Pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. - Pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. - Fasilitasi penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bagi Nelayan (SPBN-Iklas Juara). • Menjaga Ketersediaan Gas Elpiji dengan Harga Terjangkau • Bantuan permodalan dan alat produksi bagi UMKM. • Bumdes/Koperasi Desa untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan, kerjasama dengan Perusda dalam Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perikanan. • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Buruh melalui Pelibatan Peran PEMDA dalam menjalin Hubungan dengan Industri secara Berkelanjutan
		IKLAS JUARA Lingkungan Harmoni	• Lahan marjinal diolah menjadi lahan produktif berbasis pewilayahan komoditas pertanian. • RTH merupakan Fasilitas publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, ketersediaan • UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah;

			• Revitalisasi Lingkungan melalui restorasi habitat, pengelolaan limbah, dan penghijauan. • Bank Sampah: "Nabung sampah, dapat uang". • Ketersediaan prasarana pengelolaan dan Transportasi Persampahan (kendaraan angkut sampah) untuk mengangkut sampah domestik/sampah rumah tangga.
8. Berani Harmoni	- Berani Wisata dengan Program Kunjungan Desa Wisata (Dewi) di Sulteng Pariwisata Partipatoris, Kabupaten Poso (Seribu Megalith dan Geopark), Kabupaten Tojo Una Una Kepulauan Togean sebagai destinasi Pariwisata - Pelestarian Bahasa Kaili dan daerah lainnya, Batik Bomba dan Potensi Adat Lokal Lainnya di Sulawesi Tengah, - Pelestarian Bahasa Daerahi dan Tenun Ikat Tradisonal Bomba dengan menggandeng UMKM, Berani Kreatif melalui Sulteng Creative Hub - Sentra Sarana Olahraga dan Budaya Setiap Kabupaten/Kota - Inkubasi UMKM (Pelatihan, Bantuan Modal Usaha dan Mempermudah Izin Usaha) Pennigkatan WUB sebanyak 20rb +- - Pemberdayaan Bumdes sebagai Sumber Ekonomi Desa, Berani Investasi lewat Program Sulteng Invesment Forum dan pemberian kemudahan bagi Investor - Dukungan pelaksanaan Koperasi Merah Putih.	**IKLAS JUARA Berbudaya dan Berprestasi**	▪ Pelestarian seni budaya masyarakat lokal ▪ Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, ekonomi daerah, pendampingan usaha, fasilitasi perizinan usaha, dan dukungan bagi usaha perempuan ▪ Pengembangan Wisata Alam (Wisata Bahari) dan Wisata Budaya ▪ Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. ▪ Pengembangan kepemudaan. ▪ Pengembangan atlit melalui usia dini, peningkatan kapasitas pelatih dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
Berani Berintegritas	♣ Tim Gaspoll (Gerakan Aksi Satset Pemerintah Optimal Layani Langsung) –	**IKLAS JUARA Integritas**	▪ Perbaikan Kesejahteraan ASN Melalui Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),

	Call Center, Siaga Laporan-Command Center ♣ Sistem Administrasi Layanan Publik Terintegrasi (Super Aps Si-Berani) dan Peningkatan Kualitas Penerapan SPBE ♣ Budaya Kerja Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif(Berani) ♣ Co Working Space (CWS) bagi ASN ♣ Bantuan Keuangan bagi Pemerintah Desa		▪ Transformasi pemerintahan untuk Perbaikan Capaian Evaluasi Penyenggaraan Pemerintahan Daerah, ▪ Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi ▪ Pajak (Subsidi PBB) bagi masayarakat miskin, ▪ Pajak (Subsidi PBB) bagi masayarakat miskin ▪ 1 Desa 1 Mobil ----- untuk Akselerasi pembangunan desa melalui bantuan keuangan khusus (Berdasarkan Grading). ▪ Pelayanan pembuatan KTP, KK, akte Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya berbasis kewilayahan ▪ 1 BPD 1 Motor, ▪ Pelayanan berbasis layanan 1 pintu untuk Morowali Juara (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perizinan lainnya)

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program pembangunan suatu daerah adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan dimulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Penetapan program dan rencana pendanaan sampai tahun 2030 ditujukan untuk upaya antisipasi dan menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sebagai pijakan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab kepala daerah yang terpilih pada periode 2030-2034.

Program perangkat daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk program penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Sub Program Perangkat juga menguraikan kerangka pendanaan pembangunan untuk membiayai program-program yang dikelompokkan sebagai program prioritas I, prioritas II, serta prioritas III. Penyajian program prioritas ini disertai dengan indikator kinerja, kondisi target capaian awal Perubahan RPJMD, serta capaian kinerja program dan kerangka pendanaan yang diarahkan guna pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali periode 2025-2029. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali untuk periode RPJMD 2025–2030 merinci besaran proyeksi Kapasitas Riil Keuangan yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan guna pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali. Besaran nilai Kapasitas Riil Keuangan sangat menentukan besaran anggaran untuk membiayai setiap program prioritas.

Indikasi Rencana Program pada Perubahan RPJMD Kabupaten Morowali untuk tahun 2021-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
			2023	2024	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						**662.626.518.402**		**714.787.600.064**		**772.057.783.150**		**851.231.668.303**		**939.165.616.348**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						**658.005.190.982**		**709.935.206.273**		**766.962.769.670**		**845.701.239.984**		**933.358.666.613**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	263.496.646.230	100	270.084.062.385	100	276.836.163.945	100	283.757.068.044	100	290.850.994.745	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar APS)	Persen	63,21	77,99	83,99	390.625.960.846	86,96	435.774.430.786	89,93	485.846.056.968	92,90	557.449.595.746	95,87	637.788.366.864	
	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar Dan Menengah APS)	Persen	96,19	98'77	100		100		100		100		100		
	Persentase anak Usia 7-18 tahun (Kesetaraan) yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar APS)	Persen	35,13	41,91	56,61		63,10		69,59		76,08		76,84		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase anak usia 4-13 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus(APS)	Persen	0	0	0		0		0		0		0		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM															
Meningkatnya Kualitas Kurikumum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	75	95	100	481.531.000	100	505.607.550	100	530.887.928	100	557.432.324	100	585.303.940	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN															
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendiidk dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Persen	70	85	100	3.401.052.907	100	3.571.105.552	100	3.749.660.829	100	3.937.143.871	100	4.134.001.064	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**4.621.327.420**		**4.852.393.791**		**5.095.013.481**		**5.530.428.319**		**5.806.949.735**	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN															
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	95	100	100	3.277.354.458	100	3.441.222.181	100	3.613.283.290	100	3.974.611.619	100	4.173.342.200	
PROGRAM PELESTARIAN DANPENGELOLAAN CAGAR BUDAYA															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	80	85	100	914.895.572	100	960.640.351	100	1.008.672.368	100	1.059.105.987	100	1.112.061.286	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak Benda yang Ditetapkan	Persen	75	80	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN															
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	0	0	0	429.077.390	0	450.531.260	0	473.057.822	0	496.710.714	0	521.546.249	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**552.754.010.645**		**591.020.342.731**		**640.922.236.181**		**707.352.011.218**		**709.534.136.008**	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**552.126.122.176**		**590.329.665.415**		**640.231.558.865**		**706.616.333.902**		**708.776.136.008**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	179.506.244.964	100	198.620.154.627	100	225.407.956.201	100	238.716.633.452	100	264.713.880.329	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Angka	129	235	230	371.848.676.942	225	390.441.110.789	220	413.078.502.665	215	466.039.600.450	200	442.112.255.680	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	7	5	4,4		4,3		4,2		4		3,9		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	6	6	33,37	554.000.000	47,27	581.700.000	61,18	581.700.000	75,08	596.700.000	100,00	600.000.000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Persen	51	53	58,16	117.200.270	60,07	581.700.000	61,91	581.700.000	63,69	631.700.000	100	675.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	100	100.000.000	100	105.000.000	100	581.700.000	100	631.700.000	100	675.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**627.888.469**		**690.677.316**		**690.677.316**		**735.677.316**		**758.000.000**	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															
Terkendalinya Pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2	2	2,00	174.985.962	2,00	192.484.558	2,00	192.484.558	2,00	203.484.558	2,00	224.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15 - 19)	Angka	25	41	58,3		55,4		52,6		50		42,5		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive (mCPR)*	Persen	72	67	70	252.902.507	72	278.192.758	75	278.192.758	75	290.192.758	75	300.000.000	
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	Persen	9	7	6,5		6,3		6		6		6		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	16	12	22,37	200.000.000	32,37	220.000.000	42,37	220.000.000	52,37	242.000.000	62,37	234.000.000	
Rumah Sakit Umum Daerah Morowali						**183.429.655.231**		**181.959.563.658**		**184.481.823.573**		**187.067.139.986**		**199.843.755.219**	**RSUD Morowali**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	175.638.385.751	100	181.959.563.658	100	184.481.823.573	100	187.067.139.986	100	191.647.922.265	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Angka	129	235	0	7.791.269.480	0	8.180.832.954	0	8.180.832.954	0	8.188.832.954	0	8.195.832.954	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	7	5	4,4		4,3		4,2		4		3,9		
Rumah Sakit Salabangkapaku						**40.277.292.272**		**41.898.479.130**		**42.610.870.410**		**43.365.671.472**		**44.732.390.618**	**Rumah Sakit Salabangkapaku**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	98	97	98	33.847.397.874	98	35.147.090.013	98	35.859.481.293	98	36.596.282.355	98	37.897.144.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Angka	0	0	0	6.044.044.398	0	6.346.246.618	0	6.346.246.618	0	6.352.246.618	0	6.380.246.618	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	6,72	4,61	4,4		4,3		4,2		4		3,9		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	30	35	50	385.850.000	50	405.142.500	50	405.142.500	55	417.142.500	60	455.000.000	
Puskesmas Ulunambo						**2.342.785.382**		**2.459.924.651**		**2.461.924.651**		**2.459.924.651**		**2.530.000.000**	**Puskesmas Ulunambo**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	699	0	0,00	2.342.785.382	0,00	2.459.924.651	0,00	2.461.924.651	0,00	2.473.924.651	0,00	2.530.000.000	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	8	6	5,05		3,79		2,84		1,26		0,00		
Puskesmas Kaleroang						**958.669.005**		**1.008.960.380**		**1.027.960.380**		**1.037.984.380**		**1.144.000.000**	**Puskesmas Kaleroang**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	0	0	0	938.057.505	0	984.960.380	0	1.003.960.380	0	1.013.960.380	0	1.120.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	5	4	3		2		1		0		0		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	Persen	NA	NA	70	20.611.500	80	24.000.000	90	24.000.000	95	24.024.000	100	24.000.000	
Puskesmas Kaleroang						**2.269.176.070**		**2.373.844.378**		**2.391.844.378**		**2.411.964.378**		**2.707.100.000**	**Puskesmas Kaleroang**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	568	0	0	2.258.804.170	0	2.371.744.378	0	2.389.744.378	0	2.409.744.378	0	2.705.000.000	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	3	3	3		2,8		2,5		2		1,5		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang di Berdayakan	Persen	85	88	90	10.371.900	92	2.100.000	95	2.100.000	98	2.220.000	100	2.100.000	
Puskesmas Bahodopi						**3.223.678.811**		**3.384.862.752**		**3.417.862.752**		**3.447.862.752**		**3.449.862.752**	**Puskesmas Bahodopi**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MASYARAKAT															
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	0	124	0	3.223.678.811	0	3.384.862.752	0	3.417.862.752	0	3.447.862.752	0	3.449.862.752	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	3	3	16		15		14		13		12		
Puskesmas Bahomotefe						**2.140.241.143**		**2.247.253.200**		**2.269.253.200**		**2.289.253.200**		**2.293.253.200**	**Puskesmas Bahomotefe**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	0	0	0	2.140.241.143	0	2.247.253.200	0	2.269.253.200	0	2.289.253.200	0	2.293.253.200	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	5	7	5.4		3.9		2,40		0,01		0		
Puskesmas Bungku						**3.102.395.269**		**3.266.871.707**		**3.298.871.707**		**3.328.871.707**		**3.330.871.707**	**Puskesmas Bungku**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	0	0	0	3.092.258.769	0	3.246.871.707	0	3.278.871.707	0	3.308.871.707	0	3.308.871.707	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	13	11	10		8		6		4		4		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang di Berdayakan	Persen	NA	NA	100	10.136.500	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	22.000.000	
Puskesmas Wosu						**2.204.801.536**		**2.318.568.881**		**2.330.568.881**		**2.350.568.881**		**2.345.568.881**	**Puskesmas Wosu**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	0	0	0	2.195.779.886	0	2.305.568.881	0	2.317.568.881	0	2.337.568.881	0	2.332.568.881	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	2	2	17,5		16,3		15,2		14,2		13,3		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang di Berdayakan	Persen	100	100	100	9.021.650	100	13.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	100	13.000.000	
Puskesmas Bahonsuai						**2.190.748.827**		**2.344.500.000**		**2.357.100.000**		**2.360.123.000**		**2.364.923.000**	**Puskesmas Bahonsuai**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
MASYARAKAT															
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	0	0	0	2.187.090.327	0	2.340.000.000	0	2.352.300.000	0	2.355.123.000	0	2.360.123.000	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	15	14	10		8		5		3		0		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang di Berdayakan	Persen	100	100	100	3.658.500	100	4.500.000	100	4.800.000	100	5.000.000	100	4.800.000	
Puskesmas Laantula Jaya						**2.577.605.385**		**2.700.500.000**		**2.727.500.000**		**2.754.500.000**		**2.757.500.000**	**Puskesmas Laantula Jaya**

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	295	639	0	2.577.605.385	0	2.700.500.000	0	2.727.500.000	0	2.754.500.000	0	2.757.500.000	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	2	1	2		1,8		1,5		1		0,5		
Puskesmas Tanjung Harapan						**2.404.928.109**		**3.010.000.000**		**3.023.000.000**		**3.053.000.000**		**3.054.000.000**	**Puskesmas Tanjung Harapan**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	0	1613	0	2.404.928.109	0	3.010.000.000	0	3.023.000.000	0	3.053.000.000	0	3.054.000.000	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	26	14	10		7		5		3		0		
Puskesmas Fonuasingko						**1.208.402.817**		**1.403.100.000**		**1.414.400.000**		**1.428.400.000**		**1.500.000.000**	**Puskesmas Fonuasingko**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	AKI	377	0	0	1.208.402.817	0	1.403.100.000	0	1.414.400.000	0	1.428.400.000	0	1.500.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	2	5	4,3		4,1		3,9		3,7		3,5		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						**137.611.872.334**		**268.507.630.000**		**296.494.950.000**		**315.044.950.000**		**343.535.480.000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**137.611.872.334**		**268.507.630.000**		**296.494.950.000**		**315.044.950.000**		**343.535.480.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	17.665.252.064	100	18.000.000.000	100	19.000.000.000	100	20.000.000.000	100	21.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan mengingkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan perlindungan kawasan Permukiman Rawan bencana	Persen	37	42	47,232 8037	12.583.920.000	50,325 7597	6.600.000.000	53,418 7158	6.600.000.000	56,511 6719	6.600.000.000	59,604 628	6.600.000.000	
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari Abrasi dan Banjir ROB	Persen	51	54	56		57		58		59		60		
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	57	60	62		63		64		65		66		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten	Persen	85,63	69,90	87,88	950.000.000	88,63	1.950.000.000	89,38	2.000.000.000	90,13	3.000.000.000	90,88	4.000.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan sampah yang di kelola di TPA/TPST Regional	Persen	100	100	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan Akses Sanitasi(Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	8,32	8,59	24315,315	1.481.950.000	24385,875	3.481.950.000	24435,875	4.481.950.000	24485,875	5.481.950.000	24535,875	6.481.950.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE															
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	58,39	85,88	91,8375421	3.200.000.000	92,3879408	9.200.000.000	94,0391368	12.200.000.000	94,5895355	15.200.000.000	95,1399342	18.200.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	2,61	3,68	0	-	90,24	119.000.000.000	91,02	120.000.000.000	91,8	121.000.000.000	92,58	122.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN															
Meningktanya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	0	1	6	55.000.000.000	7	56.000.000.000	8	57.000.000.000	9	58.000.000.000	10	59.000.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	32,50	38,68	39,932994	43.000.000.000	43,2888864	50.000.000.000	46,6447788	70.000.000.000	50,0006712	80.000.000.000	53,3565636	100.000.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	20	62	100	544.113.270	136	425.680.000	100	313.000.000	100	313.000.000	81	253.530.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	Persen	18,90	19	81	2.886.637.000	82	3.500.000.000	84	4.500.000.000	85	5.000.000.000	86	5.500.000.000	
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan						**167.228.768.013,00**		**68.206.968.963,00**		**67.636.795.939,00**		**68.427.407.840,00**		**67.636.795.939,00**	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						***112.250.540.219,00***		***65.562.682.265,00***		***65.047.757.293,00***		***65.783.121.142,00***		***65.047.757.293,00***	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	92,57 %	88,72%	100%	8.915.547.438,00	100%	7.122.382.315,00	100%	7.238.538.443,00	100%	7.240.604.669,00	100%	7.238.538.443,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	99,65 %	95%	100%	868.140.900,00	100%	872.783.477,00	100%	824.000.000,00	100%	975.000.000,00	100%	824.000.000,00	
	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Kabupaten yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		30 Unit	33 Unit											

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
Meningkatnya kualitas kawasan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang diTangani	Persen	1,7 Ha	1,7 Ha	100%	27.473.284.917,00	100%	25.417.172.807,00	100%	24.920.172.807,00	100%	25.417.172.807,00	100%	24.920.172.807,00	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															
Meningkatnya kualitas dan keteraturan permukiman untuk mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	1,07	6	10%	14.750.000.000,00	12%	15.000.000.000,00	15%	15.250.000.000,00	18%	15.000.000.000,00	20%	15.250.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	90674 M	94464 M	100%	60.243.566.964,00	100%	17.150.343.666,00	100%	16.815.046.043,00	100%	17.150.343.666,00	100%	16.815.046.043,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						**54.978.227.794,00**		**2.644.286.698,00**		**2.589.038.646,00**		**2.644.286.698,00**		**2.589.038.646,00**	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN															
Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	NA	27%	100%	17.392.100,00	100%	16.702.000,00	100%	15.907.500,00	100%	16.702.000,00	100%	15.907.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN															
Meningkatnya peneyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	1,93 Ha	18,85 Ha	100%	54.266.423.294,00	100%	2.471.296.198,00	100%	2.422.981.146,00	100%	2.471.296.198,00	100%	2.422.981.146,00	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap Diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	NA	NA	100%	13.134.000,00	100%	91.492.500,00	100%	88.200.000,00	100%	91.492.500,00	100%	88.200.000,00	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH															
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak asasi tanah	Persentase luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen	NA	NA	100%	681.278.400,00	100%	64.796.000,00	100%	61.950.000,00	100%	64.796.000,00	100%	61.950.000,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**8.467.741.013**		**16.847.867.871**		**20.984.967.809**		**32.199.012.929**		**39.208.628.262**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**8.467.741.013**		**16.847.867.871**		**20.984.967.809**		**32.199.012.929**		**39.208.628.262**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen	100	100	100	7.757.172.143	100	8.786.936.341	100	10.899.960.818	100	11.547.900.765	100	14.427.293.666	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasidan Edukasi Rawan Bencana	Persen	83	72	80	710.568.870	80	8.060.931.530	80	10.085.006.991	80	20.651.112.164	80	24.781.334.596	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	74	71	80		80		80		80		80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	96	93	80		80		80		80		80		
Satuan Polisi Pamongpraja						**41.347.685.062**		**43.282.630.306**		**45.349.708.391**		**47.980.262.115**		**50.846.097.576**	**Satuan Polisi Pamongpraja**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**41.347.685.062**		**43.282.630.306**		**45.349.708.391**		**47.980.262.115**		**50.846.097.576**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	35.201.167.102	100	36.149.774.272	100	37.143.036.424	100	38.289.079.802	100	39.506.153.737	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	80	80	85	4.097.678.640	90	4.755.237.356	95	5.471.114.644	100	6.460.788.209	100	7.559.962.559	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	80	80	85		90		95		100		100		
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	80	80	85		90		95		100		100		
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	100	100	100	2.048.839.320	100	2.377.618.678	100	2.735.557.322	100	3.230.394.104	100	3.779.981.280	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Dinas Sosial						**24.246.738.965**		**25.934.411.180**		**27.764.786.252**		**30.255.079.126**		**33.011.050.794**	**Dinas Sosial**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						**24.246.738.965**		**25.934.411.180**		**27.764.786.252**		**30.255.079.126**		**33.011.050.794**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	6.345.223.195	100	7.391.411.180	100	7.589.786.252	100	8.025.079.126	100	8.726.050.794	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL															
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persen	NA	NA	0	-	23	75.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	Persen	12,78	11,2	25	9.333.005.060	30	9.550.000.000	40	10.000.000.000	50	11.000.000.000	60	12.000.000.000	
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	1,9	2,2	2,5		10		15		20		25		
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	28,36	25,73	66		68		70		75		80		
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	NA	NA	NA		0		25		25		25		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	89,04	99,68	99,75	8.178.554.500	99,8	8.500.000.000	100	9.500.000.000	100	10.500.000.000	100	11.500.000.000	
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	29	4,4	NA		8,4		15		20		23,4		
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	NA	20	10		10		10		10		10		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA															
Mrning katnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	323.270.460	100	350.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	Persen	20	15	15		15		15		20		15		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN															
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persen	100	100	100	66.685.750	100	68.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah						**12.090.872.390,00**		**12.753.645.447,00**		**13.466.491.514,00**		**14.401.878.207,00**		**15.428.456.725,00**	**Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Daerah**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						**11.118.297.187,00**		**11.700.293.297,00**		**12.298.139.364,00**		**13.041.907.057,00**		**13.644.131.975,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	5.469.043.362,00	100	5.605.769.446,00	100	5.745.913.682	100	5.889.561.524,00	100	6.036.800.562,00	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA															
Terkelolanya informasi tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Menyusun RTK	Persen	NA	74,67	78,67	175.725.000,00	82,67	192.539.000,00	86,67	205.326.000,00	90,67	266.189.000,00	94,67	285.952.000,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	5,85	14,87	14,73	3.326.837.558,00	14,59	3.572.678.434,00	14,44	3.792.433.246,00	14,29	3.995.525.697,00	14,14	4.196.133.588,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen	59,99	40,22	44,39	1.248.295.017,00	42,54	1.362.153.167,00	40,97	1.555.929.186,00	39,62	1.791.689.086,00	38,46	1.948.217.075,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	74.598	98.973	101.942	898.396.250,00	105.000	967.153.250,00	108.150	998.537.250,00	111.395	1.098.941.750,00	114.737	1.177.028.750,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						**972.575.203,00**		**1.053.352.150,00**		**1.168.352.150,00**		**1.359.971.150,00**		**1.784.324.750,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI															
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persen	22,19	12,96	11,76	972.575.203,00	11,09	1.053.352.150,00	9,39	1.168.352.150,00	8,73	1.359.971.150,00	8,06	1.784.324.750,00	
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan						**53.518.727.260,00**		**56.478.951.053,00**		**59.663.947.018,00**		**63.849.805.519,00**		**68.445.442.693,00**	**Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						**26.044.520.576,00**		**27.333.272.091,00**		**29.405.847.018,00**		**30.916.253.519,00**		**31.999.890.693,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	23.720.496.634,00	100	24.313.509.050,00	100	24.921.346.776,00	100	25.544.380.445,00	100	26.182.989.957,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN															
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Persen	31	56	70	-	80	-	90	932.149.282,00	95	1.463.348.074,00	100	1.463.348.074,00	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya divensifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	30	76	80	299.196.690,00	85	341.435.081,00	90	574.023.000,00	95	651.000.000,00	100	651.000.000,00	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN															
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	33	80	80	1.326.862.760,00	85	1.726.862.760,00	90	1.926.862.760,00	95	2.000.000.000,00	100	2.340.000.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN															
Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	30	97	100	697.964.492,00	100	951.465.200,00	100	1.051.465.200,00	100	1.257.525.000,00	100	1.362.552.662,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						**27.474.206.684,00**		**29.145.678.962,00**		**30.258.100.000,00**		**32.933.552.000,00**		**36.445.552.000,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PERTANIAN															
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	80	85	90	9.201.017.702,00	95	12.950.460.000,00	100	13.854.700.000,00	100	13.420.152.000,00	100	14.120.152.000,00	
	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	80	85	90		95		100		100		100		
	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	80	85	90		95		100		100		100		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Persen	100	100	100	12.496.326.420,00	100	11.100.482.000,00	100	11.258.400.000,00	100	14.258.400.000,00	100	15.958.400.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER															
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	100	100	100	765.930.600,00	100	854.120.000,00	100	894.000.000,00	100	910.000.000,00	100	956.000.000,00	
	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	100	100	100	1.990.315.000,00	100	1.220.000.000,00	100	1.156.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.560.000.000,00	
	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN															
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh pertanian	Persenrase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	100	100	100	3.020.616.962,00	100	3.020.616.962,00	100	3.095.000.000,00	100	3.095.000.000,00	100	3.851.000.000,00	
Dinas Lingkungan Hidup Daerah						**23.176.401.598**		**25.017.566.002**		**27.022.022.410**		**29.144.959.672**		**31.436.638.760**	**Dinas Lingkungan Hidup Daerah**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						**23.176.401.598**		**25.017.566.002**		**27.022.022.410**		**29.144.959.672**		**31.436.638.760**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	1.754.935.000	100	1.842.681.750	100	1.930.428.500	100	2.018.175.250	100	2.105.922.000	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	99.780.000	100	101.775.600	100	103.811.112	100	105.887.334	100	108.005.081	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	68,3	64,39	82,36	4.154.393.200	82,56	4.569.832.520	82,76	4.909.073.515	82,96	5.026.815.772	82,96	5.144.558.029	
	Indeks Kualias Udara	Indeks	84,46	83,46	77,74		78,04	-	78,34	-	78,64	-	78,64	-	
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	91,88	92,6	96,85		96,92	-	96,99	-	97,06	-	97,06	-	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)															
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	0,01	0,01	15,35	5.370.891.598	25,5	6.445.069.918	38,9	7.734.083.901		9.280.900.682		10.961.191.180	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	90	90	25	64.660.000	25	65.953.200	20	67.272.264	15	68.617.709	15	69.990.063	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	35.095.000	100	35.796.900	100	36.512.838	100	37.243.095	100	37.987.957	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	15,43	18.45	24,25	10.817.846.800	27,3	11.060.080.114	30,45	11.326.536.760	33,52	11.674.730.240	36.20	12.057.743.069	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	50	50	20	878.800.000	20	896.376.000	20	914.303.520	20	932.589.590	20	951.241.382	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah						**8.048.282.896**		**8.393.690.467**		**8.761.134.701**		**9.219.652.831**		**9.716.756.777**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**8.048.282.896**		**8.393.690.467**		**8.761.134.701**		**9.219.652.831**		**9.716.756.777**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	5.744.454.041	100	5.882.719.399	100	6.024.390.604	100	6.166.494.383	100	6.312.143.952	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pandaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	100	100	100	1.424.365.806	100	1.543.561.713	100	1.672.593.807	100	1.988.156.837	100	2.338.759.214	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	336.988.250	100	370.687.075	100	407.755.783	100	408.081.987	100	408.408.453	
	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100	100	100	443.324.800	100	487.657.280	100	536.423.008	100	536.852.146	100	537.281.628	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN															
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	99.150.000	100	109.065.000	100	119.971.500	100	120.067.477	100	120.163.531	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**10.471.589.909**		**10.895.605.217**		**11.342.297.567**		**11.898.355.989**		**12.495.754.092**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**970.280.099**		**1.101.791.842**		**1.244.967.299**		**1.442.902.012**		**1.662.736.882**	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	100	100	100	221.026.000	100	247.328.349	100	275.963.440	100	315.550.383	100	359.517.357	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	209.075.000	100	235.377.349	100	264.012.440	100	303.599.383	100	347.566.357	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	100	100	100	80.170.000	100	106.472.349	100	135.107.440	100	174.694.383	100	218.661.357	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)															
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	100	100	100	292.649.099	100	318.951.447	100	347.586.539	100	387.173.481	100	431.140.455	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	167.360.000	100	193.662.349	100	222.297.440	100	261.884.383	100	305.851.357	
	Indeks Perlindungan Anak (IPKA)	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**9.501.309.810**		**9.793.813.376**		**10.097.330.267**		**10.455.453.976**		**10.833.017.209**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	8.629.144.810	100	8.842.741.330	100	9.063.352.947	100	9.299.715.828	100	9.545.378.139	
PROGRAM PENATAAN DESA															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA															
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	100	100	100	132.540.000	100	158.842.349	100	187.477.440	100	227.064.383	100	271.031.357	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	100	100	100	462.672.000	100	488.974.349	100	514.609.440	100	557.196.383	100	601.163.357	
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunaan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100	100	100	276.953.000	100	303.255.349	100	331.890.440	100	371.477.383	100	415.444.357	
	PersentaseFasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Dinas Perhubungan Daerah						**24.999.779.704**		**15.150.590.000**		**17.780.000.000**		**19.550.000.000**		**21.110.000.000**	**Dinas Perhubungan Daerah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						**24.999.779.704**		**15.150.590.000**		**17.780.000.000**		**19.550.000.000**		**21.110.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	3.148.674.770	100	2.730.590.000	100	3.530.000.000	100	4.050.000.000	100	4.550.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Persen	100	100	100	6.509.587.270	100	1.920.000.000	100	2.450.000.000	100	3.500.000.000	100	4.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN															
Meningktanya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Persen	67	81	100	15.341.517.664	100	10.500.000.000	100	11.800.000.000	100	12.000.000.000	100	12.560.000.000	
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah						**14.466.143.503**		**16.473.847.002**		**18.997.029.703**		**20.811.273.458**		**24.546.064.662**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**13.330.679.653**		**15.186.242.782**		**17.598.474.850**		**19.314.323.120**		**22.964.979.290**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	7.145.469.223	100	7.145.469.223	100	7.145.469.223	100	7.145.469.223	100	7.145.469.223	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persen	NA	NA	100	2.058.048.431	100	2.675.462.960	100	3.478.101.848	100	3.101.478.986	100	4.031.922.681	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas pengelolaam aplikasi informatika	Indeks SPBE	Indeks	2,88	3,25	3,25	4.127.161.999	3,26	5.365.310.599	3,27	6.974.903.778	3,28	9.067.374.912	3,35	11.787.587.385	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**560.836.850**		**673.004.220**		**773.954.853**		**852.350.338**		**936.485.372**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik IPS)	Indeks	1.77	2.63	2.68	560.836.850	2.70	673.004.220	2,73	773.954.853	2,75	852.350.338	2,78	936.485.372	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						**574.627.000**		**614.600.000**		**624.600.000**		**644.600.000**		**644.600.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan pengamanan informasi pemerintah Daerah	Persen	0	1,29	1,5	574.627.000	1,6	614.600.000	1,7	624.600.000	1,8	644.600.000	1,9	644.600.000	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						**14.838.313.252,00**		**15.750.022.954,00**		**16.734.780.924,00**		**18.051.237.056,00**		**19.502.315.327,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						**14.838.313.252,00**		**15.750.022.954,00**		**16.734.780.924,00**		**18.051.237.056,00**		**19.502.315.327,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	4.905.569.710,00	100	5.028.208.953,00	100	5.153.914.177,00	100	5.282.762.031,00	100	5.414.831.082,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	40	43	46	954.660.102,00	48	1.031.032.910,00	50	1.113.515.543,00	52	1.230.771.417,00	54	1.362.280.902,00	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI															
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	40	43,19	46	1.019.245.500,00	48	1.100.785.140,00	50	1.188.847.951,00	52	1.313.637.066,00	54	1.453.433.117,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															
Meningkatnya Kualitas SDM Pengkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	19	20	21,8	1.852.016.320,00	65,5	2.000.177.625,00	65,5	2.160.191.835,00	65,5	2.382.115.338,00	65,5	2.628.759.216,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	19	20,1	21,1	370.880.000,00	23,8	400.550.400,00	25,7	432.594.432,00	28,1	481.758.195,00	31	538.366.357,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	5	5,18	6,2	5.735.941.620,00	7,33	6.189.267.926,00	8,50	6.685.716.986,00	9,53	7.360.193.009,00	10,55	8.104.644.653,00	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**13.506.873.690,00**		**14.205.046.780,00**		**14.954.177.880,00**		**15.926.756.732,00**		**16.991.457.213,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						**13.506.873.690,00**		**14.205.046.780,00**		**14.954.177.880,00**		**15.926.756.732,00**		**16.991.457.213,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	6.885.044.662,00	100	7.057.170.779,00	100	7.233.600.048,00	100	7.414.440.049,00	100	7.599.801.050,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															
Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Persen	0	45	20%	1.324.365.805,60	20%	1.429.575.200,20	20%	1.544.115.566,40	20%	1.702.463.336,60	20%	1.878.331.232,60	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	73,42	50	20%	1.324.365.805,60	20%	1.429.575.200,20	20%	1.544.115.566,40	20%	1.702.463.336,60	20%	1.878.331.232,60	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															
Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100	99	25%	1.655.457.257,00	25%	1.786.969.000,25	20%	1.544.115.566,40	20%	1.702.463.336,60	15%	1.408.748.424,45	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	72,23	86	20%	1.324.365.805,60	20%	1.429.575.200,20	20%	1.544.115.566,40	20%	1.702.463.336,60	20%	1.878.331.232,60	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	NA	20	15%	993.274.354,20	15%	1.072.181.400,15	20%	1.544.115.566,40	20%	1.702.463.336,60	25%	2.347.914.040,75	
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						**20.406.344.315**		**19.512.971.230**		**19.672.370.511**		**19.983.179.774**		**21.418.509.268**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						**12.030.738.245**		**12.392.971.230**		**12.552.370.511**		**12.813.179.774**		**13.188.509.268**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	6.883.874.371	100	7.055.971.230	100	7.232.370.511	100	7.413.179.774	100	7.598.509.268	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA															
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	66,69	76,17	76,34	2.233.543.176	84,87	1.940.000.000	87,71	1.950.000.000	89,14	1.960.000.000	89,42	2.000.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA															
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	0	25%	50%	845.347.400	75%	877.000.000	100%	850.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL															
Meningkatnya kualitas ekosistem kratif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	Persen	NA	NA	3,23	80.000.000	3,77	90.000.000	4,31	90.000.000	4,84	90.000.000	5,38	90.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	0,46	0,71	0,72	1.987.973.298	0,72	2.430.000.000	0,72	2.430.000.000	0,72	2.450.000.000	0,73	2.500.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**8.375.606.070**		**7.120.000.000**		**7.120.000.000**		**7.170.000.000**		**8.230.000.000**	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN															
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Persen	0,007	0,007	0,007	342.871.056	0,009	1.860.000.000	0,010	1.860.000.000	0,010	1.890.000.000	0,013	1.900.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi oleh raga	Persentase atlet yang masuk pelatnas	Persen	0	1,67	2,50	7.425.272.424	4,17	4.530.000.000	5,00	4.530.000.000	5,83	4.530.000.000	6,67	5.530.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas kepamukraan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	0,013	0,017	0,022	607.462.590	0,032	730.000.000	0,036	730.000.000	0,043	750.000.000	0,051	800.000.000	
Dinas Perpustakaan Daerah						**8.634.368.699**		**9.012.453.477**		**9.415.067.033**		**9.919.869.691**		**10.467.805.637**	**Dinas Perpustakaan Daerah**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**7.748.046.099**		**7.958.313.539**		**8.249.963.447**		**8.634.017.578**		**9.046.939.052**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	90	88,33	100	6.482.948.186	100	6.625.057.389	100	6.777.832.028	100	7.011.728.755	100	7.254.309.903	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	89,81	90	95	1.189.603.913	97	1.257.694.205	98	1.389.013.279	99	1.530.692.634	100	1.691.415.360	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO															
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	94,27	66,6	95	75.494.000	96	75.561.945	98	83.118.139	99	91.596.189	100	101.213.789	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						**886.322.600**		**1.054.139.939**		**1.165.103.586**		**1.285.852.113**		**1.420.866.585**	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip		27,51	27,28	35	886.322.600	40	954.139.939	45	1.055.103.586	55	1.164.632.113	60	1.286.918.485	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP															
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	NA	NA	NA	-	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.220.000	100	133.948.100	
Dinas Perikanan Daerah						**38.421.853.482,00**		**41.004.655.430,00**		**43.802.794.005,00**		**47.592.123.681,00**		**51.781.318.808,00**	**Dinas Perikanan Daerah**
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						**38.421.853.482,00**		**41.004.655.430,00**		**43.802.794.005,00**		**47.592.123.681,00**		**51.781.318.808,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	8.623.622.856,00	100	8.839.213.427,00	100	9.060.193.763,00	100	9.286.698.607,00	100	9.518.866.072,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	37755	35301	36.000	11.000.000.000,00	37.000	11.165.442.003,00	38.000	11.742.600.242,00	39.000	12.305.425.074,00	40.000	13.262.452.736,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi peikanan budi daya	Ton	34292	12000	10.301	11.298.230.626,00	10.800	11.500.000.000,00	11.350	12.000.000.000,00	11.900	13.500.000.000,00	12.500	16.000.000.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan Pelaku Usaha	Persen	NA	11,22	12,5	1.500.000.000,00	13	1.500.000.000,00	13,5	2.000.000.000,00	14	2.000.000.000,00	15	2.500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN															
Meningkatnya Konsumsi ikan oleh Masyarakat	Angka konsumsi ikan	nilai	NA	NA	76,96	6.000.000.000,00	79,26	8.000.000.000,00	81,63	9.000.000.000,00	84,07	10.500.000.000,00	86,59	10.500.000.000,00	
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian						**31.735.392.932,00**		**33.970.782.744,00**		**36.396.072.035,00**		**39.700.871.459,00**		**44.282.415.365,00**	**Dinas Perdagangan Dan Perindustrian**
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						**22.335.000.484,00**		**23.946.194.744,00**		**25.453.932.035,00**		**27.221.170.359,00**		**30.839.063.055,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	5.248.076.820,00	100	5.379.278.741,00	100	5.513.760.709,00	100	5.651.604.727,00	100	5.792.894.845,00	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PERUSAHAAN															
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usahan perdagangan yang difasilitasi	Persen	26	28	30%	86.410.000,00	35%	87.100.000,00	39	91.540.000,00	40	93.760.000,00	42	95.597.900,00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	29	30,00	31%	11.995.043.823,00	35%	13.356.058.303,00	37	14.614.611.326,00	40	15.864.876.632,00	43	19.196.961.310,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitasasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100	100	100	4.114.563.740,00	100	4.220.350.200,00	100	4.312.670.000,00	100	4.684.929.000,00	100	4.775.931.000,00	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN															
Meningkatnya tertib niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	50	55	55	458.903.350,00	60	463.057.000,00		470.780.000,00		473.000.000,00		490.879.000,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persen	33	33,50	35	432.002.751,00	40	440.350.500,00	41	450.570.000,00	43	453.000.000,00	45	486.799.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						**9.400.392.448,00**		**10.024.588.000,00**		**10.942.140.000,00**		**12.479.701.100,00**		**13.443.352.310,00**	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persen	20	35	36	9.223.853.587,00	38	9.845.967.000,00	40	10.760.000.000,00	42	12.293.091.100,00	45	13.251.700.610,00	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI															
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	Persen	20	22	25	95.575.744,00	30	95.745.000,00	30	97.380.000,00	33	99.260.000,00	35	100.978.500,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	30	37,8	40	80.963.117,00	42	82.876.000,00	45	84.760.000,00	50	87.350.000,00		90.673.200,00	
SEKERTARIAT DAERAH						**139.315.663.737,00**		**147.148.002.872,00**		**154.190.668.436,00**		**164.861.491.703,00**		**178.902.532.308,00**	**SEKERTARIAT DAERAH**
Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam						**1.324.365.806,00**		**1.429.575.200,00**		**154.411.566,00**		**1.702.463.337,00**		**1.878.331.233,00**	**Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	NA	100	100	1.324.365.806	100	1.429.575.200	100	154.411.566	100	1.702.463.337	100	1.878.331.233	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bagian Hukum						**3.310.914.514,00**		**3.573.938.000,00**		**3.860.288.916,00**		**4.256.158.342,00**		**4.695.828.082,00**	**Bagian Hukum**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM															
Meningkatnya kualitas prodak Hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum Yang dihasilkan	Persen	NA	100	100	3.310.914.514,00	100	3.573.938.000	100	3.860.288.916,00	100	4.256.158.342,00	100	4.695.828.082,00	
Bagian Kesejahteraan Rakyat						**66.218.290.281**		**71.478.760.006**		**77.205.778.315**		**85.123.166.830**		**93.916.561.635**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Tahun	NA	NA	100	66.218.290.281	100	71.478.760.006	100	77.205.778.315	100	85.123.166.830	100	93.916.561.635	
Bagian Organisasi						**1.655.457.257**		**1.786.969.000**		**1.930.144.458**		**2.212.079.171**		**2.347.914.041**	**Bagian Organisasi**
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI															
Meningkatnya tata kelola organisais Pemerintah Daerah	Indek kematangan organisasi	Skor	25,5 (rendah)	NA	35	1.655.457.257	40	1.786.969.000	45	1.930.144.458	45	2.212.079.171	50	2.347.914.041	
Bagian Tata Pemerintahan						**1.655.457.257**		**1.786.969.000**		**1.930.144.458**		**212.079.171**		**2.347.914.041**	**Bagian Tata Pemerintahan**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH															
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas kerja sama Daerah	Persen	NA	NA	82	1.655.457.257	84	1.786.969.000	86	1.930.144.458	88	212.079.171	90	2.347.914.041	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kinerja penyelenggaraan Pemerintah	Persen	NA	NA	82		84		86		88		90		
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						**2.019.657.854**		**2.180.102.180**		**2.354.776.239**		**2.596.256.588**		**2.864.455.130**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
PROGRAM KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA															
Meningkatnya Kulitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	Persen	NA	NA	100	2.019.657.854	100	2.180.102.180	100	2.354.776.239	100	2.596.256.588	100	2.864.455.130	
Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan						**1.986.548.708**		**2.144.362.800**		**2.316.173.349**		**2.553.695.005**		**2.817.496.849**	**Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Daerah yang Berjalan Baik dan Lancar	Persen	NA	NA	100	1.986.548.708	100	2.144.362.800	100	2.316.173.349	100	2.553.695.005	100	2.817.496.849	
Bagian Umum						**59.423.296.513**		**60.908.878.926**		**62.431.600.899**		**63.992.390.921**		**65.592.200.694**	**Bagian Umum**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Daerah yang Berjalan Baik dan Lancar	Persen	NA	NA	100	59.423.296.513		60.908.878.926		62.431.600.899		63.992.390.921		65.592.200.694	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Administrasi Pembangunan						**1.721.675.547**		**1.858.447.760**		**2.007.350.236**		**2.213.202.338**		**2.441.830.603**	**Administrasi Pembangunan**
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN															
Meningkatnya pelaksanaan administrasi pembangunan	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	Persen	NA	NA	95	1.721.675.547,00	95	1.858.447.760,00	95	2.007.350.236,00	95	2.213.202.338,00	95	2.441.830.603,00	
Meningkatnya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian dan sumber daya alam	Persen	NA	NA	100		100		100		100		100		
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						**47.234.363.717**		**50.596.255.353**		**54.244.891.569**		**59.223.296.513**		**64.736.394.884**	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**47.234.363.717**		**50.596.255.353**		**54.244.891.569**		**59.223.296.513**		**64.736.394.884**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	10.891.130.951	100	11.345.563.966	100	11.854.144.870	100	13.441.290.079	100	15.291.827.935	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	36.343.232.766	100	39.250.691.387	100	42.390.746.698	100	45.782.006.434	100	49.444.566.949	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah						**19.396.678.721**		**20.422.347.559**		**21.523.913.645**		**22.960.098.094**		**24.733.897.892**	**Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah**
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN						**17.321.457.793**		**17.975.720.608**		**18.671.074.561**		**19.536.955.626**		**20.474.939.574**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	12.402.865.514	100	12.662.975.336	100	12.929.188.209	100	13.201.653.512	100	13.480.524.333	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	2.075.220.929	100	2.446.626.951	100	2.852.839.084	100	3.423.142.468	100	4.058.958.318	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	2.843.371.350	100	2.866.118.321	100	2.889.047.267	100	2.912.159.646	100	2.935.456.923	
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidangInfrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan bidangPerekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**2.075.220.929**		**2.446.626.951**		**2.852.839.084**		**3.423.142.468**		**4.258.958.318**	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	100	100	100	1.875.220.929	100	2.246.626.951	100	2.652.839.084	100	3.223.142.468	100	4.058.958.318	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	NA	NA	NA		100		100		100		100		
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	NA	NA	NA		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan di daerah	Peresentase Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Penelitian, Pengembanmgan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	NA	NA	NA		100		100		100		100		
PROGRAM RISET DAN INOVASI															
Meningkatnya Pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	NA	NA	NA		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	NA	NA	NA		100		100		100		100		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan di daerah	Peresentase Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Penelitian, Pengembanmgan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						**242.497.519.319**		**280.579.650.058**		**375.014.996.457**		**469.600.313.859**		**564.339.351.540**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	234.101.079.059	100	239.953.606.035	100	245.952.446.186	100	252.101.257.341	100	258.403.788.774	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang di alokasikan melalui TKD		28,11	20,85	21,85	1.842.301.060	23,35	1.842.301.060	24,35	19.529.602.310	25,85.	37.216.903.559	27,35	54.904.204.809	
	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		38,27	37,68	38,68	1.842.301.060	40,18	1.842.301.060	41,18	19.529.602.310	43,18	37.216.903.559	45,18	54.904.204.809	
Meningkatnya tata kelola pembendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		95,55	84,18	85,18	673.105.340	87,68	673.105.340	88,68	673.105.340	91,18	673.105.340	92,18	673.105.340	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase penurunan SILPA		145,37	-64,14	63,14	1.084.304.000	61,64	18.771.605.250	60,64	36.458.906.499	59,14	54.146.207.749	58,14	71.833.508.998	
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelapora	Persentase laporan keuangan tepat waktu		100	100	100	1.084.304.000	100	15.696.906.514	100	33.384.207.763	100	51.071.509.013	100	68.758.810.262	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
Meningkatnya penerapan sistem informasi Keuangan berbasis digital	Persentaase penambahan Nilai Aset Tetap		96,42	79,32	80,32	1.870.124.800	81,82	1.799.824.800	82,82	19.487.126.050	84,32	37.174.427.299	85,32	54.861.728.549	
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah						**49.916.238.310**		**51.452.545.266**		**53.054.062.842**		**54.859.393.937**		**56.764.104.037**	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	44.618.775.088	100	45.734.244.465	100	46.877.600.577	100	48.049.540.591	100	49.250.779.106	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
Meningkatnya Upaya ekstensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	30,52 %	38,01%	38,10 %	5.297.463.222	38,20 %	5.718.300.801	38,30 %	6.176.462.265	38,40 %	6.809.853.346	38,50 %	7.513.324.931	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Persentase Ketetapan pajak berdasarkan potensi pajak	Persen	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase objek pajak yang tertagih	Persen	93,72 %	89,65%	90,00 %		90,00 %		90,00 %		90,00 %		90,00 %		
	Persentase Jumlah SPPT yang Terbayar	Persen	90,71 %	88,09%	90,00 %		90,00 %		90,00 %		90,00 %		90,00 %		
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**19.297.838.561**		**20.447.211.832**		**21.687.301.250**		**23.337.123.931**		**25.153.635.422**	**Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KEPEGAWAIAN						**16.423.543.561**		**16.947.211.832**		**17.687.301.250**		**18.837.123.931**		**19.653.635.422**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	14.931.386.554	100	14.405.438.832	100	14.612.602.514	100	14.824.379.290	100	15.040.882.394	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	100	100	100	1.492.157.007	100	2.541.773.000	100	3.074.698.736	100	4.012.744.641	100	4.612.753.028	
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	67	79	80		80		80		80		80		
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	83	82	85		85		85		85		85		
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	74	57	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**2.874.295.000**		**3.500.000.000**		**4.000.000.000**		**4.500.000.000**		**5.500.000.000**	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	49,23	96	96	2.874.295.000	100	3.500.000.000	100	4.000.000.000	100	4.500.000.000	100	5.500.000.000	
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	93	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	94	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	49,23	96	96		96		96		96		96		
Inspektorat Daerah						**29.248.514.583**		**30.880.980.565**		**32.638.017.406**		**34.950.778.856**		**37.490.877.236**	**Inspektorat Daerah**
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
INSPEKTORAT DAERAH						**29.248.514.583**		**30.880.980.565**		**32.638.017.406**		**34.950.778.856**		**37.490.877.236**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	18.947.470.013	100	19.296.086.203	100	19.652.792.446	100	20.017.787.864	100	20.391.276.547	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	71,5	72,94	75,82	5.334.672.799	77,26	6.121.885.413	78,7	7.040.168.226	80,14	8.215.076.881	81,58	9.283.036.875	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asisteni	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemrintah (SPIP)	Level 1	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,153)	Level 3 (3,365)	4.966.371.771	Level 3 (3,340)	5.463.008.948	Level 3 (3,505)	5.945.056.735	Level 3 (3,580)	6.717.914.111	Level 3 (3,605)	7.816.563.814	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 1	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,100)		Level 3 (3,150)		Level 3 (3,200)		Level 3 (3,250)		Level 3 (3,300)		
Kecamatan Bungku Timur						**8.514.774.850**		**9.095.000.000**		**9.690.000.000**		**9.785.000.000**		**10.390.000.000**	**Kecamatan Bungku Timur**

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UNSUR KEWILAYAHAN						**8.514.774.850**		**9.095.000.000**		**9.690.000.000**		**9.785.000.000**		**10.390.000.000**	
KECAMATAN						**8.514.774.850**		**9.095.000.000**		**9.690.000.000**		**9.785.000.000**		**10.390.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	7.000.000.000	100	7.500.000.000	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	100	8.500.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	100	100	75%	20.000.000	80	50.000.000	85	70.000.000	90	90.000.000	100	100.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	100	100	100	883.632.350	100	900.000.000	100	910.000.000	100	920.000.000	100	950.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	NA	NA	80	15.000.000	75	30.000.000	60	40.000.000	40	50.000.000	25	60.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	533.852.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	100	100	62.290.500	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	
Kecamatan Wita Ponda						**4.150.209.884**		**4.168.209.884**		**5.510.857.294**		**6.510.856.400**		**7.492.804.813**	**Kecamatan Wita Ponda**
UNSUR KEWILAYAHAN						**4.150.209.884**		**4.168.209.884**		**5.510.857.294**		**6.510.856.400**		**7.492.804.813**	
KECAMATAN						**4.150.209.884**		**4.168.209.884**		**5.510.857.294**		**6.510.856.400**		**7.492.804.813**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100%	100%	100%	3.490.674.884	100%	3.490.674.884	100%	4.490.574.894	100%	5.490.574.000	100%	6.352.622.413	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														58.965.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	70%	75%	80%	22.650.000	80%	30.650.000	80%	58.965.000	85%	58.965.000	85%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														500.000.000	
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	95%	100%	100%	385.100.000	75%	395.100.000	80%	400.100.000	80%	400.100.000	85%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														40.000.000	
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	95%	NA	0%	25.000.000	10%	25.000.000	10%	30.000.000	10%	30.000.000	10%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														471.217.400	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	95%	100%	100%	168.292.500	100%	168.292.500	100%	471.217.400	100%	471.217.400	100%		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														70.000.000	
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100%	100%	100%	58.492.500	100%	58.492.500	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%		
Kecamatan Bungku Tengah						**13.565.466.865**		**13.904.603.537**		**14.252.218.625**		**14.608.524.091**		**14.973.737.193**	**Kecamatan Bungku Tengah**
UNSUR KEWILAYAHAN						**13.565.466.865**		**13.904.603.537**		**14.252.218.625**		**14.608.524.091**		**14.973.737.193**	
KECAMATAN						**13.565.466.865**		**13.904.603.537**		**14.252.218.625**		**14.608.524.091**		**14.973.737.193**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	68%	94%	100,00 %	12.346.518.127	100,00 %	12.655.181.080	100,00 %	12.971.560.607	100,00 %	13.295.849.622	100,00 %	13.628.245.863	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	100%	100%	83,60 %	37.793.500	86,10 %	38.738.338	88,60 %	39.706.796	91,10 %	40.699.466	93,60 %	41.716.952	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	95%	100%	100,00 %	620.951.638	100,00 %	636.475.429	100,00 %	652.387.315	100,00 %	668.696.998	100,00 %	685.414.422	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	NA	NA	80,00 %	5.220.000	82,50 %	5.350.500	85,50 %	5.484.263	88,00 %	5.621.369	90,50 %	5.761.903	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	NA	NA	100,00 %	462.763.600	100,00 %	474.332.690	100,00 %	486.191.007	100,00 %	498.345.782	100,00 %	510.804.427	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	NA	100%	95,00 %	92.220.000	97,50 %	94.525.500	97,50 %	96.888.638	100,00 %	99.310.853	100,00 %	101.793.625	
Kecamatan Bungku Pesisir						**4.962.955.082**		**5.087.028.959**		**5.214.204.683**		**5.344.559.800**		**5.478.173.795**	**Kecamatan Bungku Pesisir**
UNSUR KEWILAYAHAN						**4.962.955.082**		**5.087.028.959**		**5.214.204.683**		**5.344.559.800**		**5.478.173.795**	
KECAMATAN						**4.962.955.082**		**5.087.028.959**		**5.214.204.683**		**5.344.559.800**		**5.478.173.795**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	94	91	100	4.207.370.432	100	4.312.554.693	100	4.420.368.560	100	4.530.877.774	100	4.644.149.718	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	99	100	100	64.500.000	100	66.112.500	100	67.765.313	100	69.459.445	100	71.195.931	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	94	66	100	303.800.000	100	311.395.000	100	319.179.875	100	327.159.372	100	335.338.356	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	100	100	100	58.000.000	100	59.450.000	100	60.936.250	100	62.459.656	100	64.021.148	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	100	83	100	300.582.150	100	308.096.704	100	315.799.121	100	323.694.099	100	331.786.452	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	59	100	100	28.702.500	100	29.420.063	100	30.155.564	100	30.909.453	100	31.682.189	
Kecamatan Bahodopi						**6.783.791.957**		**6.806.791.957**		**7.332.152.667**		**7.569.846.827**		**7.667.106.027**	**Kecamatan Bahodopi**
UNSUR KEWILAYAHAN						**6.783.791.957**		**6.806.791.957**		**7.332.152.667**		**7.569.846.827**		**7.667.106.027**	
KECAMATAN						**6.783.791.957**		**6.806.791.957**		**7.332.152.667**		**7.569.846.827**		**7.667.106.027**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	94%	81%	100%	5.633.497.467	100%	5.653.497.467	100%	5.980.756.827	100%	5.980.756.827	100%	5.980.756.827	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	96%	77%	100%	19.777.500	100%	19.777.500	100%	25.630.900	100%	36.973.500	100%	39.246.700	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	98%	92%	100%	377.494.800	100%	380.494.800	100%	410.567.340	100%	530.788.900	100%	620.450.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	85%	82%	100%	23.614.900	100%	23.614.900	100%	30.967.500	100%	30.967.500	100%	35.679.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	60%	96%	100%	666.102.290	100%	666.102.290	100%	786.230.100	100%	890.360.100	100%	890.872.300	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	54%	NA	100%	63.305.000	100%	63.305.000	100%	98.000.000	100%	100.000.000	100%	100.100.000	
Kecamatan Bungku Barat						**5.319.610.958**		**6.499.922.413**		**6.501.922.413**		**7.401.922.413**		**7.701.922.413**	**Kecamatan Bungku Barat**
UNSUR KEWILAYAHAN						**5.319.610.958**		**6.499.922.413**		**6.501.922.413**		**7.401.922.413**		**7.701.922.413**	
KECAMATAN						**5.319.610.958**		**6.499.922.413**		**6.501.922.413**		**7.401.922.413**		**7.701.922.413**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100%	100%	100%	4.588.839.558	100%	5.150.622.413	100%	5.152.622.413	100%	6.052.622.413	100%	6.352.622.413	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	70%	75%	80%	45.955.000	80%	58.965.000	80%	58.965.000	85%	58.965.000	85%	58.965.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	95%	100%	70%	157.049.000	75%	710.567.600	80%	710.567.600	80%	710.567.600	85%	710.567.600	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	95%	NA	100%	-	100%	52.000.000	100%	52.000.000	100%	52.000.000	100%	52.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	95%	100%	100%	471.217.400	100%	471.217.400	100%	471.217.400	100%	471.217.400	100%	471.217.400	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100%	100%	100%	56.550.000	100%	56.550.000	100%	56.550.000	100%	56.550.000	100%	56.550.000	
Kecamatan Bumi Raya						**6.402.710.756**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**	**Kecamatan Bumi Raya**
UNSUR KEWILAYAHAN						**6.402.710.756**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**	
KECAMATAN						**6.402.710.756**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**		**7.525.240.650**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100%	96%	100%	4.333.990.106	100%	5.456.520.000	100%	5.456.520.000	100%	5.456.520.000	100%	5.456.520.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	100%	97%	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	100%	96%	100%	1.285.000.000	100%	1.285.000.000	100%	1.285.000.000	100%	1.285.000.000	100%	1.285.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	100%	95%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	100%	96%	100%	483.720.650	100%	483.720.650	100%	483.720.650	100%	483.720.650	100%	483.720.650	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100%	98%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	
Kecamatan Sombori Kepulauan						**4.046.854.142**		**4.451.539.556**		**4.896.693.512**		**5.386.362.863**		**5.924.999.149**	**Kecamatan Sombori Kepulauan**
UNSUR KEWILAYAHAN						**4.046.854.142**		**4.451.539.556**		**4.896.693.512**		**5.386.362.863**		**5.924.999.149**	
KECAMATAN						**4.046.854.142**		**4.451.539.556**		**4.896.693.512**		**5.386.362.863**		**5.924.999.149**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	NA	82%	100%	2.790.424.112	100%	3.069.466.523	100%	3.376.413.176	100%	3.714.054.493	100%	4.085.459.942	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	NA	80%	100%	22.500.000	100%	24.750.000	100%	27.225.000	100%	29.947.500	100%	32.942.250	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	NA	73%%	100%	685.272.050	100%	753.799.255	100%	829.179.181	100%	912.097.099	100%	1.003.306.808	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	NA	74%	100%	39.540.000	100%	43.494.000	100%	47.843.400	100%	52.627.740	100%	57.890.514	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	persen	NA	85%	100%	390.648.240	100%	429.713.064	100%	472.684.370	100%	519.952.807	100%	571.948.088	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	NA	40%	100%	118.469.740	100%	130.316.714	100%	143.348.385	100%	157.683.224	100%	173.451.546	
Kecamatan Bungku Selatan						**6.131.996.895**		**6.154.460.000**		**6.179.460.000**		**6.204.460.000**		**6.229.460.000**	**Kecamatan Bungku Selatan**
UNSUR KEWILAYAHAN						**6.131.996.895**		**6.154.460.000**		**6.179.460.000**		**6.204.460.000**		**6.229.460.000**	
KECAMATAN						**6.131.996.895**		**6.154.460.000**		**6.179.460.000**		**6.204.460.000**		**6.229.460.000**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	90	91	100%	5.044.831.895	100%	5.053.460.000	100%	5.063.460.000	100%	5.073.460.000	100%	5.083.460.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	100	100	100%	18.160.000	100%	21.000.000	100%	24.000.000	100%	27.000.000	100%	30.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	62	100	100%	497.990.000	100%	500.000.000	100%	505.000.000	100%	508.000.000	100%	510.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	100	100	100%	2.040.000	100%	5.000.000	100%	7.000.000	100%	9.000.000	100%	12.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	persen	100	100	100%	353.890.000	100%	357.000.000	100%	360.000.000	100%	364.000.000	100%	368.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	100	100%	215.085.000	100%	218.000.000	100%	220.000.000	100%	223.000.000	100%	226.000.000	
Kecamatan Menui Kepulauan						**7.601.049.737**		**7.791.075.980**		**7.985.852.880**		**8.185.499.202**		**8.390.136.682**	**Kecamatan Menui Kepulauan**
UNSUR KEWILAYAHAN						**7.601.049.737**		**7.791.075.980**		**7.985.852.880**		**8.185.499.202**		**8.390.136.682**	
KECAMATAN						**7.601.049.737**		**7.791.075.980**		**7.985.852.880**		**8.185.499.202**		**8.390.136.682**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	90	100	100	6.813.536.310	100	6.983.874.718	100	7.158.471.586	100	7.337.433.375	100	7.520.869.210	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya pelayanan terpadu	Indeks Pelayanan Terpadu Kecamatan	Persen	100	75.00 %	80 %	14.576.573	100	14.940.988	100	15.314.512	100	15.697.375	100	16.089.810	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada APBDKel dan APBDesa	Persen	95	10%	10%	245.005.760	100	251.130.904	100	257.409.177	100	263.844.406	100	270.440.516	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penurunan Kasus Pelanggaran K3	Persentase Kasus K3 di Kecamatan yang Tertangani	Persen	40%	100 %	100%	53.989.468	100	55.339.205	100	56.722.685	100	58.140.752	100	59.594.271	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya urusan pemerintahan Umum yang ditugaskan	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Persen	100	100 %	100 %	357.037.507	100	365.963.445	100	375.112.531	100	384.490.344	100	394.102.603	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Telah Mendapatkan Pembinaan Administrasi	Persen	100	100 %	100 %	116.904.118	100	119.826.721	100	122.822.389	100	125.892.949	100	129.040.273	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah						**12.741.689.476**		**13.510.858.272**		**14.341.135.892**		**15.448.069.796**		**16.667.435.996**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						**12.741.689.476**		**13.510.858.272**		**14.341.135.892**		**15.448.069.796**		**16.667.435.996**	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**12.741.689.476**		**13.510.858.272**		**14.341.135.892**		**15.448.069.796**		**16.667.435.996**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	88,17	91,85	100	5.843.950.905	100	6.064.545.254	100	6.296.539.613	100	6.540.683.908	100	6.797.783.544	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	98	98,53	100	1.800.000.000	100	1.945.853.099	100	2.109.600.028	100	2.503.524.933	100	2.959.886.481	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	99,69	99,99	100	1.596.019.571	100	1.722.105.117	100	1.858.151.421	100	2.004.945.384	100	2.163.336.069	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN															
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	94,83	95,95	100	401.719.000	100	433.454.801	100	467.697.730	100	504.645.851	100	544.512.873	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di Laksanakan	Persen	93,35	87,74	100	800.000.000	100	863.200.000	100	931.392.800	100	1.004.972.831	100	1.084.365.685	

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yg Di Selesaikan	Persen	89,58	99,28	100	2.300.000.000	100	2.481.700.000	100	2.677.754.300	100	2.889.296.890	100	3.117.551.344	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja mencerminkan kondisi yang perlu diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk memahami tingkat pencapaian hasil instansi terkait dengan visi organisasi atau kepala daerah, serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menunjukkan apakah tujuan organisasi atau pemerintahan daerah tercapai atau tidak. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi pemerintahan daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sementara Indikator kinerja daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Indikator kinerja daerah dirumuskan secara teknis dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah terkait, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

IKU dan IKD dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Morowali berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan RPJMD dapat dicapai.

4.2.1. Indikator KInerja Utama (IKU)

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali menetapkan arah kebijakan strategis dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Jaminan atas capaian dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil. IKU menjadi alat evaluasi kunci yang menghubungkan perencanaan dengan implementasi kebijakan, serta sebagai dasar akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Target keberhasilan yang dituangkan melalui IKU tidak hanya mencerminkan capaian angka semata, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan pembangunan sosial dan infrastruktur daerah. Dengan memperhatikan potensi strategis Kabupaten Morowali, khususnya sebagai pusat industri berbasis nikel dan kawasan strategis nasional. Penyusunan target indikator kinerja ini diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan hingga Tahun 2029.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan Tahun 2029, dicantumkan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	BB	BB	BB	BB	
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A	
3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	48,18	50,59	53,12	55,78	58,57	59,15	
4	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	4,99	5,00	5,01	5,02	5,03	5,04	
5	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B	B	BB	BB	A	A	
6	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	C	C	B	B	B	A	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,40	87,62	87,84	88,06	88,28	88,50	
8	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68,11	69,81	71,56	73,35	75,18	77,06	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Survei Penilaian Integritas	Predikat	71,86	72,94	73,89	74,92	75,97	77,04	
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,50-74,25	74,50-75,00	74,50-75,50	74,50 - 76,00	74,50 - 76,50	74,50 - 77,00	
11	Indeks Pendidikan	Indeks	68,46	69,83	71,23	72,65	74,10	75,59	
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	58,71	59,88	60,78	61,57	62,43	63,31	
13	Indeks Kesehatan	Indeks	0,79	0,81	0,822	0,838	0,855	0,872	
14	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,570	0,568	0,566	0,564	0,560	0,550	
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	68,01	69,03	70,06	71,11	72,18	73,26	
16	Indeks Pembangunan Budaya	Indeks	48,74	49,47	50,21	50,97	51,73	52,51	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	57,75	60,64	63,67	66,85	70,20	73,71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	74,00	77,00	79,40	82,00	84,80	87,40	
19	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	64,26	69,40	74,95	80,95	87,43	94,42	
20	Rasio Konektifitas	Rasio	6,31	6,38	6,46	6,52	6,59	6,66	
21	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	12,99	14,00	14,41	14,82	15,25	15,70	
22	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	11,35	11	9,98	9,28	8,63	8,02	
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	2,55	2,50	2.43	2.36	2.29	2,20	
24	Pendapatan Perkapita (ADHK)	Ribu (Rupiah)	570.117,47	615.726,87	664.985,02	718.183,82	775.638,52	837.689,61	
25	Inflasi	Persentase	3,00	2,80	2,70	2,60	2,50	2,40	
26	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,99	3,08	3,17	3,27	3,37	3,47	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	0,456	0,457	0,456	0,454	0,449	0,443	
28	Gini Rasio	Angka	0.274	0.271	0,269	0,264	0,258	0.257	
29	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase	2,00	2,07	2,08	2,09	2,10	2,11	
30	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	Indeks	82,21	82,91	83,60	84,30	85,00	85,09	
31	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	Persentase	7,20	6,85	6,50	6,15	5,80	5,45	
32	Persentase UMKM yang naik kelas	Persentase	24,00	24,72	25,47	26,23	27,02	27,83	
33	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio	55,75	56,59	57,33	58,13	58,94	59,77	
34	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	Persentase	55,75	56,59	57,33	58,13	58,94	59,77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	44,25	44,80	45,36	45,78	46,20	46,62	
36	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7286	0,7577	0,7881	0,8196	0,8524	0,8865	
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase	59,69	60,88	62,10	63,34	64,61	65,90	
38	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	
39	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase	72,05	73,91	74,28	74,64	75,00		
40	Pertumbuhan Industri Kecil	Persentase	5,47	5,58	5,69	5,80	5,92	6,04	
41	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	Ribu (Rupiah)	40.301,79	41.107,83	41.929,98	42.768,58	43.623,95	44.496,43	
42	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)	Ribu (Rupiah)	83.082,58	88.898,36	95.121,24	101.779,73	108.904,31	116.527,61	
43	Penurunan intensitas emisi GRK	Persentase	18,49	25,75	32,42	38,67	44,26	49,21	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN INDIKATIF TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,95	79,74	80,54	81,34	82,16	82,98	
45	Proporsi Limbah B3 yang dikelola	Proporsi	18-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	
46	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	166,32	157,81	149,31	140,80	132,3		
47	Angka Kriminalitas	Persentase	19,00-17,50	17,50-16,00	16,00-13,50	13,50-12,00	12,00-10,50	10,50-9,00	

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci/Daerah

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali untuk 5 tahun mendatang (2025-2030) pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**						
1,1	**Ketahanan Energi,Air dan Kemandirian Pangan**						
1	Indeks Ketahanan Pangan	82,21	82,91	83,60	84,30	85,00	85,30
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	7,20	6,85	6,50	6,15	5,80	5,45
3	Konsumsi Listrik Perkapita	378,82	373,37	368,42	363,70	359,25	355,07
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	85,58	87,46	89,39	91,36	93,37	95,42
5	Kapasitas Air Baku	0.3 - 0.6	0.3 - 0.6	0.3 - 0.6	0.3 - 0.6	0.3 - 0.6	0.3 - 0.6
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	32,53	34,77	37,33	40,20	43,38	46,86
1,2	**Kualitas Lingkungan Hidup**						
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	75,00	77,70	80,50	83,40	86,40	89,51
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	10,02	11,72	13,71	16,04	18,77	21,96
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	73,21	76,42	79,63	82,84	86,05	89,26
4	Persentase timbulan sampah yang dikelola (daur ulang)	10,02	11,72	13,71	16,04	18,77	21,96
5	Proporsi Limbah B3 yang dikelola	18-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
1,3	**Resilensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim**						

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penurunan Insensitas Emisi GRK	18,49	25,75	34,42	38,67	44,26	49,31
2	Indeks Resiko Bencana (IRB)	166,32	157,81	149,31	140,80	132,3	126,26
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,37	0,40	0,43	0,46	0,50	0,54
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,95	79,74	80,54	81,34	82,16	82,98
1,4	**Demografi**						
1	Rasio Penduduk	121,9	121,61	121,26	120,92	120,59	120,26
2	Kepadatan Penduduk	32,18	32,65	33,09	33,52	33,93	34,33
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,6	1,46	1,34	1,3	1,24	1,18
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
2,1	**Kesejahteraan Ekonomi**						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12,99	14,00	14,41	14,82	15,25	15,70
2	Tingkat Kemiskinan	11,35	11	9,98	9,28	8,63	8,02
3	PDRB Per Kapita (ADHK)	1043311,36	1085043,814	1128445,567	1173583,39	1220526,725	1269347,794
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,55	2,5	2.43	2.36	2.29	2,2
5	Indeks Gini	0.274	0.271	0,269	0,264	0,258	0.257
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	28,94	29,53	30,14	30,75	31,38	32,02
7	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	74,50-74,25	74,50-75,00	74,50-75,50	74,50 - 76,00	74,50 - 76,50	74,50 - 77,00
2,2	**Kesehatan untuk Semua**						
1	Usia Harapan Hidup	69,81	70,21	70,61	71,01	71,41	71,81
2	Prevalensi Stunting	19,64	17,07	14,84	12,90	11,21	9,75
3	Angka Kematian Ibu	210	183	172,5	162	151,5	141
4	Angka Kematian Anak						
*	Angka Kematian Bayi	7,88	5,91	4,43	3,32	2,49	1,87

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
*	Angka Kematian Balita	9,27	7,05	5,36	4,07	3,09	2,35
5	Cakupan penemuan kasus TB (treatment coverage)	91,04	90,28	89,52	88,76	88	87,24
6	Angka Keberhasilan pengobatan TB (treatment success rate)	91,00	92,10	93,20	94,30	95,40	96,50
7	Cakupan kepersertaan jaminan kesehatan nasional	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Keluarga Sehat	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51
9	Indeks Kesehatan	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91
2,3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**						
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,37	9,84	10,09	11,33	12,58	13,05
2	Harapan Lama Sekolah	13,38	13,92	14,2	14,48	14,76	15,04
3	Angka Literasi/Numerasi :						
*	Literasi Membaca SD	55,60	56,71	57,85	59,00	60,18	61,39
*	Literasi Membaca SLTP	68,08	68,76	69,45	70,14	70,84	71,55
*	Numerasi SD	42,74	43,17	43,60	44,04	44,48	44,92
*	Numerasi SLTP	63,50	64,14	64,78	65,42	66,08	66,74
4	APS PAUD	75,00	75,75	76,51	77,27	78,05	78,83
5	APS SD/SMP	98,00	98,15	98,29	98,44	98,59	98,74
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,57	12,66	12,75	12,84	12,93	13,02

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	76,43	76,97	77,50	78,05	78,59	79,14
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	58,71	59,88	60,78	61,57	62,43	63,31
9	Indeks Literasi Digital	45,03	45,08	45,13	45,18	45,23	45,28
10	Indeks Pendidikan	68,46	69,83	71,23	72,65	74,10	75,59
2,4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**						
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	86,01	87.730	89,48	91,27	93,10	94,96
2	Rumah Layak Huni	83,50	83,64	84,60	85,57	86,53	87,12
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Bersih	92,20	92,91	93,41	93,41	94,41	95,41
4	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Layak	64,44	70,88	72,30	73,75	75,22	76,73
5	Rumah Tangga denga Akses Sanitasi Aman (100%)	7,16	7,88	8,03	8,19	8,36	8,53
2,5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**						
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	57,75	60,64	63,67	66,85	70,20	73,71
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,74	49,47	50,21	50,97	51,73	52,51
3	Indeks Kepuasan Infrastruktur	64,26	69,40	74,95	80,95	87,43	94,42
4	Persentase Jalan Kondisi Mantap	40,26	41,47	42,71	43,99	45,31	46,67
5	Persentase Akses Jaringan Internet	86,61	86,75	86,89	87,02	87,16	87,30

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
2,6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif**						
1	Indeks Perlindungan Anak	79,14	79,44	79,74	80,04	80,34	80,64
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,9	67,2	67,5	67,8	68,1	68,4
3	Indeks Pembangunan Keluarga	73,14	73,36	73,58	73,80	74,02	74,24
4	Indeks Ketimpangan Gender	0,467	0,458	0,449	0,440	0,431	0,422
5	Indeks Pemberdayaan Gender	67,5	70,5	73,5	76,5	79,5	82,5
6	TPAK Perempuan	38,07	39,21	40,39	41,60	42,85	44,13
7	Indeks Pembangunan Gender	0,55	0,60	0,64	0,70	0,74	0,78
8	Indeks Pembangunan Pemuda						
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
3,1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**						
1	Angka Ketergantungan	0,456	0,457	0,456	0,454	0,449	0,443
3,2	**Iptek, Inovasi dan produktivitas Ekonomi**						
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	0,456	0,457	0,456	0,454	0,449	0,443

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	21,43	21,86	22,30	22,74	23,20	23,66
3	Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum	15,72	15,95	16,16	16,39	16,62	16,85
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
5	Rasio Kewirausahaan	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,45	64,52	67,74	71,13	74,69	78,42
7	Indeks Inovasi Daerah	48,18	50,59	53,12	55,78	58,57	59,15
8	Persentase UMKM yang naik kelas	24,00	24,72	25,47	26,23	27,02	27,83
3,3	**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**						
1	Indeks Ekonomi Hijau	72,78	74,07	75,26	76,31	77,24	78,28
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesai	40,30	41,41	42,52	43,62	44,73	45,84
3	porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
3,4	**Transformasi Digital**						
1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,99	5,00	5,01	5,02	5,03	5,04
3,5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**						
1	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	55,75	56,59	57,33	58,13	58,94	59,77
2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	40.301,79	41.107,83	41.929,98	42.768,58	43.623,95	44.496,43

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)	83.082,58	88.898,36	95.121,24	101.779,73	108.904,31	116.527,61
4	Ekspor Barang dan Jasa	55.213,10	56.924,71	58.689,37	60.508,74	62.384,51	64.318,43
3,6	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**						
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	0,079	0,085	0,092	0,100	0,107	0,116
2	Presentase Desa Mandiri	27,78	27,78	27,78	27,78	28,57	28,57
	Indeks Desa	0,74	0,76	0,77	0,79	0,80	0,82
3,7	**Stabilitas Ekonomi Makro**						
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39
2	Tingkat Inflasi	3,00	2,80	2,70	2,60	2,5	2,40
3	Kontribusi Terhadap PDRB Provinsi	46,40	47,05	47,71	48,38	49,05	49,74
4	Pertumbuhan Industri	5,47	5,58	5,69	5,80	5,92	6,04
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
4,1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**						
1	Indeks Reformasi Hukum	87,40	87,62	87,84	88,06	88,28	88,50
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,25	3,31	3,37	3,44	3,50	3,57

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	BB	BB	BB	BB
4	Indeks Pelayanan Publik	C	B	B	B	A	A
5	Indeks Integritas Nasional	73,56	73,70	73,84	73,98	74,12	74,26
6	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	A
4,2	**Hukum Berkeadilan, Keamananan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial**						
1	Persentase Penegakan Perda	75	77	84	92	100	100
2	Persentase Capaian Aksi HAM	85	90	90	90	95	100
3	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Indeks Rasa Aman	77,85	78,30	78,75	79,20	79,65	80,10
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	72,21	72,66	72,66	72,66	73,11	73,56
6	Indeks Profesionalitas ASN	68,11	69,81	71,56	73,35	75,18	77,06
4,3	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel**						
1	Indeks Daya Saing Daerah	2,99	3,08	3,17	3,27	3,37	3,47

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nilai Maturitas SPIP	3.290	3.365	3.430	3.505	3.580	3.849
3	Nilai Kapabilits APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
4	Survei Penilaian Integritas	71,86	72,94	73,89	74,92	75,97	77,04
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A	A	A	A	A	A
	Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah						
A	**Urusan Pemerintahan Wajib**						
1	**Wajib Pelayanan Dasar**						
1.1	**Pendidikan**						
1	Skor Literasi/Numerasi SD/SMP*						
-	Skor Literasi SD	59,79	62,66	65,53	68,4	71,27	74,14
-	Skor Literasi SMP	67,71	70,58	73,45	76,32	79,19	82,06
-	Numerasi SD	53,06	55,93	58,8	61,67	64,54	67,41
-	Numerasi SMP	61,31	64,18	67,05	69,92	72,79	75,66
3	Harapan Lama Sekolah	13,38	13,92	14,2	14,48	14,76	15,04
4	Rata-Rata Lama Sekolah	9,37	9,84	10,09	11,33	12,58	13,05
5	Indeks Pendidikan	68,46	69,83	71,23	72,65	74,10	75,59

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Angka Putus Sekolah						
*	APS SD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
*	APS SMP	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
*	APS SMA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Angka Melek Huruf	99,27	99,29	99,31	99,33	99,35	99,37
8	Akreditasi Sekolah di Kabupaten Morowali						
*	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30,50	40,67	50,84	61,01	71,18	81,35
	Pendidikan Dasar (SD/MI)	95,14	97,30	100	100	100	100
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	98,12	99,50	100	100	100	100
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	90,85	97,12	99,85	100	100	100
9	Angka Partisipasi Kasar						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	107,45	107,45	107,45	107,45	107,45	107,45
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	97,89	99,82	101,28	101,28	101,28	101,28
10	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Angka Partisipasi Murni						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	95,57	96,07	96,57	97,07	97,57	98,07
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	78,98	79,78	80,58	81,38	82,18	82,98
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	80,14	80,94	81,74	82,54	83,34	84,14
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI)	99,34	99,84	100	100	100	100
*	Pendiidkan Dasar (SMP/MTs)	95,47	95,97	96,47	96,97	97,47	97,97
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	93,29	94,09	94,89	95,69	96,49	97,29
13	Angka Kelulusan						
*	SD	100	100	100	100	100	100
*	SMP	100	100	100	100	100	100
*	SMA	100	100	100	100	100	100
14	Angka Yang Melanjutkan						
*	SD	100	100	100	100	100	100
*	SMP	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
*	SMA	100	100	100	100	100	100
15	Rasio Ketersediaan Sekolah						
*	Pendidikan Dasar (SD/MI)	1 : 95	1 : 95	1 : 95	1 : 95	1 : 95	1 : 95
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	1 : 175	1 : 175	1 : 175	1 : 175	1 : 175	1 : 175
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	1 : 200	1 : 200	1 : 200	1 : 200	1 : 200	1 : 200
16	Rasio Guru/Murid Sekolah						
*	Pendiidkan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	10,94	10,79	10,64	10,49	10,34	10,19
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	12,40	12,27	12,14	12,01	11,88	11,75
17	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah						
*	Pendidikan Anak Usia Dini (SD/MI)	1 : 14	1: 16	1 : 17	1 : 18	1 : 18	1 : 18
*	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	1 : 13	1: 14	1 : 15	1 : 18	1 : 18	1 : 18
*	Pendidikan Menengah (SMA dan SMK)	1 : 18	1 : 16	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
18	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	98,03	98,05	98,07	98,09	98,11	98,13
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	91,69	93,24	94,79	96,34	97,89	99,44

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,34	99,84	100	100	100	100
21	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,47	95,97	96,47	96,97	97,47	97,97
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100	100
1.2	**Kesehatan**						
1	Umur Harapan Hidup	69,81	70,21	70,61	71,01	71,41	71,81
2	Prevalensi Stunting	19,64	17,07	14,84	12,90	11,21	9,75
3	Indeks Kesehatan	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	7,88	5,91	4,43	3,32	2,49	1,87
5	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	9,27	7,05	5,36	4,07	3,09	2,35
6	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	7,2	6,3	5,4	4,5	3,6	2,7
7	Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	210	183	172,5	162	151,5	141
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100	100
9	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	2,6	4,1	5,6	7,1	8,6	10,1

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,232	0,243	0,254	0,265	0,276	0,287
11	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,016	0,017	0,018	0,019	0,02	0,021
12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,383	0,233	0,200	0,200	0,200	0,200
13	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	6,50	5,65	4,45	4,45	4,45	4,45
14	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Balita Yang Pernah di Imunisasi Campak	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	91,04	90,28	89,52	88,76	88	87,24
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	314,21	274,09	233,97	193,85	153,73	113,61
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
20	Penderita Diare Yang Ditangani	100	100	100	100	100	100
21	Angka Kejadian Malaria	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
23	Cakupan Puskesmas	100	100	100	100	100	100
24	Cakupan Pembantu Puskesmas	20,00	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00
25	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	85,00	85,00	86,00	86,00	87,00	87,00

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
27	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100	100	100	100	100	100
28	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100
29	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	100
30	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100
31	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	100
32	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
33	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
34	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
35	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
36	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
37	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	100
39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	100
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	64,26	69,40	74,95	80,95	87,43	94,42
2	Tingkat Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
4	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,0057	0,0058	0,0059	0,006	0,0061	0,0062
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	30	34,72	39,44	44,16	48,88	53,6
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	78	80,84	83,68	86,52	89,36	92,2
7	Rasio Jaringan Irigasi	0,90	0,92	0,95	0,97	0,98	0,99
8	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	90,62	92,32	94,02	95,72	97,42	99,12
9	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk	2,5	2,74	2,98	3,22	3,46	3,7
10	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	54,19	54,43	54,67	54,91	55,15	55,39

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di Wilayan Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	60,06	60,3	60,54	60,78	61,02	61,26
12	rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	87,24	87,48	87,72	87,96	88,2	88,44
13	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	85,58	87,46	89,39	91,36	93,37	95,42
14	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,74	78,98	79,22	79,46	79,7	79,94
15	rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	1,82	2,06	2,3	2,54	2,78	3,02
16	tingkat kemantapan jalan	35,26	37,3	39,34	41,38	43,42	45,46
17	rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	9,64	9,88	10,12	10,36	10,6	10,84
18	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100	100
1.4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**						
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	86,68	87,20	87,72	88,25	88,78	89,31

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase kawasan kumuh yang ditata	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Rumah Layak Huni	83,50	83,64	84,60	85,57	86,53	87,12
4	capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
5	capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
6	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100	100	100	100	100	100
7	penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13,32	12,80	12,28	11,75	11,22	10,69
8	persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	98,13	98,35	98,57	98,79	99,01	99,23
1.5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**						
	Pol PP						
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	80	81	82	83	84	85
2	Angka Kriminalitas	19,00-17,50	17,50-16,00	16,00-13,50	13,50 - 12,00	12,00 - 10,50	10,50-9,00
3	Persentase jumlah pelanggaran K3 yang tertangani	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
	Penanggulangan Bencana						
1	Indeks Resiko Bencana	166,32	157,81	149,31	140,80	132,3	126,26
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Terhadap Bencana	173,50	172,00	171,00	170,00	169,00	168,00
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100
1.6	**Sosial**						

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya	2,84	2,75	2,69	2,63	2,57	2,51
2	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	61,45	64,52	67,74	71,13	74,69	78,42
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	53.911	54.411	54.911	55.411	55.911	56.411
4	Persentase PMKS yang tertangani	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1	1	1	1	1	1
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (persen)	100	100	100	100	100	100
7	Korban bencana alam (Jiwa/KK)	0	0	0	0	0	0
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**						
2.7	**Tenaga Kerja**						
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	179,71	183,84	188,07	192,40	196,82	201,35
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,55	2,5	2.43	2.36	2.29	2,2
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,45	64,52	67,74	71,13	74,69	78,42
4	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (orang)	35,00	30,00	30,00	25,00	25,00	20,00
5	Rasio Lulusan S1/S2/S3	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
6	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	20	25	25	30	30	35
7	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60	70	80	85	90	100
8	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	15,09	15,31	15,53	15,75	15,97	16,19
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	62,72	62,94	63,16	63,38	63,6	63,82

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	40,66	41,1	41,54	41,98	42,42	42,86
2.8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0,55	0,60	0,64	0,70	0,74	0,78
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,467	0,458	0,449	0,440	0,431	0,422
3	Indeks Pemberdayaan Gender	67,5	70,5	73,5	76,5	79,5	82,5
4	Persentase Perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga pemerintahan dan swasta	25,76	26,79	27,86	28,98	30,14	31,34
5	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
6	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
7	Rasio KDRT	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
8	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
9	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
10	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
11	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
12	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	33,33	34,17	35,01	35,85	36,69	37,53

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
14	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
2.9	**Pangan**						
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,21	82,91	83,60	84,30	85,00	85,30
2	Skor Pola Harapan Pangan (SPPH)	85,20	86,40	87,60	88,80	90	90
3	Ketersediaan Pangan Utama	271,85	293,85	315,85	337,85	359,85	381,85
4	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita						
	Energi (Kilo Kal)	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	Protein Perkaapita (Gram)	65,12	66,14	67,16	68,18	69,2	70,22
6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	77,95	78,97	79,99	81,01	82,03	83,05
2,1	**Pertanahan**						
1	Persentase Fasilitas Umum/Pemerintah yang memiliki status lahan yang tetap	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
3	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	100	100	100	100	100	100
4	persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	100	100	100	100	100
5	persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	57,72	57,84	57,96	58,08	58,2	58,32
6	persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	100	100	100	100	100	100
2.11	**Lingkungan Hidup**						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,95	79,74	80,54	81,34	82,16	82,98
2	Indeks Kualitas Air	66,97	69,64	72,43	75,33	78,34	81,47
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	92,79	92,99	93,18	93,38	93,58	93,77
4	Indeks Kualitas Udara	83,59	83,71	83,84	83,96	84,09	84,21
5	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	1.185.211,33	1.328.112,19	1.497.873,86	1.691.876,07	1.879.068,03	2.090.616,71
7	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	100	100	100	100	100	100
10	Penetapan Hak MHA	100	100	100	100	100	100
11	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.12	**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	100	100	100	100	100	100
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	100	100	100	100	100	100
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100	100	100	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100	100	100	100	100	100
8	Kepemilikan akta kelahiran	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	67	67	67	67	67	67
2.13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
1	Indeks Desa	0,74	0,76	0,77	0,79	0,80	0,82
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	100	100	100	100	100	100
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	144	144	144	144	144	144
4	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	27,78	27,78	27,78	27,78	28,57	28,57
2.14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61	62	63	64	65	66
2	Angka Stunting (SSGI)	22,62	19,68	17,12	14,9	12,96	11,27
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,6	1,46	1,34	1,3	1,24	1,18
4	Persentase Akseptor KB di Kabupaten Morowali	88,89	89,09	89,29	89,49	89,69	89,89
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	59,57	59,77	59,97	60,17	60,37	60,57
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9
7	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
8	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,01	2,21	2,41	2,61	2,81	3,01
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,01	67,21	67,41	67,61	67,81	68,01
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,01	18,21	18,41	18,61	18,81	19,01
2,15	**Perhubungan**						
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
2	Rasio Ijin Trayek	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Pemasangan Rambu-Rambu	60	70	80	85	90	100
5	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30
6	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun						
	Angkutan Laut						
	Jumlah Penumpang Turun	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	Jumlah Penumpang Naik	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	220.000	220.200	220.400	220.600	220.800	221.000
	Jumlah barang muat (ton)	510.000	510.200	510.400	510.600	510.800	511.000
	Angkutan Udara						

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Penumpang Datang	32.000	32.200	32.400	32.600	32.800	33.000
	Jumlah Penumpang Berangkat	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800	23.000
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	290.000	290.200	290.400	290.600	290.800	291.000
	Jumlah barang muat (ton)	100.000	100.200	100.400	100.600	100.800	101.000
7	rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63
8	kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,43	0,52	0,61	0,7	0,79	0,88
2,16	**Komunikasi dan Informatika**						
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	51-75	51-75	51-75	51-75	76-90	76-90
2	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	3,25	3,31	3,37	3,44	3,50	3,57
3	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Layanan	3,73	3,75	3,78	3,80	3,83	3,86
4	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,25
5	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Tata Kelola	2,52	2,53	2,55	2,56	2,58	2,59

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Kebijakan	2,92	2,93	2,95	2,97	2,99	3,01
7	Akses Jaringan Komunikasi	88,5	90	91,5	93	94,5	96
8	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	83,71	85,71	87,71	89,71	91,71	93,71
9	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	73,48	78,48	83,48	88,48	93,48	98,48
10	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
2,17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
1	Pendapatan Perkapita	570.117,47	615.726,87	664.985,02	718.183,82	775.638,52	837.689,61
2	Persentase Koperasi yang berkualitas	16,67	18,59	19,87	20,47	21,08	21,71

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rata-Rata Omzet UMKM	2.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
4	Persentase Koperasi Aktif	44,2	45,2	46,2	47,2	48,2	49,2
5	rasio Volume usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	22,41	22,9	23,39	23,88	24,37	24,86
7	persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64
2,18	**Penanaman Modal**						
1	Persentase Peningkatan Investasi	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
2	Nilai Investasi	122.281.105,44	128.395.160,71	136.098.870,35	145.625.791,28	157.275.854,58	171.430.681,49
3	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	75	80	85	90	95	100
4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	122.281.105,44	128.395.160,71	136.098.870,35	145.625.791,28	157.275.854,58	171.430.681,49
5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	28,36	28,62	28,88	29,14	29,4	29,66

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
2,19	**Kepemudaan dan Olahraga**						
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	68,01	69,03	70,06	71,11	72,18	73,26
2	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (Jumlah Organisasi Pemuda)	59,12	61,27	63,42	65,57	67,72	69,87
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,87	3,53	4,19	4,85	5,51	6,17
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	22,16	22,82	23,48	24,14	24,8	25,46
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	7	8	9	10	11	12
2,2	**Statistik**						
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,63	3.419	4,44	5,78	7,51	9,77
2	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
2,21	**Persandian**						
1	Indeks SPBE Kabupaten Morowali	3,25	3,31	3,37	3,44	3,50	3,57
2	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Layanan	3,73	3,75	3,78	3,80	3,83	3,86
3	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Manajemen	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,25
4	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Tata Kelola	2,52	2,53	2,55	2,56	2,58	2,59
5	Indeks Kematangan Penyelenggaraan SPBE pada Domain Kebijakan	2,92	2,93	2,95	2,97	2,99	3,01
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	100	100	100	100	100
2,22	**Kebudayaan**						
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	48,74	49,47	50,21	50,97	51,73	52,51

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	90,29	90,29	90,29	90,29	90,29	90,29
2,23	**Perpustakaan**						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	58,71	59,88	60,78	61,57	62,43	63,31
2	Persentase Perpustakaan ber Standar Norma Prosedur (SNP)	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	5000	5100	5200	5300	5400	5500
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	62,66	64,79	66,92	69,05	71,18	73,31
2,24	**Kearsipan**						
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	40,99	44,27	47,81	51,64	55,77	60,23
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100	100
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**						

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
3,25	**Kelautan dan Perikanan**						
1	Nilai Tukar Nelayan	106	107	108	109	110	111
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	93,49	93,76	94,03	94,31	94,58	94,85
3	Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	0,83	0,85	0,86	0,88	0,90	0,90
4	Produksi Perikanan (ton)						
	Produksi Perikanan Laut	34.350	34.550	34.750	34.950	35.150	35.350
	Produksi Perikanan Darat	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
5	Produksi Perikanan Budidaya	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
6	Konsumsi Ikan	66,36	68,56	70,76	72,96	75,16	77,36
7	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3,26	**Pariwisata**						
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi , Makan, Minum	55,75	56,59	57,33	58,13	58,94	59,77
2	Jumlah Kunjungan Wisata	5000	5000	5000	5000	5000	5000
3	Lama Kunjungan Wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	80	80	80	80	80	80
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	80	80	80	80	80	80
6	Tingkat hunian akomodasi	75	75	75	75	75	75
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.27	**Pertanian**						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	105	106	107	109	110	111
2	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	2,00	2,07	2,08	2,09	2,1	2,5
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
	Padi	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
	Jagung	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Ubi Jalar	203,95	203,95	203,95	203,95	203,95	203,95

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ubi Kayu	290,69	290,69	290,69	290,69	290,69	290,69
	Kacang Tanah	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
	Kacang Kedelai	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
4	Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
	Padi	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00
	Jagung	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
	Ubi Jalar	800,00	800,00	825,00	825,00	850,00	850,00
	Ubi Kayu	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
	Kacang Tanah	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00
	Kacang Kedelai	130,00	130,00	135,00	135,00	140,00	140,00
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29	88,29
3,3	**Perdagangan**						
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Net Ekspor Barang Dan Jasa (ADHK)	55.213,10	56.924,71	58.689,37	60.508,74	62.384,52	64.318,44
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	100	100	100	100	100	100
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	100	100	100	100	100
3,31	**Perindustrian**						
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	72,05	73,91	74,28	74,64	75,00	75,2
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	5,2	6,32	7,44	8,56	9,68	10,8
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100	100
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,32	**Transmigrasi**						
1	Persentase penduduk miskin di Kawasan transmigrasi yang di Bina	50	60	70	80	90	100
4	**Unsur Pendukung**						
4,1	**Sekretariat Daerah**						

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	BB	BB	BB	BB
2	Nilai Sakip	B	BB	BB	A	A	A
3	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	0	1	2	2	3	3
4,2	**Sekretariat DPRD**						
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	98,23	98,43	98,62	98,82	99,02	99,22
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	**Unsur Penunjang**						

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5,1	**Perencanaan**						
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	61- 70	71 - 80	81 - 90	81 - 90	81 - 90	81 - 90
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5,2	**Keuangan**						
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A	A	A	A	A	A
2	Indeks Penyerapan Anggaran	15	15	15	15	15	15
3	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	12	12	12	12	12	12
4	Indeks Opini BPK atas LKPD	15	15	15	15	15	15
5	Persentase SILPA Terhadap APBD	10	10	10	10	10	10
6	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	10	10	10	10	10	10
8	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
*	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	12,85	13,21	13,77	14,28	14,88	15,20
*	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1.188.897,08	2377794,16	3.566.691,24	4.755.588,32	5.944.485,40	7.133.382,48
*	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	2,39	4,78	7,18	9,57	11,96	14,35
*	Total Kredit/PDRB (%)	2,39	4,78	7,18	9,57	11,96	14,35
	Inklusi Keuangan (%)	50,00	50,05	55,05	65,05	75,05	85,05
9	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15,18	15,4	15,62	15,84	16,06	16,28
10	Rasio PAD	37,59	40,09	42,59	45,09	47,59	50,09
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5
5,3	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**						
1	Indeks Profesionalitas ASN	68,11	69,81	71,56	73,35	75,18	77,06
2	Presentase disiplin ASN	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,11	66,12	68,13	70,14	72,15	74,16

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,69	27,7	29,71	31,72	33,73	35,74
5	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,33	27,34	29,35	31,36	33,37	35,38
5.5	**Penelitian dan Pengembangan**						
1	Indeks Inovasi Daerah	48,18	50,59	53,12	55,78	58,57	59,15
6	**Unsur Pengawasan**						
6,1	**Inspektorat**						
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,29	3.365	3.430	3.505	3.580	3.849
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
3	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,86	72,94	73,89	74,92	75,97	77,04
7	**Unsur Kewilayahan**						
7.1	**Kecamatan**						
1	Angka Kriminalitas	19,00-17,50	17,50-16,00	16,00-13,50	13,50 - 12,00	12,00 - 10,50	10,50-9,00
8	**Unsur Pemerintahan Umum**						
8,1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**						
1	Indeks Krukunan Umat Beragama (IKUB)	57,75	60,64	63,67	66,85	70,20	73,71

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Indeks Demokrasi Indonesia	60-80	60-80	60-80	80-85	80-85	80-85

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Tanggal 27 November 2024 yang dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Sistematika dokumen RPJMD ini didasarkan pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, subtansi dijabarkan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan. RPJMD ini dimaksudkan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kabupaten Morowali kurun waktu 2025 sampai dengan 2029, dengan berpedoman pada subtansial penting, Kaidah Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaannya sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan Penting Subtansial

Berdasarkan potensi sumberdaya, capaian pembangunan sebelumnya dan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Morowali, disimpulkan bahwa untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan pentahapan dan arah pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 yang mencakup peningkatan daya saing dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang prima, pengelolaan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta penyediaan infrastruktur yang maju dan mandiri. Setiap tahun, fokus pembangunan bergeser dari penataan dan peningkatan SDM serta prasarana, hingga pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Lokus pembangunan tersebar di berbagai kecamatan, dengan prioritas pada pengembangan kawasan kota kecil, pengentasan kemiskinan, prasarana pendidikan dan kesehatan, infrastruktur perhubungan dan komunikasi, energi dan air, jalan dan perumahan, pertanian dan peternakan, perikanan, lingkungan dan ruang terbuka hijau, pariwisata, ketenagakerjaan, serta perindustrian dan perdagangan. Kecamatan seperti Bahodopi, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Menui Kepulauan, Witaponda, dan Bumi Raya menjadi fokus utama dalam berbagai aspek pembangunan untuk memastikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

.

5.2. Kaidah Pelaksanaan dan Pengendalian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus diimplementasikan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Perencanaan Penganggaran sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Di samping itu, RPJMD merupakan Pedoman bagi setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra (Rencana Strategis) OPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Periode 2025-2029 disusun dalam kondisi keterbatasan data dan informasi sehingga bila dalam perjalanannya dapat terhimpun data yang lebih lengkap dan akurat yang menyebabkan dinilai perlu untuk melakukan revisi terhadap RPJMD ini, maka RPJMD harus segera direvisi dan disesuaikan dengan data dan informasi yang akurat tersebut. Penyesuaian dilakukan tidak hanya pada aspek teknis perencanaan dan anggaran, tetapi juga pada hal-hal yang yang menyangkut manajemen perencanaan pembangunan secara menyeluruh serta adanya tambahan regulasi;
2. RPJMD adalah barometer untuk mengukur sejauhmana capaian dari pelaksanaannya sehingga merupakan ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Karena pada RPJMD belum semua tujuan dan sasaran disajikan secara terukur, maka Renstra OPD harus disajikan dengan sasaran yang lebih terukur sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi baik terhadap Renstra yang bersangkutan juga terhadap RPJMD;
3. Sebagai barometer, RPJMD harus dievaluasi baik dalam kurun waktu setiap tahun, pertengahan periode pelaksanannya, dan akhir periode pelaksanaannya, sehingga jika dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan dan kekurangan dapat segera disesuaikan agar efektivitas pelaksanaan pembangunan dapat tercapai dan dapat menjadi acuan penyusunan RPJMD periode berikutnya;
4. RPJMD harus menjadi pedoman bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, maka sosialisasi RPJMD harus segera dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu agar jelas bagi seluruh pemangku kepentingan tentang tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini;

5. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (renja) OPD, dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Prioritas, Program dan Kegiatan Prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya serta menjamin konsistensi dan keberlanjutan program, maka kegiatan serta pembiayaannya ditetapkan oleh masing-masing pimpinan OPD;
6. Bila dalam pelaksanaannya dinilai perlu untuk melakukan perubahan sasaran pada tahun-tahun tertentu tetapi tidak mengubah sasaran akhir RPJMD untuk program yang bersangkutan, maka atas persetujuan Bupati, penetapan perubahan sasaran tersebut dimuat dalam RKPD tahun yang bersangkutan.

5.3. Evaluasi terhadap dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali periode 2025-2029 didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perencanaan pembangunan dilakukan melalui tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang optimal. Implementasi pembangunan diarahkan oleh visi "Terwujudnya Kabupaten Morowali yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan," dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang inklusif, peningkatan kemakmuran masyarakat melalui sektor-sektor unggulan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Setiap tahapan pembangunan dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi daerah, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Diperlukan pelibatan masyarakat, DPRD, dan lembaga/stakeholders lain dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 yang dilakukan melalui mekanisme:

- Konsultasi Publik, Pemerintah Kabupaten Morowali mengadakan konsultasi publik untuk menghimpun saran dan masukan dari masyarakat terkait rencana pembangunan. Ini dilakukan melalui forum-forum seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten
- Partisipasi Aktif, Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi proyek. Ini memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

- Transparansi Informasi: Pemerintah menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengikuti dan berpartisipasi secara efektif.
- Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka dalam rapat paripurna, yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan.
- Pengawasan dan Evaluasi, DPRD berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi efektivitas program-program yang dijalankan. Mereka memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Morowali.
- Kolaborasi dengan Eksekutif, DPRD bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun program yang bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta memastikan program tersebut selaras dengan visi dan misi pembangunan baik dari tingkat nasional (Presiden/Wakil Presiden), dan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pengawasan Hukum, Lembaga hukum seperti kejaksaan dan kepolisian serta BPK berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka memastikan tidak ada penyimpangan atau korupsi dalam penggunaan anggaran pembangunan.
- Penegakan Hukum, Lembaga hukum menindaklanjuti setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga tercipta lingkungan yang transparan dan akuntabel.
- Kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga hukum bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan hukum dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, serta memastikan semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Demikian kesimpulan subtansial penting, Kaidah Pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Morowali Periode 2025-2029 ini disusun untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan guna pencapaian visi ”IKLAS JUARA”.